

**PEMERINTAH DAERAH
SELUMA**



RAPERDA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SELUMA

**TAHUN
2025 - 2029**

Seluma Emas Berlian



TEDDY RAHMAN, S.E., M.M
BUPATI SELUMA



Drs. H. GUSTIANTO
WAKIL BUPATI SELUMA



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SELUMA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Seluma untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan RKPD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Bupati.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tindak lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan/atau
 - b. penyusunan RPJMD periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, maka untuk kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD tahun berkenaan, Pemerintah Daerah tetap menyusun Rancangan RKPD tahun berkenaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan mempedomani RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka penyebutan Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal
BUPATI SELUMA,

TEDDY RAHMAN

Diundangkan di SELUMA
pada tanggal
PEJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

DEDDY RAHMADANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA,
PROVINSI BENGKULU:

RANCANGAN
PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH SELUMA NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-
2029

I. UMUM

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak, dengan ini menginstruksikan :

Pembangunan daerah di Kabupaten Seluma diselenggarakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH SELUMA NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, sejalan dengan dinamika, tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Seluma.

Penyusunan RPJMD merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewajiban setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya serta menyusun kebijakan pembangunan secara mandiri sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah, dengan tetap menjaga sinergi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan berbagai kebijakan strategis lainnya. Dokumen ini memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.



Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, hingga elemen masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan pembangunan, tetapi juga aspiratif terhadap harapan masyarakat.

RPJMD ini juga memuat berbagai strategi untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, sinergi antar lembaga, serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Inovasi, partisipasi, dan gotong royong menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 ini. Semoga dokumen ini menjadi pedoman strategis yang efektif dalam mencapai cita-cita pembangunan, demi terwujudnya Kabupaten Seluma yang Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman (EMAS BERLIAN).

Tais,
Bupati,

2025

Teddy Rahman, S.E., M.M.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Penulisan	I-16
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-40
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-87
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-117
2.5. Gambaran Keuangan Daerah	II-141
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis	II-156
2.6.1. Permasalahan Kabupaten Seluma	II-157
2.7. Isu Strategis	II-171
2.7.1. Isu Strategis Global	II-171
2.7.2. Isu Strategis Nasional	II-178
2.7.2.1. Isu Strategis dan Arah Pembangunan Wilayah Sumatera ...	II-191
2.7.3. Isu Strategis Provinsi Bengkulu	II-195
2.7.4. Isu Strategis Kabupaten Seluma	II-197
BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-21
3.3. Lokus Pembangunan RPJMD 2025-2029	III-37
3.3.1. Orientasi Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang	III-37
BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
BAB V. PENUTUP	V-1





DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Nama dan Luasan Kecamatan di Kabupaten Seluma.....	II-3
Tabel II-2. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.....	II-14
Tabel II-3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	II-15
Tabel II-4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023.....	II-17
Tabel II-5. Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023.....	II-19
Tabel II-6. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.....	II-22
Tabel II-7. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.....	II-22
Tabel II-8. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023.....	II-25
Tabel II-9. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024.....	II-28
Tabel II-10. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Seluma 2020-2024.....	II-30
Tabel II-11. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024.....	II-32
Tabel II-12. Rasio Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024.....	II-33
Tabel II-13. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024.....	II-35
Tabel II-14. Proyeksi Penduduk Kabupaten Seluma Tahun 2025–2030...	II-37
Tabel II-15. Proyeksi Demografi Kabupaten Seluma Tahun 2025–2030 Berdasarkan Indikator Kependudukan Strategis.....	II-38
Tabel II-16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2018-2024.....	II-41
Tabel II-17. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024.....	II-43



Tabel II-18. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah)	II-45
Tabel II-19. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2017-2024	II-47
Tabel II-20. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024.....	II-49
Tabel II-21. Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	II-51
Tabel II-22. Umur Harapan Hidup (Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	II-53
Tabel II-23. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023.....	II-54
Tabel II-24. Angka Stunting di Kabupaten Seluma Tahun 2021-2024	II-57
Tabel II-25. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Seluma Tahun 2024 Menurut Kecamatan	II-58
Tabel II-26. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.....	II-60
Tabel II-27. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.....	II-62
Tabel II-28. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024	II-64
Tabel II-29. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2024.....	II-67
Tabel II-30. Jumlah Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Seluma Tahun 2024	II-68
Tabel II-31. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Kabupaten Seluma.....	II-70
Tabel II-32. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2018-2023.....	II-72
Tabel II-33. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.	II-75
Tabel II-34. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2023.....	II-78
Tabel II-35. Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024	II-79
Tabel II-36. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024	II-81



Tabel II-37. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024.....	II-83
Tabel II-38. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu 2016-2023.....	II-85
Tabel II-39. Angka Ketergantungan Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024.....	II-88
Tabel II-40. PDRB Kabupaten Seluma Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah). II-91	
Tabel II-41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	II-94
Tabel II-42. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024.....	II-96
Tabel II-43. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Provinsi Bengkulu 2018-2023.....	II-98
Tabel II-44. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024.....	II-101
Tabel II-45. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seluma Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II-104
Tabel II-46. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu 2020-2024(Persen)II-105	
Tabel II-47. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Persentase Penanganan dari Tahun 2019-2023	II-106
Tabel II-48. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024.....	II-110
Tabel II-49. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel II-50. Inflasi Kota Bengkulu tahun 2018-2023	II-114
Tabel II-51. Perkembangan Indikator Bidang Penanaman Modal Kabupaten Seluma 2020-2024	II-116
Tabel II-52. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024.....	II-118
Tabel II-53. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024....	II-120
Tabel II-54. Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024.....	II-123



Tabel II-55. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023.....	II-126
Tabel II-56. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023.....	II-130
Tabel II-57. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024.....	II-130
Tabel II-58. Capaian Indikator Kinerja Kunci Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024.....	II-133
Tabel II-59. Realisasi APBD Kabupaten Seluma 2020-2024	II-141
Tabel II-60. Neraca Daerah Tahun Anggaran Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel II-61. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026-2030	II-153
Tabel II-62 Rumusan Permasalahan Kabupaten Seluma	II-159
Tabel II-63 Analisa Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Manusia di Kabupaten Seluma.....	II-162
Tabel II-64 Analisa Permasalahan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Kabupaten Seluma.....	II-165
Tabel II-65 Analisa Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Seluma	II-167
Tabel II-66 Analisa Permasalahan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Seluma	II-169
Tabel II-67. Isu Strategis Transformasi Sosial Nasional.....	II-181
Tabel II-68. Isu Strategis Transformasi Ekonomi Nasional	II-184
Tabel II-69. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan.....	II-187
Tabel II-70. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	II-189
Tabel II-71. Isu Ketahanan Sosial dan Politik.....	II-191
Tabel II-72. Isu Strategis Wilayah Sumatera	II-192
Tabel II-73. Arahana Pembangunan Wilayah Sumatera (Provinsi Bengkulu).....	II-193
Tabel II-74 Permasalahan dan Isu Strategis Provinsi Bengkulu	II-196
Tabel II-75 Isu Strategis Daerah	II-198
Tabel III-1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Seluma dengan Misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel III-2. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	III-15



Tabel III-3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.....	III-18
Tabel III-4. Tujuan, Sasaran dan Strategi Setiap Misi	III-23
Tabel III-5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Seluma	III-27
Tabel III-6. Fokus Pembangunan Daerah Per Periode Tahun 2025-2029.....	III-27
Tabel III-7. Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.....	III-28
Tabel III-8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	III-30
Tabel III-9. Keselarasan Program Prioritas Kepala Daerah dengan Prioritas Nasional.....	III-34
Tabel III-10 Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Seluma	III-40
Tabel III-11. Data Dasar Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu	III-43
Tabel III-12 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2029 ...	III-66
Tabel IV-1 Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.....	IV-3
Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seluma Tahun 2026-2030.....	IV-95
Tabel IV-3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Seluma	IV-96



DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-6
Gambar II-1. Peta Administrasi Kabupaten Seluma.....	II-5
Gambar II-2. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak antara Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2023.....	II-18
Gambar II-3. Grafik Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik PLN di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, serta Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Kaur Selama Tahun 2019–2023.	II-20
Gambar II-4. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu (2021–2023).....	II-24
Gambar II-5. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lain di Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024.....	II-26
Gambar II-6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seluma Tahun 2019-2025	II-29
Gambar II-7. Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024	II-44
Gambar II-8. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dan Kota Bengkulu Tahun 2019–2024 (Juta Rupiah)	II-46
Gambar II-9. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seluma dengan Provinsi dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017–2024	II-48
Gambar II-10. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024	II-50
Gambar II-11. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024	II-52
Gambar II-12. Perbandingan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2023	II-56
Gambar II-13. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024	II-61



Gambar II-14. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Seluma dengan Provinsi dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024	II-63
Gambar II-15. erbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024	II-80
Gambar II-16. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Seluma dengan Provinsi dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024	II-82
Gambar II-17. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Seluma dengan Provinsi dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024	II-84
Gambar II-18. Tren Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2023.....	II-86
Gambar II-19. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024.....	II-95
Gambar II-20. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	II-109
Gambar II-21. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024.....	II-124
Gambar II-22. Penetapan Isu-isu Strategis Kabupaten Seluma 2025-2029.....	II-157
Gambar II-23. Permasalahan Kabupaten Seluma.....	II-158
Gambar II-24. Analisis terhadap Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	II-170
Gambar III-1. Bagan Perencanaan Strategik dan Perencanaan Operasional	III-27
Gambar III-2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seluma.....	III-39
Gambar III-3 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seluma.....	III-41
Gambar III-4 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi.....	III-52
Gambar III-5 Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi.....	III-56
Gambar III-6 Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air.....	III-58



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam visi Bupati Seluma terpilih, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Seluma EMAS BERLIAN (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman).” Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lima tahunan yang terukur, terarah, dan berbasis pada potensi, permasalahan, serta kebutuhan nyata masyarakat. RPJMD dirancang tidak hanya sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai media transformasi daerah dalam menjawab tantangan pembangunan masa kini dan mendatang.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RPJMD ini berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Di samping itu, RPJMD 2025–2029 juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan daerah dan nasional. Inmendagri tersebut menekankan transformasi tata kelola pemerintahan digital, penguatan pelayanan publik, akselerasi pembangunan ekonomi hijau, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

RPJMD Kabupaten Seluma juga disusun dalam kerangka harmonisasi antarlevel pemerintahan. Dokumen ini memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu untuk memastikan sinkronisasi pembangunan pada sektor lintas wilayah dan kewenangan, seperti pendidikan menengah,



layanan kesehatan rujukan, dan infrastruktur regional. Selain itu, kesinambungan arah pembangunan jangka panjang dijaga melalui penyesuaian dengan RPJPD Kabupaten Seluma, sebagai dokumen visi dan arah strategis pembangunan dua dekade ke depan. Secara teknis, RPJMD juga dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, yang menjadi dasar penyusunan APBD, serta memperhatikan RPJMN sebagai dokumen induk pembangunan nasional lima tahunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma juga dilakukan dengan memperhatikan dokumen-dokumen teknis pendukung yang berperan penting dalam memperkuat kualitas substansi dan arah kebijakan. Salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD), yang menjamin integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam seluruh kebijakan dan program. KLHS juga memastikan arah pembangunan mendukung pencapaian indikator TPB/SDGs secara konsisten. Selain itu, Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun oleh perangkat daerah berdasarkan data dan analisis rasional, menjadi landasan awal untuk merumuskan isu strategis dan arah kebijakan yang obyektif, logis, dan terukur.

Dokumen pendukung lainnya adalah Rencana Induk Pembangunan Investasi Daerah (RIP-JPID), yang memberikan arahan strategis pembangunan berbasis investasi melalui pemetaan sektor unggulan daerah, potensi investasi, serta pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta. RIP-JPID memperkuat peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tak kalah penting, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir, sebagai refleksi terhadap keberhasilan dan tantangan pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Evaluasi ini menjadi pijakan penting dalam menyusun isu-isu strategis pembangunan yang lebih relevan dan solutif pada periode mendatang.

Lebih lanjut, berbagai dokumen perencanaan sektoral dan tematik juga menjadi referensi utama dalam merancang RPJMD yang terintegrasi.



Dokumen sektoral seperti rencana strategis bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, serta dokumen tematik seperti mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan sosial, dipadukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa pembangunan lintas sektor dapat dilaksanakan secara sinergis dan saling mendukung. Dengan pendekatan yang berbasis data, partisipatif, integratif, dan responsif terhadap dinamika zaman, RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen strategis yang mampu mendorong transformasi daerah menuju pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam semangat Seluma EMAS BERLIAN.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan hukum dan peraturan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum, keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMN, dan RTRW, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara efektif dan efisien. Kepatuhan terhadap regulasi ini juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan publik. Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor xx Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Seluma;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 - 2045;

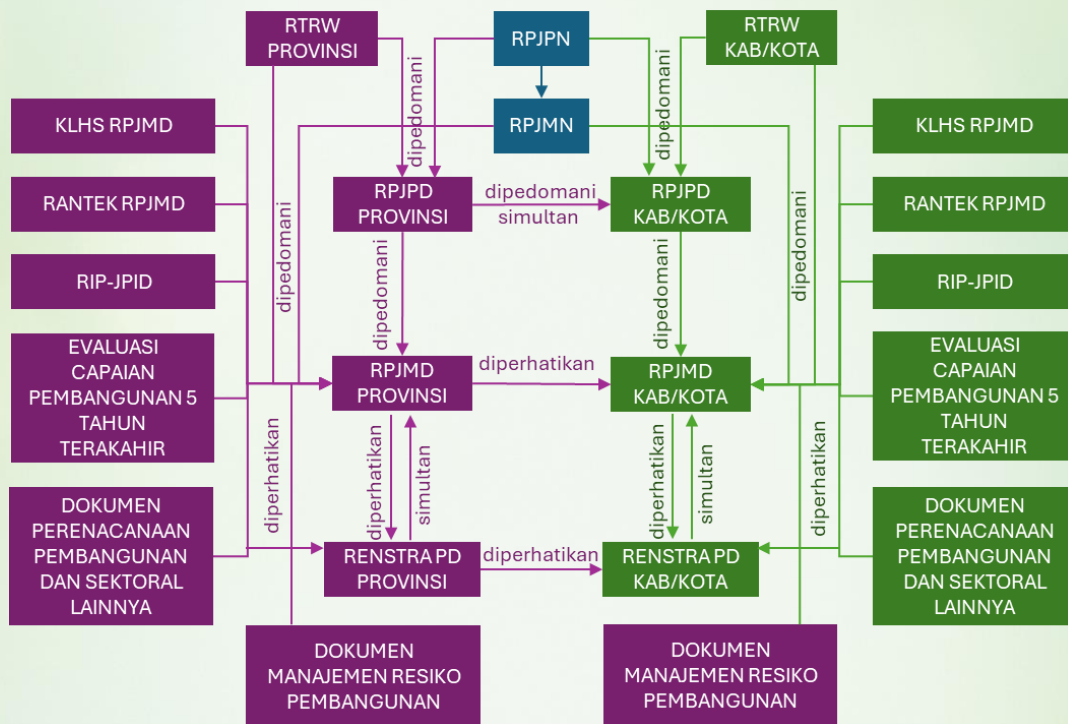
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, serta ketentuan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD dan RPJMD, tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologis.

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud tidak hanya menekankan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan hidup, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks Kabupaten Seluma, pembangunan berkelanjutan menjadi arah strategis utama dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, tangguh, serta adaptif terhadap dinamika perubahan global, nasional, maupun regional.



Gambar I-1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain

Upaya pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai empat sasaran utama, yaitu: (1) meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan miskin; (2) memperluas kesempatan kerja dan berusaha melalui penguatan iklim investasi serta pengembangan UMKM berbasis potensi lokal; (3) meningkatkan akses dan



kualitas layanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta (4) memperkuat daya saing daerah melalui inovasi, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Seluma menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berfungsi sebagai penghubung strategis antara visi-misi kepala daerah dan implementasi kebijakan pembangunan daerah. RPJMD memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Seluma mengacu pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana diatur dalam regulasi nasional, antara lain:

1. RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga harus selaras dengan RPJPD Kabupaten Seluma, RPJMD Provinsi Bengkulu, dan RPJMN;
2. Penyusunan dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas;
3. Mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan perencanaan pembangunan daerah, guna menjamin kesesuaian pembangunan dengan kapasitas dan fungsi ruang;
4. Disusun berdasarkan analisis kondisi, potensi, dan dinamika perkembangan daerah serta nasional, yang didukung oleh data dan hasil evaluasi pembangunan periode sebelumnya.



A. Hubungan RPJMD Kabupaten Seluma dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Secara substansial, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah secara terukur dan terpadu. Penyusunan RPJMD ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan diselaraskan dengan berbagai dokumen strategis lainnya guna memastikan kesinambungan dan sinkronisasi pembangunan antarlevel pemerintahan.

Pertama, RPJMD Kabupaten Seluma memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dokumen pembangunan nasional lima tahunan yang memuat prioritas, sasaran, dan target strategis pembangunan lintas sektor. Penyesuaian ini penting untuk menjamin bahwa program pembangunan di Kabupaten Seluma selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) nasional, integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), strategi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi menuju ekonomi hijau dan berketahanan.

Kedua, RPJMD Kabupaten Seluma diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu, yang merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi dan RPJMN. Sinergi ini menjadi penting terutama dalam sektor-sektor pembangunan yang bersifat lintas wilayah atau lintas kewenangan, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah, penyelenggaraan pendidikan menengah, serta sistem layanan kesehatan rujukan. Dengan memperhatikan dokumen provinsi, Pemerintah Kabupaten Seluma dapat memastikan bahwa arah pembangunan daerah mendukung prioritas pembangunan regional.

Ketiga, RPJMD Kabupaten Seluma merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma sebagai dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20



tahun. RPJPD menjadi acuan utama dalam menjaga konsistensi visi pembangunan lintas periode pemerintahan serta menjamin keberlanjutan arah dan prioritas pembangunan daerah. RPJMD disusun dengan mempedomani visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang telah disepakati dalam RPJPD tersebut.

Keempat, keterkaitan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga menjadi hal yang fundamental. RKPD merupakan dokumen tahunan yang menjabarkan RPJMD secara lebih operasional, sekaligus menjadi dasar penyusunan APBD setiap tahun. RKPD Kabupaten Seluma juga memperhatikan RKP Nasional dan RKPD Provinsi, sehingga memastikan konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan yang fleksibel, adaptif, namun tetap terarah pada tujuan strategis lima tahunan yang telah ditetapkan.

B. Dokumen Teknis Pendukung Penyusunan RPJMD

Selain merujuk pada dokumen-dokumen utama seperti RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD, dan RKPD, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 juga mengintegrasikan berbagai dokumen teknis dan pendukung substantif. Integrasi ini bertujuan untuk memperkuat kualitas perencanaan, ketepatan kebijakan, serta memastikan bahwa seluruh proses pembangunan didasarkan pada analisis yang komprehensif dan evidence-based.

Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD), yang berfungsi untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi terintegrasi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. KLHS juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) secara lebih sistemik dan konsisten. Di samping itu, Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi dasar teknis awal dalam penyusunan dokumen ini, yang disusun secara objektif oleh perangkat



daerah teknis berdasarkan data dan analisis rasional untuk merumuskan arah kebijakan yang logis dan terukur.

Selanjutnya, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPJ PID) menjadi salah satu dokumen strategis yang turut memperkuat arah pembangunan Kabupaten Seluma berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan. Dokumen ini memuat arah kebijakan riset dan inovasi daerah serta strategi pemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, penyusunan kebijakan berbasis bukti, pengembangan ekosistem riset dan inovasi, serta penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Integrasi RIPJ PID ke dalam RPJMD menjadi krusial dalam mendorong transformasi pembangunan yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga berbasis pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Selain itu, hasil Evaluasi Capaian Pembangunan Lima Tahun Terakhir juga menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan implementasi RPJMD periode sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai pijakan dalam perumusan isu strategis dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan sektoral dan tematik, seperti rencana pembangunan bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, serta dokumen tematik mengenai mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan sosial. Integrasi dokumen sektoral ini bertujuan agar pembangunan lintas sektor dapat dikoordinasikan secara menyeluruh dan sinergis.

Keterpaduan dan konsistensi antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan tersebut dirancang untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Seluma berjalan secara sistematis, terarah, inklusif, dan berkelanjutan. RPJMD bukan sekadar dokumen administratif lima tahunan, melainkan merupakan instrumen utama transformasi pembangunan daerah yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata. Selain itu, RPJMD juga menjadi referensi penting dalam penyusunan Dokumen



Manajemen Risiko Pembangunan, sebagai upaya antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko yang mungkin timbul selama periode pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. RPJMD disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Seluma dalam mengarahkan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Lebih dari itu, RPJMD juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjembatani capaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan tetap mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui penyusunan RPJMD ini, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten Seluma dapat dijalankan secara efektif, efisien, inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing dan ketahanan daerah.

A. Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi Pemerintah Kabupaten Seluma dalam menyelenggarakan pembangunan lima tahunan secara sistematis, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma terpilih, yakni “Terwujudnya Kabupaten Seluma EMAS BERLIAN (Elok, Maju, Adil, Sejahtera,



Berkelanjutan, dan Beriman),” ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang mampu menjawab tantangan aktual serta mewujudkan cita-cita pembangunan daerah secara nyata dan berorientasi hasil.

RPJMD ini juga merupakan instrumen untuk mengonsolidasikan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Seluma, dengan tetap mempertimbangkan keselarasan terhadap kebijakan pembangunan nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Bengkulu. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan rencana kerja dan penganggaran yang terfokus, efisien, dan sinergis, guna mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Maksud penyusunan RPJMD ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya:

- a. Kemajuan daerah, melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan lokal, pemerataan infrastruktur wilayah, dan peningkatan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang inklusif dan berdaya saing;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi fondasi utama pembangunan, melalui perbaikan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan kapasitas masyarakat dan generasi muda sebagai aktor pembangunan masa depan;
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperluas cakupan layanan dasar yang berkualitas dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat miskin, rentan, dan daerah tertinggal;
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan profesional, melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel, yang didukung oleh sistem



pemerintahan berbasis digital dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;

- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mendorong reformasi birokrasi, pelayanan terpadu, serta penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjamin hak-hak dasar masyarakat secara cepat, mudah, dan berkualitas;
- f. Keberlanjutan pembangunan, yang diwujudkan melalui integrasi prinsip lingkungan hidup, mitigasi risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, serta penggunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan intergenerasional;
- g. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan moralitas sosial, guna menciptakan masyarakat yang beriman, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai pilar identitas daerah.

RPJMD Kabupaten Seluma disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan—termasuk perangkat daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat umum—melalui forum-forum konsultasi publik dan dialog pembangunan. Penyusunan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis data yang valid serta pendekatan evidence-based policy, guna memastikan bahwa rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat Kabupaten Seluma.

Dengan pendekatan tersebut, RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen pembangunan yang tidak hanya administratif dan prosedural, tetapi menjadi pedoman transformatif yang mampu menggerakkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat menuju Seluma yang Elok dalam tata ruang dan kelestarian lingkungannya, Maju dalam pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, Adil dalam akses dan distribusi sumber daya, Sejahtera dalam kualitas hidup masyarakat,



Berkelanjutan dalam orientasi pembangunan lintas generasi, serta Beriman dalam karakter sosial dan spiritual masyarakatnya.

B. Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memberikan arah yang jelas, sistematis, dan terukur bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk memastikan terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati Seluma terpilih, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Seluma Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman” melalui perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang konkret dan selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Secara khusus, tujuan dari penyusunan RPJMD ini meliputi:

a. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

Menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma ke dalam arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang terintegrasi dengan RPJPD Kabupaten Seluma, serta memperhatikan konsistensi dengan RPJMD Provinsi Bengkulu dan RPJMN.

b. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah yang mampu merespons isu-isu strategis, tantangan pembangunan lokal, serta dinamika nasional dan global secara adaptif dan progresif, untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

c. Menynergikan dan Menyelaraskan Program Pembangunan

Mengharmonisasikan program dan kegiatan lintas sektor antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, sekaligus mendorong kemitraan dengan dunia usaha, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil, berbasis potensi unggulan daerah dan nilai-nilai kearifan lokal.

d. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya



Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia aparatur, infrastruktur, dan aset wilayah secara efisien, akuntabel, dan tepat sasaran, guna mencapai hasil pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

e. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat

Merumuskan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar yang berpihak pada masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan wilayah tertinggal, dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat.

f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif, melalui reformasi birokrasi, penerapan digitalisasi pemerintahan (e-government), serta penguatan sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.

g. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang merata, pelatihan vokasi, kesehatan masyarakat yang prima, serta penguatan karakter dan nilai keimanan untuk menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia.

h. Meningkatkan Daya Saing dan Ekonomi Lokal

Mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Kabupaten Seluma di tingkat regional maupun nasional.

i. Menanggulangi Permasalahan Strategis Daerah



Mengidentifikasi dan menangani berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, kesenjangan antarwilayah, serta degradasi lingkungan melalui pendekatan kebijakan yang holistik dan terintegrasi.

j. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan Daerah

Mendorong pembangunan yang berbasis lingkungan dan berwawasan jangka panjang, dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, serta mendorong resilien terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

Dengan tersusunnya RPJMD ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Seluma memiliki arah pembangunan yang kuat, adaptif, dan mampu membawa daerah menuju transformasi yang lebih tangguh, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Dokumen ini juga menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi Seluma yang EMAS BERLIAN.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta diselaraskan dengan arahan terbaru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini disajikan secara sistematis dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:



a. Latar belakang;

Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi kepala daerah.

b. Dasar hukum penyusunan;

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

c. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;

Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPD, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.

d. Maksud dan tujuan; dan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

e. Sistematika penulisan.

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

a. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:

- i. Aspek geografi dan demografi;
- ii. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- iii. Aspek Daya Saing Daerah;
- iv. Aspek Pelayanan Umum.



Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- i. Standar Pelayanan Minimal;
 - ii. Kerjasama daerah;
 - iii. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
 - iv. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
 - b. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
 - c. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
 - i. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - ii. Isu strategis daerah.
3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- a. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
 - i. Visi dan Misi; dan
 - ii. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
 - b. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
 - i. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - ii. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- a. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:



- i. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - ii. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- b. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - i. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - ii. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki sejarah pembentukan dan perkembangan wilayah yang mencerminkan dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang. Pada awal berdirinya, Kabupaten Seluma hanya terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas, dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan wilayah, serta tuntutan efisiensi pelayanan pemerintahan, wilayah administratif Kabupaten Seluma mengalami pemekaran signifikan. Hingga tahun 2020, jumlah kecamatan bertambah menjadi 14, dengan total 202 desa dan kelurahan yang terdiri dari 182 desa dan 20 kelurahan. Pemekaran ini menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika lokal.

Sebelum resmi berdiri sebagai kabupaten mandiri, wilayah Kabupaten Seluma merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembentukan Kabupaten Seluma sebagai entitas pemerintahan tersendiri ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Berdasarkan ketentuan tersebut, luas wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan sebesar 4.128,46 km², yang mencakup sekitar 2.400,44 km² daratan dan 1.728,02 km² wilayah laut. Komposisi wilayah ini memberikan potensi geografis yang unik, menjadikan Kabupaten Seluma sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang tersebar di wilayah pesisir dan pedalaman.

Dalam perjalanannya, batas wilayah Kabupaten Seluma mengalami penyesuaian melalui sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2019 tentang batas dengan Kota Bengkulu, Nomor



49 Tahun 2013 tentang batas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor 98 Tahun 2017 dan Nomor 99 Tahun 2017 yang mengatur batas dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat, serta Nomor 9 Tahun 2020 mengenai batas dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Penyesuaian batas ini tidak hanya memperjelas batas administrasi antarwilayah, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan sumber daya dan ruang wilayah Kabupaten Seluma. Berdasarkan penyesuaian terbaru, luas wilayah Kabupaten Seluma meningkat menjadi 247.936 hektare.

Transformasi wilayah dan kelembagaan yang telah dilalui Kabupaten Seluma tidak hanya menandakan perkembangan administratif, tetapi juga menggambarkan kesiapan daerah ini untuk terus berkembang sebagai kawasan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Dengan kekayaan potensi daratan, kawasan pesisir, serta letak geografis yang strategis di jalur lintas barat Sumatera, Kabupaten Seluma memiliki peluang besar untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing Provinsi Bengkulu di masa mendatang.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan dua fondasi penting dalam menentukan arah perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Aspek geografi mencakup posisi strategis wilayah, luas dan karakteristik topografi, iklim, serta potensi sumber daya alam, sementara aspek demografi meliputi jumlah, pertumbuhan, sebaran, komposisi usia, dan kondisi sosial ekonomi penduduk. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang relevan, responsif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, pemahaman mendalam terhadap aspek geografis dan demografis menjadi prasyarat penting untuk memastikan arah pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.



Secara geografis, Kabupaten Seluma terletak di bagian selatan Provinsi Bengkulu dan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang dari arah Provinsi Sumatera Selatan melalui jalur lintas barat Sumatera. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah di utara, Provinsi Sumatera Selatan di timur, Kabupaten Bengkulu Selatan di selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Dengan luas wilayah mencapai 2.479,36 km² atau setara dengan 247.936 hektare, Kabupaten Seluma memiliki topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga kawasan pegunungan. Iklim tropis basah dengan dua musim dominan (kemarau dan hujan) mendominasi wilayah ini, memengaruhi pola pertanian, tata air, serta daya dukung infrastruktur dan pemukiman.

Kabupaten Seluma terdiri atas 14 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2.479,36 km² atau setara dengan 247.936 hektare. Setiap kecamatan memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan luas wilayah dan pusat administrasi kecamatannya. Berikut ini adalah gambaran rinci mengenai luas wilayah dan pusat administrasi dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Seluma.

Tabel II-1. Nama dan Luasan Kecamatan di Kabupaten Seluma

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km ²)	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Semidang Alas Maras	Kembang Mumpo	120,87	12.087	4,88
2	Semidang Alas	Pajar Bulan	508,65	50.865	20,52
3	Talo	Masmambang	111,89	11.189	4,51
4	Iilir Talo	Padang Cekur	113,85	11.385	4,59
5	Talo Kecil	Sukamerindu	91,22	9.122	3,68
6	Ulu Talo	Air Keruh	328,54	32.854	13,25
7	Seluma	Tais	27,41	2.741	1,11
8	Seluma Selatan	Rimbo Kedui	80,43	8.043	3,24
9	Seluma Barat	Pagar Agung	87,60	8.760	3,53
10	Seluma Timur	Selebar	77,08	7.708	3,11
11	Seluma Utara	Puguk	320,99	32.099	12,95
12	Sukaraja	Sukaraja	189,46	18.946	7,64
13	Air Periukan	Dermayu	163,81	16.381	6,61
14	Lubuk Sandi	Rena Panjang	257,56	25.756	10,39
			2.479,36	247.936	



Kecamatan Talo memiliki luas wilayah sebesar 111,89 km² atau 11.189 hektare, dengan pusat pemerintahan di Masmambang. Kecamatan ini menyumbang 4,51 persen dari total luas kabupaten. Bersebelahan dengan Talo, Kecamatan Ilir Talo, yang berpusat di Padang Cekur, memiliki luas wilayah 113,85 km² atau 11.385 hektare, yang mencakup 4,59 persen dari total wilayah. Kecamatan Talo Kecil, dengan ibu kota Sukamerindu, mencakup luas wilayah 91,22 km² atau 9.122 hektare, atau sekitar 3,68 persen dari total luas kabupaten. Sementara itu, Kecamatan Ulu Talo, dengan pusat administrasi di Air Keruh, memiliki luas wilayah signifikan, yaitu 328,54 km² atau 32.854 hektare, yang setara dengan 13,25 persen dari total wilayah kabupaten.



Gambar II-1. Peta Administrasi Kabupaten Seluma

Kecamatan Seluma, yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten dengan ibu kota Tais, memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 27,41 km² atau 2.741 hektare, yang hanya menyumbang 1,11 persen dari total wilayah kabupaten. Kecamatan Seluma Selatan, dengan ibu kota Rimbo Kedui, mencakup luas wilayah sebesar 80,43 km² atau 8.043 hektare, yang setara dengan 3,24 persen dari keseluruhan wilayah kabupaten. Kecamatan Seluma Barat, dengan pusat pemerintahan di Pagar Agung, memiliki luas 87,60 km² atau 8.760 hektare, yang mencakup 3,53 persen dari total wilayah. Selanjutnya, Kecamatan Seluma Timur, dengan ibu kota di Selebar, mencakup luas wilayah sebesar 77,08 km² atau 7.708 hektare, yang mewakili 3,11 persen dari keseluruhan wilayah. Kecamatan Seluma Utara, dengan pusat administrasi di Puguk, memiliki luas wilayah yang signifikan, yaitu 320,99 km² atau 32.099 hektare, yang setara dengan 12,95 persen dari total wilayah kabupaten.

Di bagian lain kabupaten, Kecamatan Sukaraja, dengan pusat pemerintahan di Sukaraja, memiliki luas wilayah sebesar 189,46 km² atau 18.946 hektare, yang mencakup 7,64 persen dari total wilayah. Kecamatan Air Periukan, yang berpusat di Dermayu, memiliki luas wilayah sebesar 163,81 km² atau 16.381 hektare, yang setara dengan 6,61 persen dari total luas kabupaten. Terakhir, Kecamatan Lubuk Sandi, dengan pusat administrasi di Rena Panjang, mencakup luas wilayah sebesar 257,56 km² atau 25.756 hektare, yang menyumbang 10,39 persen dari total wilayah Kabupaten Seluma.

Dari sisi potensi sumber daya alam, Kabupaten Seluma memiliki kekayaan di sektor pertanian (padi, jagung, palawija), perkebunan (sawit, karet, kopi), kehutanan, perikanan laut, dan potensi pariwisata berbasis alam serta budaya. Namun, pengelolaan potensi tersebut memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun ketimpangan



pembangunan antarwilayah, khususnya antara daerah pesisir dan pedalaman.

Secara topografis, wilayah Kabupaten Seluma memiliki keragaman ketinggian yang menciptakan peluang dan tantangan pembangunan. Sekitar 24,32 persen wilayahnya berada pada ketinggian 100–500 mdpl (58.409 hektare), ideal untuk pertanian dan perkebunan dataran menengah. Sementara wilayah dengan ketinggian >1.000 mdpl (16,75 persen atau 40.223 hektare) berpotensi besar untuk pengembangan pariwisata, konservasi alam, dan pengelolaan air. Sebaliknya, wilayah dengan ketinggian 0–10 mdpl (12,83 persen atau 30.820 hektare) dan 10–25 mdpl (9,30 persen) berada di zona rawan banjir dan abrasi, khususnya di sepanjang garis pantai sejauh 70 km.

Dari sisi kemiringan lahan, sebanyak 25,84 persen wilayah (62.060 hektare) berada pada kemiringan 0–3 persen yang cocok untuk pemukiman dan infrastruktur, namun rawan genangan. Wilayah dengan kemiringan 3–15 persen (18,10 persen) sesuai untuk agroforestri dan pertanian campuran. Adapun lahan dengan kemiringan di atas 40 persen (28,47 persen atau 68.362 hektare) merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang penting untuk konservasi ekologis dan perlindungan sumber daya air. Pengelolaan wilayah ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan erosi dan degradasi lingkungan.

Dari aspek demografi, Kabupaten Seluma menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil, dengan dominasi kelompok usia produktif yang menjadi potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas daerah. Namun, persebaran penduduk masih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi, sementara wilayah pedalaman masih menghadapi tantangan dalam pelayanan dasar dan infrastruktur. Hal ini menjadi dasar penting untuk mendorong pemerataan pembangunan



melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan akses pelayanan publik, serta penguatan konektivitas antarwilayah.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek geografis dan demografis tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mengelola ruang dan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan. Langkah strategis meliputi pengembangan wilayah berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemenuhan hak dasar masyarakat melalui pendekatan wilayah yang berkeadilan.

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Seluma memiliki posisi geografis yang strategis di bagian selatan Provinsi Bengkulu, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah di utara, Provinsi Sumatera Selatan di timur, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Letak ini menjadikan Seluma sebagai daerah transisi antara wilayah pesisir dan dataran tinggi, serta berpotensi memainkan peran sebagai penopang aktivitas ekonomi, ekologi, dan konektivitas kawasan selatan Provinsi Bengkulu. Dengan karakter geografis dan aksesibilitas yang terus berkembang, Kabupaten Seluma memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai kawasan penyangga dan pusat pertumbuhan baru yang mendukung keseimbangan pembangunan wilayah provinsi.

a. Kontribusi Geografis dan Konektivitas Wilayah

Kabupaten Seluma dilintasi oleh jalur lintas barat Sumatera yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jalur strategis ini menjadikan Seluma sebagai titik simpul konektivitas antara wilayah pesisir dan pedalaman, serta antara kawasan tengah dan selatan Bengkulu. Aksesibilitas darat yang semakin baik membuka peluang pengembangan kawasan permukiman baru, distribusi logistik, perdagangan hasil bumi, serta perluasan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan. Kedekatan Seluma dengan



Kota Bengkulu dan beberapa kabupaten lainnya menjadikannya wilayah yang potensial untuk mendukung integrasi ekonomi regional dan mobilitas antarwilayah.

b. Kontribusi Ekonomi Regional

Struktur ekonomi Kabupaten Seluma ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, karet, sawit, dan hasil laut menjadi penopang utama mata pencaharian masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan regional. Selain itu, potensi pengembangan kawasan agropolitan, pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata berbasis alam dan budaya menjadi peluang yang dapat mendorong akselerasi ekonomi daerah. Dengan dukungan konektivitas wilayah dan sumber daya alam yang melimpah, Seluma dapat berkembang sebagai pusat penghasil komoditas pertanian dan perikanan untuk menyuplai kebutuhan wilayah sekitarnya, termasuk Kota Bengkulu.

c. Kontribusi Sosial Budaya dan Identitas Daerah

Kabupaten Seluma dikenal memiliki keragaman sosial budaya yang terbentuk dari perpaduan masyarakat asli (etnis Serawai) dan pendatang dari berbagai suku. Nilai-nilai lokal seperti semangat gotong royong, budaya musyawarah, dan religiusitas yang kuat menjadi modal sosial penting dalam mendorong pembangunan sosial yang inklusif dan harmonis. Identitas daerah yang terbentuk dari akar budaya ini menjadi fondasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing, serta memiliki semangat kebersamaan dan toleransi. Keragaman budaya juga membuka peluang pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

d. Kontribusi Lingkungan dan Ketahanan Ekologis



Topografi Kabupaten Seluma yang terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan dan pegunungan menjadikan daerah ini memiliki fungsi ekologis strategis. Kawasan hutan lindung, daerah tangkapan air, sempadan sungai, dan bentang alam pesisir memberikan kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana seperti banjir, abrasi, dan longsor. Dalam lima tahun ke depan, strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu diarahkan pada pengembangan ekowisata, konservasi kawasan lindung, serta pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

e. Kontribusi dalam Tata Ruang dan Rencana Pengembangan Wilayah

Dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma periode 2025–2029, telah ditegaskan arah pembangunan wilayah yang menekankan pada pemerataan pembangunan antarwilayah, pengembangan infrastruktur dasar, serta penguatan kawasan strategis seperti kawasan pesisir, kawasan pertanian terpadu, dan simpul pertumbuhan baru di wilayah perbatasan dan pedalaman. Penataan ruang Kabupaten Seluma diarahkan untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan di Tais, Sukaraja, Semidang Alas, dan wilayah pesisir sebagai penggerak ekonomi daerah yang inklusif. Penetapan kawasan-kawasan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang terencana, merata, dan mendukung integrasi lintas wilayah dalam konteks pembangunan Provinsi Bengkulu.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Seluma memiliki kekayaan sumber daya alam yang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian daerah, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan



kehutanan. Dengan luas wilayah mencapai 2.479,36 km², Kabupaten Seluma memiliki topografi yang bervariasi mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan, yang memberikan keunggulan dalam keberagaman komoditas unggulan. Di sektor pertanian, Seluma tercatat sebagai salah satu sentra produksi padi utama di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, pada tahun 2022, luas panen padi mencapai 8.060 hektare dengan produksi sebesar 33.366 ton gabah kering giling. Selain padi, komoditas pertanian lain seperti jagung dengan produksi 2.580 ton dari luas panen 864 hektare, serta ubi kayu dan kacang tanah turut memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Sektor perkebunan juga menjadi salah satu keunggulan Seluma dengan kontribusi luas dan produksi yang terus meningkat. Pada tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai lebih dari 7.000 hektare dengan produksi mencapai 18.000 ton Tandan Buah Segar (TBS). Komoditas lain seperti karet dengan luas 9.328 hektare dan produksi sekitar 7.260 ton, serta kopi yang ditanam di lebih dari 3.000 hektare lahan, menunjukkan peran penting sektor ini dalam mendukung pendapatan masyarakat perdesaan. Potensi ini tidak hanya menopang sektor pertanian dan industri pengolahan, tetapi juga membuka peluang hilirisasi produk berbasis agroindustri.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Kabupaten Seluma memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 70 kilometer yang membentang di wilayah barat, langsung menghadap Samudera Hindia. Potensi sumber daya perikanan laut ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan, khususnya di Kecamatan Talo, Ilir Talo, dan Pasar Talo. Menurut Dinas Perikanan, produksi perikanan tangkap mencapai 2.250 ton per tahun, terdiri atas ikan pelagis, ikan demersal, dan udang. Selain perikanan laut, budidaya perikanan air tawar juga berkembang, terutama di kecamatan yang memiliki ketersediaan air permukaan dan mata air alami, seperti Seluma Utara dan Seluma Barat.



Tercatat lebih dari 1.200 kolam ikan milik rakyat telah dimanfaatkan untuk budidaya ikan lele, nila, dan gurame.

Sektor kehutanan juga menjadi bagian penting dalam struktur sumber daya alam Kabupaten Seluma. Kawasan hutan di Seluma mencakup hutan lindung dan hutan produksi yang tersebar di wilayah tengah dan utara kabupaten. Selain fungsi ekologis untuk menjaga iklim mikro, mencegah erosi, dan menjaga ketersediaan air, kawasan hutan juga memiliki potensi hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, madu hutan, dan tanaman obat. Pada saat yang sama, tantangan seperti kerusakan hutan akibat pembukaan lahan dan konversi fungsi perlu dijawab dengan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat dan penguatan regulasi lokal.

Di wilayah pesisir, selain potensi perikanan, Seluma juga menghadapi ancaman abrasi pantai yang semakin meningkat, terutama di wilayah Kecamatan Air Periukan dan Sukaraja. Penanganan abrasi dan pengelolaan kawasan pesisir menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan masyarakat pesisir. Potensi sumber daya alam yang terbukti ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma memiliki dasar kuat untuk mengembangkan perekonomian berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah ke depan perlu diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sektor-sektor unggulan ini secara berkelanjutan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan keseimbangan sosial-ekonomi.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Seluma didasarkan pada perhitungan indeks jejak ekologis (IJE) yang mempertimbangkan berbagai dimensi tekanan terhadap lingkungan. Dimensi tersebut mencakup tekanan penduduk (PP), tekanan terhadap ruang (PR), tekanan terhadap cakupan layanan (PC), serta tekanan terhadap sumber daya alam (PS). Masing-masing tekanan diukur berdasarkan luas wilayah



kecamatan dikalikan dengan koefisien tertentu yang mencerminkan intensitas tekanan ekologis.

Dari hasil kompilasi data, total tekanan lingkungan pada tingkat kecamatan menunjukkan variasi yang cukup tajam. Rata-rata total tekanan lingkungan di Kabupaten Seluma berada pada kisaran 789.146, tetapi terdapat kecamatan yang mencatat tekanan ekstrem tinggi hingga mencapai lebih dari 13 juta. Tingginya nilai ini menunjukkan adanya konsentrasi tekanan aktivitas manusia yang signifikan, baik dari aspek populasi, intensifikasi penggunaan ruang, maupun eksploitasi sumber daya alam. Wilayah dengan tekanan tinggi umumnya berada pada kecamatan dengan luasan besar dan aktivitas ekonomi yang padat, seperti pertanian intensif, perikanan, maupun pembangunan permukiman yang kurang terkendali.

Sebaliknya, terdapat kecamatan dengan nilai tekanan yang relatif rendah, bahkan terdapat entri data nol yang perlu dikaji ulang validitasnya. Namun secara umum, kecamatan dengan tekanan lebih rendah biasanya merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, tutupan lahan yang relatif masih alami, dan minimnya aktivitas konversi lahan. Ketimpangan distribusi tekanan ini menunjukkan bahwa beban ekologis tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Seluma.

Distribusi tekanan yang tidak seimbang ini menandakan bahwa beberapa wilayah mulai mengalami tekanan ekologis melebihi kapasitas daya dukungnya. Bila tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan seperti berkurangnya kualitas air dan udara, meningkatnya bencana ekologis, dan terganggunya fungsi ekosistem jangka panjang. Selain itu, tekanan lingkungan yang tinggi juga dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat, terutama yang bermukim di wilayah rentan.

Data ini menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis pada keseimbangan ekologis. Pembangunan ke depan harus mempertimbangkan zonasi daya dukung



lingkungan, agar alokasi ruang, investasi, dan pelayanan publik dilakukan dengan prinsip berkelanjutan. Strategi pembangunan yang menitikberatkan pada konservasi kawasan lindung, penguatan ketahanan lingkungan, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengurangan emisi dan limbah akan menjadi krusial dalam menjaga daya tampung lingkungan Kabupaten Seluma.

Lebih jauh, pendekatan spasial berbasis data IJE dapat diintegrasikan dalam penyusunan RTRW dan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), untuk memastikan bahwa setiap arah pembangunan tidak melampaui batas ekologis wilayah. Pendekatan ini sekaligus dapat mendukung pencapaian target RPJMD dalam aspek kualitas lingkungan hidup, serta menyelaraskan pembangunan daerah dengan target nasional dalam RPJP dan SDGs.

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Kabupaten Seluma mencerminkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara merata dan berkelanjutan, mencakup tiga pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan dijaga melalui penguatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Aksesibilitas ditingkatkan dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan pasar, sedangkan pemanfaatan pangan diarahkan pada peningkatan kesadaran gizi dan konsumsi pangan seimbang yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Untuk mengukur kondisi ketahanan pangan secara menyeluruh, digunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang tersedia secara rutin. IKP menjadi alat perencanaan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pangan yang efektif. Dengan dukungan lintas sektor dan pengelolaan anggaran yang tepat, Pemerintah Kabupaten Seluma berupaya mewujudkan sistem pangan



daerah yang tangguh dan berkelanjutan guna menunjang kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2024, terlihat bahwa Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, dari angka 67,6 pada tahun 2019 menjadi 71,61 pada tahun 2024. Meskipun demikian, IKP Seluma secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi, yang pada tahun 2024 mencapai 73,39. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Seluma cenderung berada di kelompok tengah ke bawah, terutama bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebong (77,06), Kota Bengkulu (78,72), dan Mukomuko (76,57) yang menempati peringkat teratas dalam IKP tahun 2024.

Tabel II-2. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,4	74,54	72,3	73,67	74,63	74,91
Bengkulu Tengah	73	67,24	68,63	62,12	61,54	62,14
Bengkulu Utara	66,9	68,15	68,21	58,31	70,74	72,62
Kaur	70,1	70,68	72,12	71,51	73,9	74,75
Kepahiang	72,4	68,99	68,68	67,14	69,41	72,43
Kota Bengkulu	66,5	67,24	67,82	65,29	75,68	78,72
Lebong	72,2	76,09	74,38	74,86	75,84	77,06
Mukomuko	70,8	71,46	76,17	71,78	76,63	76,57
Rejang Lebong	70,9	70,64	67,54	66,68	72,67	73,11
Seluma	67,6	67,72	67,29	68,54	71,64	71,61
Provinsi Bengkulu	61,8	70,28	70,32	67,99	72,27	73,39

Sementara itu, beberapa daerah mengalami fluktuasi tajam, seperti Kabupaten Bengkulu Tengah yang justru mengalami penurunan signifikan dari 73,0 pada 2019 menjadi 62,14 di tahun 2024—menjadikannya sebagai daerah dengan IKP terendah di provinsi. Kabupaten Seluma sendiri menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan perlahan membaik dibanding kabupaten tersebut, meski masih tertinggal dibanding daerah dengan capaian IKP tinggi. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Seluma telah mengalami perbaikan dalam ketahanan pangan, masih diperlukan upaya lebih serius untuk mengejar ketertinggalan dibanding daerah lain yang



memiliki indeks di atas rata-rata provinsi, terutama dalam hal ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan.

2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Salah satu indikator yang mencerminkan tingkat ketahanan pangan masyarakat adalah prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, yaitu persentase penduduk yang asupan energinya tidak mencapai kebutuhan minimum harian untuk hidup sehat dan aktif. Indikator ini mencerminkan seberapa besar bagian populasi yang rentan terhadap kelaparan tersembunyi akibat konsumsi energi pangan yang tidak mencukupi secara kronis.

Dalam konteks Kabupaten Seluma, isu ketidacukupan konsumsi pangan menjadi perhatian penting dalam agenda pembangunan daerah, terutama mengingat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang signifikan namun belum sepenuhnya mampu menjamin ketersediaan dan akses pangan yang merata di seluruh wilayah. Kondisi geografis, pola konsumsi masyarakat, serta keterbatasan daya beli menjadi faktor yang saling terkait dalam membentuk dinamika ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan menjadi bagian integral dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

**Tabel II-3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024**

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	8,09	8,25	10,38	9,16	9,42
Rejang Lebong	11,62	11,27	16,55	11,66	12,54
Bengkulu Utara	6,56	6,68	9,91	7,49	9,7
Kaur	6,33	7,01	9,54	9,52	12,36
Seluma	7,38	7,97	8,63	9,06	11,05
Mukomuko	3,64	5	5,94	4,86	5,56
Lebong	8,03	9,51	12,66	9,94	12,38
Kepahiang	10,99	11,3	15,4	13,17	13,7
Bengkulu Tengah	5,67	6	9,3	7,89	9,48
Kota Bengkulu	8,2	11,11	14,61	9,81	6,43
Provinsi Bengkulu	7,72	8,64	11,66	9,25	9,86

Sumber: BPS Indonesia



Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Kabupaten Seluma mengalami tren peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, angka prevalensi berada di level 7,38 persen dan terus meningkat menjadi 7,97 persen pada 2021, 8,63 persen pada 2022, hingga mencapai 9,06 persen pada 2023 dan 11,05 persen pada tahun 2024. Lonjakan angka ini menunjukkan adanya penurunan kualitas ketahanan pangan rumah tangga yang mengindikasikan persoalan dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan pangan secara optimal. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma sempat mencatat angka yang lebih rendah dari provinsi pada tiga tahun pertama, tetapi sejak 2023 prevalensinya mulai melampaui provinsi. Pada tahun 2023, prevalensi di Seluma tercatat sebesar 9,06 persen, sedikit di atas rata-rata provinsi yang sebesar 9,25 persen. Sementara pada tahun 2024, selisihnya semakin besar, dengan Seluma mencapai 11,05 persen, sedangkan rata-rata provinsi berada di angka 9,86 persen.

Dalam konteks regional, posisi Kabupaten Seluma pada tahun 2024 berada di kelompok menengah–tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Angka 11,05 persen tersebut lebih tinggi dibandingkan Mukomuko (5,56 persen), Kota Bengkulu (6,43 persen), Bengkulu Tengah (9,48 persen), dan Bengkulu Selatan (9,42 persen). Namun demikian, angka Seluma masih lebih rendah dibandingkan Kaur (12,36 persen), Lebong (12,38 persen), dan Kepahiang yang menempati posisi tertinggi dengan 13,70 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun bukan yang terburuk, Kabupaten Seluma menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan yang harus direspons melalui kebijakan yang terarah dan berbasis data. Pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi lintas sektor, khususnya dalam penguatan sistem distribusi pangan, dukungan terhadap petani kecil dan rumah tangga miskin, serta integrasi program perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi lokal yang mendukung akses pangan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.



3. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Akses terhadap sumber air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, ketersediaan air minum yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi bagian krusial dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, sekaligus mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Bagi Kabupaten Seluma, pemenuhan akses air minum layak tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga, yang selanjutnya sangat relevan untuk dimasukkan dalam arah kebijakan dan sasaran strategis RPJMD 2025–2029.

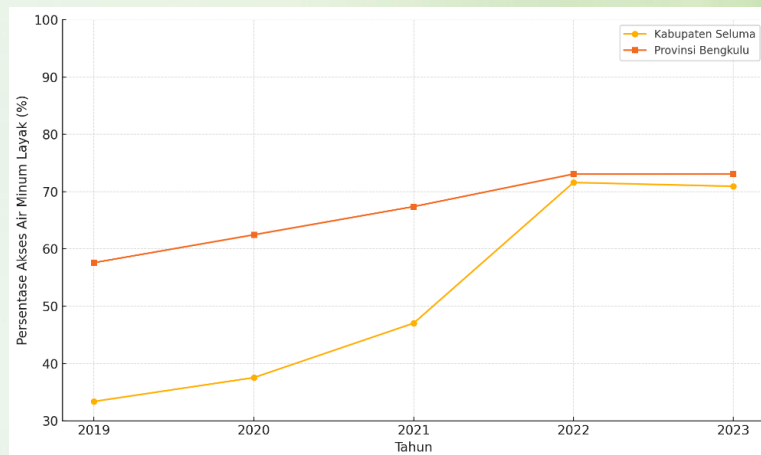
Tabel II-4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	65,85	45,78	58,22	65	62,72
Rejang Lebong	56,63	45,24	65,07	57,25	56,37
Bengkulu Utara	41,21	56,24	53,11	82,64	84,11
Kaur	66,42	79,4	86,2	83,94	84,18
Seluma	33,38	37,54	47,04	71,59	70,93
Mukomuko	53,32	79,41	75,99	75,73	75,45
Lebong	65,81	61,16	57,37	54,85	59,7
Kepahiang	46,19	63,82	62,65	61,81	62,14
Bengkulu Tengah	44,82	49,32	63,06	51,89	50,44
Kota Bengkulu	85,16	88,77	92,21	94,51	93,38
Bengkulu	57,6	62,47	67,39	73,07	73,08

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2023, Kabupaten Seluma menunjukkan peningkatan signifikan, dari hanya 33,38 persen pada tahun 2019 menjadi 70,93 persen pada tahun 2023. Lonjakan paling tajam terjadi antara tahun 2021 dan 2022, yakni dari 47,04 persen



menjadi 71,59 persen, yang menunjukkan adanya intervensi program yang cukup berhasil dalam perluasan akses air minum layak.



Gambar II-2. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak antara Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2023

Meski peningkatan tersebut cukup menggembirakan, persentase akses air minum layak di Kabupaten Seluma pada 2023 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu, yang tercatat sebesar 73,08 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Seluma masih tertinggal dari Kabupaten Kaur (84,18%), Bengkulu Utara (84,11%), Mukomuko (75,45%), dan jauh di bawah Kota Bengkulu yang hampir mencapai cakupan penuh sebesar 93,38 persen.

Namun, capaian Seluma jauh lebih baik dibanding beberapa daerah lain seperti Bengkulu Tengah (50,44%), Rejang Lebong (56,37%), dan Lebong (59,70%), yang mengalami stagnasi bahkan penurunan pada beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan yang progresif, diperlukan upaya konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai standar akses air minum layak yang merata, aman, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan pedesaan.



4. Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN

Ketersediaan akses listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pembangunan infrastruktur dasar dan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap penerangan listrik tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keamanan rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat. Di Kabupaten Seluma, peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan, terpencil, dan sulit dijangkau. Meskipun secara umum cakupan layanan listrik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, masih terdapat tantangan dalam memastikan keterjangkauan, keandalan, dan kesinambungan layanan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperluas akses listrik PLN secara merata guna mendukung transformasi sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Seluma.

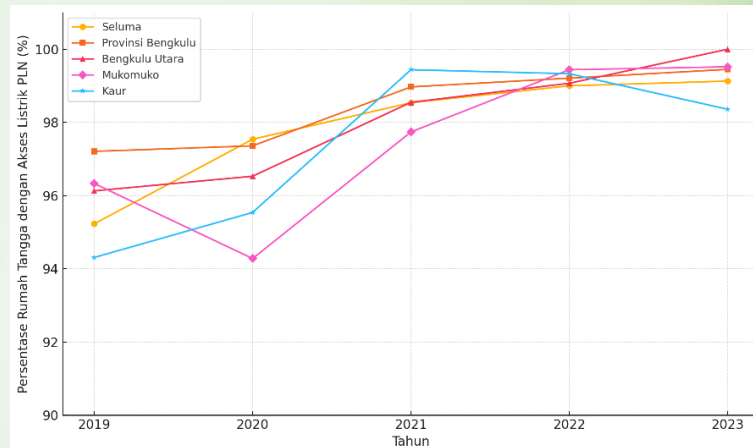
Tabel II-5. Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Bengkulu	97,21	97,36	98,97	99,21	99,45
Bengkulu Selatan	99,62	96,25	99,87	99,84	99,35
Rejang Lebong	97,72	97,08	99,05	98,26	99,01
Bengkulu Utara	96,13	96,53	98,55	99,07	100
Kaur	94,31	95,54	99,44	99,33	98,36
Seluma	95,23	97,54	98,54	99	99,13
Mukomuko	96,33	94,28	97,74	99,44	99,52
Lebong	97,06	99,01	99,42	99,44	99,96
Kepahiang	97,19	95,76	97,47	98,35	98,82
Bengkulu Tengah	96,32	99,37	99,01	99,72	99,49
Kota Bengkulu	99,38	100	99,95	99,84	99,95

Cakupan akses listrik di Kabupaten Seluma menunjukkan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir, naik dari 95,23 persen pada 2019 menjadi 99,13 persen pada 2023. Peningkatan ini menempatkan



Seluma di level yang hampir setara dengan rata-rata Provinsi Bengkulu (99,45 persen), dan mencerminkan keberhasilan dalam pemerataan pelayanan dasar energi.



Gambar II-3. Grafik Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik PLN di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, serta Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Kaur Selama Tahun 2019–2023.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Seluma terbilang baik. Daerah seperti Bengkulu Utara telah mencapai cakupan penuh (100 persen), sementara Mukomuko dan Kaur mencatat angka di atas 98 persen. Di sisi lain, tren Seluma tergolong stabil dan terus membaik tanpa fluktuasi berarti, tidak seperti Mukomuko yang sempat turun pada 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa program elektrifikasi di Seluma berjalan cukup efektif dan merata. Ke depan, tantangan yang perlu dihadapi adalah menjaga keandalan pasokan, memperluas jaringan ke wilayah terpencil, dan mengoptimalkan pemanfaatan energi untuk mendorong produktivitas masyarakat.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Ekosistem yang sehat dan berfungsi optimal tidak hanya menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Seluma, kualitas



lingkungan hidup menjadi isu strategis, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan juga menjadi bagian integral dalam mewujudkan visi pembangunan Seluma yang berkelanjutan.

Dengan karakter wilayah yang mencakup pesisir, perbukitan, dan kawasan hutan, serta adanya tekanan akibat alih fungsi lahan, pertambangan, dan permukiman, Kabupaten Seluma menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan yang partisipatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari amanat ini adalah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan fungsi ekologis dan keadilan antargenerasi. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar pembangunan daerah sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan mampu merespons tantangan lingkungan global, seperti perubahan iklim dan penurunan keanekaragaman hayati.

Pemerintah Kabupaten Seluma berkomitmen untuk mengimplementasikan amanat tersebut melalui berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan karakter wilayahnya. Langkah yang telah dilakukan meliputi pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, perlindungan kawasan pesisir dan hutan lindung, serta pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi



menimbulkan degradasi lingkungan. Sebagai alat ukur keberhasilan, digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk menilai kondisi lingkungan secara berkala. IKLH menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan tujuan keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Seluma.

Tabel II-6. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)			Indeks Kualitas Udara (IKU)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	55,00	45,00	45,00	92,62	92,39	93,04
Rejang Lebong	58,33	63,33	61,67	86,56	88,41	89,58
Bengkulu Utara	50,00	50,00	30,00	87,47	89,35	91,46
Kaur	N/A	36,67	N/A	95,09	95,08	94,39
Seluma	45,00	30,00	60,00	93,04	92,98	94,48
Mukomuko	N/A	40,00	48,46	90,79	90,60	91,82
Lebong	50,00	48,57	52,00	95,32	96,67	96,21
Kepahiang	48,33	43,53	51,11	91,39	91,62	93,96
Bengkulu Tengah	44,29	40,40	54,17	87,68	86,94	89,28
Kota Bengkulu	44,12	45,00	37,78	88,70	88,10	90,65
Provinsi Bengkulu	49,81	46,18	48,98	90,81	91,27	92,49

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan komponennya di Provinsi Bengkulu tahun 2021–2023, Kabupaten Seluma menunjukkan perbaikan signifikan terutama dalam aspek Indeks Kualitas Air (IKA) yang meningkat tajam dari 30,00 di tahun 2022 menjadi 60,00 pada 2023, bahkan melampaui rata-rata provinsi yang hanya 48,98. Sementara Indeks Kualitas Udara (IKU) Seluma juga terus membaik dan berada di atas rata-rata provinsi selama tiga tahun terakhir, mencapai 94,48 pada tahun 2023. Ini menunjukkan kualitas udara yang relatif baik dan stabil dibanding beberapa kabupaten lain seperti Rejang Lebong dan Bengkulu Tengah.

Tabel II-7. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	46,77	46,83	47,61	68,43 (Sedang)	64,59 (Sedang)	65,03 (Sedang)
Rejang Lebong	43,41	43,41	45,94	66,50 (Sedang)	70,12 (Sedang)	69,53 (Sedang)
Bengkulu Utara	57,21	57,21	56,93	66,75 (Sedang)	68,51 (Sedang)	60,79 (Sedang)
Kaur	66,36	66,36	66,42	53,04 (Sedang)	67,83 (Sedang)	52,77 (Sedang)



Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Seluma	45,90	45,90	45,94	64,65 (Sedang)	59,99 (Sedang)	70,89 (Baik)
Mukomuko	64,48	64,56	64,09	50,89 (Sedang)	66,87 (Sedang)	69,44 (Sedang)
Lebong	77,44	76,03	77,55	74,36 (Baik)	75,06 (Baik)	75,50 (Baik)
Kepahiang	29,19	29,19	29,51	61,58 (Sedang)	60,86 (Sedang)	63,73 (Sedang)
Bengkulu Tengah	25,62	25,62	26,59	57,77 (Sedang)	57,01 (Sedang)	62,35 (Sedang)
Kota Bengkulu	25,22	25,22	27,93	58,04 (Sedang)	58,12 (Sedang)	57,04 (Sedang)
Provinsi Bengkulu	55,52	55,19	55,80	71,46 (Baik)	70,82 (Baik)	72,10 (Baik)

Untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL), capaian Seluma cenderung stagnan di angka 45,94 pada 2023, masih di bawah rata-rata provinsi (55,80), menunjukkan bahwa pengelolaan dan perlindungan lahan perlu menjadi perhatian lebih. Namun demikian, peningkatan yang paling mencolok terlihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan, di mana Seluma berhasil naik dari 59,99 (kategori sedang) pada 2022 menjadi 70,89 (kategori baik) pada tahun 2023. Ini menempatkan Seluma sebagai satu dari sedikit kabupaten yang berhasil masuk kategori “baik,” sejajar dengan Kabupaten Lebong dan mendekati capaian provinsi (72,10).

Secara keseluruhan, Kabupaten Seluma menunjukkan kemajuan penting dalam kualitas lingkungan, terutama pada aspek air dan udara, meskipun pengelolaan lahan masih menjadi tantangan. Tren positif ini menunjukkan efektivitas kebijakan lingkungan yang dijalankan, dan perlu terus diperkuat agar keberlanjutan pembangunan daerah dapat tercapai dengan tetap menjaga daya dukung ekologis.





Gambar II-4. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu (2021–2023)

2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga tsunami. IRB dibentuk dari tiga komponen utama: bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Bahaya menggambarkan potensi kejadian bencana di suatu wilayah, kerentanan mencerminkan dampak yang mungkin timbul terhadap masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur, sedangkan kapasitas menunjukkan kemampuan daerah dalam mengantisipasi dan merespons bencana. Indeks ini sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis risiko, agar kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhitungkan ketahanan wilayah terhadap bencana.

Kabupaten Seluma yang memiliki bentang alam beragam—dari pesisir hingga wilayah berbukit dan hutan lindung—menyimpan potensi risiko



bencana yang tinggi, terutama banjir, longsor, gempa bumi, dan abrasi pantai. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma 2025–2029, IRB menjadi salah satu dasar untuk menetapkan arah pembangunan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana. Pemerintah daerah perlu mendorong penataan ruang berbasis risiko, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan menjadikan IRB sebagai acuan utama dalam kebijakan pengurangan risiko bencana, Kabupaten Seluma dapat lebih siap menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan tekanan terhadap lingkungan.

Tabel II-8. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Utara	205,60	205,60	186,25	189,19	189,19	186,92
Kaur	203,20	203,20	196,86	182,55	192,16	192,16
Seluma	191,20	191,20	165,74	172,23	163,04	165,81
Bengkulu Selatan	186,40	186,40	186,40	186,40	165,18	149,8
Bengkulu Tengah	173,20	173,20	167,80	167,80	163,99	152,34
Muko Muko	166,02	166,02	172,29	172,29	164,32	164,32
Kota Bengkulu	137,68	137,68	147,50	143,88	143,88	128,25
Kepahiang	138,00	138,00	138,00	117,49	101,31	112,35
Rejang Lebong	100,71	100,71	92,58	108,60	97,92	99,33
Lebong	118,00	118,00	118,00	113,09	106,49	89,52

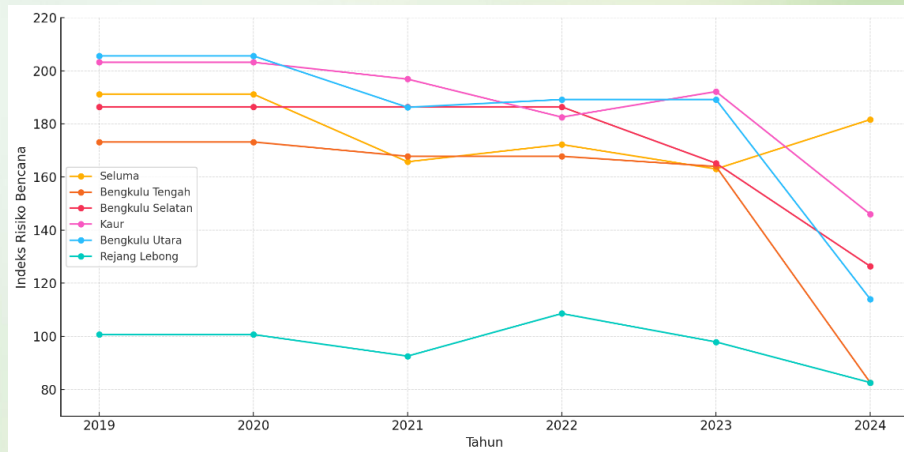
Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2023

Kabupaten Seluma menunjukkan dinamika tingkat risiko bencana yang cukup fluktuatif dalam enam tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan dari 191,20 pada 2019 menjadi 163,04 pada 2023, angka tersebut kembali naik ke 181,62 pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya pengurangan risiko, tekanan lingkungan dan potensi bahaya masih tinggi di wilayah ini. Kondisi geografis yang mencakup wilayah pesisir, perbukitan, serta kawasan rawan longsor turut memperkuat potensi bencana, terutama banjir dan gempa bumi.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain, Seluma masih berada dalam kelompok risiko menengah–tinggi bersama Bengkulu Utara dan Kaur. Sebaliknya, kabupaten seperti Rejang Lebong dan Bengkulu Tengah berhasil menurunkan indeks risikonya secara signifikan, bahkan mencapai



nilai terendah di 82,63 pada 2024. Situasi ini memperlihatkan pentingnya konsistensi dan efektivitas strategi mitigasi risiko bencana. Tanpa perencanaan berbasis risiko yang kuat—melalui tata ruang, infrastruktur tahan bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat—kenaikan IRB dapat terus berulang dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Gambar II-5. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lain di Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

F. Demografi

Karakteristik demografi Kabupaten Seluma mencerminkan dinamika penduduk yang berpengaruh langsung terhadap arah dan keberhasilan pembangunan daerah. Aspek-aspek seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, distribusi usia, tingkat kelahiran dan kematian, pola migrasi, serta kondisi sosial ekonomi menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik, perencanaan ruang, dan pengembangan infrastruktur. Informasi demografi ini diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, isu-isu demografi menjadi salah satu pertimbangan utama. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat perlu diimbangi dengan perluasan dan peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan permukiman. Sementara itu, dominasi kelompok usia produktif menciptakan



peluang strategis untuk meraih bonus demografi, yang dapat dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan informasi demografi secara optimal, kebijakan pembangunan Seluma dapat diarahkan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk mencerminkan besarnya populasi yang mendiami Kabupaten Seluma dalam kurun waktu tertentu dan menjadi indikator fundamental dalam analisis demografi. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan arus migrasi, serta berdampak langsung pada perencanaan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur, dan energi. Selain itu, informasi ini juga menentukan besaran potensi tenaga kerja, skala permintaan konsumsi, dan tekanan terhadap lingkungan serta layanan publik. Oleh karena itu, pemetaan jumlah penduduk yang akurat menjadi fondasi penting dalam merancang arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, data jumlah penduduk digunakan untuk menyusun prioritas pembangunan yang adaptif terhadap dinamika demografi. Jika kelompok usia produktif mendominasi, maka kebijakan difokuskan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan penciptaan peluang ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia, maka perhatian diarahkan pada penguatan layanan sosial dan kesehatan lansia. Selain sebagai basis perencanaan sektoral, jumlah penduduk juga menjadi salah satu variabel kunci dalam menentukan alokasi anggaran pembangunan, sehingga penting untuk dikelola dengan pendekatan berbasis data dan proyeksi jangka menengah yang akurat.



**Tabel II-9. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
2020-2024**

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	2.005.045	2.032.384	2.059.373	2.086.006	2.112.235
Bengkulu Selatan	165.725	167.685	169.591	171.463	173.315
Rejang Lebong	276.005	279.280	282.519	285.710	288.832
Bengkulu Utara	295.825	299.479	303.111	306.659	310.125
Kaur	126.125	127.816	129.449	131.063	132.659
Seluma	207.314	209.961	212.544	215.063	217.507
Mukomuko	189.833	192.863	195.854	198.794	201.700
Lebong	105.947	107.447	108.902	110.347	111.750
Kepahiang	149.298	151.130	152.912	154.651	156.353
Bengkulu Tengah	116.344	117.986	119.571	121.139	122.673
Kota Bengkulu	372.629	378.737	384.920	391.117	397.321

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Dalam periode 2020 hingga 2024, jumlah penduduk Kabupaten Seluma mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, dari 207.314 jiwa pada tahun 2020 menjadi 217.507 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan rata-rata pertambahan sekitar 2.500 jiwa per tahun, menempatkan Seluma sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Provinsi Bengkulu setelah Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di Kabupaten Kaur dan Lebong, namun masih lebih lambat dibanding Kabupaten Rejang Lebong yang mencatat kenaikan sekitar 12.800 jiwa selama lima tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan total penduduk Provinsi Bengkulu yang bertambah dari 2.005.045 jiwa pada 2020 menjadi 2.112.235 jiwa pada 2024, kontribusi penduduk Seluma terhadap populasi provinsi berkisar di angka 10,3%, menunjukkan posisi strategis kabupaten ini dalam peta demografi regional. Sementara itu, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Lebong mencatat jumlah penduduk yang lebih kecil dan pertumbuhan yang relatif lebih lambat, memperlihatkan bahwa Seluma memiliki potensi yang lebih besar dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan perluasan layanan dasar. Dengan tren pertumbuhan ini, pemerintah Kabupaten Seluma perlu



mengantisipasi peningkatan kebutuhan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur dasar lainnya, agar pembangunan berjalan selaras dengan dinamika populasi.

Gambar II-6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seluma Tahun 2019-2025

Kecamatan	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Semidang Alas Maras	24.164	25.066	25.394	25.797	25.965	26.271	26.566
Semidang Alas	14.768	15.688	15.827	16.012	16.049	16.170	16.284
Talo	11.409	12.224	12.332	12.476	12.505	12.599	12.688
Ilir Talo	13.314	15.818	16.024	16.277	16.383	16.574	16.760
Talo Kecil	10.950	10.838	10.949	11.092	11.133	11.232	11.326
Ulu Talo	5.235	6.049	6.153	6.276	6.342	6.442	6.541
Seluma	10.473	10.111	10.249	10.417	10.491	10.620	10.745
Seluma Selatan	11.518	13.713	13.990	14.311	14.506	14.779	15.050
Seluma Barat	8.277	9.846	10.020	10.225	10.338	10.507	10.674
Seluma Timur	9.444	10.933	11.097	11.294	11.388	11.543	11.695
Seluma Utara	8.438	9.320	9.442	9.591	9.654	9.767	9.877
Sukaraja	35.483	32.981	33.145	33.401	33.349	33.473	33.578
Air Periukan	19.204	23.500	23.926	24.427	24.709	25.123	25.533
Lubuk Sandi	11.125	11.790	11.957	12.159	12.251	12.407	12.560
KABUPATEN SELUMA	193.802	207.877	210.505	213.755	215.063	217.507	219.877

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, 2025

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2025, jumlah penduduk Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 193.802 jiwa pada tahun 2019 menjadi 219.877 jiwa pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan demografis yang cukup stabil, dengan rata-rata pertambahan lebih dari 4.000 jiwa per tahun. Kecenderungan ini perlu direspons dengan kebijakan pembangunan yang adaptif, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur.

Secara spasial, Kecamatan Sukaraja merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar sepanjang periode tersebut, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan dari 35.483 jiwa (2019) menjadi 32.981 jiwa (2020) sebelum kembali naik perlahan. Disusul oleh Kecamatan Semidang Alas Maras dan Air Periukan yang menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, terutama Air Periukan yang meningkat lebih dari 5.900 jiwa dalam



enam tahun. Di sisi lain, kecamatan-kecamatan seperti Ulu Talo dan Seluma Utara mencatat jumlah penduduk yang relatif kecil, meskipun tetap mengalami pertumbuhan.

Kenaikan penduduk yang relatif merata antar kecamatan menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas antarwilayah. Kecamatan dengan pertumbuhan cepat memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan fasilitas publik, sementara kecamatan dengan jumlah penduduk kecil dapat diarahkan sebagai wilayah konservasi atau pengembangan berbasis potensi lokal. Dengan memanfaatkan data demografi ini secara strategis, Kabupaten Seluma dapat mengarahkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel II-10. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Seluma 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
0–4	17.480	17.495	17.565	18.845	19.225
5–9	17.574	17.591	17.660	17.255	17.190
10–14	17.455	17.459	17.523	17.283	17.309
15-19	18.417	18.367	18.393	17.921	17.673
20-24	17.703	17.653	17.627	17.840	17.957
25-29	17.309	17.395	17.534	17.049	16.958
30-34	16.895	17.016	17.157	16.885	16.899
35-39	16.860	17.069	17.341	16.744	16.683
40-44	15.709	15.915	16.145	16.450	16.610
45-49	13.773	14.118	14.491	14.976	15.348
50-54	11.644	12.012	12.422	12.655	13.032
55-59	9.170	9.508	9.868	10.355	10.738
60-64	7.020	7.334	7.688	7.946	8.276
65-69	4.827	5.100	5.373	5.734	6.058
70-75	3.175	3.450	3.760	3.643	3.847
75+	2.866	3.023	3.208	3.482	3.704
Jumlah	207.877	210.505	213.755	215.063	217.507

Data jumlah penduduk Kabupaten Seluma menurut kelompok umur tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan struktur demografi yang relatif stabil dengan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun). Pada tahun 2024, mayoritas penduduk Seluma berada dalam kelompok usia kerja, terutama



pada rentang umur 20–44 tahun, yang secara konsisten mencatat jumlah tinggi sepanjang periode lima tahun tersebut. Kondisi ini menjadi indikator potensialnya bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja.

Di sisi lain, tren pertumbuhan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) juga menunjukkan peningkatan, dari 10.868 jiwa pada tahun 2020 menjadi 13.609 jiwa pada tahun 2024. Lonjakan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat layanan sosial dan kesehatan yang ramah lansia. Sementara itu, jumlah penduduk anak usia dini (0–4 tahun) juga mengalami peningkatan dari 17.480 jiwa pada 2020 menjadi 19.225 jiwa pada 2024, menandakan pentingnya penguatan kebijakan gizi, pendidikan anak usia dini, dan layanan kesehatan ibu-anak. Secara keseluruhan, dinamika struktur umur ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Seluma berada dalam fase transisi demografi yang kompleks—di mana peluang ekonomi dan tantangan pelayanan publik harus diantisipasi dengan kebijakan pembangunan yang adaptif, responsif, dan berbasis data.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menjadi indikator penting dalam memahami dinamika demografi Kabupaten Seluma. Perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk, berdampak langsung pada kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan yang stabil berpotensi mendukung penguatan basis ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi, produktivitas tenaga kerja, dan perluasan pasar sektor-sektor strategis seperti pertanian dan jasa.

Namun demikian, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur, lapangan kerja, dan ketahanan



lingkungan, maka tekanan terhadap pelayanan publik akan meningkat dan berisiko memperburuk ketimpangan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, analisis terhadap laju pertumbuhan penduduk menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan—guna memastikan bahwa dinamika demografi dapat menjadi peluang, bukan tantangan.

Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Seluma dalam periode 2021 hingga 2024 berada dalam kategori tinggi dan relatif stabil, berkisar antara 1,54% hingga 1,69%. Angka ini menunjukkan dinamika demografis yang lebih cepat dibandingkan sejumlah daerah lain di Provinsi Bengkulu, bahkan secara konsisten berada di atas rata-rata pertumbuhan provinsi yang menurun dari 1,48% pada 2021 menjadi 1,12% pada 2024. Jika dikelola secara strategis, pertumbuhan ini memberikan peluang besar bagi penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kontribusi produktivitas wilayah.

Tabel II-11. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024

Wilayah	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	1,48	1,4	1,13	1,12
Bengkulu Selatan	1,4	1,31	1,18	1,16
Rejang Lebong	1,04	0,95	1,23	1,2
Bengkulu Utara	1,29	1,21	1,28	1,26
Kaur	1,48	1,4	1,24	1,21
Seluma	1,69	1,61	1,56	1,54
Mukomuko	1,89	1,81	1,37	1,34
Lebong	0,6	0,51	1,18	1,16
Kepahiang	1,7	1,62	1,36	1,34
Bengkulu Tengah	1,6	1,51	1,68	1,66
Kota Bengkulu	1,79	1,71	1,35	1,32

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Dibandingkan dengan kabupaten lain, Seluma berada pada posisi menengah–atas bersama daerah seperti Kepahiang dan Bengkulu Tengah, namun lebih stabil dibandingkan Mukomuko dan Kota Bengkulu yang mencatat penurunan laju pertumbuhan yang lebih tajam. Sementara itu, wilayah seperti Lebong dan Rejang Lebong memperlihatkan pertumbuhan yang jauh lebih lambat. Dalam konteks ini, Seluma perlu mengantisipasi



tekanan terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur publik agar pertumbuhan demografis yang berlangsung tidak menimbulkan ketimpangan, melainkan menjadi kekuatan pendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Rasio Penduduk

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Seluma memberikan gambaran penting mengenai keseimbangan struktur demografi dan distribusi potensi tenaga kerja. Rasio jenis kelamin yang condong ke salah satu sisi dapat berpengaruh pada dinamika sosial dan kebutuhan layanan publik, terutama di sektor-sektor tertentu seperti pertanian, perikanan, pendidikan, atau kesehatan. Perbedaan ini umumnya dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, migrasi, serta peran sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, rasio jenis kelamin menjadi pertimbangan penting untuk memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok laki-laki dan perempuan secara proporsional. Ketika perempuan mendominasi, program penguatan peran perempuan, akses terhadap layanan kesehatan ibu-anak, serta pelatihan keterampilan berbasis gender perlu diperkuat. Sebaliknya, jika laki-laki lebih banyak, maka strategi pengembangan sektor ekonomi yang padat karya, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja laki-laki harus menjadi perhatian. Dengan menyusun kebijakan yang mempertimbangkan dimensi gender secara seimbang, pembangunan di Kabupaten Seluma dapat berlangsung lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Tabel II-12. Rasio Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	104,9	104,72	104,6	104,51	104,38
Bengkulu Selatan	104,1	103,95	103,83	103,72	103,6
Rejang Lebong	104,5	104,34	104,21	104,02	103,86
Bengkulu Utara	105	104,87	104,74	104,52	104,36
Kaur	106,4	106,27	106,14	105,83	105,64
Seluma	106,5	106,38	106,25	106,24	106,15
Mukomuko	107	106,89	106,76	106,61	106,47



Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Lebong	104,8	104,68	104,55	104,58	104,48
Kepahiang	106,6	106,46	106,33	106	105,78
Bengkulu Tengah	105,6	105,44	105,31	105,11	104,96
Kota Bengkulu	102	101,86	101,74	101,99	101,97

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Seluma menunjukkan kecenderungan yang stabil dengan angka yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Rasio ini turun tipis dari 106,5 pada tahun 2020 menjadi 106,15 pada tahun 2024, yang berarti terdapat sekitar 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Nilai ini menempatkan Seluma sebagai salah satu daerah dengan rasio jenis kelamin tertinggi di provinsi, sedikit di bawah Mukomuko dan Kepahiang.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang berada di kisaran 104, Seluma secara konsisten memiliki kelebihan jumlah penduduk laki-laki yang cukup signifikan. Kota Bengkulu mencatat rasio paling seimbang dengan angka di sekitar 102, sementara daerah seperti Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong menunjukkan rasio yang semakin mendekati keseimbangan dari tahun ke tahun.

Tingginya rasio penduduk laki-laki di Seluma dapat berkorelasi dengan dominasi sektor-sektor pekerjaan tertentu seperti pertanian, perkebunan, atau perikanan yang secara tradisional lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Dalam konteks perencanaan pembangunan, kondisi ini perlu dicermati agar kebijakan ketenagakerjaan, layanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat tetap memperhatikan keseimbangan gender serta kesetaraan akses terhadap peluang pembangunan.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Seluma memberikan gambaran penting mengenai pola persebaran populasi dan keterkaitannya dengan akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, serta dinamika sosial ekonomi di masing-masing wilayah. Kecamatan-kecamatan seperti Sukaraja, Air



Periukan, dan Seluma sebagai pusat pemerintahan cenderung memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedalaman seperti Ulu Talo atau Semidang Alas. Distribusi ini berpengaruh langsung terhadap perencanaan fasilitas publik, penyediaan pelayanan dasar, dan arah pembangunan wilayah.

Ketimpangan kepadatan antarwilayah perlu direspons secara proporsional dalam RPJMD Kabupaten Seluma 2025–2029. Wilayah yang padat penduduk memerlukan strategi tata ruang yang terintegrasi dengan penguatan infrastruktur dan pengendalian tekanan lingkungan. Di sisi lain, kecamatan dengan kepadatan rendah harus difasilitasi melalui pembangunan konektivitas, akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar tidak tertinggal. Dengan merujuk pada indikator kepadatan, pembangunan di Kabupaten Seluma dapat dirancang lebih merata dan menjangkau seluruh masyarakat di berbagai kondisi geografis.

Tabel II-13. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	99,88	102,6	102,34	103,63	104,93
Bengkulu Selatan	136,25	141,63	139,4	140,52	142,04
Rejang Lebong	178,6	170	181,59	184,45	186,46
Bengkulu Utara	66,16	69,23	67,57	68,42	69,19
Kaur	48,51	54,01	49,7	50,24	50,85
Seluma	85,45	87,69	87,86	88,4	89,41
Mukomuko	46,03	47,86	47,5	48,03	48,74
Lebong	63,78	55,56	64,35	66,21	67,05
Kepahiang	199,81	228,03	205,49	206,37	208,64
Bengkulu Tengah	95,71	95,71	97,89	98,97	100,34
Kota Bengkulu	2.485,47	2.495,74	2.560,32	2.602,07	2.643,34

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Data kepadatan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma memiliki tingkat kepadatan penduduk yang berada pada kategori menengah, yaitu meningkat dari 85,45 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 89,41 jiwa/km² pada tahun 2024. Angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai



104,93 jiwa/km² di tahun 2024, dan jauh di bawah Kota Bengkulu yang sangat tinggi, yakni 2.643,34 jiwa/km².

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Seluma memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibanding Mukomuko, Kaur, dan Bengkulu Utara—yang umumnya memiliki karakteristik wilayah yang lebih luas dan menyebar—namun masih lebih rendah dibanding Kepahiang, Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan yang memiliki pusat-pusat permukiman dan aktivitas ekonomi yang lebih padat. Dibanding Bengkulu Tengah, Seluma sedikit tertinggal dalam hal kepadatan, meskipun laju pertumbuhannya relatif stabil.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Seluma masih memiliki potensi ruang wilayah yang luas untuk dikembangkan, terutama di sektor pemukiman, pertanian terpadu, dan pengembangan kawasan baru. Namun demikian, perlu strategi yang tepat untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk dan penyebarannya sejalan dengan penguatan infrastruktur, akses layanan dasar, dan pelestarian lingkungan, agar kepadatan tidak terkonsentrasi hanya di wilayah-wilayah tertentu dan dapat mendukung pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.

5. Proyeksi jumlah penduduk

Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020–2050 yang dirilis pada 2023 oleh Pemerintah Pusat melalui kolaborasi antara Bappenas, BPS, UNFPA, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan menjadi pijakan penting dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan wilayah. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, dengan pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan tren pertumbuhan dan dinamika demografi nasional serta regional.

Dengan menyesuaikan karakteristik pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu, telah dihasilkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Seluma untuk periode 2025–2030. Proyeksi ini menjadi referensi strategis dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, khususnya dalam perencanaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta untuk



merumuskan kebijakan sosial-ekonomi yang responsif terhadap potensi dan tantangan demografis di masa mendatang.

Tabel II-14. Proyeksi Penduduk Kabupaten Seluma Tahun 2025–2030

Kelompok Umur	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0–4	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5–9	19.225	19.421	19.389	19.347	19.293	19.233	19.165
10–14	17.190	17.201	17.411	17.612	17.808	17.996	18.181
15–19	17.309	17.349	17.386	17.419	17.448	17.471	17.482
20–24	17.673	17.696	17.724	17.759	17.798	17.838	17.879
25–29	17.957	17.893	17.857	17.842	17.847	17.864	17.887
30–34	16.958	16.963	16.928	16.861	16.779	16.701	16.642
35–39	16.899	16.951	17.017	17.091	17.158	17.200	17.206
40–44	16.683	16.819	16.918	16.986	17.032	17.078	17.131
45–49	16.610	16.793	16.987	17.190	17.402	17.590	17.712
50–54	15.348	15.621	15.858	16.061	16.242	16.416	16.598
55–59	13.032	13.390	13.738	14.075	14.396	14.690	14.954
60–64	10.738	11.084	11.438	11.796	12.155	12.511	12.858
65–69	8.276	8.616	8.946	9.265	9.581	9.899	10.222
70–74	6.058	6.348	6.656	6.979	7.306	7.630	7.953
75+	3.847	4.106	4.349	4.580	4.807	5.043	5.292
Total	3.704	3.984	4.301	4.652	5.028	5.422	5.827

Proyeksi penduduk Kabupaten Seluma tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, khususnya pada kelompok usia produktif dan lanjut usia. Total jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan potensi peningkatan kebutuhan layanan dasar, infrastruktur sosial, serta perlindungan kelompok rentan. Kelompok usia produktif (15–64 tahun) tetap menjadi mayoritas, yang merupakan modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ketenagakerjaan dan produktivitas.

Di sisi lain, kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) juga mengalami kenaikan signifikan, dari sekitar 27.154 jiwa pada tahun 2025 menjadi lebih dari 31.000 jiwa pada tahun 2030. Hal ini menuntut kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan kesehatan lansia, jaminan sosial, dan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap struktur penduduk menua. Sementara itu, kelompok usia muda (0–14 tahun) relatif stabil dan memberikan peluang untuk memperkuat sektor pendidikan dan perlindungan anak. Dengan dinamika ini, kebijakan pembangunan Kabupaten Seluma



perlu dirancang secara berimbang agar mampu mengoptimalkan bonus demografi sekaligus mengantisipasi perubahan struktur penduduk dalam jangka menengah.

Dari data pada tabel proyeksi demografi kabupaten Seluma tahun 2025–2030 berdasarkan indikator kependudukan strategis dapat disimpulkan bahwa:

a. Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)

Kepadatan penduduk Kabupaten Seluma dihitung berdasarkan total penduduk dibagi dengan luas wilayah sebesar ±2.479,36 km². Selama periode 2025–2030, terjadi peningkatan kepadatan dari 88,7 jiwa/km² pada 2025 menjadi 92,3 jiwa/km² pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan populasi yang stabil namun perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang dan pelayanan dasar agar tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

Tabel II-15. Proyeksi Demografi Kabupaten Seluma Tahun 2025–2030 Berdasarkan Indikator Kependudukan Strategis

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proyeksi Jumlah Penduduk	218.276	220.628	222.890	225.080	227.189	229.192
Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	88,04	88,99	89,9	90,78	91,63	92,44
Proyeksi Penduduk Usia Produktif (15-64)	160.559	161.851	163.080	164.257	165.359	166.349
Proyeksi Penduduk Usia Produktif (%)	73,56	73,36	73,17	72,98	72,78	72,58
Proyeksi Angka Ketergantungan (%)	35,95	36,32	36,68	37,03	37,39	37,78
Proyeksi Bonus Demografi (%)	73,56	73,36	73,17	72,98	72,78	72,58
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut (65+)	19.070	19.951	20.824	21.694	22.572	23.467

b. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif (15–64 Tahun)

Jumlah penduduk usia produktif diperkirakan meningkat dari 123.923 jiwa pada 2025 menjadi 127.342 jiwa pada 2030. Penduduk kelompok ini merupakan aset penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Seluma mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas pendidikan,



pelatihan kerja, dan perluasan lapangan pekerjaan agar potensi kelompok ini dapat dimaksimalkan.

c. Proyeksi Persentase Penduduk Usia Produktif (%)

Persentase usia produktif terhadap total penduduk Seluma menurun dari 56,37% pada 2025 menjadi 54,60% pada 2030. Ini menunjukkan perlambatan pertumbuhan kelompok usia kerja dibandingkan dengan kelompok tanggungan (anak-anak dan lansia). Penurunan ini menjadi peringatan awal untuk mengatur strategi pembangunan sosial-ekonomi yang adaptif, terutama pada sektor perlindungan sosial dan jaminan hari tua.

d. Proyeksi Jumlah Angka Ketergantungan

Jumlah penduduk tanggungan (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) meningkat dari 95.954 jiwa pada 2025 menjadi 105.785 jiwa pada 2030. Hal ini menunjukkan meningkatnya beban sosial terhadap penduduk usia kerja, yang jika tidak ditangani dapat menimbulkan tekanan pada sistem kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

e. Proyeksi Persentase Angka Ketergantungan (%)

Rasio ketergantungan di Kabupaten Seluma meningkat dari 77,42% menjadi 83,06% sepanjang 2025–2030. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lebih dari 77 hingga 83 penduduk tanggungan. Kenaikan ini mengindikasikan pentingnya memperkuat sistem pelayanan dasar dan jaring pengaman sosial untuk mendukung kelompok tanggungan secara berkelanjutan.

f. Proyeksi Bonus Demografi (%)

Bonus demografi Seluma mengalami tren penurunan dari 56,54% pada 2025 menjadi 54,63% pada 2030. Penurunan ini memperkecil peluang untuk memanfaatkan struktur penduduk produktif yang dominan. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak cepat dengan kebijakan yang mendukung penciptaan nilai tambah



ekonomi melalui produktivitas dan inovasi berbasis sumber daya manusia.

g. **Proyeksi Penduduk Usia Lanjut (65+ Tahun)**

Penduduk lanjut usia diproyeksikan meningkat dari 14.663 jiwa pada 2025 menjadi 17.289 jiwa pada 2030. Kenaikan ini menuntut kebijakan khusus dalam sektor kesehatan lansia, penyediaan layanan sosial yang inklusif, serta infrastruktur publik yang ramah usia. Proses penuaan penduduk ini menandai dimulainya transisi demografi yang perlu diantisipasi secara terintegrasi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator utama yang menggambarkan dinamika perkembangan ekonomi daerah berdasarkan perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Indikator ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkualitas menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Seluma, LPE memiliki signifikansi strategis sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan daerah selama periode RPJMD 2025–2029. Capaian LPE tidak hanya menunjukkan performa sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta perdagangan dan jasa, tetapi juga mencerminkan sejauh mana intervensi pemerintah daerah mampu mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Peningkatan LPE juga menjadi sinyal positif bagi perbaikan iklim investasi, pengembangan UMKM, dan peningkatan



infrastruktur wilayah. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis LPE secara periodik diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah agar tetap adaptif terhadap tantangan ekonomi yang dinamis.

Tabel II-16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2018-2024

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62
Bengkulu Selatan	4,95	4,97	0,26	3,25	3,45	3,18	4,37
Rejang Lebong	4,96	4,96	0,07	3,14	4,3	4,05	4,29
Bengkulu Utara	4,81	4,92	0,23	4,01	3,14	4,18	4,43
Kaur	4,98	4,98	0,12	3,08	3,78	3,4	4,15
Seluma	4,8	4,93	-0,01	2,18	2,92	2,61	4,06
Mukomuko	5,01	5,03	0,06	3,35	4,33	3,69	4,05
Lebong	5,01	4,97	0,1	3,08	2,98	2,84	4,3
Kepahiang	5	4,89	0,06	3,16	4,19	4,01	4,28
Bengkulu Tengah	4,97	4,97	-0,06	2,29	3,03	3,82	3,97
Kota Bengkulu	5,48	5,41	-0,25	3,47	5,69	5,53	5,39

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma dalam periode 2018 hingga 2024 menunjukkan pola yang cukup dinamis dengan tekanan yang nyata akibat pandemi. Pada 2018 dan 2019, ekonomi Seluma tumbuh stabil di kisaran 4,80% dan 4,93%. Namun, memasuki tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menurun drastis menjadi -0,01%, mencerminkan dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah. Pada tahun-tahun berikutnya, upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, meskipun pertumbuhan yang tercatat masih tergolong moderat. Tahun 2021 hanya mencapai 2,18%, diikuti dengan 2,92% pada 2022, dan kembali melambat ke angka 2,61% di tahun 2023.

Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,06%. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 4,62%, serta tertinggal dari kabupaten/kota lainnya seperti Kota Bengkulu (5,39%), Bengkulu Selatan (4,37%), dan Bengkulu Utara (4,43%). Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi di Kabupaten Seluma



berlangsung lebih lambat dibandingkan daerah lain, sehingga perlu ada intervensi yang lebih efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Perlambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah rendah, terbatasnya investasi swasta, serta belum optimalnya dukungan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah. Ke depan, strategi pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan, penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta perluasan akses pasar bagi UMKM. Dukungan terhadap inovasi daerah, reformasi regulasi investasi, dan pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal juga penting untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan kompetitif di Kabupaten Seluma.

2. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator penting yang mencerminkan persentase penduduk Kabupaten Seluma yang hidup di bawah garis kemiskinan, atau belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Tingginya angka ini menjadi cerminan masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang perlu ditangani, terutama terkait keterbatasan akses terhadap pekerjaan produktif, modal usaha, serta pelayanan publik yang merata dan berkualitas di berbagai wilayah kecamatan.

Dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan berbasis data. Strateginya mencakup penguatan pelayanan dasar, pengembangan potensi ekonomi desa, dukungan terhadap UMKM dan pertanian keluarga, serta perluasan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,



Kabupaten Seluma diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Tabel II-17. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

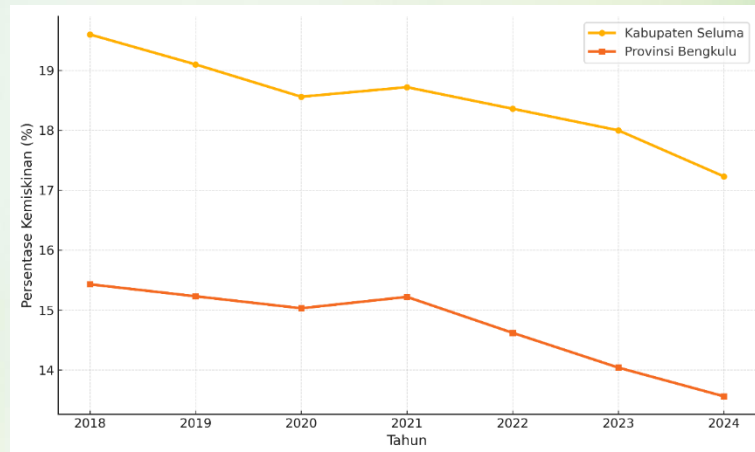
Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	13,56
Bengkulu Selatan	18,65	18,54	17,82	18,16	17,86	17,51	17,1
Rejang Lebong	16,23	15,95	15,85	15,85	15,65	14,79	14,65
Bengkulu Utara	11,81	11,65	11,67	11,61	11,48	11,29	10,96
Kaur	19,40	18,89	18,47	18,62	18,10	17,83	17,12
Seluma	19,60	19,10	18,56	18,72	18,36	18,00	17,23
Mukomuko	11,40	11,70	11,72	11,93	11,44	10,76	10,76
Lebong	11,59	11,77	11,85	12,00	12,03	11,15	10,45
Kepahiang	14,42	14,74	14,69	14,83	14,53	14,12	12,9
Bengkulu Tengah	8,20	8,80	9,30	9,68	9,76	9,40	10,14
Kota Bengkulu	18,82	18,09	17,65	17,89	15,73	14,71	13,76

Kemiskinan di Kabupaten Seluma menunjukkan penurunan bertahap, meskipun masih berada di atas rata-rata provinsi. Selama periode 2018–2024, persentase penduduk miskin menurun dari 19,60% menjadi 17,23%. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun lajunya masih lebih lambat dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Sebagai perbandingan, rata-rata provinsi turun dari 15,43% menjadi 13,56% pada periode yang sama, sedangkan beberapa kabupaten seperti Lebong dan Bengkulu Utara sudah mencatatkan angka kemiskinan di bawah 11%.

Seluma masih termasuk dalam kelompok daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi, bersama Kaur dan Bengkulu Selatan. Ketiganya memiliki karakteristik wilayah perdesaan yang luas, keterbatasan infrastruktur, dan distribusi ekonomi lokal yang belum merata. Sementara itu, kabupaten seperti Bengkulu Tengah dan Lebong berhasil menjaga angka kemiskinan lebih rendah berkat keunggulan dalam konektivitas wilayah, penguatan pertanian dan UMKM, serta integrasi program bantuan sosial yang lebih baik.



Penurunan kemiskinan di Seluma perlu terus didorong dengan pendekatan lintas sektor, terutama melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal. Strategi pembangunan yang berpihak pada kelompok rentan dan wilayah tertinggal akan menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan secara lebih merata dan berkelanjutan.



Gambar II-7. Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024

3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator penting yang menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk Kabupaten Seluma dalam satu tahun. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan. Nilai ini memberikan gambaran mengenai tingkat produktivitas ekonomi, daya beli masyarakat, serta potensi kesejahteraan yang tercermin dari aktivitas ekonomi di seluruh wilayah kabupaten. Peningkatan nilai PDRB per kapita umumnya mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, PDRB per kapita menjadi tolok ukur strategis untuk menilai efektivitas



kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Seluma mendorong peningkatan indikator ini melalui penguatan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian dan perkebunan berbasis potensi lokal, pengolahan hasil bumi, serta pengembangan pariwisata dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu, pemerataan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penguatan konektivitas antarwilayah juga menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Seluma.

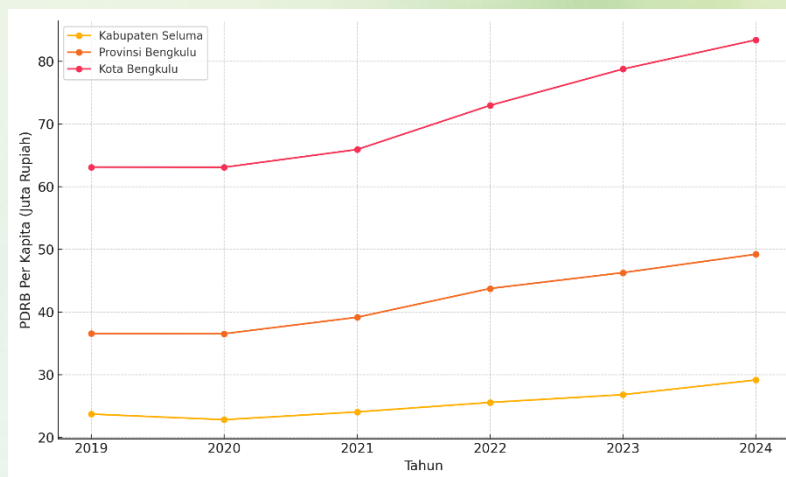
Tabel II-18. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah)

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	36,57	36,55	39,17	43,76	46,29	49,23
Bengkulu Selatan	34,05	35,09	36,95	39,58	42	45,38
Rejang Lebong	34,9	34,53	36,13	38,91	41,65	45,24
Bengkulu Utara	27,42	28,44	32,91	40,64	40,73	41,21
Kaur	29,05	28,62	30,52	32,65	34,7	37,42
Seluma	23,72	22,83	24,07	25,58	26,82	29,17
Mukomuko	27,81	27,75	29,52	31,74	34,2	37,51
Lebong	29,25	32,01	33,76	35,71	37,69	40,99
Kepahiang	31,13	29,54	31,42	33,75	36,31	40,07
Bengkulu Tengah	40,82	40,15	46,33	54,73	55,02	55,28
Kota Bengkulu	63,13	63,11	65,94	72,98	78,78	83,43

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2025

Selama periode 2019 hingga 2024, Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan PDRB per kapita yang cukup positif, dari Rp23,72 juta pada tahun 2019 menjadi Rp29,17 juta pada tahun 2024. Walaupun mengalami penurunan di tahun 2020 akibat dampak pandemi, Seluma berhasil memulihkan dan meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakatnya secara bertahap. Namun, nilai PDRB per kapita Seluma masih berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu, yang mencapai Rp49,23 juta pada tahun 2024. Gap ini mencerminkan perlunya strategi penguatan sektor ekonomi lokal dan peningkatan produktivitas untuk mengejar ketertinggalan.





Gambar II-8. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dan Kota Bengkulu Tahun 2019–2024 (Juta Rupiah)

Jika dibandingkan dengan Kota Bengkulu, ketimpangan semakin jelas terlihat. Kota Bengkulu memiliki nilai PDRB per kapita hampir tiga kali lipat dari Seluma, mencapai Rp83,43 juta pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan nilai tambah yang lebih besar di wilayah perkotaan. Bagi Kabupaten Seluma, data ini menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih fokus pada sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta peningkatan konektivitas antarwilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

termasuk dalam angkatan kerja namun belum memperoleh pekerjaan. Indikator ini mencerminkan kemampuan perekonomian daerah dalam menyediakan lapangan kerja serta memperlihatkan sejauh mana keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Fluktuasi TPT sangat dipengaruhi oleh dinamika sektor ekonomi lokal, kualitas pendidikan dan pelatihan, serta kapasitas daerah dalam menciptakan peluang kerja yang produktif dan berkelanjutan.

alam kerangka RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, penanganan isu pengangguran menjadi prioritas strategis untuk mendukung



penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri kecil menengah, dan jasa, yang memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja lokal. Di samping itu, peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasi dan sinergi antara lembaga pendidikan dan pelaku usaha akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Tabel II-19. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2017-2024

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	2,6	3,09	2,36	3,52	2,55	3,51	3,56	3,25
Rejang Lebong	3	1,69	2,84	3,7	2,45	2,28	2,94	2,43
Bengkulu Utara	3,89	2,72	4,14	3,82	3,51	4,16	3,33	2,89
Kaur	1,9	2,85	2,4	2,73	3,45	3,83	3,81	3,71
Seluma	3,22	2,95	2,23	3,04	3,44	1,74	2,68	2,38
Mukomuko	3,53	4,9	3,93	3,59	3,68	3,07	3,14	2,41
Lebong	3,57	6,34	4,01	3,92	3,18	3,16	2,72	2,55
Kepahiang	2,94	3,08	2,27	2,52	1,89	2,92	2,41	2,37
Bengkulu Tengah	2,72	3,48	4,63	4,45	4,07	2,48	3,20	2,56
Kota Bengkulu	6,61	5	4,29	6,82	6,35	6,15	5,04	5
Provinsi Bengkulu	3,74	3,51	3,39	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11

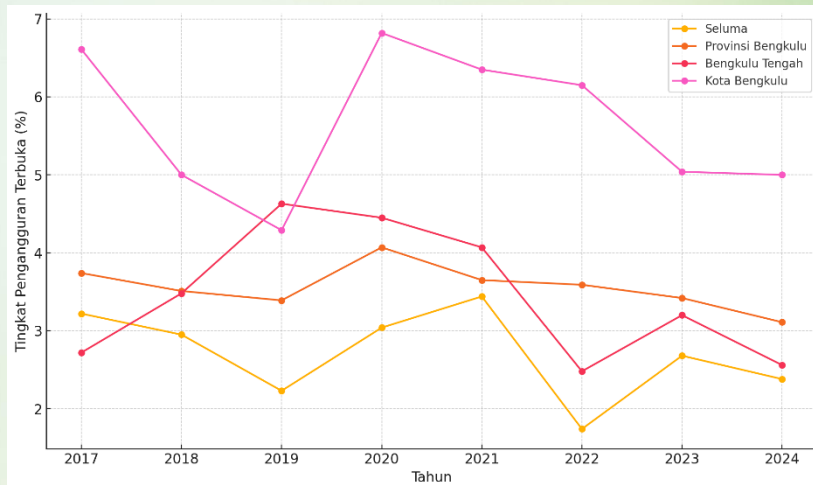
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Kabupaten Seluma menunjukkan fluktuasi angka pengangguran yang relatif moderat dibandingkan daerah lainnya. Setelah mencatat angka sebesar 3,22% pada tahun 2017, TPT Seluma sempat menurun menjadi 2,23% di 2019, kemudian naik kembali di 2021 (3,44%), dan akhirnya turun ke angka 2,38% pada tahun 2024. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu (3,11% pada 2024), Seluma mencatat angka yang lebih rendah, menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif lebih baik. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kabupaten Kepahiang (2,37%) dan Rejang Lebong (2,43%), posisi Seluma masih sedikit lebih tinggi.

Sementara itu, Kota Bengkulu secara konsisten mencatat angka TPT tertinggi sepanjang periode, meskipun berhasil ditekan dari 6,82% pada 2020 menjadi 5,00% pada 2024. Kabupaten Bengkulu Tengah yang sempat



mencatat angka tertinggi pada 2019 (4,63%) juga berhasil menurunkan TPT secara signifikan menjadi 2,56% pada 2024. Data ini menegaskan pentingnya penguatan sektor ketenagakerjaan dan pelatihan keterampilan yang relevan di Kabupaten Seluma untuk mempertahankan tren penurunan TPT dan meningkatkan kualitas pasar kerja daerah.



Gambar II-9. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seluma dengan Provinsi dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017–2024

5. Indeks Gini

Indeks Gini mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Seluma dan menjadi indikator penting dalam menilai keadilan sosial ekonomi di wilayah ini. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dalam konteks pembangunan daerah, nilai Indeks Gini membantu mengukur sejauh mana hasil pembangunan telah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Ketimpangan yang tinggi menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan sumber penghidupan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.

Dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, pengurangan ketimpangan pendapatan menjadi prioritas untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi



lokal, memperluas jangkauan perlindungan sosial, serta meningkatkan konektivitas dan kualitas layanan dasar. Dengan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan, Kabupaten Seluma diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok sosial.

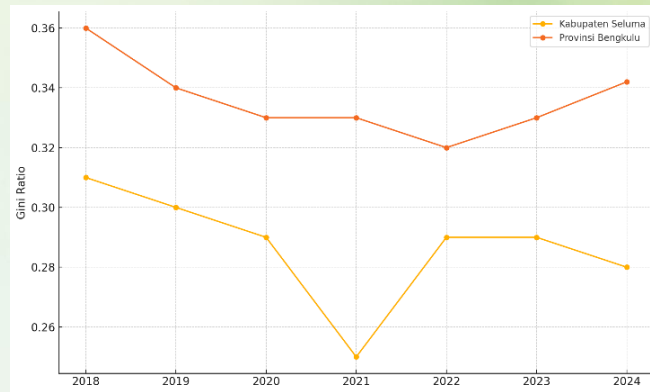
Tabel II-20. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,36	0,32	0,31	0,30	0,30	0,35	0,3
Rejang Lebong	0,33	0,30	0,29	0,35	0,30	0,30	0,28
Bengkulu Utara	0,35	0,30	0,28	0,31	0,28	0,30	0,28
Kaur	0,31	0,29	0,32	0,28	0,28	0,29	0,3
Seluma	0,31	0,30	0,29	0,25	0,29	0,29	0,28
Mukomuko	0,32	0,29	0,25	0,26	0,26	0,29	0,28
Lebong	0,29	0,31	0,28	0,27	0,27	0,29	0,29
Kepahiang	0,30	0,27	0,31	0,28	0,30	0,33	0,31
Bengkulu Tengah	0,29	0,26	0,26	0,25	0,24	0,27	0,27
Kota Bengkulu	0,39	0,36	0,37	0,38	0,37	0,38	0,44
Provinsi Bengkulu	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,342

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Tahun 2025

Selama periode 2018–2024, Kabupaten Seluma menunjukkan tren penurunan ketimpangan pendapatan yang cukup stabil, dengan Gini Ratio menurun dari 0,31 menjadi 0,28. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2024 mencapai 0,342. Capaian ini menandakan bahwa distribusi pendapatan di Seluma relatif lebih merata dibandingkan banyak wilayah lain di provinsi tersebut. Setelah sempat menyentuh angka 0,25 pada 2021, Gini Ratio Seluma memang mengalami sedikit kenaikan, namun tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah.





Gambar II-10. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Seluma berada dalam kelompok dengan tingkat ketimpangan yang terkendali. Kota Bengkulu, misalnya, mengalami tren peningkatan ketimpangan secara signifikan hingga mencapai 0,44 pada tahun 2024, tertinggi di provinsi ini. Sebaliknya, Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat angka yang lebih rendah dari Seluma, dengan nilai Gini Ratio yang stabil pada kisaran 0,25–0,27 selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan hasil pembangunan di Kabupaten Seluma telah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih diperlukan penguatan strategi untuk memperluas akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar di seluruh wilayah.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Seluma, mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, peningkatan IPM merupakan prioritas utama karena mencerminkan kemajuan kualitas hidup masyarakat. Kinerja IPM yang membaik menunjukkan perbaikan akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan yang lebih merata, serta peningkatan pendapatan rumah tangga yang mendukung kesejahteraan.



**Tabel II-21. Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil LF SP2020)
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024**

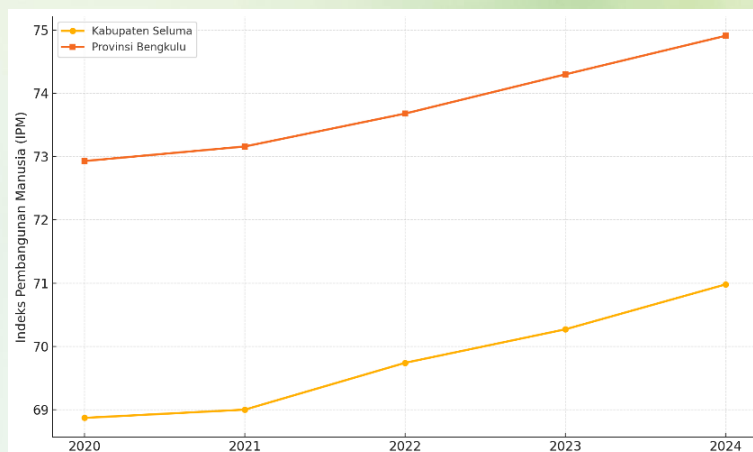
Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	72,93	73,16	73,68	74,3	74,91
Bengkulu Selatan	72,81	72,93	73,58	74,06	74,53
Rejang Lebong	72,51	72,85	73,54	74,43	75,04
Bengkulu Utara	70,81	71,28	71,76	72,27	73,1
Kaur	69,52	69,71	70,3	70,92	71,53
Seluma	68,87	69	69,74	70,27	70,98
Mukomuko	71,47	71,67	72,15	73	73,65
Lebong	71,2	71,67	72,35	72,95	73,54
Kepahiang	69,91	70,38	70,85	71,38	72,05
Bengkulu Tengah	69,42	69,78	70,29	70,81	71,67
Kota Bengkulu	82,31	82,49	82,93	83,38	83,95

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Seluma ke depan perlu diarahkan pada penguatan layanan kesehatan di tingkat desa dan kecamatan, peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa dan usaha kecil. Dengan mendorong pembangunan manusia yang merata dan berkeadilan, IPM Seluma diharapkan terus meningkat secara konsisten, bukan hanya sebagai indikator statistik, tetapi juga sebagai refleksi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata.

Selama periode 2020–2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seluma menunjukkan peningkatan bertahap dari 68,87 pada tahun 2020 menjadi 70,98 pada tahun 2024. Meskipun mengalami tren positif, posisi Kabupaten Seluma masih tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencatat IPM sebesar 74,91 di tahun 2024. Selisih lebih dari tiga poin ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma perlu mempercepat perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak agar tidak tertinggal lebih jauh.





Gambar II-11. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

Beberapa kabupaten lain di Provinsi Bengkulu seperti Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan mencatat IPM di atas 74, sementara Seluma masih berada di bawah 71. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih agresif, termasuk pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas kesehatan, serta penguatan daya beli masyarakat melalui dukungan terhadap ekonomi produktif rumah tangga.

B. Kesehatan untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Seluma menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat, ketersediaan layanan medis, pola hidup sehat, serta kondisi lingkungan dan gizi. Angka UHH yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang baik dan pola hidup yang mendukung umur panjang. Dalam konteks ini, UHH tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor kesehatan, tetapi juga menjadi tolok ukur kesejahteraan secara umum.

Dalam perencanaan RPJMD 2025–2029, peningkatan UHH di Kabupaten Seluma merupakan bagian penting dari upaya pembangunan manusia. Pemerintah daerah perlu terus memperluas akses pelayanan



kesehatan, meningkatkan kualitas sarana dan tenaga medis, serta mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat. Dengan dukungan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi, peningkatan UHH diharapkan dapat memperkuat fondasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung pencapaian kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Tabel II-22. Umur Harapan Hidup (Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	72,59	72,65	72,9	73,11	73,31
Bengkulu Selatan	72,47	72,49	72,67	72,87	73,05
Rejang Lebong	72,99	73,17	73,44	73,67	73,87
Bengkulu Utara	72,49	72,57	72,81	73,03	73,23
Kaur	72,12	72,22	72,49	72,74	72,97
Seluma	72,1	72,25	72,49	72,71	72,9
Mukomuko	73,11	73,19	73,44	73,71	73,95
Lebong	71,93	72,04	72,34	72,59	72,81
Kepahiang	71,73	71,87	72,07	72,26	72,41
Bengkulu Tengah	72,17	72,17	72,33	72,46	72,56
Kota Bengkulu	73,88	73,94	74,18	74,43	74,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025

Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 72,10 tahun, dan meningkat menjadi 72,90 tahun pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 0,8 tahun dalam kurun waktu lima tahun ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam aspek kesehatan, lingkungan hidup, serta pelayanan publik dasar, khususnya di sektor kesehatan dan gizi masyarakat.

Meskipun mengalami peningkatan, UHH Kabupaten Seluma secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu, yang mencapai 73,31 tahun pada tahun 2024. Bahkan, UHH Seluma masih tertinggal dari beberapa kabupaten/kota lain di provinsi ini, seperti Rejang Lebong (73,87), Mukomuko (73,95), dan Kota Bengkulu yang mencatat angka tertinggi, yakni 74,69 tahun. Seluma juga sedikit berada di bawah kabupaten tetangga seperti Bengkulu Selatan (73,05) dan Bengkulu Utara (73,23).



Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun capaian UHH Seluma terus mengalami perbaikan, gap kualitas hidup dan kesehatan penduduk masih perlu diperhatikan secara serius, terutama dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan, percepatan penanganan stunting dan gizi buruk, peningkatan sanitasi, serta perlindungan sosial terhadap kelompok rentan menjadi faktor kunci dalam mendorong percepatan peningkatan UHH Seluma di masa mendatang.

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator yang menggambarkan derajat kesehatan keluarga melalui berbagai aspek, seperti imunisasi, akses air bersih dan sanitasi, status gizi balita, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Di Kabupaten Seluma, IKS menjadi alat evaluasi yang penting dalam mengukur efektivitas program kesehatan di tingkat rumah tangga. Kinerja IKS juga merefleksikan kualitas hidup dan menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia yang sehat dan produktif.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Seluma 2025–2029, peningkatan IKS diposisikan sebagai strategi kunci dalam upaya pembangunan kesehatan berbasis keluarga. Masalah seperti rendahnya cakupan layanan di wilayah perdesaan, praktik hidup tidak sehat, serta masih adanya kasus gizi buruk menjadi tantangan yang harus ditangani secara lintas sektor. Oleh karena itu, perlu diperkuat sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar guna menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga di seluruh wilayah Seluma secara merata.

Tabel II-23. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023



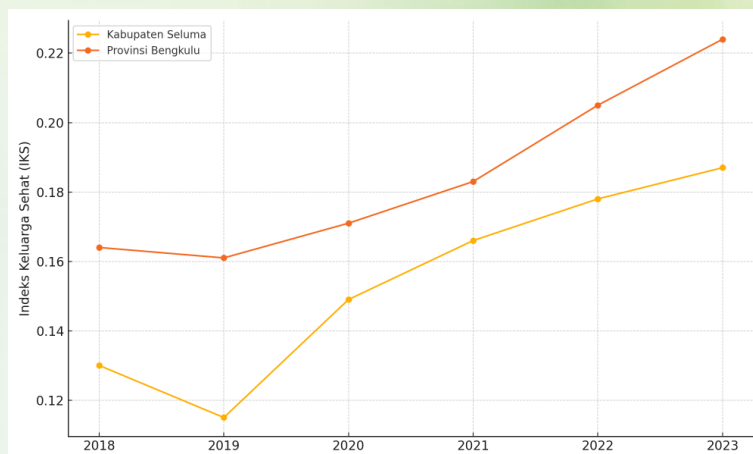
Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rejang Lebong	0,123	0,134	0,147	0,159	0,198	0,209
Kota Bengkulu	0,274	0,299	0,294	0,304	0,307	0,291
Bengkulu Utara	0,133	0,146	0,168	0,181	0,207	0,261
Lebong	0,081	0,073	0,08	0,081	0,118	0,135
Kepahiang	0,156	0,128	0,142	0,166	0,207	0,242
Bengkulu Tengah	0,156	0,128	0,136	0,165	0,186	0,256
Mukomuko	0,099	0,109	0,141	0,143	0,157	0,16
Seluma	0,13	0,115	0,149	0,166	0,178	0,187
Bengkulu Selatan	0,162	0,148	0,156	0,183	0,187	0,206
Kaur	0,098	0,083	0,085	0,085	0,127	0,134
Provinsi Bengkulu	0,164	0,161	0,171	0,183	0,205	0,224

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Seluma menunjukkan peningkatan secara konsisten selama periode 2018–2023, dari 0,130 pada tahun 2018 menjadi 0,187 pada tahun 2023. Namun, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2023 mencapai 0,224. Gap antara Kabupaten Seluma dan provinsi semakin melebar terutama sejak tahun 2021, yang mengindikasikan perlunya percepatan peningkatan kualitas hidup keluarga melalui pendekatan layanan dasar dan perilaku hidup sehat.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Seluma masih tertinggal dari daerah seperti Kota Bengkulu (0,291), Bengkulu Utara (0,261), dan Kepahiang (0,242). Meskipun peningkatan Seluma tergolong stabil, nilai absolutnya mengindikasikan bahwa masih banyak keluarga yang belum memenuhi indikator-indikator dasar kesehatan secara optimal. Ke depan, upaya penguatan layanan primer, peningkatan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta intervensi berbasis keluarga perlu menjadi prioritas untuk mengejar ketertinggalan tersebut.





Gambar II-12. Perbandingan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2023

3. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan indikator yang menggambarkan persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, khususnya tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, daya tahan tubuh, hingga potensi produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, stunting mencerminkan masalah yang bersifat multidimensional dan erat kaitannya dengan kualitas pelayanan kesehatan, praktik pengasuhan anak, kondisi sanitasi lingkungan, ketahanan pangan keluarga, serta aspek sosial ekonomi masyarakat.

Di Kabupaten Seluma, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan RPJMD Tahun 2025–2029. Stunting dipandang sebagai isu strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang dan berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, strategi percepatan penurunan stunting di Seluma perlu dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif. Upaya ini mencakup penguatan fungsi posyandu, peningkatan cakupan dan kualitas layanan gizi balita dan ibu hamil, perluasan akses terhadap air



bersih dan sanitasi layak, serta edukasi yang berkelanjutan kepada orang tua dan masyarakat luas mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat.

Dengan pelaksanaan intervensi yang bersinergi antar sektor dan berbasis data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Seluma diharapkan mampu mempercepat perbaikan status gizi anak-anak, mengurangi prevalensi stunting secara signifikan, serta mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan kompetitif untuk mendukung pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel II-24. Angka Stunting di Kabupaten Seluma Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Persentase Stunting	Nilai	24,7	22,1	26	22,6

Berdasarkan data persentase stunting di Kabupaten Seluma pada periode 2021–2024 tren penurunan belum berlangsung secara konsisten. Pada tahun 2021, angka stunting berada di level 24,7 persen dan menurun menjadi 22,1 persen pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan adanya dampak positif dari program intervensi yang dilakukan pemerintah daerah, baik melalui program gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, maupun program gizi sensitif seperti perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan edukasi kesehatan. Namun, pada tahun 2023 angka stunting kembali meningkat signifikan hingga 26 persen.

Memasuki tahun 2024, angka stunting berhasil ditekan kembali menjadi 22,6 persen, mendekati capaian terendah dalam empat tahun terakhir. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pemulihan dan penguatan program penanganan stunting mulai membuahkan hasil. Meskipun demikian, nilai 22,6 persen masih berada di atas ambang batas 20 persen yang ditetapkan WHO sebagai kategori masalah kesehatan masyarakat yang rendah, sehingga Kabupaten Seluma masih perlu melakukan percepatan penurunan stunting. Langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain



memperluas cakupan intervensi gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), memastikan keberlanjutan program lintas sektor, meningkatkan kualitas data pemantauan pertumbuhan anak, serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan stunting.

4. Imunisasi Anak

Imunisasi dasar lengkap merupakan salah satu langkah strategis dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi maupun balita akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Melalui program Universal Child Immunization (UCI), pemerintah menargetkan setiap desa mampu mencapai cakupan imunisasi dasar lengkap secara merata, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Cakupan desa/kelurahan UCI menunjukkan persentase desa yang berhasil memberikan imunisasi dasar lengkap kepada seluruh bayi di wilayahnya dalam satu tahun berjalan. Indikator ini tidak hanya menggambarkan kinerja pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga mencerminkan efektivitas sistem distribusi vaksin, peran aktif tenaga kesehatan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program imunisasi. Data capaian desa/kelurahan UCI tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel II-25. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Seluma Tahun 2024 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Persentase (%)
1	Sukaraja Riak	Siabun	3	100,0
2	Sukaraja	Babatan	8	100,0
4	Airperiukan	Dermayu	10	100,0
5	Airperiukan Air	Periukan	6	100,0
8	Selumabarat Talang	Tinggi	9	100,0
9	Seluma	Tais	7	100,0
10	Selumaselatan Rimbo	Kedui	12	100,0
11	Selumautara	Puguk	10	100,0
12	Seluma Timur Seluma	Timur	8	100,0
13	Talo	Masmambang	16	100,0
14	Talo Kecil	Ssukamerindu	11	100,0



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Persentase (%)
16	Ilirtalo	Penagoil	7	100,0
17	Ilirtalo Ilir	Talo	8	100,0
19	Semidang Alas Rena Gajah	Mati	3	100,0
20	Semidang Alas Maras Kembang	Mumpo	15	80,0
21	Semidang Alas Maras Gunung	Kembang	6	100,0

Sumber: Laman SDI Kabupaten Seluma

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa hampir seluruh wilayah berhasil mencapai cakupan imunisasi dasar lengkap 100 persen. Dari 21 puskesmas yang tercatat, 20 di antaranya menunjukkan capaian penuh, mencakup seluruh desa/kelurahan di wilayah kerjanya. Hanya Puskesmas Kembang Mumpo di Kecamatan Semidang Alas Maras yang belum mencapai target maksimal, dengan capaian 80 persen atau setara 12 dari 15 desa yang telah memenuhi kriteria UCI.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan sistem layanan kesehatan Kabupaten Seluma dalam pendistribusian vaksin, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat dalam program imunisasi. Meski demikian, adanya satu wilayah yang belum mencapai 100 persen menunjukkan perlunya intervensi tambahan, baik melalui peningkatan akses pelayanan, penguatan komunikasi risiko, maupun pendampingan tenaga kesehatan agar seluruh desa/kelurahan dapat memenuhi target UCI di tahun-tahun mendatang.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang mencerminkan capaian pendidikan formal penduduk usia 25 tahun ke atas, yang berfungsi sebagai cerminan tingkat akses, keberhasilan, dan pemerataan pendidikan di masyarakat. Di Kabupaten Seluma, indikator ini menjadi landasan penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif terhadap tantangan pembangunan. Semakin tinggi



angka RLS, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses informasi penting, dan meningkatkan taraf hidup melalui jalur pendidikan.

Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Seluma 2025–2029, peningkatan RLS menjadi prioritas yang harus dijalankan secara terstruktur. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan hingga ke desa-desa terpencil, perluasan program pendidikan kesetaraan bagi masyarakat dewasa, serta peningkatan kualitas pengajar dan infrastruktur sekolah. Strategi tersebut diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan angka RLS, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan yang berbasis pada pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis masyarakat Seluma untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

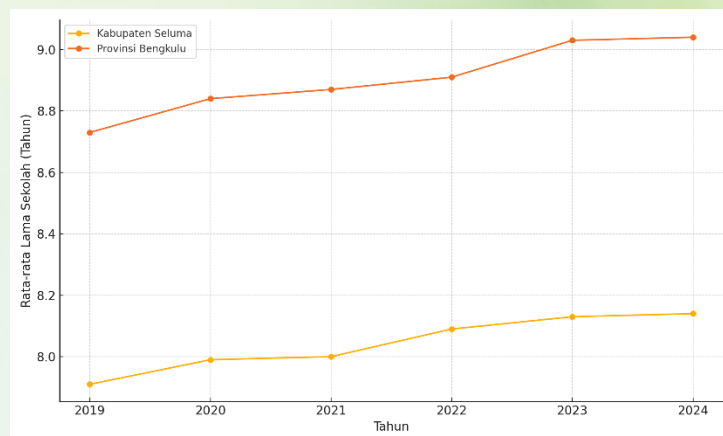
Tabel II-26. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	8,73	8,84	8,87	8,91	9,03	9,04
Bengkulu Selatan	9,02	9,26	9,27	9,39	9,41	9,42
Rejang Lebong	8,26	8,28	8,33	8,55	8,8	8,81
Bengkulu Utara	7,86	7,87	8,09	8,1	8,11	8,32
Kaur	8,25	8,37	8,38	8,39	8,41	8,47
Seluma	7,91	7,99	8	8,09	8,13	8,14
Mukomuko	7,99	8,29	8,3	8,31	8,56	8,57
Lebong	7,9	7,99	8,18	8,24	8,26	8,41
Kepahiang	7,93	8,24	8,29	8,3	8,36	8,37
Bengkulu Tengah	7,22	7,47	7,48	7,49	7,51	7,71
Kota Bengkulu	11,78	11,79	11,8	11,82	11,83	11,84

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan moderat dalam enam tahun terakhir, dari 7,91 tahun pada 2019 menjadi 8,14 tahun pada 2024. Meski mengalami pertumbuhan, angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 9,04 tahun pada 2024. Ini menandakan bahwa akses dan capaian pendidikan formal di Kabupaten Seluma belum setara dengan capaian provinsi secara keseluruhan.





Gambar II-13. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Seluma juga belum termasuk dalam kelompok dengan RLS tertinggi. Kota Bengkulu mencatat RLS tertinggi secara konsisten (11,84 tahun pada 2024), diikuti oleh Bengkulu Selatan (9,42 tahun). Beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong, Mukomuko, dan Kaur pun mencatatkan angka yang lebih tinggi dari Seluma. Situasi ini mencerminkan tantangan serius dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan di Seluma, terutama di kalangan penduduk usia dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang menysar pemerataan akses pendidikan serta peningkatan fasilitas dan mutu pembelajaran di wilayah-wilayah tertinggal.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Seluma mencerminkan seberapa besar potensi anak-anak usia sekolah untuk menyelesaikan jenjang pendidikan formal berdasarkan kondisi saat ini. Indikator ini menjadi penting karena tidak hanya menggambarkan akses terhadap pendidikan, tetapi juga memperlihatkan ekspektasi masyarakat terhadap masa depan generasi muda. Rendahnya angka HLS di Seluma dapat mengindikasikan keterbatasan dalam infrastruktur pendidikan, kendala ekonomi, atau masih tingginya angka putus sekolah, khususnya di wilayah pedesaan.



Tabel II-27. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

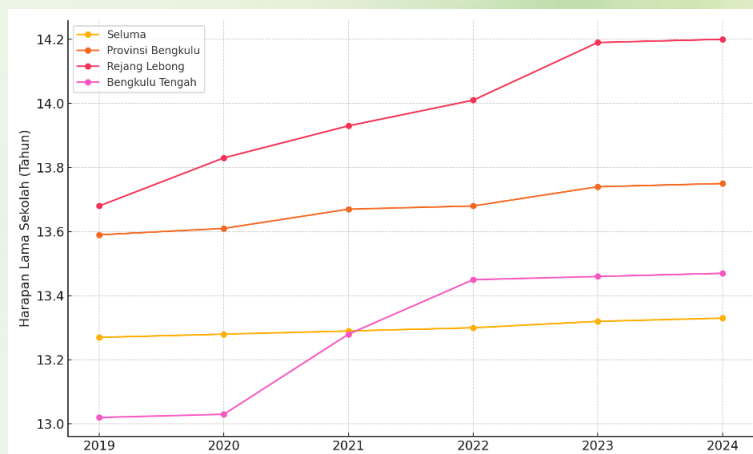
Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	13,59	13,61	13,67	13,68	13,74	13,75
Bengkulu Selatan	13,6	13,61	13,62	13,63	13,65	13,66
Rejang Lebong	13,68	13,83	13,93	14,01	14,19	14,2
Bengkulu Utara	12,86	12,87	12,88	12,89	12,91	12,92
Kaur	12,98	12,99	13,06	13,07	13,14	13,15
Seluma	13,27	13,28	13,29	13,3	13,32	13,33
Mukomuko	12,72	12,73	12,74	12,76	12,86	12,87
Lebong	12,56	12,57	12,58	12,75	12,9	12,91
Kepahiang	12,89	12,9	13,12	13,13	13,14	13,16
Bengkulu Tengah	13,02	13,03	13,28	13,45	13,46	13,47
Kota Bengkulu	16,01	16,02	16,03	16,04	16,06	16,07

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Seluma 2025–2029, peningkatan HLS perlu didorong melalui pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil, peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, serta penguatan dukungan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, Seluma dapat membangun pondasi sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selama periode 2019–2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan yang stabil namun masih terbatas. Pada tahun 2019, HLS Seluma berada di angka 13,27 tahun dan meningkat secara perlahan hingga mencapai 13,33 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan akses pendidikan dan partisipasi sekolah, tetapi peningkatannya belum cukup signifikan untuk menutup kesenjangan dengan wilayah lain.





Gambar II-14. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Seluma dengan Provinsi dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu yang mencapai HLS sebesar 13,75 tahun pada 2024, posisi Kabupaten Seluma masih berada di bawah rata-rata provinsi. Bahkan, beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong (14,2 tahun) dan Kota Bengkulu (16,07 tahun) menunjukkan capaian yang jauh lebih tinggi. Kabupaten Bengkulu Tengah yang pada 2019 memiliki HLS lebih rendah dari Seluma (13,02 tahun), sejak 2021 terus mengalami peningkatan lebih cepat dan pada 2024 mencapai 13,47 tahun, menyalip Seluma. Kondisi ini menegaskan pentingnya percepatan kebijakan perluasan akses pendidikan di Seluma, khususnya untuk mendorong anak-anak usia sekolah agar dapat menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dibentuk berdasarkan tujuh komponen utama yang saling berkaitan dalam menciptakan ekosistem literasi yang berdaya guna. Unsur-unsur tersebut meliputi pemerataan akses layanan perpustakaan, kecukupan jumlah dan variasi koleksi bahan bacaan, ketersediaan tenaga perpustakaan yang memadai, serta frekuensi kunjungan masyarakat ke perpustakaan setiap harinya. Selain itu, keberadaan perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi, dan jumlah anggota perpustakaan yang aktif, juga menjadi indikator penting dalam mengukur



kemajuan literasi suatu daerah. Setiap unsur ini mencerminkan keseimbangan antara penyediaan sarana dan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Seluma, penguatan pembangunan literasi yang tercermin melalui capaian IPLM perlu menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Tahun 2025–2029, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kehadiran perpustakaan sebagai fasilitas publik tidak akan optimal apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas layanan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan literasi. Oleh karena itu, strategi pembangunan literasi di Seluma perlu diarahkan pada perluasan akses perpustakaan hingga ke desa-desa terpencil, peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga perpustakaan, serta pengembangan program literasi yang berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Dengan memperkuat seluruh aspek yang menjadi komponen penyusun IPLM secara konsisten dan kolaboratif, Kabupaten Seluma memiliki peluang besar untuk menumbuhkan budaya literasi dari tingkat akar rumput. Hal ini tidak hanya akan mendukung transformasi sosial masyarakat, tetapi juga memperkuat pondasi pembangunan manusia yang berkualitas serta meningkatkan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Tabel II-28. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024

Kabupaten/ Kota	Tahun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
Bengkulu Selatan	2023	50,01	0,6667	0,2878	0,147	0,0464	0,3526	1	1
Rejang Lebong		60,77	0,7576	0,2165	0,2311	0,0487	1	1	1
Bengkulu Utara		60,72	0,6102	0,423	0,1569	0,0606	1	1	1
Kaur		70,34	0,5548	0,6684	0,6363	0,064	1	1	1
Seluma		54,45	0,4154	0,2122	0,152	0,032	1	1	1
Mukomuko		57,68	0,488	0,4989		0,0506	1	1	1
Lebong		48,86	0,6076	0,1104		0,0133	0,6891	1	1
Kepahiang		46,88	0,5893	0,0949	0,2922	0,0302	1	1	0,2747
Bengkulu Tengah		60,38	0,4263	0,0975	1	0,0288	0,6742	1	1
Kota Bengkulu		60,53	0,7368	0,1349	0,3313	0,0339	1	1	1
Provinsi Bengkulu		59,83	0,5833	0,2664	0,2952	0,0429	1	1	1
Bengkulu Selatan	2024	62,41	0,7363	0,4059	0,1604	0,0665	1	1	1
Rejang Lebong		62,12	0,7485	0,2506	0,2975	0,052	1	1	1
Bengkulu Utara		31,25	0,6034	0,1983	0,1549	0,1374	1	0,0509	0,0427



Kabupaten/ Kota	Tahun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
Kaur		61,02	0,5307	0,3183	1	0,3741	1	0,0481	1
Seluma		28,18	0,4511	0,0169	0,1511	0,1132	1	0,1999	0,0405
Mukomuko		64,29	0,5558	0,5769	0,3647	1	1	1	0,0028
Lebong		65,27	0,7301	0,4232		0,7153	1	0,6999	1
Kepahiang		51,21	0,6006	0,1808	0,3717	0,0562	1	1	0,3756
Bengkulu Tengah		45,8	0,4463	0,471	1	0,0363	1	0,0797	0,173
Kota Bengkulu		55,33	0,7619	0,1658	0,4794	0,1777	1	1	0,2882
Provinsi Bengkulu		65,96	0,6097	0,2859	0,4734	0,2481	1	1	1

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana layanan dan aktivitas literasi mampu menjangkau serta dimanfaatkan oleh masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2023, Kabupaten Seluma mencatat nilai IPLM sebesar 54,45, yang meskipun belum mencapai rata-rata Provinsi Bengkulu sebesar 59,83, masih berada dalam kisaran moderat. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat tajam, di mana IPLM Kabupaten Seluma anjlok menjadi hanya 28,18, sementara rata-rata provinsi justru meningkat cukup signifikan menjadi 65,96. Penurunan ini menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar antara capaian daerah dan capaian provinsi, sekaligus menempatkan Kabupaten Seluma sebagai wilayah dengan capaian IPLM terendah kedua di Provinsi Bengkulu tahun 2024.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya penguatan ekosistem literasi di Seluma pada berbagai aspek penyusun IPLM. Salah satu penurunan paling signifikan terjadi pada ketersediaan koleksi bahan bacaan, yang pada tahun 2024 hanya tercatat sebesar 0,0169, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 0,2859. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan juga stagnan di angka 0,1511, menunjukkan bahwa ketersediaan pustakawan belum memadai untuk mendukung layanan literasi yang merata dan berkualitas. Meskipun ada peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dari 0,032 pada tahun 2023 menjadi 0,1132 pada tahun 2024, capaian tersebut tetap tergolong rendah jika dibandingkan dengan angka provinsi sebesar



0,2481. Situasi ini menandakan bahwa minat baca masyarakat dan daya tarik layanan perpustakaan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Lebih lanjut, indikator jumlah anggota perpustakaan aktif di Kabupaten Seluma juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari posisi ideal dengan skor 1,00 pada tahun 2023, turun menjadi hanya 0,0405 pada tahun 2024. Penurunan tajam ini mengindikasikan lemahnya kesinambungan program literasi yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas. Padahal, keaktifan anggota perpustakaan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan perpustakaan dalam menjangkau dan melibatkan masyarakat secara langsung. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi strategis, maka tidak hanya akan berdampak pada rendahnya capaian literasi, tetapi juga berpotensi menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Seluma secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dan terukur untuk memperkuat kembali seluruh dimensi penyusun IPLM sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Seluma dapat digambarkan melalui indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan. Kedua indikator ini memberikan gambaran mengenai capaian akses pendidikan terhadap kelompok usia sekolah yang semestinya berada di jenjang pendidikan tertentu (APM), serta cakupan total peserta didik tanpa memperhitungkan batasan usia (APK). Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, analisis APM dan APK menjadi penting untuk mengidentifikasi tingkat keterjangkauan, pemerataan, dan efisiensi sistem pendidikan daerah. Data ini juga merefleksikan efektivitas berbagai kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan ke depan.



Tabel II-29. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)				Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SD/MI	95,5	96,75	97,18	98,91	106,45	106,52	106,91	108,11
SMP/MTs	82,08	81,45	81,6	81,52	101,43	95,4	91,37	85,72
SMA/SMK/MA	70,58	71,73	73	74,65	94,61	96,25	97,95	99,7

Sumber: BPS Kabupaten Seluma

Tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Seluma pada periode 2021 hingga 2024 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI mengalami peningkatan dari 95,5% pada tahun 2021 menjadi 98,91% pada tahun 2024. Demikian pula dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang yang sama, yang terus meningkat dari 106,45% menjadi 108,11%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Seluma telah mengakses pendidikan sesuai usianya, bahkan mencerminkan inklusi terhadap anak-anak di luar kelompok usia ideal.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs), APM cenderung stagnan dalam kisaran 81%, sementara APK justru menunjukkan tren penurunan dari 101,43% pada tahun 2021 menjadi 85,72% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa di jenjang ini, khususnya bagi kelompok usia tidak ideal. Penurunan APK dapat menjadi sinyal adanya potensi putus sekolah atau hambatan akses, seperti faktor ekonomi, geografis, atau sosial-budaya yang perlu segera ditindaklanjuti.

Untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA), terdapat peningkatan yang cukup stabil baik pada APM maupun APK. APM meningkat dari 70,58% menjadi 74,65%, sedangkan APK naik dari 94,61% menjadi 99,7% selama periode empat tahun. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan akses dan minat masyarakat terhadap pendidikan menengah atas, yang dapat menjadi modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Seluma.



Secara keseluruhan, meskipun capaian APM dan APK di jenjang pendidikan dasar dan menengah atas menunjukkan kemajuan, partisipasi pada jenjang menengah pertama masih menjadi titik lemah yang harus mendapatkan perhatian serius. Intervensi kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data diperlukan untuk memastikan kesinambungan pendidikan antarjenjang, terutama dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Seluma.

5. Sekolah Bermutu

Kualitas pendidikan di suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari jumlah sekolah yang telah memperoleh akreditasi. Pada tahun ajaran 2023/2024, di Kabupaten Seluma terdapat 178 sekolah dasar (SD) dengan rincian 3 sekolah berakreditasi A, 88 sekolah berakreditasi B, 87 sekolah berakreditasi C, dan 8 sekolah belum terakreditasi (sumber: laman SDI Kabupaten Seluma). Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) pada periode yang sama terdapat 40 sekolah terakreditasi, dengan komposisi 5 sekolah berakreditasi A, 19 sekolah berakreditasi B, 16 sekolah berakreditasi C, dan 9 sekolah belum terakreditasi (sumber: laman SDI Kabupaten Seluma). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya signifikan untuk mendorong lebih banyak sekolah mencapai akreditasi A.

Peningkatan akreditasi sekolah perlu diawali dengan pemetaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada jenjang SD dan SMP. Informasi mengenai kebutuhan PTK di Kabupaten Seluma pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-30. Jumlah Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Seluma Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kebutuhan			
		Pendidik SD	Tenaga Kependidikan SD	Pendidik SMP	Tenaga Kependidikan SMP
1	Sukaraja	191	37	109	18
2	Seluma Timur	87	21	53	10
3	Seluma	102	22	75	14
4	Seluma Utara	78	14	38	6
5	Seluma Selatan	63	13	34	6



No	Nama Kecamatan	Jumlah Kebutuhan			
		Pendidik SD	Tenaga Kependidikan SD	Pendidik SMP	Tenaga Kependidikan SMP
6	Talo	71	15	35	6
7	Semidang Alas	104	19	47	7
8	Semidang Alas Maras	119	21	54	8
9	Iilir Talo	83	14	30	5
10	Talo Kecil	53	10	28	4
11	Ulu Talo	54	8	28	4

Sumber: Laman SDI Kabupaten Seluma (diolah)

Berdasarkan data kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Seluma tahun 2024, terlihat bahwa kebutuhan pendidik pada jenjang SD secara umum lebih tinggi dibandingkan jenjang SMP di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan kebutuhan pendidik SD tertinggi adalah Sukaraja dengan 191 orang, disusul Semidang Alas Maras sebanyak 119 orang, dan Semidang Alas sebanyak 104 orang. Sebaliknya, kebutuhan pendidik SD terendah terdapat di Kecamatan Talo Kecil (53 orang) dan Ulu Talo (54 orang). Untuk tenaga kependidikan SD, Sukaraja juga mencatat kebutuhan terbesar sebanyak 37 orang, sedangkan kebutuhan terendah berada di Ulu Talo sebanyak 8 orang.

Pada jenjang SMP, kebutuhan pendidik tertinggi kembali ditemukan di Sukaraja sebanyak 109 orang, diikuti Seluma sebanyak 75 orang, serta Seluma Timur sebanyak 53 orang. Kecamatan dengan kebutuhan pendidik SMP terendah adalah Iilir Talo, Talo Kecil, dan Ulu Talo yang masing-masing membutuhkan 28–30 orang. Untuk tenaga kependidikan SMP, kebutuhan terbesar berada di Sukaraja (18 orang) dan terendah di Talo Kecil serta Ulu Talo (masing-masing 4 orang). Secara keseluruhan, pola kebutuhan ini menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah sekolah lebih banyak dan populasi siswa lebih tinggi, seperti Sukaraja dan Seluma, cenderung memiliki kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang lebih besar, sehingga perlu menjadi prioritas dalam perencanaan rekrutmen dan distribusi SDM pendidikan di Kabupaten Seluma.



D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, serta perlindungan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat hidup secara layak dan bermartabat tanpa diskriminasi. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Seluma tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-31. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Kabupaten Seluma

N O	Kecamatan	Disabilitas Fisik	Disabilitas Netra/ Buta	Disabilitas Rungu/ Wicara	Disabilitas Mental/ Jiwa	Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitas Lainnya
1	Sukaraja	26	5	7	29	1	2
2	Seluma	7	2	2	16	0	3
3	Talo	4	3	2	4	2	1
4	Semidang Alas	5	1	1	8	1	0
5	Semidang Alas Maras	13	3	6	10	0	3
6	Air Periukan	9	2	8	17	1	3
7	Lubuk Sandi	8	4	2	6	1	6
8	Seluma Barat	12	8	8	9	0	1
9	Seluma Timur	5	7	6	14	2	5
10	Seluma Utara	10	0	4	2	0	0
11	Seluma Selatan	9	3	7	28	0	6
12	Talo Kecil	6	1	2	6	1	0
13	Ulu Talo	2	3	0	6	0	0
14	Ilir Talo	23	3	3	5	0	0
	Jumlah	139	45	58	160	9	30

Berdasarkan data jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Seluma, total terdapat 441 penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kecamatan dengan kategori yang beragam. Jenis disabilitas yang paling banyak dialami adalah disabilitas mental/jiwa dengan jumlah 160 orang (36,28%), diikuti disabilitas fisik sebanyak 139 orang (31,52%), dan disabilitas rungu/wicara sebanyak 58 orang (13,15%). Sementara itu, disabilitas netra/buta tercatat sebanyak 45 orang (10,20%), disabilitas lainnya sebanyak 30 orang (6,80%), dan disabilitas fisik dan mental sebanyak 9 orang (2,04%).



Secara wilayah, kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak adalah Sukaraja dengan 70 orang, didominasi oleh disabilitas mental/jiwa (29 orang) dan fisik (26 orang). Disusul Kecamatan Seluma Selatan dengan 53 orang dan Air Periukan dengan 40 orang. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit adalah Ulu Talo dengan 11 orang dan Talo dengan 16 orang. Distribusi ini menunjukkan bahwa permasalahan disabilitas di Kabupaten Seluma cukup bervariasi antarwilayah, sehingga diperlukan strategi penanganan dan pelayanan yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dan konsentrasi jumlah penyandang di tiap kecamatan, baik dari sisi rehabilitasi, bantuan sosial, maupun peningkatan aksesibilitas layanan publik.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menjadi instrumen strategis dalam menilai sejauh mana Kabupaten Seluma berhasil membangun dan mempertahankan kekuatan budayanya di tengah dinamika pembangunan. Dimensi seperti keberagaman budaya lokal, partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai tradisi, literasi budaya, serta pendidikan berbasis kearifan lokal menjadi tolok ukur utama dalam mendorong penguatan identitas daerah. Peningkatan IPK di Seluma mencerminkan upaya kolektif dalam menjaga kesinambungan nilai budaya, memperkuat solidaritas sosial, dan memperluas ruang ekspresi seni yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Dalam perencanaan RPJMD 2025–2029, penguatan IPK diarahkan untuk menjadikan kebudayaan sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah. Kabupaten Seluma memiliki potensi kekayaan tradisi yang kuat dan beragam, yang jika dikembangkan secara berkelanjutan dapat menjadi fondasi bagi penguatan karakter masyarakat dan pendorong sektor ekonomi kreatif berbasis komunitas. Pemerintah daerah perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku budaya, memperkuat ekosistem pendidikan berbasis budaya lokal, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam revitalisasi



tradisi daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun masyarakat Seluma yang berdaya, beridentitas, dan sejahtera.

Tabel II-32. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2018-2023

Tahun	Nasional	Bengkulu
2018	53.74	59.95
2019	55.91	61.13
2020	54.65	56.59
2021	51.90	54.56
2022	55.13	57.28
2023	57.13	61.45

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

a. Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan dalam IPK Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 6,59% pada tahun 2023, dari 74,44 menjadi 79,35. Salah satu indikator yang mengalami peningkatan signifikan adalah persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian, yang meningkat sebesar 13,80%, dari 30,95 pada tahun 2022 menjadi 35,22 pada tahun 2023. Selain itu, jumlah guru master yang mendapatkan pelatihan metode pengajaran bahasa daerah juga mengalami peningkatan, dari 252 orang menjadi 260 peserta pelatihan.

Dimensi Pendidikan IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 77,60 poin. Berdasarkan baseline tahun 2018, capaian dimensi ini telah melampaui target tahun 2024 dengan pencapaian sebesar 131,30%. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pendidikan tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pada tahun 2023, Bengkulu menjadi salah satu dari 22 provinsi yang mendapatkan program revitalisasi bahasa daerah dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Program ini mencakup pelatihan bagi guru bahasa daerah, kepala sekolah, pengawas, siswa, serta komunitas penutur bahasa daerah. Program



revitalisasi ini berfokus pada tiga bahasa lokal, yaitu Enggano, Rejang, dan Bengkulu dialek Serawai. Pelatihan yang diberikan kepada guru master diharapkan dapat diteruskan kepada guru lain dan diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah di tingkat kabupaten/kota.

b. Dimensi Budaya Literasi

Dimensi Budaya Literasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat dari 57,60 menjadi 61,91. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam tiga bulan terakhir, yang meningkat sebesar 29,21%, dari 5,34 pada tahun 2022 menjadi 6,90 pada tahun 2023. Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 mencapai 29 ribu orang, melampaui target 25 ribu pengunjung. Tren ini terus meningkat pada tahun 2023, dengan jumlah pengunjung mencapai 36 ribu orang, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi.

Dimensi Budaya Literasi IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 66,06 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi ini telah mencapai 68,26% dari target 2024. Untuk mencapai proyeksi tahun 2024, diperlukan peningkatan skor sebesar 4,15 poin. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2019 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu memiliki satu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini diimplementasikan melalui Gerakan Satu Desa Satu Perpustakaan. Selain itu, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi, termasuk penyediaan bahan bacaan "Pojok Raflesia Kantor Bahasa" di



Perpustakaan Bank Indonesia, pojok baca di lobi perpustakaan daerah, serta kegiatan Jambore Literasi.

c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat dari 75,77 menjadi 76,90. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong, yang naik sebesar 8,83%, dari 29,45 pada tahun 2022 menjadi 32,05 pada tahun 2023. Pemerintah Kota Bengkulu, melalui Rencana Strategis Kecamatan Kampung Melayu 2019-2023, terus mendorong semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 81,07 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi ini masih berada 17,72% di bawah target 2024. Untuk memenuhi target tersebut, skor IPK harus meningkat sebesar 4,17 poin dalam tahun mendatang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong praktik gotong royong secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Gotong royong tidak hanya memperkuat ketahanan sosial budaya, tetapi juga meningkatkan solidaritas dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Tradisi gotong royong tetap dijaga oleh masyarakat Bengkulu, seperti yang terlihat dalam berbagai praktik budaya lokal. Suku Rejang di Bengkulu Utara masih menjalankan tradisi “Bekejai” dalam upacara pernikahan adat kejai, yang bertujuan untuk melestarikan nilai tradisional sekaligus memperkuat persatuan. Sementara itu, di Kabupaten Seluma, Suku Serawai melestarikan tradisi "Ngidak Gelamai" saat menyambut Idul Fitri. Dalam tradisi ini, masyarakat



bersama-sama membuat dodol atau gelamai, yang menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong.

Dengan berbagai strategi yang telah diimplementasikan, Provinsi Bengkulu memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan IPK dalam berbagai dimensi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk memastikan bahwa pertumbuhan di setiap dimensi berjalan secara berkelanjutan, guna mencapai target pembangunan kebudayaan baik dalam jangka menengah maupun menuju visi Indonesia Emas 2045.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menjadi indikator strategis untuk menilai sejauh mana hak-hak anak di Kabupaten Seluma terpenuhi secara menyeluruh, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan keluarga, maupun perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Melalui lima dimensi utama IPA, pemerintah daerah dapat memetakan kondisi anak secara lebih komprehensif dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan intervensi. Hal ini penting untuk memastikan setiap anak di Seluma dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Tabel II-33. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.

	Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
Kota Bengkulu	2021	53,650	89,890	75,910	32,530	75,330	66,600
	2022	47,860	88,010	79,730	33,400	73,920	65,560
	2023	44,350	91,310	78,670	32,680	75,870	65,690
Seluma	2021	45,260	82,950	74,450	34,290	73,360	63,020
	2022	52,770	81,010	73,910	33,300	69,580	62,980
	2023	48,130	84,560	79,320	31,180	76,530	64,950
Rejang Lebong	2021	46,280	76,020	68,120	30,970	66,720	58,500
	2022	49,080	73,720	71,190	28,230	64,170	58,050



	Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
Mukomuko	2023	45,620	80,810	73,510	30,200	75,280	62,130
	2021	42,930	77,870	77,640	32,600	79,690	63,090
	2022	48,820	79,620	78,310	30,000	78,160	63,970
	2023	52,610	81,370	77,960	31,240	69,550	63,380
Lebong	2021	44,160	59,430	72,670	25,140	76,430	56,330
	2022	50,150	73,630	71,720	31,330	65,150	59,110
	2023	52,580	66,170	71,590	33,030	73,600	60,100
Kepahiang	2021	43,010	73,040	75,710	20,950	70,100	57,490
	2022	49,520	70,780	75,250	29,930	63,870	58,460
	2023	48,350	76,640	74,430	32,210	66,240	60,300
Kaur	2021	44,830	79,810	78,580	30,540	79,840	63,730
	2022	48,320	78,960	80,680	30,330	71,310	62,700
	2023	45,000	74,750	81,140	29,950	75,220	61,990
Bengkulu Utara	2021	44,460	83,960	72,550	27,900	70,760	61,010
	2022	49,910	82,520	73,100	29,960	71,700	62,460
	2023	52,040	92,620	79,780	27,980	74,900	66,660
Bengkulu Tengah	2021	46,500	65,830	74,650	32,160	80,610	60,740
	2022	50,340	77,010	77,440	31,550	72,340	62,540
	2023	50,010	63,890	72,760	30,300	74,210	58,940
Bengkulu Selatan	2021	45,870	85,010	74,000	21,690	66,000	59,620
	2022	51,500	82,230	74,670	32,770	69,050	62,920
	2023	46,160	82,580	76,010	32,190	70,340	62,350

Dalam RPJMD 2025–2029, peningkatan nilai IPA perlu menjadi bagian penting dari strategi pembangunan manusia. Tantangan seperti rendahnya literasi keluarga terhadap hak-hak anak, akses pendidikan di wilayah terpencil, serta penanganan kasus kekerasan anak harus ditangani secara kolaboratif. Pemerintah Kabupaten Seluma perlu memperkuat program pelayanan dasar yang ramah anak, mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan, serta menyediakan sistem pelaporan dan pendampingan anak yang terpadu. Dengan pendekatan ini, perlindungan anak di Seluma dapat menjadi landasan untuk menciptakan generasi yang sehat, aman, dan siap menghadapi masa depan.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Seluma mengalami fluktuasi moderat selama periode 2021–2023. Nilainya sedikit menurun dari 63,02 pada tahun 2021 menjadi 62,98 di 2022, namun kembali meningkat ke



64,95 pada 2023. Ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja perlindungan anak meskipun sempat mengalami stagnasi. Peningkatan di tahun terakhir terutama didukung oleh perbaikan pada dimensi kesehatan dasar, lingkungan keluarga, dan perlindungan khusus.

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, Kabupaten Seluma secara konsisten memiliki nilai IPA yang sedikit lebih tinggi dari rerata Provinsi Bengkulu pada 2021 dan 2022. Namun, pada 2023, meskipun provinsi juga mengalami kenaikan, Seluma tetap mempertahankan keunggulan relatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak di Seluma memiliki efektivitas yang baik dan perlu terus diperkuat, terutama pada dimensi pendidikan dan hak sipil yang masih tertinggal dibanding dimensi lainnya.

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi indikator penting dalam mengukur ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui dimensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan, serta relasi sosial. Di Kabupaten Seluma, peningkatan IKK berperan strategis dalam membangun masyarakat yang sehat dan mandiri, terutama dalam upaya memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan. Akses keluarga terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi rumah tangga menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan sosial yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, keluarga yang berkualitas juga menjadi aktor utama dalam penurunan stunting, perbaikan gizi anak, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pemenuhan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, akses air bersih, dan sanitasi yang baik masih menjadi tantangan di beberapa wilayah pedesaan Seluma. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan keluarga harus didukung oleh investasi pada layanan dasar, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pelestarian nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan solidaritas antarwarga. Melalui pendekatan yang menempatkan keluarga



sebagai pusat pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, Kabupaten Seluma memiliki peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, tangguh, dan berdaya saing di masa mendatang.

Tabel II-34. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	85,960	87,570	89,650	90,980
Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	70,040	78,380	82,110	77,650
Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	72,050	72,550	73,440	77,550
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	62,930	64,230	72,110	73,270
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial -Budaya	57,100	58,610	61,100	62,630
Nilai IKK Total	71,170	74,390	77,890	78,140

Data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, dengan nilai total IKK naik dari 71,17 pada tahun 2020 menjadi 78,14 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Komponen legalitas-struktur keluarga mencatat nilai tertinggi secara konsisten, mencapai 90,98 pada 2023, menunjukkan bahwa aspek administratif dan struktur keluarga di Bengkulu sudah sangat kuat. Di sisi lain, ketahanan fisik sempat mengalami lonjakan signifikan dari 70,04 pada 2020 ke 82,11 pada 2022, namun sedikit menurun menjadi 77,65 pada 2023, yang mungkin mencerminkan adanya tantangan dalam aspek kesehatan, tempat tinggal, atau akses terhadap layanan dasar.

Sementara itu, ketahanan ekonomi keluarga menunjukkan peningkatan stabil dari 72,05 menjadi 77,55 selama periode empat tahun, mencerminkan perbaikan dalam stabilitas penghasilan dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar. Ketahanan sosial-psikologi dan sosial-budaya juga menunjukkan pertumbuhan positif—komponen sosial-psikologi meningkat dari 62,93 menjadi 73,27, dan sosial-budaya dari 57,10 menjadi 62,63. Hal ini menandakan perbaikan dalam hubungan antaranggota keluarga, dukungan sosial, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis keluarga di Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Seluma, terus mengalami



kemajuan dan harus terus diperkuat agar dapat menjadi fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Di Kabupaten Seluma, IKG menjadi indikator penting untuk menilai kualitas pembangunan yang adil dan setara. Ketimpangan gender yang tinggi menandakan masih adanya hambatan yang dihadapi perempuan, baik dalam hal akses terhadap pendidikan dan kesehatan, maupun partisipasi di sektor ekonomi dan pengambilan keputusan.

Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 Kabupaten Seluma perlu difokuskan pada pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Hal ini mencakup perluasan akses layanan dasar, peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan, serta penguatan kapasitas perempuan di ruang publik dan kelembagaan. Pembangunan yang berperspektif gender akan mendorong kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Seluma.

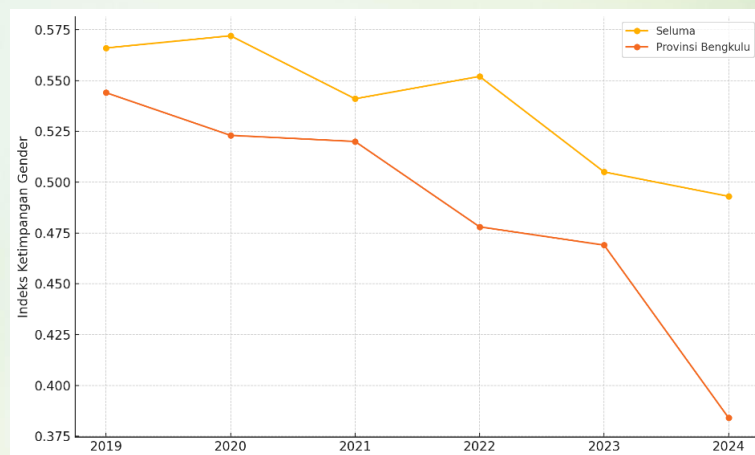
Tabel II-35. Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,829	0,827	0,761	0,738	0,784	0,316
Rejang Lebong	0,52	0,469	0,537	0,46	0,45	0,392
Bengkulu Utara	0,588	0,6	0,592	0,538	0,513	0,477
Kaur	0,62	0,555	0,561	0,541	0,547	0,478
Seluma	0,566	0,572	0,541	0,552	0,505	0,493
Mukomuko	0,638	0,633	0,623	0,606	0,604	0,768
Lebong	0,557	0,545	0,474	0,499	0,52	0,432
Kepahiang	0,577	0,529	0,51	0,514	0,515	0,489
Bengkulu Tengah	0,537	0,485	0,512	0,536	0,524	0,483
Kota Bengkulu	0,443	0,412	0,464	0,328	0,319	0,159
Provinsi Bengkulu	0,544	0,523	0,52	0,478	0,469	0,384

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025



Seluma mengalami penurunan IKG dari 0,566 pada 2019 menjadi 0,493 pada 2024. Meskipun menunjukkan perbaikan, tingkat ketimpangan gender di Seluma masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu, yang berhasil menurunkan IKG dari 0,544 menjadi 0,384 pada periode yang sama. Penurunan IKG di provinsi ini menunjukkan kemajuan dalam mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.



Gambar II-15. erbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Seluma masih berada di atas rata-rata provinsi dan belum mencapai tingkat ketimpangan serendah beberapa kabupaten/kota lain seperti Kota Bengkulu yang mencatat IKG terendah (0,159) pada 2024. Ini menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender di Seluma masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan tinggi, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencerminkan sejauh mana kesetaraan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Seluma dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati angka 100, semakin menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat pembangunan yang setara.



Dalam konteks Seluma, IPG menjadi instrumen strategis untuk menilai efektivitas program pembangunan yang inklusif dan adil terhadap semua kelompok gender.

Peningkatan IPG di Seluma perlu diupayakan melalui langkah-langkah konkret seperti pemerataan akses layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dan kewirausahaan, serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik. Melalui pengarusutamaan gender yang konsisten dalam RPJMD 2025–2029, Seluma memiliki peluang untuk membangun tatanan masyarakat yang setara, berdaya, dan mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

Tabel II-36. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024

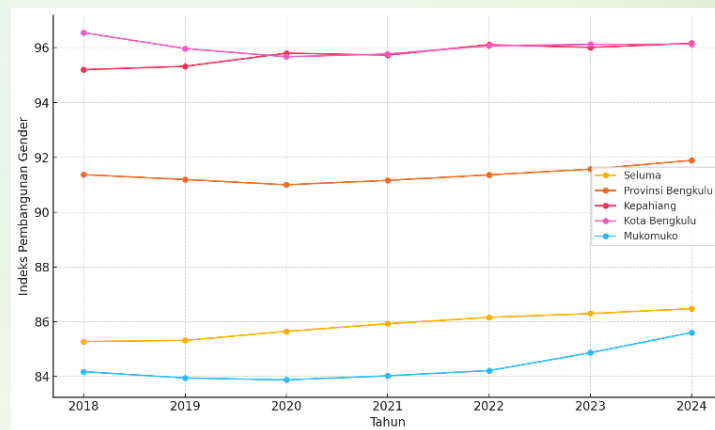
Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	91,37	91,19	91,00	91,16	91,36	91,57	91,89
Bengkulu Selatan	94,08	94,05	94,14	94,31	94,72	94,74	94,89
Rejang Lebong	94,59	94,15	93,78	93,72	93,83	94,24	94,83
Bengkulu Utara	91,19	91,25	91,23	91,39	91,39	91,47	91,81
Kaur	87,20	87,13	87,12	87,17	87,51	87,72	87,83
Seluma	85,28	85,32	85,65	85,93	86,16	86,30	86,48
Mukomuko	84,18	83,95	83,88	84,03	84,22	84,87	85,61
Lebong	90,99	91,49	91,60	91,86	92,19	92,06	92,35
Kepahiang	95,20	95,32	95,80	95,73	96,11	96,01	96,16
Bengkulu Tengah	86,36	86,55	86,83	87,04	87,29	87,25	87,51
Kota Bengkulu	96,55	95,97	95,67	95,77	96,07	96,12	96,13

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2018–2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 85,28 pada tahun 2018 menjadi 86,48 pada tahun 2024. Meski mengalami kemajuan, posisi Seluma masih berada di bawah rata-rata IPG Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 91,89. Ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Seluma yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, IPG Seluma tergolong rendah dan hanya sedikit lebih tinggi dari Mukomuko. Kabupaten Kepahiang dan Kota Bengkulu mencatat IPG tertinggi, masing-masing di atas 96, yang mencerminkan tingkat kesetaraan gender yang jauh lebih baik. Untuk mengejar ketertinggalan, Pemerintah Kabupaten Seluma perlu memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.



Gambar II-16. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Seluma dengan Provinsi dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur strategis untuk menilai sejauh mana perempuan di Kabupaten Seluma memiliki kesempatan yang setara dalam kehidupan publik dan ekonomi. Indikator ini mencakup partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, jabatan strategis, serta kontribusinya dalam pendapatan ekonomi rumah tangga. IDG yang tinggi mencerminkan tingkat pemberdayaan yang kuat, di mana perempuan tidak hanya menikmati hak yang sama dalam akses layanan dasar, tetapi juga memainkan peran penting dalam memengaruhi kebijakan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma, khususnya untuk RPJMD 2025–2029, peningkatan IDG menjadi bagian penting dalam



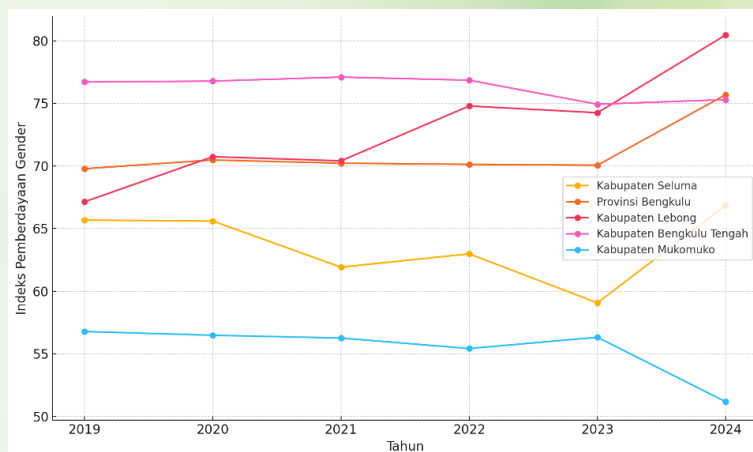
mendorong kesetaraan dan keadilan gender yang substansial. Pemerintah daerah perlu memastikan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pemerintahan, memperluas akses terhadap pelatihan kepemimpinan, serta mendukung perempuan dalam kewirausahaan dan sektor formal. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi agenda sosial, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Seluma.

Tabel II-37. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu	69,78	70,48	70,22	70,13	70,06	75,69
Bengkulu Selatan	55,2	55,03	54,62	55,63	55,87	60,92
Rejang Lebong	64,71	64,82	65,7	63,57	63,13	64,53
Bengkulu Utara	65,77	62,32	62,52	62,39	61,88	59,07
Kaur	62,13	61,17	61,72	62,29	62,89	71,16
Seluma	65,68	65,6	61,92	62,98	59,07	66,86
Mukomuko	56,78	56,48	56,26	55,42	56,32	51,17
Lebong	67,14	70,74	70,41	74,79	74,25	80,46
Kepahiang	65,09	66,27	66,96	67,12	66,41	55,37
Bengkulu Tengah	76,71	76,78	77,1	76,85	74,93	75,3
Kota Bengkulu	77,58	77,68	77,67	77,54	75,94	76

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Seluma mengalami fluktuasi selama periode 2019–2024. Nilainya sempat menurun dari 65,68 pada 2019 menjadi 59,07 pada 2023, sebelum naik kembali ke angka 66,86 pada 2024. Tren ini menunjukkan adanya dinamika dalam partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik. Meski capaian tahun 2024 mencatatkan perbaikan, nilai tersebut masih menunjukkan bahwa ruang pemberdayaan perempuan di Seluma belum optimal. Tantangan seperti keterbatasan akses perempuan terhadap posisi strategis dan lapangan kerja yang inklusif kemungkinan menjadi faktor yang memengaruhi dinamika ini.





Gambar II-17. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Seluma dengan Provinsi dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Seluma berada di tengah. Capaian Seluma lebih baik dibandingkan Mukomuko (51,17) dan Bengkulu Utara (59,07), namun masih tertinggal dari daerah seperti Lebong (80,46), Kota Bengkulu (76), dan Bengkulu Tengah (75,3). Fakta ini memperkuat urgensi untuk memperluas pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Dukungan terhadap perempuan sebagai pelaku usaha, pemimpin komunitas, maupun ASN di posisi strategis perlu diperkuat dalam RPJMD Kabupaten Seluma 2025–2029.

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi indikator strategis dalam mengukur kemajuan pembangunan generasi muda di Kabupaten Seluma, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi publik, dan kesetaraan gender. Nilai IPP yang tinggi menunjukkan bahwa pemuda memiliki akses luas terhadap layanan dasar dan kesempatan yang memungkinkan mereka berkembang menjadi individu yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing di berbagai bidang. Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Seluma 2025–2029, peningkatan IPP sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia ke depan,



khususnya dalam memanfaatkan potensi bonus demografi dan memperkuat ketahanan sosial daerah.

Upaya peningkatan IPP di Seluma perlu difokuskan pada penguatan pendidikan dan pelatihan kerja, layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan remaja, serta penyediaan ruang partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik. Pemuda Seluma harus diberikan peran lebih besar dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah, sekaligus difasilitasi untuk mengembangkan potensi di bidang ekonomi kreatif dan transformasi digital. Dengan strategi yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan pemuda di Seluma dapat menjadi fondasi bagi pencapaian visi pembangunan daerah yang elok, maju, adil, sejahtera, berkelanjutan, dan beriman.

Tabel II-38. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu 2016-2023

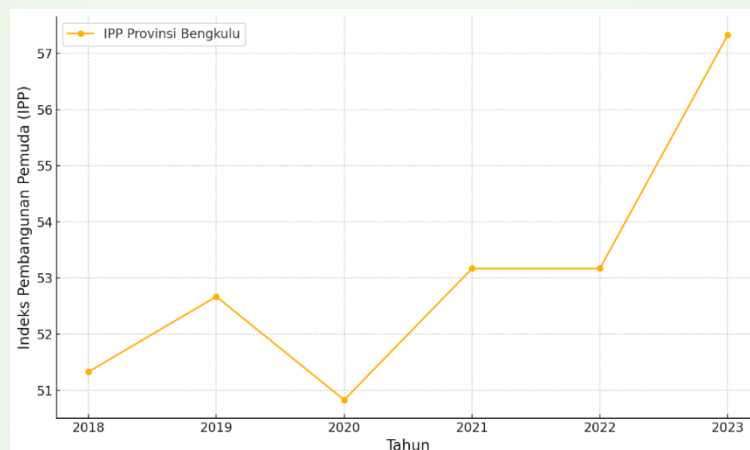
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan	X1 (Rata-rata lama sekolah)	10,53	10,77	10,87	11,14	11,09	11,22
	X2 (APK Sekolah Menengah)	88,95	91,54	92,7	92,98	92,38	93,85
	X3 (APK Perguruan Tinggi)	38,31	37,63	38,39	38,66	38,15	38,01
	D1	70	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33
Kesehatan dan Kesejahteraan	X4 (Angka kesakitan pemuda)	7,21	8,7	8,23	8,61	10,7	6,52
	X5 (Persentase korban kejahatan)	1,31	1,77	1,54	1,18	0,87	0,79
	X6 (Persentase pemuda yang merokok)	29,75	30	29,54	28,21	28,03	27,12
	X7 (Persentase remaja perempuan yang sedang hamil)	16,31	14,94	27,3	23,12	23,12	11,21
	D2	55	50	42,5	52,5	52,5	65
Lapangan dan Kesempatan Kerja	X8 (Persentase pemuda wirausaha kerah putih)	0,21	0,32	0,32	0,51	0,56	0,63
	X9 (Tingkat pengangguran terbuka)	9,96	8,34	9,86	9,67	8,84	9,39
	D3	45	50	45	50	50	55
Partisipasi dan Kepemimpinan	X10 (Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan)	78,65	78,65	78,65	64,8	64,8	65,73
	X11 (Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi)	7,79	7,79	7,79	4,54	4,54	5,88
	X12 (Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat)	9,9	9,9	9,9	5,2	5,2	5,97
	D4	46,67	46,67	46,67	40	40	40
Gender dan	X13 (Angka perkawinan)	14,33	13,24	10,68	11,93	11,93	7,01



		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Diskriminasi	usia anak)						
	X14 (Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas)	45,8	45,81	47,34	48,93	48,93	48,33
	X15 (Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)	15,89	21,29	19,17	19,36	18,85	20,07
	D5	40	43,33	46,67	50	50	53,33
IPP		51,33	52,67	50,83	53,17	53,17	57,33

Sumber: <https://ipp.sarikata.com>

Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bengkulu tahun 2018–2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif. IPP meningkat dari 51,33 pada tahun 2018 menjadi 57,33 pada tahun 2023, menandakan adanya kemajuan dalam pembangunan pemuda di berbagai aspek penting. Salah satu lonjakan paling mencolok terjadi pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan (D2), yang naik signifikan dari 52,5 menjadi 65 pada 2023, didorong oleh menurunnya angka kesakitan dan penurunan tajam persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Selain itu, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja (D3) juga mencatat peningkatan dari 45 menjadi 55, yang menunjukkan semakin membaiknya akses pemuda terhadap pekerjaan, meskipun angka pengangguran masih perlu diwaspadai.



Gambar II-18. Tren Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2023

Sementara itu, domain Pendidikan dan Keterampilan (D1) tetap stabil di angka 73,33 sejak 2019, menandakan bahwa capaian pendidikan formal



pemuda telah mencapai titik yang cukup tinggi namun belum mengalami peningkatan baru. Di sisi lain, domain Partisipasi dan Kepemimpinan (D4) stagnan di angka 40 sejak 2021, menunjukkan masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam organisasi dan kegiatan sosial. Domain Gender dan Diskriminasi (D5) mencatat peningkatan menjadi 53,33, mencerminkan penurunan angka perkawinan usia anak dan meningkatnya keterlibatan perempuan muda dalam pendidikan dan sektor formal. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu telah mengalami kemajuan dalam pembangunan pemuda, namun masih memerlukan perhatian serius pada aspek partisipasi sosial, kewirausahaan, dan pendidikan tinggi agar potensi generasi muda dapat dimaksimalkan secara optimal.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan pilar utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seluma. Daya saing mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola berbagai potensi strategis, terutama sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sistem ekonomi secara efisien dan inovatif. Penguatan daya saing tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, penguatan daya saing diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, optimalisasi pemanfaatan inovasi dan teknologi, penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru, percepatan transformasi digital, serta integrasi ekonomi lokal ke dalam jejaring domestik dan global. Keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga menjadi agenda strategis guna membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan. Di sisi lain, stabilitas ekonomi makro dijaga sebagai fondasi untuk mendukung kesinambungan fiskal dan kebijakan pembangunan yang mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan. Seluruh aspek ini diukur



melalui indikator-indikator kontekstual yang mencerminkan kesiapan Kabupaten Seluma dalam menjawab tantangan masa depan secara adaptif, resilien, dan kompetitif.

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai daya saing sumber daya manusia, khususnya dari sisi struktur demografi dan potensi ekonomi. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, rasio ketergantungan yang rendah menandakan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif, sehingga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat basis tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi belanja sosial pemerintah. Sebaliknya, angka ketergantungan yang tinggi mengindikasikan beban ekonomi yang lebih besar bagi kelompok usia produktif, yang dapat menghambat akumulasi modal manusia dan menurunkan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pemanfaatan potensi usia produktif yang besar harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap lapangan kerja. Hal ini penting agar bonus demografi yang tercermin dari rasio ketergantungan rendah benar-benar dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi. Penguatan sektor pendidikan, pelatihan vokasional, serta penciptaan iklim investasi dan usaha yang menyerap tenaga kerja lokal akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa struktur penduduk produktif benar-benar mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bengkulu Tengah secara berkelanjutan.

Tabel II-39. Angka Ketergantungan Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024

Tahun	Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14 & 65+)	Penduduk Usia Produktif (15-64)	Angka Ketergantungan (%)
2020	63.377	144.500	43,86
2021	64.118	146.387	43,80
2022	65.089	148.666	43,78
2023	66.242	148.821	44,51



2024	67.333	150.174	44,84

Angka ketergantungan di Kabupaten Seluma selama periode 2020–2024 menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, dari 42,08% pada tahun 2020 menjadi 43,61% pada tahun 2024. Secara absolut, jumlah penduduk usia tidak produktif (kelompok usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) meningkat sebesar 2.676 jiwa dalam lima tahun, dari 34.566 jiwa pada tahun 2020 menjadi 37.242 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, kelompok usia produktif (15–64 tahun) hanya mengalami peningkatan sebesar 3.291 jiwa, dari 82.140 jiwa menjadi 85.431 jiwa pada periode yang sama. Kesenjangan laju pertumbuhan antarkelompok ini mempertegas bahwa beban tanggungan terhadap kelompok usia produktif cenderung membesar.

Peningkatan angka ketergantungan sebesar 1,53 poin persentase dalam lima tahun terakhir harus dilihat sebagai sinyal penting bagi perencanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Seluma. Rasio ini menggambarkan bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menopang sekitar 43 orang yang berada dalam kelompok usia belum atau tidak produktif. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pembangunan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja.

Kenaikan kelompok usia muda (0–4 tahun dan 5–9 tahun) selama periode 2020–2024 juga memperlihatkan potensi pertumbuhan angkatan kerja dalam satu hingga dua dekade mendatang. Namun, potensi tersebut hanya akan berdampak positif terhadap daya saing daerah jika diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan dasar, kesiapan sistem pendidikan menengah dan vokasional, serta perluasan akses terhadap pasar kerja yang produktif. Sementara itu, peningkatan penduduk lansia (65 tahun ke atas), yang naik dari 10.868 jiwa pada tahun 2020 menjadi 13.609 jiwa pada tahun 2024, turut menambah beban pembiayaan sosial dan kesehatan, serta menuntut kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap struktur usia menua.



Implikasi dari tren ini adalah perlunya integrasi kebijakan kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan dalam kerangka RPJMD 2025–2029. Pemerintah daerah perlu mendorong reformasi kebijakan pendidikan berbasis kompetensi, memperkuat sistem pelatihan kerja yang responsif terhadap kebutuhan pasar, dan menciptakan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja usia produktif secara luas. Tanpa intervensi strategis, struktur demografi Kabupaten Seluma dapat menjadi beban ketimbang peluang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di masa depan.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan merupakan nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi di suatu wilayah selama periode tertentu. Kegiatan ini mencakup berbagai subsektor seperti industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, logam, furnitur, dan aneka produk manufaktur lainnya. Industri pengolahan berfungsi sebagai jembatan antara sektor primer dan tersier, serta memiliki peran sentral dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan produktivitas daerah.

Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, PDRB industri pengolahan menjadi salah satu indikator strategis dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Peningkatan kontribusi sektor ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan, memperluas kesempatan kerja, serta membangun struktur ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sektor industri pengolahan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahunan daerah.



Tabel II-40. PDRB Kabupaten Seluma Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.377,25	1.391,12	1.422,43	1.436,55	1468,63	1.377,25
B. Pertambangan dan Penggalian	97,31	102,46	105,08	104,56	107,99	97,31
C. Industri Pengolahan	235,96	242,20	255,03	256,87	269,07	235,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,29	3,61	3,81	4,10	4,29	3,29
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,20	5,20	5,41	5,60	5,96	5,20
F. Konstruksi	151,54	155,09	161,14	166,34	174,09	151,54
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	227,78	246,84	260,46	267,00	278,02	227,78
H. Transportasi dan Pergudangan	64,98	66,95	70,19	74,14	78,02	64,98
I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	45,07	45,57	49,07	53,32	59,2	45,07
J. Informasi dan Komunikasi	32,57	35,65	39,75	43,22	47,26	32,57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	23,23	24,70	25,21	24,85	26,12	23,23
L. Real Estate	130,47	132,17	139,53	150,77	157,38	130,47
M,N. Jasa Perusahaan	3,51	3,48	3,87	4,20	4,56	3,51
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	274,12	274,57	275,09	291,83	313,82	274,12
P. Jasa Pendidikan	151,21	154,57	153,49	160,94	171,24	151,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,83	29,51	29,16	31,64	33,98	27,83
R,S,T,U. Jasa Lainnya	19,02	19,26	19,91	21,59	23,75	19,02
Produk Domestik Regional Bruto	2.870,32	2.932,95	3.018,64	3.097,53	3.223,40	2.870,32
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	2.870,32	2.932,95	3.018,64	3.097,53	3.223,40	2.870,32

Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga konstan menunjukkan kecenderungan stabil pada kisaran 8,2% hingga 8,4% sepanjang periode 2019–2023. Pada tahun 2019, sektor ini menyumbang sekitar 8,22% dari total PDRB, meningkat menjadi 8,44% pada tahun 2021, dan mencapai titik tertinggi pada 2023 sebesar 8,35%. Namun demikian, angka tahun 2024 kembali turun ke level semula, yaitu 8,22%, seiring dengan stagnasi nilai PDRB sektor industri yang tidak mengalami peningkatan nominal dari tahun 2019.

Stabilitas rasio ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan belum mengalami ekspansi struktural yang signifikan dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Keterbatasan dalam investasi, skala produksi, serta konektivitas antar sektor masih menjadi kendala utama dalam



peningkatan kontribusi sektor ini. Dengan demikian, peningkatan rasio PDRB industri pengolahan memerlukan intervensi strategis melalui pembangunan infrastruktur pendukung, fasilitasi industri berbasis komoditas unggulan, serta integrasi hulu-hilir yang mampu mendorong pertumbuhan nilai tambah secara konsisten dan terukur.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga konstan menunjukkan tren pertumbuhan moderat selama periode 2019–2023. Pada tahun 2019, sektor ini menyumbang sekitar 1,57% dari total PDRB, kemudian mengalami peningkatan bertahap menjadi 1,98% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya perluasan aktivitas ekonomi lokal di bidang jasa konsumsi, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan mobilitas penduduk antarwilayah.

Meskipun kontribusi relatifnya masih tergolong kecil dibandingkan sektor-sektor utama seperti pertanian dan administrasi pemerintahan, tren positif ini mengindikasikan bahwa sektor akomodasi dan makan minum memiliki potensi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis jasa di Kabupaten Seluma. Penguatan sektor ini ke depan memerlukan intervensi strategis, termasuk dukungan terhadap pelaku UMKM kuliner, promosi pariwisata lokal, serta perbaikan infrastruktur dan layanan yang mendukung kegiatan konsumsi masyarakat dan kunjungan wisata.

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Rasio kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga konstan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dalam periode 2019–2023. Pada tahun 2019, sektor ini menyumbang Rp45,07 miliar atau sekitar 1,57% dari total PDRB, dan meningkat menjadi Rp59,20 miliar atau sekitar 1,98% pada tahun 2023. Kenaikan kontribusi sebesar 0,41 poin persentase dalam lima tahun mencerminkan adanya ekspansi aktivitas ekonomi di bidang konsumsi,



terutama yang berkaitan dengan jasa kuliner, penginapan, dan layanan pendukung.

Pertumbuhan tertinggi secara nominal terjadi pada periode 2021–2023, yakni dari Rp49,07 miliar ke Rp59,20 miliar, menunjukkan percepatan pemulihan dan peningkatan permintaan konsumsi pascapandemi. Meskipun nilai dan persentasenya masih relatif kecil dibandingkan sektor-sektor dominan seperti pertanian atau perdagangan, tren yang ditunjukkan sektor ini tetap signifikan dalam konteks diversifikasi struktur ekonomi daerah. Sektor ini juga secara konsisten berada di atas sektor-sektor seperti jasa perusahaan, pengadaan listrik dan gas, serta pengelolaan limbah.

Stabilitas dan pertumbuhan rasio kontribusi sektor ini menunjukkan potensi penguatan ekonomi berbasis jasa di Kabupaten Seluma, khususnya dalam mendukung pembangunan pariwisata dan kegiatan konsumsi masyarakat. Untuk mendorong peningkatan kontribusi lebih lanjut, diperlukan intervensi yang terarah dalam bentuk pelatihan sumber daya manusia, penguatan UMKM kuliner dan penginapan, serta kebijakan yang mendukung daya saing sektor jasa lokal secara berkelanjutan.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator strategis yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kapasitas penyediaan tenaga kerja dalam suatu daerah, tetapi juga memperlihatkan dinamika struktur sosial dan ekonomi, termasuk hasil dari kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, TPAK menjadi alat ukur penting dalam menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia daerah. TPAK yang tinggi menandakan bahwa mayoritas



penduduk usia produktif terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan sektor-sektor produktif, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, TPAK yang rendah dapat mengindikasikan masalah struktural seperti minimnya ketersediaan lapangan kerja yang layak, ketimpangan gender dalam dunia kerja, atau rendahnya keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan TPAK perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah melalui investasi pada pelatihan vokasional, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta integrasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel II-41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	70,11	73,95	75,64	75,95	74,45
Rejang Lebong	77,93	76,09	74,46	77,86	74,92
Bengkulu Utara	72	67,62	67,72	68,6	71,9
Kaur	69,54	69,28	72,22	68,44	71,63
Seluma	76,45	70,13	70,57	73,44	73,45
Mukomuko	65,68	64,11	62,72	67,16	66,46
Lebong	74,38	72,01	72,8	70,23	71,67
Kepahiang	78,99	75,59	74,47	75,73	76,51
Bengkulu Tengah	69,71	67,32	65,16	64,96	68,89
Kota Bengkulu	65,99	65,42	66,29	66,61	68,54
Provinsi Bengkulu	71,73	69,75	69,81	70,91	71,71

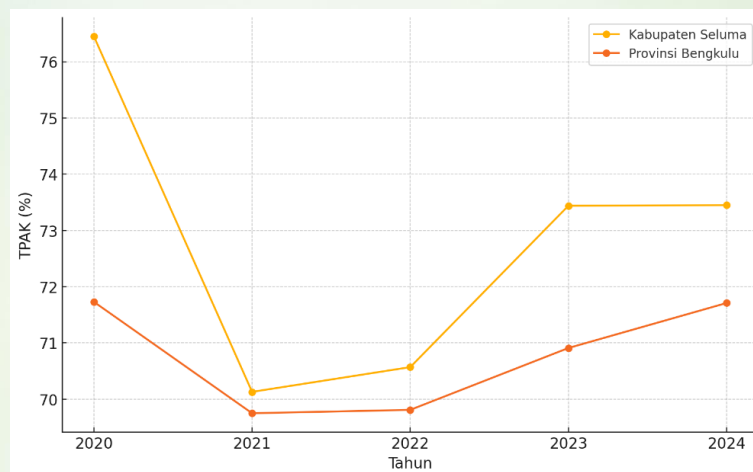
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seluma menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Tertinggi pada tahun 2020 sebesar 76,45 persen, TPAK Seluma sempat menurun drastis menjadi 70,13 persen di tahun 2021, lalu bergerak naik kembali dan stabil pada kisaran 73,44 hingga 73,45 persen pada dua tahun terakhir. Meskipun mengalami penurunan dari posisi awal, capaian TPAK Seluma tetap berada di atas rata-rata provinsi selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja relatif tinggi.

Dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, TPAK Kabupaten Seluma secara konsisten lebih tinggi setiap tahun, dengan selisih tertinggi tercatat



pada tahun 2020 sebesar 4,72 poin persentase. Sementara itu, bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Seluma termasuk dalam kelompok dengan TPAK menengah-atas. Kabupaten seperti Kepahiang dan Rejang Lebong mencatat angka TPAK yang lebih tinggi, masing-masing mencapai 76,51 persen dan 77,86 persen pada tahun tertinggi. Sebaliknya, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko mencatat angka TPAK yang lebih rendah dari Seluma selama hampir seluruh periode. Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma memiliki potensi tenaga kerja aktif yang cukup besar, namun tetap memerlukan kebijakan afirmatif untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi, khususnya pada kelompok perempuan dan usia muda.



Gambar II-19. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Seluma dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

5. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan atau program yang bersifat inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Penilaian ini disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan menjadi salah satu alat ukur untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah secara terstruktur dan berkelanjutan.



Bagi Kabupaten Seluma, penguatan inovasi daerah menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan fiskal, rendahnya daya saing, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Dalam beberapa tahun terakhir, geliat inovasi mulai tumbuh melalui berbagai inisiatif di sektor pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Namun demikian, capaian indeks inovasi daerah Seluma masih tergolong sedang dan memerlukan penguatan kelembagaan inovasi, kolaborasi antar-perangkat daerah, serta keberanian mencoba pendekatan baru berbasis teknologi, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat.

Tabel II-42. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Wilayah	2021		2022		2023		2024	
	Indeks Inovasi	Kategori	Indeks Inovasi	Kategori	Indeks Inovasi	Kategori	Indeks Inovasi	Kategori
Provinsi Bengkulu	57,93	Inovatif	48,57	Inovatif	51,49	Inovatif	53,39	Inovatif
Kota Bengkulu	59,37	Inovatif	64	Sangat Inovatif	69,46	Sangat Inovatif	76,72	Sangat Inovatif
Bengkulu Utara	52,61	Inovatif	55,42	Inovatif	48,16	Inovatif	55,39	Inovatif
Bengkulu Selatan	50,42	Inovatif	37,95	Inovatif	51,45	Inovatif	54,34	Inovatif
Kepahiang	46	Inovatif	46,49	Inovatif	48,15	Inovatif	39,68	Inovatif
Seluma	45,05	Inovatif	42,85	Inovatif	42,73	Inovatif	51,64	Inovatif
Rejang Lebong	44,07	Inovatif	51,32	Inovatif	40,69	Inovatif	47,67	Inovatif
Bengkulu Tengah	37,47	Inovatif	40,24	Inovatif	34,18	Kurang Inovatif	42,04	Inovatif
Kaur	11,68	Kurang Inovatif	41,29	Inovatif	48,39	Inovatif	40,45	Inovatif
Mukomuko	11,76	Kurang Inovatif	41,54	Inovatif	32,89	Kurang Inovatif	23,16	Kurang Inovatif
Lebong	22,69	Kurang Inovatif	27,41	Kurang Inovatif	45,92	Inovatif	38,26	Inovatif

Selama periode 2021 hingga 2024, kinerja inovasi Kabupaten Seluma secara konsisten berada dalam kategori “Inovatif”, meskipun nilai indeksnya menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, indeks inovasi Seluma berada di angka 45,05 dan sedikit menurun menjadi 42,85 pada 2022 dan 42,73 pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 51,64, menunjukkan adanya penguatan dalam ekosistem inovasi daerah, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun kolaborasi lintas



sektor. Meskipun belum mencapai kategori “Sangat Inovatif”, kenaikan nilai indeks pada tahun terakhir mengindikasikan perbaikan arah kebijakan dan implementasi program berbasis inovasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Seluma.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024, Kabupaten Seluma masih berada di kelompok tengah dalam klasifikasi indeks inovasi. Nilai indeks Seluma (51,64) lebih tinggi dibandingkan Rejang Lebong (47,67), Kepahiang (39,68), Kaur (40,45), Bengkulu Tengah (42,04), Lebong (38,26), dan Mukomuko (23,16). Namun demikian, Seluma masih tertinggal cukup jauh dari Kota Bengkulu yang telah konsisten berada dalam kategori “Sangat Inovatif” dan mencapai nilai tertinggi sebesar 76,72 pada tahun 2024. Dengan posisi saat ini, Kabupaten Seluma memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan inovasi yang lebih agresif melalui kebijakan yang mendukung budaya inovasi, peningkatan kapasitas SDM ASN, serta kolaborasi aktif dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha dalam menciptakan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan daerah.

C. Transformasi Digital

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan TIK di suatu daerah. Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu akses dan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta keterampilan TIK. Ketiga aspek tersebut mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap perangkat dan jaringan teknologi informasi, mampu menggunakannya secara produktif dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki kompetensi literasi digital yang memadai. Peningkatan IP-TIK menandakan bahwa suatu daerah semakin siap dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era transformasi digital.



Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma tahun 2025–2029, IP-TIK memegang peran strategis sebagai indikator kesiapan daerah dalam mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Kenaikan nilai IP-TIK akan berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), percepatan digitalisasi layanan publik, serta pengembangan sektor ekonomi digital yang inklusif, termasuk dalam pemberdayaan pelaku UMKM dan wirausaha muda lokal. Selain itu, peningkatan keterampilan digital masyarakat akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan IP-TIK perlu menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Seluma yang berorientasi pada inklusivitas, adaptabilitas, dan keberlanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur teknologi yang merata hingga ke wilayah perdesaan, peningkatan literasi digital melalui pendidikan formal dan nonformal, serta sinergi lintas sektor dalam memperluas pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat fondasi TIK, Kabupaten Seluma akan lebih siap menghadapi era digital dan mampu membangun sistem pembangunan yang lebih cerdas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Tabel II-43. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Provinsi Bengkulu 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Akses & Infrastruktur	5,5	5,73	5,99	5,89	6,01	6,13
Penggunaan	3,61	4,13	4,58	5,52	5,66	5,74
Keahlian	6,2	6,29	6,37	6,41	6,4	6,45
IP-TIK	4,88	5,2	5,5	5,85	5,95	6,04

Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Nilai IP-TIK meningkat dari 4,88 pada tahun 2018 menjadi 6,04 pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh kemajuan di



ketiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian. Subindeks keahlian mencatat nilai tertinggi sepanjang periode, mencapai 6,45 pada tahun 2023, menandakan adanya kemajuan dalam kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. Subindeks penggunaan TIK menunjukkan peningkatan paling signifikan, dari 3,61 di tahun 2018 menjadi 5,74 pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan kesadaran dan adopsi teknologi di kalangan masyarakat.

Peningkatan indeks ini menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur digital dan penguatan literasi TIK di Bengkulu telah memberikan dampak positif terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi transformasi digital. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perencanaan pembangunan ke depan, termasuk dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma 2025–2029. Dengan mendorong percepatan pembangunan TIK melalui kebijakan yang memperluas akses, meningkatkan penggunaan, dan memperkuat keahlian digital, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, efisiensi pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan pendekatan penting untuk melihat kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. IMDI disusun berdasarkan pengembangan dari G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy, dan menjadi kerangka kerja komprehensif dalam mengukur keterampilan digital masyarakat secara objektif dan terstandarisasi.

Kerangka IMDI terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pilar, subpilar, dan indikator. Secara khusus, terdapat empat pilar utama dalam pengukuran IMDI, yaitu:

- a. Infrastruktur dan Ekosistem



Pilar ini menjadi landasan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan jangkauan, kualitas, dan biaya layanan internet. Pilar ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap infrastruktur digital, serta pentingnya keberadaan ekosistem pembelajaran yang mendukung kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi.

b. Keterampilan Digital

Pilar ini mencakup literasi digital dan keterampilan dasar penggunaan teknologi. Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kesetaraan, seperti perbedaan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penguasaan teknologi antar kelompok masyarakat. Pilar ini merujuk pada Digital Literacy Global Framework dari UNESCO sebagai acuan pengembangan indikator.

c. Pemberdayaan

Pilar ini mencerminkan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan peluang ekonomi, baik melalui usaha digital mandiri maupun partisipasi dalam ekonomi berbagi (sharing economy). Akses terhadap platform digital tidak hanya membuka ruang bagi peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

d. Pekerjaan

Pilar ini berfokus pada keterampilan digital yang dibutuhkan dalam dunia kerja, baik saat ini maupun di masa depan. Pengukuran meliputi kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital untuk menyelesaikan tugas kerja, serta kesesuaian antara permintaan



keterampilan di pasar tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.

Melalui keempat pilar ini, IMDI memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi era digital. Bagi Kabupaten Seluma, penguatan indikator-indikator IMDI menjadi bagian strategis dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan berbasis teknologi informasi.

Tabel II-44. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024

Tahun	Kabupaten/ Kota	Indeks Masyarakat Digital	Pilar Infrastruktur dan Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
2022	Bengkulu Selatan	36,17	31,65	53,82	20,74	37,83
	Bengkulu Tengah	42,30	36,52	62,38	27,11	42,26
	Bengkulu Utara	33,81	33,85	39,51	22,84	39,3
	Kaur	39,08	33,96	51,04	22,88	47,81
	Kepahiang	45,67	36,71	67,67	27,93	48,89
	Kota Bengkulu	40,99	40,7	59,9	23,38	40,22
	Lebong	41,48	32,43	67,53	25,46	38,89
	Mukomuko	41,09	37,86	56,14	26,89	43,07
	Rejang Lebong	34,31	33,48	42,01	21,35	40,53
	Seluma	43,48	31,49	70,07	27,81	42,36
	Provinsi Bengkulu	39,82	34,86	57,06	24,64	42,12
2023	Bengkulu Selatan	41,88	55,2	50,86	27,01	35,23
	Bengkulu Tengah	46,42	53,95	70,65	24,62	36,01
	Bengkulu Utara	44,65	53,13	63,2	26,58	35,22
	Kaur	45,90	55,24	65,18	27,68	34,23
	Kepahiang	48,45	54,95	71,26	30,24	35,07
	Kota Bengkulu	45,72	56,58	71,35	21,39	32,8
	Lebong	44,59	56,29	62,48	23,98	36,4
	Mukomuko	46,68	53,77	68,75	27,47	35,58
	Rejang Lebong	41,88	53,16	53,17	26,36	35,66
	Seluma	45,93	53,1	70,28	24,81	34,55
	Provinsi Bengkulu	45,21	56,55	58,38	27,51	36,16
2024	Bengkulu Selatan	38,65	51,94	49,73	19,8	36,21
	Bengkulu Tengah	42,18	50,71	59,73	23,1	36,37
	Bengkulu Utara	45,46	54,08	69,21	22,25	37
	Kaur	44,19	49,13	64,13	25,81	38,41
	Kepahiang	47,88	51,01	66,29	32,91	40,82
	Kota Bengkulu	47,25	58,58	63,56	29	37,7
	Lebong	39,78	51,86	54,4	19,15	36,6
	Mukomuko	44,58	50,52	63,25	26,78	38,33
	Rejang Lebong	44,13	54,86	62,56	22,42	38,63
	Seluma	41,60	51,77	58,46	21,62	36,25



	Provinsi Bengkulu	43,57	52,45	61,13	24,28	37,63

Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/>

Selama periode 2022 hingga 2024, kinerja digitalisasi masyarakat Kabupaten Seluma mengalami dinamika yang menunjukkan tantangan dalam mempertahankan capaian yang optimal. Pada tahun 2022, indeks masyarakat digital Seluma mencapai 43,48 dan menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Bengkulu. Capaian tersebut terutama ditopang oleh Pilar Keterampilan Digital yang sangat tinggi, yakni 70,07, dan Pilar Pemberdayaan sebesar 27,81. Namun, pada tahun 2023 indeks meningkat sedikit menjadi 45,93, masih dengan keunggulan di Pilar Keterampilan Digital sebesar 70,28, meskipun terjadi sedikit penurunan di Pilar Pemberdayaan dan Pekerjaan. Memasuki tahun 2024, terjadi penurunan nilai indeks menjadi 41,60. Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya Pilar Keterampilan Digital menjadi 58,46 dan Pilar Pemberdayaan yang turun menjadi 21,62. Meskipun Pilar Infrastruktur dan Ekosistem membaik dari 31,49 pada 2022 menjadi 51,77 pada 2024, peningkatan ini belum mampu mengimbangi penurunan di pilar-pilar lainnya.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024, posisi Kabupaten Seluma berada di bawah rata-rata provinsi yang mencatat angka 43,57. Kabupaten Seluma juga tertinggal dari beberapa daerah seperti Kepahiang (47,88), Kota Bengkulu (47,25), dan Bengkulu Utara (45,46). Meskipun demikian, Seluma masih menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Lebong (39,78) dan Bengkulu Selatan (38,65). Penurunan indeks ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan percepatan transformasi digital, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan keterampilan digital. Penguatan literasi digital, pemanfaatan teknologi untuk ekonomi lokal, serta peningkatan akses infrastruktur digital yang inklusif menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas masyarakat digital Seluma ke depan.



D. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen penting dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran. Indikator ini mencerminkan besarnya investasi fisik yang dilakukan dalam suatu wilayah, berupa pengeluaran untuk aset tetap seperti mesin, peralatan, bangunan, kendaraan, infrastruktur, dan sarana produksi lainnya yang digunakan untuk kegiatan ekonomi jangka panjang. PMTB menjadi gambaran langsung mengenai pembangunan kapasitas produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Peran PMTB sangat strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Seluma, terutama dalam menyusun RPJMD Tahun 2025–2029. Peningkatan nilai PMTB mencerminkan optimisme pelaku ekonomi, masuknya investasi baru, serta perluasan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah maupun swasta. Dengan bertambahnya aset produktif, daya saing daerah pun meningkat, yang pada akhirnya memperkuat struktur ekonomi lokal. Sebaliknya, stagnasi atau penurunan PMTB dapat menjadi indikasi lemahnya iklim investasi, keterbatasan anggaran pembangunan fisik, atau hambatan regulasi yang perlu segera diatasi.

Untuk mengukur perkembangan PMTB secara akurat, analisis berbasis PDRB harga konstan lebih tepat digunakan dibandingkan harga berlaku. Penggunaan harga konstan memungkinkan evaluasi pertumbuhan investasi fisik riil dari waktu ke waktu tanpa distorsi akibat inflasi. Pemerintah Kabupaten Seluma perlu menjadikan indikator ini sebagai bagian penting dalam evaluasi capaian pembangunan, serta mendorong pertumbuhan PMTB melalui peningkatan kualitas belanja modal, kemudahan perizinan usaha, dan pembangunan infrastruktur strategis yang mampu menarik investasi jangka panjang.



Tabel II-45. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seluma Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.931,56	1.974,65	2.056,97	2.137,56	2.240,41
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	49,66	47,93	51,73	57,67	64,89
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	524,64	529,06	528,80	548,35	592,32
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.789,90	1.878,39	1.942,21	1.978,47	2.019,98
Perubahan Inventori	31,59	1,10	1,83	-17,95	5,86
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.457,03	-1.498,16	-1.562,92	-1.606,56	-1.700,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.870,32	2.932,95	3.018,64	3.097,53	3.223,40

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Seluma menunjukkan pertumbuhan yang stabil selama periode 2020–2024 berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan. Nilainya meningkat dari Rp1.789,90 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.019,98 miliar pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 12,9% dalam lima tahun. Kenaikan ini mencerminkan adanya ekspansi investasi fisik di daerah, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengadaan alat produksi, maupun aset tetap lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan PMTB yang konsisten mengindikasikan adanya kepercayaan dari sektor publik maupun swasta terhadap prospek ekonomi Kabupaten Seluma. Ini juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah mulai mengarah pada penguatan kapasitas produksi dan pembangunan fisik yang berkelanjutan. Meskipun pertumbuhannya moderat, tren positif ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong iklim investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, dan memperkuat belanja modal yang produktif dalam kerangka RPJMD 2025–2029.

E. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat karena mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni.



Hunian layak tidak hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, pencahayaan dan ventilasi yang cukup, serta ketahanan terhadap kondisi lingkungan dan risiko bencana. Selain aspek teknis, hunian layak juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi, seperti keamanan lingkungan, kenyamanan, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, pemenuhan akses terhadap hunian layak menjadi prioritas strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Sebagai daerah dengan karakteristik geografis yang cukup beragam, termasuk wilayah pedesaan dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, upaya penyediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan harus ditingkatkan secara terintegrasi. Penyediaan hunian layak yang merata dan terjangkau memiliki implikasi langsung terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

Tabel II-46. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu 2020-2024(Persen)

2020	2021	2022	2023	2024
47,94	51,36	54,98	54,74	56,52

Berdasarkan data Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak di Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup positif. Pada tahun 2020, hanya sekitar 47,94% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, namun angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 56,52% pada tahun 2024. Meskipun sempat sedikit menurun dari 54,98% pada tahun 2022 menjadi 54,74% di tahun 2023, tren secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang konsisten.



Kenaikan hampir 9 poin persentase dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa program pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas tempat tinggal telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas akses terhadap hunian yang layak, termasuk melalui intervensi perbaikan rumah tidak layak huni, pengembangan kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Namun demikian, masih terdapat lebih dari 40% rumah tangga yang belum memiliki hunian sesuai standar kelayakan, yang menandakan perlunya kebijakan yang lebih agresif dan terintegrasi ke depan.

2. Rumah Tidak Layak Huni

Kabupaten Seluma masih menghadapi permasalahan dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang relatif tinggi. Namun, berbagai upaya lintas sektor telah dilakukan untuk mengurangi jumlah RTLH tersebut. Berdasarkan data jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan persentase penanganannya di Kabupaten Seluma tahun 2019–2023, terlihat bahwa permasalahan RTLH masih cukup signifikan di hampir semua kecamatan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanganan. Beberapa kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi pada tahun 2023 antara lain Seluma Selatan (5.515 unit), Sukaraja (2.070 unit), dan Ilir Talo (810 unit). Sementara itu, beberapa kecamatan memiliki jumlah RTLH relatif lebih rendah, seperti Seluma (210 unit) dan Talo Kecil (252 unit).

Tabel II-47. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Persentase Penanganan dari Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Unit	RTLH	Jumlah RTLH Tertangani					RTLH	Persentase				
				2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
			Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	%	%	%	%	%	%
1	Sukaraja	8,268	2,07	665	699	725	779	1,021	24.04	16.99	16.58	16.27	15.61	12.96
2	Air Perinkan	5,86	1,147	333	650	710	740	750	19.57	13.89	8.48	7.46	6.95	6.77
3	Lubuk Sandi	2,708	859	67	57	103	240	251	31.72	29.25	29.25	27.92	22.86	22.45
4	Seluma Barat	2,395	335	24	25	55	75	117	13.99	12.99	12.99	11.69	10.86	9.10
5	Seluma	2,445	210	151	151	155	156	164	8.59	2.41	2.41	2.25	2.21	1.88
6	Seluma Selatan	3,217	5,515	120	127	144	144	161	16.01	12.28	12.06	11.53	11.53	11.31
7	Seluma Utara	2,238	547	50	66	82	235	236	24.44	22.21	21.49	20.78	13.94	13.90



8	Seluma Timur	2,789	333	0	31	48	151	223	11.94	11.94	10.83	10.22	6.53	3.94
9	Talo	2,93	423	11	14	31	31	38	14.44	14.06	13.96	13.38	13.38	13.14
10	Ilin Talo	3,959	810	342	388	409	439	489	20.46	11.82	10.66	10.13	9.37	8.11
11	Ulu Talo	1,611	529	0	0	16	141	149	32.84	32.84	32.84	31.84	24.08	23.59
12	Talo Kecil	2,56	252	1	21	36	56	60	9.84	9.84	8.44	8.44	7.66	7.50
13	Semidang Alas	3,764	654	78	82	88	183	189	17.38	15.30	15.04	15.04	12.51	12.35
14	Semidang Alas Maras	6,085	839	92	112	113	113	126	13.79	12.28	11.93	11.93	11.93	11.72

Dari sisi persentase penanganan, sebagian besar kecamatan menunjukkan tren penurunan persentase RTLH yang berhasil ditangani dari tahun ke tahun. Misalnya, Kecamatan Sukaraja mengalami penurunan dari 24,04% pada 2019 menjadi 12,96% pada 2023, dan Air Periukan dari 19,57% menjadi 6,77% pada periode yang sama. Beberapa kecamatan memiliki capaian penanganan yang relatif lebih stabil, seperti Talo dan Semidang Alas, meskipun penurunannya tetap terlihat. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah RTLH yang tertangani belum mampu mengimbangi penambahan atau keberadaan RTLH baru setiap tahunnya. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi penanganan yang lebih agresif, terintegrasi lintas sektor, dan berbasis prioritas wilayah dengan jumlah RTLH tinggi, agar target pengurangan RTLH dapat dicapai secara lebih optimal di masa mendatang.

3. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi status desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencerminkan kapasitas desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara menyeluruh. Status ini menunjukkan bahwa desa telah mampu menyediakan infrastruktur dasar secara memadai, memiliki sistem pelayanan publik yang efisien, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, serta kegiatan ekonomi lokal yang dinamis. Desa Mandiri juga dicirikan oleh kuatnya tata kelola pemerintahan desa dan kemampuannya dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam sistem klasifikasi IDM, terdapat lima tingkat status desa yang menggambarkan level kemandirian dan pembangunan desa. Urutan status



dari yang tertinggi ke yang terendah adalah: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Desa dengan status Mandiri menandakan kondisi pembangunan yang optimal, sedangkan desa dengan status Tertinggal dan Sangat Tertinggal umumnya masih menghadapi persoalan mendasar dalam infrastruktur, layanan dasar, dan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat.

Peningkatan status desa dari kategori rendah ke kategori yang lebih tinggi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pembangunan desa dan keberhasilan intervensi kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam konteks RPJMD Kabupaten, strategi pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan mendorong peningkatan desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri perlu dijadikan agenda prioritas. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif dan berkeadilan yang memperkuat daya saing wilayah secara menyeluruh.

Melalui penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas aparatur, pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemerintah daerah dapat mempercepat pencapaian status desa Mandiri. Selain sebagai indikator kinerja pembangunan, peningkatan status IDM juga secara langsung mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

Hingga tahun 2024, belum terdapat satu pun desa di Provinsi Bengkulu yang mencapai status *Mandiri* menurut klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM). Status tertinggi yang dicapai oleh desa-desa di wilayah ini adalah *Maju*, yang baru berhasil diraih oleh beberapa kabupaten/kota seperti Kota Bengkulu, Mukomuko, dan Bengkulu Selatan. Sementara itu, sebagian besar kabupaten masih berada pada level *Berkembang*, menandakan bahwa



penguatan kapasitas pembangunan desa secara menyeluruh masih menjadi tantangan lintas wilayah.

Gambar II-20. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM
Bengkulu Selatan	2,27	Cukup	0,6749	Berkembang	0,7011	Berkembang	0,7161	Maju	0,7411	Maju
Rejang Lebong	1,66	Kurang	0,6461	Berkembang	0,6749	Berkembang	0,6909	Berkembang	0,7066	Berkembang
Bengkulu Utara	1,82	Cukup	0,6749	Berkembang	0,6925	Berkembang	0,7008	Berkembang	0,7187	Maju
Kaur	1	Kurang	0,6504	Berkembang	0,6659	Berkembang	0,6913	Berkembang	0,7092	Maju
Seluma	1,19	Kurang	0,6404	Berkembang	0,6531	Berkembang	0,6656	Berkembang	0,6796	Berkembang
Mukomuko	1,54	Kurang	0,6924	Berkembang	0,7018	Berkembang	0,7266	Maju	0,7485	Maju
Lebong	1,66	Kurang	0,6295	Berkembang	0,6469	Berkembang	0,666	Berkembang	0,6864	Berkembang
Kepahiang	2,03	Cukup	0,6518	Berkembang	0,669	Berkembang	0,6864	Berkembang	0,7106	Maju
Bengkulu Tengah	1,43	Kurang	0,6266	Berkembang	0,6563	Berkembang	0,6901	Berkembang	0,7104	Maju
Kota Bengkulu	1,74	Kurang	0,7123	Maju	0,7572	Maju	0,7572	Maju	0,7572	Maju
Provinsi Bengkulu	2,9	Baik	0,6559	Berkembang	0,6748	Berkembang	0,6935	Berkembang	0,7176	Maju

Kabupaten Seluma menunjukkan kemajuan bertahap dalam nilai IDM selama periode 2020–2024, dari 1,19 (status *Kurang*) pada tahun 2020 menjadi 0,6796 (status *Berkembang*) pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun, capaian ini masih menempatkan Seluma di bawah rata-rata provinsi (0,7176), dan belum mencapai ambang batas status *Maju* ($\geq 0,7050$). Jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Mukomuko (0,7485) dan Bengkulu Selatan (0,7411), Seluma berada di kelompok dengan progres IDM yang lebih lambat dan tertinggal dalam mendorong transisi status desa.

Meskipun demikian, tren peningkatan nilai IDM di Seluma mencerminkan adanya potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong desa menuju status *Maju* bahkan *Mandiri* di masa mendatang. Dengan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi desa, serta penguatan kelembagaan dan digitalisasi tata kelola desa, Kabupaten Seluma memiliki peluang untuk mendorong sebagian desa unggulnya melampaui batas *Berkembang*. Strategi pembangunan yang terintegrasi dalam RPJMD 2025–



2029 perlu diarahkan secara spesifik untuk mengangkat desa-desa potensial ini menuju status yang lebih tinggi secara bertahap dan berkelanjutan.

4. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di sektor kesehatan dan lingkungan. Sanitasi layak mencakup fasilitas buang air besar yang higienis, aman, dan tidak mencemari lingkungan, serta dikelola secara berkelanjutan. Di Kabupaten Seluma, peningkatan cakupan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah, mengingat masih adanya kesenjangan akses antar wilayah dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, indikator ini menjadi fokus penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan risiko penyakit berbasis lingkungan, dan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel II-48. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,02	74,73	84,09	83,81	84,42
Rejang Lebong	70,02	71,5	70,3	64,41	71,81
Bengkulu Utara	79,23	83,37	83,43	82,44	85,53
Kaur	78,21	81,23	82,14	83,4	84,63
Seluma	76,96	80,84	81,66	81,77	85,75
Mukomuko	81,04	86,78	79,12	90,84	88,61
Lebong	66,8	51,55	59,12	65,23	59,49
Kepahiang	65,95	66,89	68,54	70,55	72,55
Bengkulu Tengah	85,44	74,05	75,45	78,9	81,37
Kota Bengkulu	95,71	97,49	94,99	93,94	96,15
Provinsi Bengkulu	78,1	79,81	79,58	80,28	83,01

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Selama periode 2020 hingga 2024, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kabupaten Seluma mengalami peningkatan yang cukup stabil dan positif. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak berada di angka 76,96 persen dan meningkat menjadi 80,84



persen pada 2021. Tren kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2022 sebesar 81,66 persen dan tahun 2023 sebesar 81,77 persen, hingga akhirnya mencapai 85,75 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sebesar 8,79 poin dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam infrastruktur sanitasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang sehat dan aman. Pencapaian ini juga mengindikasikan bahwa program-program pembangunan sanitasi di Kabupaten Seluma telah berjalan cukup efektif dan tepat sasaran.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024, Kabupaten Seluma menempati posisi di atas rata-rata provinsi yang sebesar 83,01 persen. Bahkan, Seluma melampaui daerah lain seperti Bengkulu Selatan (84,42%), Kaur (84,63%), Bengkulu Tengah (81,37%), dan jauh lebih tinggi dibandingkan Lebong (59,49%) dan Kepahiang (72,55%). Pencapaian Seluma juga mendekati Bengkulu Utara (85,53%) dan hanya berada di bawah Kota Bengkulu (96,15%) serta Mukomuko (88,61%). Posisi ini menempatkan Kabupaten Seluma sebagai salah satu daerah dengan performa terbaik dalam pembangunan akses sanitasi layak. Ke depan, tantangan yang dihadapi bukan hanya meningkatkan cakupan, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem sanitasi, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta integrasi sanitasi dengan kebijakan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

F. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak daerah dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku, lalu dikalikan seratus



persen. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar tingkat partisipasi sektor perpajakan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, dan sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan masih terbatasnya kemampuan fiskal daerah dalam menggali potensi penerimaan dari kegiatan ekonomi lokal. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seluma, rasio ini menjadi alat ukur penting untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dan efektivitas kebijakan pengelolaan pajak. Selain itu, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi ruang perbaikan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta merancang strategi fiskal yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan ekonomi lokal.

Tabel II-49. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PDRB Harga Berlaku (Rp)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2020	10.258.560.367	4.730.450.000.000	0,2169
2021	13.046.747.568	5.053.600.000.000	0,2582
2022	12.422.281.873	5.436.500.000.000	0,2285
2023	13.089.236.807	5.768.870.000.000	0,2269
2024	11.921.411.783	6.344.920.000.000	0,1879

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Seluma selama periode 2020–2024 menunjukkan tingkat kontribusi perpajakan yang masih sangat rendah terhadap total aktivitas ekonomi daerah. Meskipun nilai PDRB atas dasar harga berlaku terus meningkat setiap tahun, dari Rp4,73 triliun pada 2020 menjadi Rp6,34 triliun pada 2024, rasio pajak daerah justru mengalami penurunan dari 0,2169% menjadi hanya 0,1879%. Bahkan pada tahun 2024, ketika PDRB mencapai nilai tertinggi selama lima tahun, penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, menyebabkan rasio fiskal ini menurun ke titik terendah dalam periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk memperluas basis penerimaan pajak.



Secara keseluruhan, rasio yang berada di bawah 0,3% menunjukkan bahwa struktur perpajakan daerah masih lemah dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat terbatas. Bahkan pada tahun tertingginya (2021), rasio ini hanya mencapai 0,2582%, jauh dari harapan ideal rasio fiskal daerah yang sehat dan mendukung kemandirian keuangan. Ketimpangan antara pertumbuhan PDRB dan penerimaan pajak juga mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung belum sepenuhnya tercatat, terjangkau, atau tergarap oleh sistem pemungutan pajak daerah. Bisa jadi ini berkaitan dengan minimnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, lemahnya sistem informasi perpajakan, atau rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di tingkat lokal.

Fenomena ini menandakan urgensi untuk memperkuat sistem perpajakan daerah secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, hingga manajemen pengelolaan data dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Seluma perlu melakukan reformasi dalam pengelolaan pajak daerah, dimulai dari pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, peningkatan kapasitas aparatur pemungut pajak, serta pemanfaatan digitalisasi untuk efisiensi dan transparansi layanan perpajakan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha mengenai kewajiban perpajakan perlu diperkuat melalui sosialisasi dan insentif yang tepat. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB bukan hanya soal penerimaan, tetapi merupakan indikator penting kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian daerah yang menunjukkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) dan mencerminkan tekanan langsung terhadap daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga. Faktor penyebab inflasi dapat berasal dari sisi permintaan, pasokan barang dan



jasa, maupun faktor struktural seperti inefisiensi distribusi dan logistik. Jika tidak dikendalikan, inflasi dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali menjadi kunci bagi terciptanya ketahanan ekonomi di tingkat daerah. Kabupaten Seluma hingga kini belum memiliki perhitungan inflasi tersendiri oleh BPS karena belum ditetapkan sebagai kota IHK. Sebagai gantinya, digunakan data inflasi Kota Bengkulu sebagai pendekatan (proxy), mengingat hubungan ekonomi antara Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu yang sangat erat, terutama dalam hal rantai pasok, konsumsi rumah tangga, dan pola distribusi barang dan jasa yang saling terhubung secara geografis maupun fungsional.

Dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, inflasi memiliki pengaruh strategis terhadap berbagai indikator pembangunan, seperti daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, hingga efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan konsumsi dan mempersempit ruang fiskal, sementara inflasi yang terkendali menciptakan kepastian dalam perencanaan ekonomi daerah. Oleh karena itu, inflasi perlu diperhitungkan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi, perumusan target pendapatan daerah, serta penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Upaya pengendalian inflasi dapat ditempuh melalui penguatan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), peningkatan kapasitas sentra produksi pangan, serta pembenahan rantai distribusi dan logistik daerah. Dengan demikian, stabilitas harga bukan hanya menjadi indikator teknis, melainkan juga instrumen fundamental dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Seluma.

Tabel II-50. Inflasi Kota Bengkulu tahun 2018-2023

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0,99	0,88	0,14	0,39	0,54	0,62
Februari	-0,3	-0,28	0,09	0,14	-0,1	0,04
Maret	0,37	-0,23	-0,02	0,23	0,74	0,25
April	0,26	0,54	-0,35	0,1	1,45	0,28
Mei	0,32	1,11	0,41	0,11	0,53	0,17
Juni	0,81	0,76	0,04	0,31	0,6	0,21



Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Juli	0,87	0,56	-0,23	-0,12	0,91	0,49
Agustus	-1,8	0,86	-0,22	0,16	-0,24	-0,07
September	0,59	0,64	0,08	0,17	1,22	0,23
Oktober	-0,74	0,56	0,02	-0,02	-0,14	0,28
November	0,2	0,27	0,35	0,52	0,05	0,3
Desember	0,79	0,59	0,14	0,39	0,23	0,24
Tahunan	2,35	2,91	0,89	2,42	5,92	3,09

Inflasi Kota Bengkulu mengalami dinamika yang mencolok selama periode 2018–2023. Tingkat inflasi tahunan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,89%, dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Inflasi melonjak tajam pada tahun 2022 hingga mencapai 5,92%, tertinggi dalam enam tahun terakhir, dipicu oleh tekanan harga pangan dan energi. Tahun 2023 mencatat penurunan menjadi 3,09%, menandakan stabilisasi harga meskipun belum kembali ke tingkat moderat seperti sebelum pandemi. Secara umum, inflasi bulanan cukup berfluktuasi, dengan beberapa bulan mencatat deflasi, terutama pada Agustus dan Oktober, yang mencerminkan dampak musiman dan volatilitas sektor pangan.

Ketiadaan data inflasi resmi di Kabupaten Seluma mengharuskan penggunaan data Kota Bengkulu sebagai acuan perencanaan. Hal ini dilakukan karena arus barang dan pola konsumsi masyarakat di Seluma sangat dipengaruhi oleh kondisi harga di Kota Bengkulu. Dengan demikian, perubahan harga yang terjadi di Kota Bengkulu merefleksikan tekanan ekonomi yang juga dirasakan oleh masyarakat Seluma. Laju inflasi yang tinggi dapat memperlemah daya beli, mendorong kenaikan kemiskinan, dan mengganggu efisiensi anggaran, termasuk dalam penyusunan HSPK dan perhitungan belanja publik. Stabilitas harga perlu dijaga melalui penguatan distribusi bahan pokok, pengendalian margin perdagangan, dan ketepatan intervensi pasar agar fluktuasi inflasi tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah.



3. Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah seluruh bentuk kegiatan menempatkan sejumlah modal, baik oleh investor dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks pemerintahan daerah, penanaman modal mencakup investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, BUMD, maupun kerja sama pemerintah dengan pihak swasta yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal bisa berbentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), dan meliputi investasi baru maupun perluasan usaha yang sudah ada.

Hubungannya dengan RPJMD Kabupaten Seluma sangat erat, karena RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat arah kebijakan, strategi, dan program prioritas. Penanaman modal menjadi salah satu instrumen penting untuk merealisasikan target-target pembangunan yang ada di RPJMD, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur. Dalam RPJMD Kabupaten Seluma, kebijakan penanaman modal biasanya diintegrasikan dengan strategi pengembangan potensi unggulan daerah, perbaikan iklim investasi (termasuk penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif), serta kerja sama lintas sektor untuk menarik investor. Dengan kata lain, penanaman modal adalah motor penggerak yang membantu menjembatani perencanaan pembangunan di atas kertas menjadi hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Tabel II-51. Perkembangan Indikator Bidang Penanaman Modal Kabupaten Seluma 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Investasi	Milyar Rupiah	953,69	203,98	1.469,12	564,93	822,36
Penanaman Modal Asing	Milyar Rupiah	18,87	5,6	51,09	11,64	71,97
Penanaman Modal Dalam Negeri	Milyar Rupiah	934,83	198,32	1.418,05	553,26	750,39

Sumber: Dinas DPMPTTSP. 2025, Laman SDI Kabupaten Seluma



Berdasarkan data perkembangan indikator bidang penanaman modal Kabupaten Seluma tahun 2020–2024, terlihat bahwa nilai investasi mengalami fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Pada 2020, total nilai investasi mencapai Rp953,69 miliar, kemudian turun drastis menjadi Rp203,98 miliar pada 2021. Tahun 2022 mencatat lonjakan signifikan hingga Rp1,469 triliun, namun kembali menurun menjadi Rp564,93 miliar pada 2023, dan sedikit meningkat menjadi Rp822,36 miliar pada 2024.

Dilihat dari sumbernya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi total investasi setiap tahun, dengan nilai tertinggi pada 2022 sebesar Rp1,418 triliun dan terendah pada 2021 sebesar Rp198,32 miliar. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) relatif lebih kecil kontribusinya, meskipun juga berfluktuasi signifikan. PMA tertinggi terjadi pada 2024 sebesar Rp71,97 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan 2023 (Rp11,64 miliar) dan 2021 (Rp5,6 miliar). Pola ini menunjukkan bahwa PMDN menjadi penopang utama realisasi investasi di Kabupaten Seluma, sedangkan PMA meski kecil, menunjukkan potensi peningkatan terutama di tahun terakhir periode data. Fluktuasi yang terjadi mengindikasikan perlunya strategi yang lebih konsisten dalam menarik dan mempertahankan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan alat ukur untuk menilai tingkat kematangan implementasi tata kelola pemerintahan digital pada instansi pemerintah, termasuk di tingkat daerah. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan internal, pengelolaan layanan, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta mutu layanan publik berbasis elektronik. Indeks ini digunakan untuk mengukur



sejauh mana prinsip-prinsip digital telah diterapkan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagi Kabupaten Seluma, Indeks SPBE memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya daerah. Nilai SPBE yang tinggi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, efisiensi birokrasi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Dengan kata lain, tata kelola digital yang baik mendukung reformasi birokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Lebih lanjut, optimalisasi SPBE di Kabupaten Seluma menjadi solusi penting dalam menjawab tantangan geografis seperti keterpencilan wilayah dan keterbatasan layanan langsung. Melalui platform pelayanan digital, masyarakat desa dan daerah sulit jangkauan dapat mengakses layanan secara lebih cepat dan mudah. SPBE juga merupakan bagian dari indikator transformasi digital nasional, sehingga peningkatan capaian indeks ini di Kabupaten Seluma akan berkontribusi pada keterpaduan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, penguatan implementasi SPBE harus menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis data, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

Tabel II-52. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024

Nama Instansi	2021		2022		2023		2024	
	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
Provinsi Bengkulu	2,79	Baik	3.14	Baik	3,12	Baik	3,92	Sangat Baik
Bengkulu Utara	1,44	Kurang	2.20	Cukup	2,9	Baik	3,28	Baik
Bengkulu Selatan	1,96	Cukup	2.34	Cukup	2,45	Cukup	2,87	Baik
Rejang Lebong	1,84	Cukup	2.80	Baik	3,23	Baik	3,24	Baik
Kaur			1.27	Kurang	2,24	Cukup	2,42	Cukup
Seluma	1,41	Kurang	2.57	Cukup	2,54	Cukup	2,26	Cukup



Nama Instansi	2021		2022		2023		2024	
	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
Mukomuko	1,74	Kurang	2,06	Cukup	2,07	Cukup	2,07	Cukup
Kepahiang	1,94	Cukup	2,13	Cukup	2,28	Cukup	2,47	Cukup
Lebong	1,55	Kurang	1,55	Kurang	2,93	Baik	3,38	Baik
Bengkulu Tengah	1,29	Kurang	2,37	Cukup	2,55	Cukup	2,84	Baik
Kota Bengkulu	1,68	Kurang	2,22	Cukup	2,61	Baik	2,63	Baik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Seluma menunjukkan dinamika capaian selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, nilai SPBE Seluma berada pada angka 1,41 dengan predikat Kurang, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 2,57 pada 2022 dan 2,54 pada 2023 dengan predikat Cukup, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 2,26 pada tahun 2024, yang masih berada dalam kategori Cukup. Meskipun belum mencapai predikat Baik, tren awal peningkatan menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam aspek kebijakan, tata kelola, dan layanan digital, meski capaian 2024 menunjukkan perlunya evaluasi atas penurunan kinerja digitalisasi layanan pemerintahan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu yang mencapai indeks 3,92 (Sangat Baik) pada 2024, Kabupaten Seluma masih tertinggal cukup jauh dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital. Bahkan bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain seperti Rejang Lebong (3,24), Lebong (3,38), dan Bengkulu Tengah (2,84), posisi Kabupaten Seluma berada di kelompok bawah. Sementara kabupaten yang sebelumnya memiliki nilai SPBE lebih rendah seperti Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan kini berhasil menembus predikat Baik, Seluma justru mengalami stagnasi dan penurunan performa pada tahun terakhir.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma masih memiliki pekerjaan besar untuk mengoptimalkan transformasi digital pemerintahan. Peningkatan indeks SPBE bukan sekadar soal ketersediaan teknologi, tetapi juga menyangkut penguatan tata kelola digital, pengembangan kapasitas aparatur, serta integrasi sistem informasi layanan publik. Dalam konteks RPJMD 2025–2029, penguatan SPBE harus menjadi prioritas strategis guna



mendorong efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dan membangun sistem pemerintahan yang transparan, responsif, serta adaptif terhadap perubahan digital.

2. Indeks Pelayanan Publik

Sistem zonasi penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia kini menggunakan pendekatan klasifikasi berbasis interval nilai dan kategori kualitas yang dikenal dengan sistem “lampu lalu lintas.” Zona Hijau dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kategori A (nilai 88,00–100) untuk Kualitas Tertinggi dan Kategori B (78,00–87,99) untuk Kualitas Tinggi. Zona Kuning meliputi Kategori C (54,00–77,99) yang menunjukkan Kualitas Sedang, sedangkan Zona Merah mencakup Kategori D (32,00–53,99) dan Kategori E (0–31,99) yang merepresentasikan Kualitas Rendah dan Terendah, dengan makna perlunya perhatian dan perbaikan yang serius dalam aspek pelayanan publik.

Bagi Kabupaten Seluma, sistem zonasi ini berfungsi sebagai alat evaluatif yang sangat strategis untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah mematuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Penilaian ini tidak hanya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan layanan, tetapi juga dapat memengaruhi pemberian insentif, penghargaan kinerja, dan persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas birokrasi pemerintah daerah. Implementasi sistem zonasi penilaian kepatuhan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan publik, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029.

Tabel II-53. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Kaur	57,99	89,01	96,14	96,14
Bengkulu Selatan	72,21	84,48	95,57	95,27
Rejang Lebong	65,99	83,05	93,76	93,07
Lebong	97,65	84,23	93,07	93,76
Kepahiang	88,74	85,97	92,72	92,72
Bengkulu Tengah	51,05	64,89	91,33	91,33



	2021	2022	2023	2024
Kota Bengkulu	89,05	83,21	90,47	90,74
Seluma	62,71	85,51	89,1	89,61
Bengkulu Utara	83,51	78,56	88,34	88,34
Mukomuko	54,79	60,35	90,02	90,64
Provinsi Bengkulu	91,91	80,2	87,05	88,3

Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan dalam penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, Seluma memperoleh nilai 62,71 dan termasuk dalam Zona Kuning (Kategori C: Kualitas Sedang). Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, nilainya meningkat secara signifikan dan konsisten berada dalam Zona Hijau, dengan capaian 85,51 pada 2022 (Kategori B: Kualitas Tinggi), 89,10 pada 2023, dan 89,61 pada 2024. Dengan nilai tersebut, Seluma mendekati ambang batas Kategori A (Kualitas Tertinggi), menunjukkan komitmen dan perbaikan nyata dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Seluma cukup kompetitif meskipun belum masuk dalam kategori nilai tertinggi. Kabupaten seperti Kaur (96,14) dan Bengkulu Selatan (95,27) berhasil menembus Kategori A, sedangkan Seluma berada di rentang atas Kategori B. Namun Seluma berhasil melampaui capaian beberapa daerah lain seperti Bengkulu Utara (88,34) dan Provinsi Bengkulu (88,30) pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma telah berhasil memperkuat kualitas layanan dasar, memperbaiki standar operasional prosedur pelayanan, dan meningkatkan akuntabilitas perangkat pelayanan publik.

Peningkatan ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Seluma dalam melanjutkan agenda reformasi birokrasi yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Ke depan, fokus harus diarahkan pada konsistensi pelaksanaan standar pelayanan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kompetensi aparatur yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Target untuk masuk ke dalam Kategori A (Kualitas Tertinggi)



secara berkelanjutan harus dijadikan sasaran strategis, sejalan dengan visi peningkatan tata kelola pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Indeks Integritas Nasional

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen evaluatif yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap praktik integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Skor SPI, dengan skala 0 hingga 100, mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih telah diterapkan oleh suatu daerah, berdasarkan masukan dari ASN, pengguna layanan publik, dan kalangan ahli. SPI menjadi indikator penting dalam menilai tata kelola birokrasi yang bebas dari praktik penyimpangan.

Dalam konteks pembangunan daerah, integrasi SPI ke dalam RPJMD Kabupaten Seluma berfungsi sebagai tolok ukur reformasi birokrasi yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. SPI tidak hanya membantu mengidentifikasi area rawan penyimpangan, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan korupsi yang berbasis bukti. Peningkatan skor SPI harus menjadi bagian dari strategi pembangunan, karena tata kelola yang berintegritas merupakan fondasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Seluma menunjukkan tren fluktuatif dan menurun dalam capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, Seluma mencatat skor 71,69 yang tergolong cukup baik dan kompetitif di tingkat provinsi. Namun, skor tersebut mengalami penurunan tajam pada 2022 menjadi 63,55, sempat pulih ke angka 70,26 pada 2023, dan kembali merosot signifikan menjadi 63,07 di tahun 2024. Penurunan lebih dari 7 poin dalam satu tahun terakhir menandakan adanya tantangan



serius dalam konsistensi implementasi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel II-54. Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Nama Instansi	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	63,04	62,77	69,24	71,76
Kabupaten Bengkulu Selatan	63,5	63,45	70,6	72,12
Kabupaten Rejang Lebong	72,64	65,86	71,65	74,62
Kabupaten Bengkulu Utara	72,58	72,62	74,21	73,15
Kabupaten Kaur	67,9	68,98	71,54	70,72
Kabupaten Seluma	71,69	63,55	70,26	63,07
Kabupaten Mukomuko	64,7	72,74	73,77	73,02
Kabupaten Lebong	75,21	71,36	70,94	69,66
Kabupaten Kepahiang	75,74	74,66	73,7	74,44
Kabupaten Bengkulu Tengah	76,15	65,82	72,3	66,64
Kota Bengkulu	72,37	71,41	72,51	70,67

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Seluma berada di posisi bawah pada tahun 2024. Kabupaten Kepahiang (74,44), Rejang Lebong (74,62), dan Mukomuko (73,02) menempati posisi teratas dalam SPI 2024, sementara Seluma hanya mencatat skor yang lebih tinggi dari Kabupaten Bengkulu Tengah (66,64) dan sedikit di bawah rata-rata provinsi (71,76). Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik tata kelola pemerintahan di Seluma masih menghadapi kendala dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Situasi tersebut menuntut perhatian khusus dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas pengawasan internal, perbaikan sistem pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan, hingga peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Pendidikan integritas bagi ASN dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan juga harus menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi daerah. SPI tidak hanya menjadi indikator evaluatif, tetapi juga fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kredibel, partisipatif, dan bebas dari praktik korupsi.



4. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana efektivitas tata kelola pemerintahan dijalankan secara bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komponen utama dalam penilaian indeks ini mencakup manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan internal, serta efektivitas sumber daya manusia aparatur.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, penguatan reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan skor Indeks Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi refleksi kinerja kelembagaan, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan, efisiensi anggaran, serta pencapaian target-target pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator ini perlu secara konsisten dipantau dan diperkuat sebagai bagian dari kerangka transformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Gambar II-21. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	B	B	BB
Bengkulu Utara	CC	B	BB
Bengkulu Selatan	C	B	BB
Rejang Lebong	CC	BB	BB
Kaur	C	C	CC
Seluma	C	B	BB
Mukomuko	CC	CC	BB
Kepahiang	CC	CC	BB
Lebong	CC	CC	BB
Bengkulu Tengah	CC	CC	BB



	2022	2023	2024
Kota Bengkulu	CC	CC	BB

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/#>

Perjalanan reformasi birokrasi di Kabupaten Seluma selama tiga tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, Seluma masih berada pada kategori C, yang mencerminkan tahap awal dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi kategori B, dan selanjutnya pada tahun 2024 berhasil mencapai kategori BB. Kenaikan bertahap ini menunjukkan adanya peningkatan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan, seperti efisiensi layanan publik, akuntabilitas kinerja, serta transparansi dan integritas aparatur. Perbaikan ini menjadi indikator bahwa komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi mulai menunjukkan hasil yang konkret di tingkat daerah.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024, Kabupaten Seluma berada dalam kelompok yang berhasil mencapai kategori BB, bersama dengan Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Mukomuko, Kepahiang, Lebong, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Dengan demikian, hanya Kabupaten Kaur yang masih tertinggal di kategori CC. Capaian Seluma sejalan dengan Provinsi Bengkulu yang juga mengalami peningkatan dari B menjadi BB pada tahun 2024. Kinerja ini menempatkan Kabupaten Seluma sebagai bagian dari mayoritas kabupaten/kota di Bengkulu yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam reformasi birokrasi. Ke depan, tantangan Seluma adalah mempertahankan capaian ini dan melangkah menuju kategori A, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta akselerasi digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan partisipatif.



B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi suatu daerah berdasarkan tiga aspek utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Aspek kebebasan sipil mencakup hak untuk berpendapat, berkumpul, dan mengakses informasi; hak-hak politik menilai partisipasi warga dalam pemilu dan proses politik; sementara aspek lembaga demokrasi mencerminkan efektivitas kerja institusi seperti DPRD, partai politik, dan lembaga peradilan. Nilai IDI berada dalam rentang 0–100, dengan klasifikasi kategori baik (≥ 81), sedang (60–80), dan buruk (< 60), yang menggambarkan seberapa kuat kualitas demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, IDI menjadi tolok ukur penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Demokrasi yang kuat berkontribusi langsung pada stabilitas politik, peningkatan kepercayaan publik, serta perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. IDI yang tinggi juga mendukung iklim investasi yang sehat dan memperkuat sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi di Kabupaten Seluma harus diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, perlindungan hak-hak sipil, serta pembukaan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel II-55. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023

2021	2022	2023
72,73	73,23	74,26

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 72,73 pada tahun 2021 menjadi



73,23 pada 2022, dan naik lagi menjadi 74,26 pada 2023. Meskipun ketiganya masih berada dalam kategori “Sedang” (rentang nilai 60–80), tren ini mencerminkan perbaikan bertahap dalam aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi di tingkat provinsi.

Bagi Kabupaten Seluma, capaian IDI Provinsi Bengkulu ini menjadi rujukan penting dalam perumusan RPJMD 2025–2029, khususnya dalam memperkuat pilar demokrasi lokal. Peningkatan IDI di tingkat provinsi menunjukkan adanya ruang kebijakan yang mendukung partisipasi publik, penguatan lembaga perwakilan, dan jaminan terhadap hak-hak sipil, yang perlu diadopsi dan diperluas cakupannya di level kabupaten. Dengan mendorong transparansi, keterbukaan informasi publik, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Seluma dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas demokrasi di daerah dan nasional.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD untuk di level provinsi terdapat 62 indikator dan di level kabupaten/kota, ada 48 indikator dari 12 pilar. Keduabelas pilar tersebut adalah:

a. Pilar 1: Institusi

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, check and balances, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

b. Pilar 2: Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur



transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

c. Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet *fixed-broadband*, dan pengguna internet.

d. Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.

e. Pilar 5: Kesehatan

Pilar Kesehatan mengukur “harapan hidup” yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan hidup.

f. Pilar 6: Keterampilan

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.

g. Pilar 7: Pasar Produk

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

h. Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan



pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

i. Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/start-up, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.

j. Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

k. Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah, dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.

l. Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

NAMA PROVINSI	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	3,14	5	2,62	3,26
Prov. Bengkulu	3,92	2,11	4,17	2,64	3,67	3,18	3,18	4,2	4,23	1,04	5	2,35	3,29
Bengkulu Selatan	3,84	1,35	2,87	2,36	3,69	3,72	3,53	3,6	4,21	0,25	5	0,76	2,94



NAMA PROVINSI	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Rejang Lebong	3,94	2,18	2,77	2,42	3,77	3,22	2,94	4,06	2,04	0,46	5	0,82	2,94
Bengkulu Utara	4,16	2,77	2,55	2,56	3,66	3,27	2,35	3,86	3,36	0,55	5	0,85	2,94
Kaur	3,8	1,83	2,09	2,36	3,6	2,94	2,4	2,85	2,1	0,94	5	0,95	2,91
Seluma	3,86	1,26	2,44	2,03	2,99	2,94	2,12	2,54	1,75	0,19	5	0,97	2,8
Mukomuko	3,88	2,28	2,32	2,24	3,36	3,13	2,18	2,77	2,01	0,94	5	0,76	2,9
Lebong	4,2	1,76	2,3	2,34	3,31	3,15	2,31	2,56	2,61	0,14	5	1,24	2,75
Kepahiang	4,11	1,7	2,9	2,38	3,16	2,58	2,45	2,61	1,65	0,95	5	0,45	2,65
Bengkulu Tengah	3,87	1,86	2,99	2,17	3,69	3,13	3,42	2,09	1,49	0,19	5	0,53	2,77
Kota Bengkulu	4,03	2,69	4,97	2,79	3,85	4,19	5	4,6	4,15	1,04	5	3,41	3,81

Tabel II-56. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

NAMA PROVINSI	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,38	3,22	3,03	3,44
Prov. Bengkulu	4,26	2,67	4,26	3,43	3,73	3,24	3,1	4,5	2,96	3,96	2,52	2,28	3,47
Rata-Rata Kab/Kota	4,07	2,26	3,88	3,36	3,59	3,02	3,95	4,26	3,7	3,5	2,59	2,44	3,06
Bengkulu Selatan	4,08	2,3	4,18	3,7	3,64	3,07	3,87	4,18	3,53	3,25	2,5	2,44	3,11
Rejang Lebong	4,09	2,39	3,99	3,32	3,77	3,39	3,85	3,91	3,44	4,15	2,78	2,64	3,19
Bengkulu Utara	4,19	2,81	3,77	3,2	3,73	3,55	3,07	3,6	3,6	3,25	2,57	2,24	2,91
Kaur	3,81	2,02	3,29	3,84	3,36	3,26	2,55	4,1	3,4	3,5	2,67	2,04	2,85
Seluma	3,87	1,95	3,76	3,6	3,15	3,24	2,45	3,96	3,57	3,33	2,22	1,84	2,74
Mukomuko	4,06	1,73	3,53	3,68	3,22	3,22	2,47	3,22	2,57	3,22	2,4	2,07	2,78
Lebong	4,09	2,05	3,65	3,51	3,41	3,55	2,55	3,56	3,05	3,55	2,5	2,01	2,99
Kepahiang	4,2	2,49	4,05	3,85	3,72	3,4	2,6	4,07	3,46	3,27	2,27	2,09	3,03
Bengkulu Tengah	4,16	2	4,12	3,86	3,72	3,44	2,7	4,11	3,41	3,57	2,35	2	2,95
Kota Bengkulu	4,16	2,98	5	2,81	3,88	4,35	5	4,67	4,33	4,52	2,79	3,52	3,83

Tabel II-57. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NAMA PROVINSI	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Prov. Bengkulu	4,28	2,56	3,52	4,02	3,75	4,33	3,07	3,38	3,35	3,99	2,68	2,83	3,48
Rata-Rata Kab/Kota	4,4	3,07	4,04	3,82	3,6	4,13	2,84	3,84	2,31	3,72	3,74	1,71	3,43
Bengkulu Selatan	4,51	3,3	4,2	3,68	3,62	4,27	3,57	3,93	2,63	3,7	4,7	1,55	3,64
Rejang Lebong	4,6	3,1	4,24	3,61	3,69	4,28	3,79	3,86	2,27	3,93	4,49	1,69	3,63
Bengkulu Utara	4,64	3,2	3,76	3,79	3,65	3,98	2,1	3,86	2,55	3,86	3,41	1,41	3,35
Kaur	4,26	2,76	3,43	4,09	3,53	4,04	2,24	3,76	2,19	3,49	4,54	1,62	3,33
Seluma	4,37	3,04	3,94	4,03	3,62	4,08	2,25	3,34	2,35	3,58	3,68	1,57	3,32
Mukomuko	4,64	2,8	3,83	3,93	3,53	4,04	2,32	3,05	2,62	3,66	2,58	0,85	3,16
Lebong	4,27	3,08	3,29	4,13	3,25	4,11	2,43	3,93	2,35	3,45	4,12	2,44	3,4
Kepahiang	3,99	3,05	4,45	3,71	3,63	4,15	2,73	3,68	1,67	3,59	3,49	1,09	3,27
Bengkulu Tengah	4,53	3,23	4,38	3,77	3,63	4,12	1,97	4,05	1,27	3,59	3,1	1,18	3,24
Kota Bengkulu	4,18	3,12	4,91	3,46	3,82	4,21	5	4,93	3,16	4,36	3,28	3,7	4,01

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Seluma dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menggambarkan



adanya upaya perbaikan secara bertahap. Pada tahun 2022, Seluma mencatat skor IDSD sebesar 2,80, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 2,74 pada tahun 2023, sebelum akhirnya meningkat signifikan menjadi 3,32 pada tahun 2024. Kenaikan skor pada tahun terakhir tersebut mencerminkan respons positif terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang mulai berdampak pada peningkatan daya saing daerah, meskipun secara umum masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu dan nasional.

Peningkatan skor IDSD ini terutama ditopang oleh perbaikan pada sejumlah pilar strategis, seperti Pilar 1 yang mencerminkan kondisi makroekonomi daerah. Skor Pilar 1 meningkat dari 3,86 pada tahun 2022 menjadi 4,37 pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa stabilitas ekonomi Seluma semakin terjaga dengan pertumbuhan yang relatif sehat. Hal serupa terjadi pada Pilar 6 yang berkaitan dengan efisiensi pasar tenaga kerja, di mana perbaikan dalam kualitas dan produktivitas SDM serta meningkatnya dinamika pasar kerja lokal turut mendorong skor pilar ini mencapai 4,08 pada tahun 2024. Kondisi ini diperkuat oleh stabilitas sosial dan keamanan daerah, sebagaimana tercermin dalam Pilar 11 yang secara konsisten mencatat skor sempurna 5,00 selama tiga tahun berturut-turut. Stabilitas ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif dan ramah investasi.

Namun demikian, tantangan signifikan masih tampak pada beberapa pilar lain yang bersifat transformatif. Pilar 12 yang mengukur kapasitas inovasi daerah masih berada dalam kategori lemah, dengan skor hanya 0,97 pada tahun 2022 dan meskipun meningkat menjadi 1,84 pada 2023, kembali menurun ke 1,57 di tahun 2024. Hal ini mencerminkan terbatasnya ekosistem inovasi lokal, minimnya kolaborasi riset, dan rendahnya adopsi teknologi dalam tata kelola maupun sektor produktif. Pilar 10 yang menggambarkan kesiapan teknologi informasi dan komunikasi juga menunjukkan kondisi yang masih belum optimal. Meskipun meningkat signifikan dari skor awal 0,19 pada tahun 2022 menjadi 3,58 pada 2024,



angka tersebut masih mencerminkan kesenjangan digital, baik dari sisi infrastruktur maupun literasi digital masyarakat dan ASN.

Pilar lain yang perlu mendapat perhatian adalah Pilar 2 yang berkaitan dengan kekuatan institusi publik. Meskipun mengalami perbaikan, dari skor 1,26 pada tahun 2022 menjadi 3,04 pada 2024, pilar ini tetap menempati posisi yang relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Lemahnya tata kelola birokrasi, rendahnya efektivitas kebijakan, dan belum optimalnya praktik transparansi dan akuntabilitas publik menjadi faktor yang perlu segera dibenahi. Ketimpangan antar pilar ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Seluma masih berkembang secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan perlu difokuskan pada upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, membangun ekosistem inovasi berbasis kolaborasi, serta mempercepat transformasi digital yang merata. Pendekatan ini akan menjadi kunci untuk mendorong lompatan daya saing daerah yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan mempertahankan keunggulan pada aspek keamanan dan memperbaiki kelemahan pada institusi, teknologi, dan inovasi, Kabupaten Seluma memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam kompetisi regional dan mewujudkan visi pembangunan daerah secara lebih progresif.



D. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Tabel II-58. Capaian Indikator Kinerja Kunci Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
- Pendidikan						
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	63.998	60.942	63.242	62.913	61.683
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	84.951	89.352	88.42	89.444	99.482
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	56.003	71.09	68.679	69.329	68.388
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8.094	3.096	3.459	4.219	36.632
- Kesehatan						
1.b.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0.026	0.052	0.523	0.498	0.465
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83.91	98.515	84.712	94.81	95.128
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99.632	99.905	88.5	100	100
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	90.371	87.52	92.849	99.283	98.899
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	52.687	95.514	100	100	86.778
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	51.862	54.571	94.345	45.334
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	26.095	34.623	52.135	49.556	36.88
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	26.731	39.997	96.879	94.169	94.179
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31.692	30.238	82.698	82.701	35.991
1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60.77	67.082	88.248	88.277	60.085
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	76.014	93.023	87.625	95.333	100
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	74.566	18.75	100	100	100



No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1.b.14	Persentase orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	75.412	79.998	76.516	64.262	74.073
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	100	0	100	0	0
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100	0	100	0	0
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	100	100	23.663	28.973
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	0	10.707	3.7	73.883	0
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0	6.036	0.438	92.775	0
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	0	100	100	100	0
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	31.261	31.261	23.662	30.874	35.289
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	13400	50.2	100	97.847	74
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	13400	100	100	100	100
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	20	12.5	0	0
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	0.84	100	0	0
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	22.759	115.587	100	66.132	52.008
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	18.014	18.151	18.735	10.937	10.437
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.002	18.151	0.506	0.972	44.948
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	2.591	100	100	100	100
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1615	6.44	100	2.559	0
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	868	3.46	100	0.043	0



No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	100	100	0	0
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	68	68	68	10	406
- Sosial						
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	1.383	5.544	4.414	5.72	3.098
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	24.144	100	49	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
- Tenaga Kerja						
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.105	0.332	0.322	0.353	4.029
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	50.102	0.086	0.037	107.267Juta	58.312
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	10.526	73.684	100	100	74.074
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	47.101	21.118	39.184	13.778	21.635
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	21.156	16.57	18.636	0.002	0.006
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	0.039	0.029	0.028	100	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0	17.398	15.406	22.119	19.161
- Pangan						
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0.138	0.094	4.61	85.113	82.8
- Pertanahan						
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	100	0	100	76.244	100



No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
	diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	100	100
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	0	100	75.643	0
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	0	12.6	0	0
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	0	7.362	0	0
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100
- Lingkungan Hidup						
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	0	0	58.99	70.89	47.95
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	22	3.276	4.038	6.399	1.511
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	9.091	0	0	9.091	0
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	98.801	99.999	90.656	90.951	92.957
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	94.538	89.52	74.94	78.386	85.766
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	99.346	98.773	97.725	98.509	98.855
2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	0	46.667	34.091	53.571
- Pemberdayaan masyarakat dan desa						
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	37.736	17.391	15.217	64.103	44
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	0	0	0	102.752
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana						
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.51	2.24	3	2.44	0
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80.145	82.17	77.112	80.857	3.365
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0	0	0.098	6.626	10.088
- Perhubungan						
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0	0	1	157	0
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0	157	157	0	0
- Komunikasi dan Informatika						
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	10.526	43.182	34.091	34.091



No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	76.842	78.197	75.418	70.81	0.836
- Koperasi, usaha kecil dan menengah						
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	10.345	15.358	15.254	15.254	7.119
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	0	7.584	0	0	8.085
- Penanaman Modal						
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0	-120.587	620.222	-61.546	45.57
- Kepemudaan dan Olahraga						
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0	0.004	7.249	0.143	7.464
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0	2.097	4.627	2.152	6.989
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	0	0	0	48	8
- Statistik						
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	51.163	51.163	81.818	100	81.818
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	51.163	51.163	81.818	100	81.818
- Persandian						
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	150	150	100	0	2.273
- Kebudayaan						
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	3.448	1.408	100	2.817	100
- Perpustakaan						
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	610	0	76.668	0	56.38
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	20.757	55.89	28.18
- Kearsipan						
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1	4.25	18.75	7.5	100
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1	0	1	0	0



No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
3. Urusan Pilihan						
- Kelautan dan Perikanan						
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	5678.6	2010	99.902	112.292	112.263
- Pariwisata						
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	-100	140	8.333	61.538
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	0	-100	3.586	53.09	0.479
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	0	1.553.571	5.58	4.756	5.798
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0	0	1.646	1.646	1.704
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0	0.2	3.308	5.302	3.424
- Pertanian						
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	139.119	258.452	45.293	0.036	444.703
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	0	-66.46	353.416	-71.493	-46.304
- Kehutanan						
3.d			0	1	100	100
- Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	0	100	0	0
- Perdagangan						
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	93.711	93.711	100	0.629
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	0	96.996	96.996	96.996	83.966
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	100	100	100	26.364
- Perindustrian						
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0	-96.453	2.263	0	0.692
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0	1	2.73	0
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	70	0	100	0	0



No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	100	0	0
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	0	1	20	0
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	25	0	0	0	0
- Transmigrasi						
3.h	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6	1	10	100
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
- Perencanaan dan Keuangan						
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	12.696	31.301	30.479	34.015	38.882
4.a.2	Rasio PAD	1.363	89.171	5.778	41.542	2.732
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	2.779	2	2
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	151	2	2	3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	61.886	64.575	81.037	24.636	61.577
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	9	10	7	3	3
- Pengadaan						
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	8.421	0	0	0
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8.923	32.121	26.181	11.606	15.498
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30.709	41.829	85.732	82.891	27.769
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0	31.024	9.654	9.265	17.616
- Kepegawaian						
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	586.957	631.677	69.467	92.509	88.816
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55.837	19.949	42.84	63.541	30.211
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.395	0	9.116	7.761	26.442
- Manajemen Keuangan						



No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	50.023	99.722	0.8573	113.803	52.066
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	151.355	0	105.555	584.583	27.017
4.d.3	Manajemen Aset	4	4	4	4	2
4.d.4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	3.282	100	1.43	2.539	9.298
- Transparansi dan Partisipasi Publik						
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	0	100	0	100	85.27
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	0	100	100	8.333	66.667



2.5. Gambaran Keuangan Daerah

A. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Tabel II-59. Realisasi APBD Kabupaten Seluma Selama 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	892.591.305.932	924.977.365.243	900.868.599.310	997.144.922.490	1.070.959.372.201
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.156.314.890	36.120.622.734	40.005.839.023	40.893.788.411	29.263.800.963
Pajak Daerah	10.258.560.367	13.046.747.568	12.422.281.873	13.089.236.807	11.921.411.783
Retribusi Daerah	502.160.600	244.347.500	713.058.310	882.727.227	1.557.133.232
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.623.568.623		1.172.268.381	1.589.910.654	1.366.840.008
Lain-lain PAD yang Sah	52.772.025.300	22.829.527.666	25.698.230.459	25.331.913.723	14.418.415.940
PENDAPATAN TRANSFER	827.408.582.042	861.169.766.758	860.862.760.287	956.251.134.079	1.030.813.967.792
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	813.965.160.249	820.937.819.304	812.619.400.937	916.409.189.177	1.000.572.147.037
Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.443.421.793	40.231.947.454	48.243.359.350	39.841.944.902	30.241.820.755
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.409.000	27.686.975.751			10.881.603.446
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.409.000	27.686.975.751			10.881.603.446
BELANJA DAERAH	918.591.196.414	917.479.879.704	926.186.229.043	999.693.129.093	1.078.461.082.268
BELANJA OPERASI	601.216.838.769	610.563.301.254	568.191.863.200	621.695.938.573	724.900.679.686
Belanja Pegawai	330.887.823.612	357.009.852.501	365.053.344.973	385.742.776.491	427.804.581.529
Belanja Barang dan Jasa	226.260.815.157	237.711.345.768	191.607.365.561	219.959.524.027	236.309.238.111
Belanja Hibah	40.527.200.000	12.107.300.345	11.155.152.666	15.693.638.055	60.783.360.046
Belanja Bantuan Sosial	3.541.000.000	3.734.802.640	376.000.000	300.000.000	3.500.000
BELANJA MODAL	115.512.700.497	104.545.903.286	166.614.538.136	160.819.778.999	138.137.554.734
Belanja Modal Tanah	2.131.987.462	82.000.000	0	854.619.000	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.019.445.552	22.384.802.669	17.711.653.330	15.502.243.598	36.165.591.844
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.225.187.406	12.826.303.713	11.990.506.470	39.549.615.278	25.662.939.862
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.368.531.347	69.252.796.904	136.912.378.336	104.913.301.123	74.931.673.028
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.767.548.730	0			1.377.350.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	11.332.811.311	3.670.851.978	4.490.110.000	48.956.789	144.375.926
BELANJA TRANSFER	190.528.845.837	198.699.823.187	186.889.717.707	217.128.454.732	215.278.471.922
SURPLUS/DEFISIT				-2.548.206.603	-7.501.710.068
PEMBIAYAAN DAERAH				13.949.153.007	11.397.678.869
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.356.432.200	32.499.581.718	39.228.875.888	13.949.153.007	9.362.478.933
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				13.949.153.007	0
PEMBIAYAAN NETTO		32.499.581.718	39.266.782.740	13.949.153.007	11.397.678.869
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		39.997.067.256	13.949.153.007	11.400.946.404	3.895.968.801

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Seluma selama periode 2020–2024 mengalami dinamika yang mencerminkan berbagai tantangan fiskal, perubahan kebijakan nasional, serta pemulihan pasca-pandemi. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp892,59 miliar, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar Rp997,14 miliar. Namun, tahun 2024 menunjukkan penurunan menjadi Rp1,07 triliun jika memperhitungkan seluruh kategori pendapatan termasuk



“Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah” yang kembali muncul sebesar Rp10,88 miliar. Meskipun demikian, struktur sumber penerimaan daerah menunjukkan tekanan serius, khususnya pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun signifikan dari Rp40,89 miliar (2023) menjadi Rp29,26 miliar (2024).

Rinciannya, PAD Kabupaten Seluma sangat bergantung pada komponen "Lain-lain PAD yang Sah", yang pada 2020 menyumbang Rp52,77 miliar, namun terus menurun akibat dua perubahan kebijakan nasional. Pertama, sejak tahun 2021, pendapatan dari satuan pendidikan dasar (SD dan SMP), seperti dana BOSDA, iuran masyarakat, dan pendapatan operasional lainnya, tidak lagi dicatat dalam APBD karena diberlakukan pengelolaan mandiri oleh sekolah, mengikuti Permendagri Nomor 24 Tahun 2020. Kedua, penurunan PAD semakin tajam pada 2024 seiring dengan tidak dicatatkannya lagi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pendapatan daerah. Dana kapitasi dari BPJS Kesehatan yang sebelumnya masuk ke kas daerah, sejak 2024 langsung dikelola oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah berstatus BLUD, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru. Meski secara kas daerah angka PAD menurun, namun secara operasional dana tersebut tetap digunakan untuk pelayanan publik, hanya saja tidak lagi tercatat dalam struktur APBD.

Di sisi lain, pendapatan transfer tetap menjadi tulang punggung penerimaan daerah, dengan kontribusi mencapai 96,2% pada tahun 2024 atau sebesar Rp1,03 triliun dari total pendapatan daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat mendominasi, yaitu sebesar Rp1,00 triliun pada tahun 2024, sementara transfer antar daerah justru mengalami tren penurunan, dari Rp48,24 miliar (2022) menjadi Rp30,24 miliar (2024). Ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan Kabupaten Seluma terhadap pendanaan dari pemerintah pusat, dan mengindikasikan kerentanan fiskal terhadap dinamika kebijakan nasional.



Di sisi belanja, terjadi peningkatan total belanja daerah dari Rp918,59 miliar (2020) menjadi Rp1,07 triliun (2024). Belanja operasi menjadi komponen dominan dengan tren meningkat dari Rp601,22 miliar (2020) menjadi Rp724,90 miliar (2024), didorong oleh belanja pegawai dan lonjakan belanja hibah pada 2024 yang mencapai Rp60,78 miliar. Sementara itu, belanja modal sempat menanjak pada 2022 sebesar Rp166,61 miliar namun kembali turun menjadi Rp138,14 miliar pada 2024. Belanja transfer juga menunjukkan fluktuasi tinggi, dari Rp190,53 miliar (2020), meningkat menjadi Rp217,13 miliar (2023), kemudian turun tipis ke Rp215,28 miliar pada 2024. Besarnya belanja transfer selama periode ini, khususnya untuk bantuan keuangan kepada desa, menjadi sorotan penting dalam belanja yang bersifat mandatory namun belum sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan PAD.

Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan tantangan struktural Kabupaten Seluma dalam menciptakan ruang fiskal yang cukup dan mandiri untuk pembangunan. Dalam RPJMD 2025–2029, arah kebijakan fiskal daerah perlu difokuskan pada reformasi menyeluruh PAD, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi aset dan ekonomi lokal, serta penguatan peran teknologi dalam sistem pemungutan dan akuntabilitas penerimaan. Diversifikasi pendapatan dan efisiensi belanja mutlak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat otonomi daerah dalam merespons tantangan pembangunan ke depan.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Seluma selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang meningkat dengan fluktuasi moderat, mencerminkan upaya stabilisasi fiskal di tengah dinamika kebijakan dan kebutuhan pelayanan publik. Total belanja daerah naik dari Rp918,59 miliar pada 2020 menjadi Rp1,08 triliun pada 2024. Kenaikan ini menandakan komitmen terhadap pembiayaan program-program prioritas, meskipun masih diwarnai dominasi belanja operasi yang membatasi ruang belanja pembangunan jangka panjang.



Belanja operasi terus mendominasi struktur belanja daerah dengan tren peningkatan signifikan. Dari Rp601,22 miliar pada 2020, naik menjadi Rp724,90 miliar pada 2024. Kontributor utama kenaikan ini adalah belanja pegawai, yang membesar dari Rp330,89 miliar (2020) menjadi Rp427,80 miliar (2024), atau tumbuh sekitar 29,3%. Lonjakan ini mengindikasikan beban rutin yang semakin besar terhadap APBD, sehingga menurunkan fleksibilitas fiskal untuk alokasi belanja yang lebih produktif. Selain itu, lonjakan belanja hibah pada 2024 yang mencapai Rp60,78 miliar—tertinggi dalam lima tahun terakhir—juga perlu diawasi dalam konteks efektivitas dan keberlanjutan program.

Sementara itu, belanja modal, yang idealnya menjadi instrumen utama pembangunan fisik dan infrastruktur, mengalami tren penurunan sejak 2022. Setelah mencapai Rp166,61 miliar pada 2022, belanja modal turun menjadi Rp160,82 miliar (2023), dan kembali turun menjadi Rp138,14 miliar (2024). Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya belanja pada kategori strategis seperti belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dari Rp136,91 miliar (2022) menjadi Rp74,93 miliar (2024). Padahal, sektor ini penting untuk peningkatan konektivitas antarwilayah, akses pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal. Penurunan pada belanja modal mengindikasikan risiko stagnasi dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Komponen belanja tidak terduga dan bantuan sosial tetap pada kisaran minimal, masing-masing hanya menyerap kurang dari 1% total belanja setiap tahunnya, menunjukkan fungsinya yang bersifat antisipatif dan insidental. Namun yang paling mencolok adalah belanja transfer, yang turun drastis dari Rp217,13 miliar pada 2023 menjadi Rp215,28 miliar pada 2024. Meskipun tidak setajam estimasi sebelumnya (Rp64,05 miliar), tren penurunan ini tetap mencerminkan adanya evaluasi ulang terhadap belanja ke desa atau bentuk transfer lainnya. Jika tidak disertai perbaikan perencanaan dan sinergi antarlevel pemerintahan, hal ini berpotensi menurunkan kinerja pembangunan berbasis wilayah.



Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, tantangan utama Kabupaten Seluma adalah melakukan rasionalisasi belanja operasi, terutama belanja pegawai dan hibah, untuk memberi ruang lebih luas bagi belanja modal yang berkualitas dan produktif. Reformasi belanja berbasis kinerja, prioritas infrastruktur dasar, serta efisiensi pengeluaran rutin harus menjadi fokus utama agar APBD dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Kabupaten Seluma selama periode 2020–2024 memainkan peran penting sebagai instrumen penyeimbang fiskal dalam rangka menjaga kelangsungan belanja daerah, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pola pembiayaan yang terjadi menunjukkan bahwa sumber utama pembiayaan masih berasal dari penerimaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, tanpa diversifikasi sumber pembiayaan lainnya seperti pinjaman daerah atau kerja sama pembiayaan alternatif. Kondisi ini mencerminkan kehati-hatian fiskal yang tinggi, namun di sisi lain juga membatasi fleksibilitas dalam mengatasi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks.

Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan mencapai Rp62,36 miliar dengan pembiayaan netto sebesar Rp32,50 miliar. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan tren kenaikan kebutuhan pembiayaan, dengan pembiayaan netto masing-masing sebesar Rp32,50 miliar dan Rp39,27 miliar, yang umumnya digunakan untuk menutupi kekurangan pendapatan daerah dalam membiayai belanja. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi dan pemulihan ekonomi, Kabupaten Seluma masih mengandalkan dana sisa anggaran tahun sebelumnya untuk menopang keberlanjutan program pembangunan, terutama belanja modal dan transfer ke desa. Pada tahun 2023, pembiayaan kembali digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp2,55 miliar, dengan pembiayaan netto sebesar Rp13,95 miliar. Namun pada 2024, meskipun defisit meningkat menjadi Rp7,50 miliar, pembiayaan yang



tersedia justru turun menjadi Rp11,40 miliar, mencerminkan keterbatasan ruang fiskal dari sisi sisa kas dan terbatasnya skema pembiayaan baru yang digunakan.

Penurunan pembiayaan daerah ini utamanya disebabkan oleh semakin kecilnya nilai SiLPA yang dapat digunakan dan belum adanya terobosan dalam strategi pembiayaan alternatif. Tidak tercatatnya penerimaan pembiayaan baru selain SiLPA selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi fiskal daerah masih sangat konservatif, yang berisiko menghambat kelincahan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan yang bersifat prioritas dan mendesak, seperti perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, dan pengurangan kemiskinan.

Oleh karena itu, dalam kerangka penyusunan RPJMD 2025–2029, pendekatan pembiayaan daerah perlu ditransformasikan dari sekadar penutup defisit menjadi instrumen pendukung pembangunan strategis. Kabupaten Seluma perlu menyusun strategi pembiayaan jangka menengah yang proaktif dan terukur, seperti eksplorasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan aset daerah untuk pembiayaan produktif, atau bahkan penerbitan obligasi daerah untuk proyek-proyek prioritas dengan tingkat pengembalian sosial yang tinggi. Dengan tata kelola risiko yang baik dan transparansi yang terjaga, pembiayaan daerah dapat menjadi alat penting dalam memperluas kapasitas fiskal Kabupaten Seluma untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Seluma selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan fluktuasi pengelolaan fiskal daerah. Pada tahun 2020, SiLPA tercatat cukup tinggi sebesar Rp39,99 miliar, mencerminkan adanya akumulasi anggaran yang tidak terserap atau belum dibelanjakan pada akhir tahun anggaran. Namun



pada tahun-tahun berikutnya, tren SiLPA menurun tajam: sebesar Rp13,95 miliar pada 2021, turun lagi menjadi Rp11,40 miliar pada 2022, dan mencapai titik terendah sebesar Rp3,89 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, SiLPA tidak lagi tercatat dalam realisasi keuangan, yang bisa mengindikasikan dua kemungkinan: seluruh anggaran terserap optimal, atau memang tidak ada sisa kas dari pembiayaan yang tersedia.

Menurunnya nilai SiLPA secara berturut-turut dapat ditafsirkan secara dualistik. Di satu sisi, hal ini dapat menunjukkan peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran, di mana belanja daerah lebih selaras dengan perencanaan dan tidak menyisakan dana yang menganggur. Namun di sisi lain, rendahnya SiLPA juga mengisyaratkan melemahnya fleksibilitas fiskal, terutama dalam menghadapi kebutuhan mendadak atau menutup defisit kas di awal tahun anggaran berikutnya. Minimnya SiLPA dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk merespons perubahan prioritas atau urgensi belanja publik yang bersifat darurat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan program, terutama pada saat pendapatan belum sepenuhnya terealisasi pada awal tahun.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah yang sehat, SiLPA seharusnya dikelola sebagai instrumen strategis, bukan sekadar sisa anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Seluma perlu memperkuat akurasi proyeksi SiLPA dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, agar perannya dalam menjaga keseimbangan kas dan kesinambungan fiskal dapat lebih optimal. Perencanaan anggaran berbasis kinerja, penjadwalan kegiatan yang realistis, serta efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi kunci agar belanja tidak tertunda dan pembiayaan tidak mengendap. Dengan manajemen yang tepat, SiLPA dapat menjadi penyangga fiskal yang bermanfaat, bukan menjadi cerminan dari perencanaan yang tidak presisi.



B. Neraca Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

Neraca Daerah merupakan laporan posisi keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan kekayaan, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode anggaran. Unsur utama dalam neraca ini meliputi aset (seperti kas, tanah, bangunan, dan peralatan), kewajiban (hutang jangka pendek dan panjang), serta ekuitas (selisih antara aset dan kewajiban). Neraca ini menjadi alat penting untuk menilai kemampuan keuangan riil daerah dan mencerminkan seberapa sehat kondisi fiskal suatu pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan yang akuntabel, Neraca Daerah menjadi dasar untuk mengetahui kapasitas pembiayaan, potensi pengembangan aset, serta struktur pembiayaan jangka panjang.

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, khususnya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, Neraca Daerah memiliki fungsi strategis sebagai landasan penyusunan kebijakan yang realistis dan berkelanjutan. Informasi dari neraca digunakan untuk mengidentifikasi ruang fiskal, merumuskan prioritas belanja, serta merancang strategi pemanfaatan aset yang lebih produktif. Ketika aset didominasi oleh aset tetap yang belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini dapat menjadi peluang pembiayaan pembangunan melalui kerja sama pemanfaatan aset daerah. Di sisi lain, tingginya kewajiban menunjukkan perlunya pengendalian belanja dan penguatan efisiensi fiskal. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan RPJMD sangat bergantung pada pemahaman yang baik terhadap kondisi keuangan yang tercermin dalam Neraca Daerah.



Tabel II-80. Neraca Daerah Tahun Anggaran Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	1.702.457.973.842,45	1.736.244.088.788,98	1.753.808.050.866,08	1.832.888.933.065,31	1.803.448.840.681,07
	A. Aset Lancar	77.005.707.709,06	78.999.032.831,69	55.521.873.008,94	45.310.845.308,13	46.680.239.808,48
	B. Investasi Jangka Panjang	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13
	C. Aset Tetap	1.583.875.745.664,78	1.614.126.348.704,68	1.678.199.951.999,01	1.729.851.606.014,46	1.788.467.245.707,05
	D. Aset Lainnya	24.664.110.874,48	26.206.297.658,48	3.173.816.264,00	22.978.193.264,00	10.004.585.264,00
	JUMLAH ASET	1.702.457.973.842,45	1.736.244.088.788,98	1.753.808.050.866,08	1.815.053.054.180,72	1.862.064.480.373,66
2	KEWAJIBAN	4.479.101.615,05	6.366.922.524,00	2.276.286.920,00	2.600.494.695,00	46.235.009.753,50
	A. Kewajiban Jangka Pendek	4.479.101.615,05	6.366.922.524,00	2.276.286.920,00	2.600.494.695,00	46.235.009.753,50
	B. Kewajiban Jangka Panjang				-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.479.101.615,05	6.366.922.524,00	2.276.286.920,00	2.600.494.695,00	46.235.009.753,50
3	EKUITAS	1.697.978.872.221,40	1.726.877.166.264,98	1.751.531.763.946,08	1.812.452.559.485,72	1.815.829.470.620,16
	JUMLAH EKUITAS	1.697.978.872.221,40	1.726.877.166.264,98	1.751.531.763.946,08	1.812.452.559.485,72	1.815.829.470.620,16

Struktur neraca daerah Kabupaten Seluma selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang stabil dengan tren pertumbuhan nilai aset dan ekuitas, disertai fluktuasi pada komponen kewajiban. Total aset daerah meningkat dari Rp1,70 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,86 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan aset tetap, yang naik secara konsisten dari Rp1,58 triliun (2020) menjadi Rp1,79 triliun (2024). Pertumbuhan aset tetap menunjukkan akumulasi investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur dan barang milik daerah yang bernilai jangka panjang.

Namun demikian, terdapat penurunan signifikan pada aset lancar, dari Rp77,0 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp46,7 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena aset lancar mencerminkan likuiditas jangka



pendek pemerintah daerah untuk membiayai kewajiban operasional. Sementara itu, aset lainnya mengalami fluktuasi tajam, dengan penurunan drastis pada 2022 dan ketidakstabilan di tahun-tahun berikutnya.



Dari sisi kewajiban, angka total menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil selama empat tahun pertama, namun melonjak signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp46,23 miliar dari hanya Rp2,60 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan kewajiban ini berpotensi menekan posisi fiskal daerah dan memerlukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber utang atau beban jangka pendek yang ditanggung pada tahun tersebut.

Ekuitas daerah, yang merupakan selisih antara total aset dan kewajiban, juga meningkat dari Rp1,69 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,82 triliun pada tahun 2024. Tren kenaikan ini menunjukkan akumulasi kekayaan bersih daerah, yang merefleksikan hasil dari surplus anggaran dan pertumbuhan nilai aset tetap. Namun, lonjakan kewajiban pada 2024 menyebabkan pertumbuhan ekuitas menjadi melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, neraca daerah Kabupaten Seluma mencerminkan penguatan posisi aset dan ekuitas, namun dengan penurunan likuiditas jangka pendek dan peningkatan kewajiban yang cukup tajam di tahun terakhir. Hal ini menandakan pentingnya penguatan manajemen aset, pengelolaan kas, serta pengendalian kewajiban jangka pendek guna menjaga stabilitas fiskal dan kesehatan keuangan daerah secara berkelanjutan.

C. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Proyeksi Keuangan Daerah adalah estimasi kondisi keuangan pemerintah daerah di masa depan yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, serta potensi defisit atau surplus, yang disusun berdasarkan tren historis dan arah kebijakan fiskal. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029, proyeksi keuangan berfungsi sebagai landasan untuk menyusun target pembangunan yang realistis dan seimbang dengan kapasitas fiskal daerah. Proyeksi ini memastikan bahwa program prioritas yang direncanakan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penanggulangan kemiskinan, dapat dilaksanakan



secara terukur dan berkelanjutan. Selain itu, proyeksi keuangan juga membantu mengidentifikasi potensi risiko fiskal dan kebutuhan pembiayaan alternatif, sehingga strategi pembangunan dapat disusun dengan lebih akurat dan bertanggung jawab.



Tabel II-61. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.060.077.768.754,55	982.682.516.504,00	988.148.475.994,24	993.654.234.989,16	999.200.248.832,42	1.004.786.980.305,34
	A. Pendapatan Asli Daerah	29.263.800.962,55	43.100.341.680,00	43.962.348.513,60	44.841.595.483,87	45.738.427.393,55	46.653.195.941,42
	B. Pendapatan Transfer	1.030.813.967.792,00	939.582.174.824,00	944.186.127.480,64	948.812.639.505,29	953.461.821.438,87	958.133.784.363,92
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja	1.060.077.768.754,55	982.682.516.504,00	988.148.475.994,24	993.654.234.989,16	999.200.248.832,42	1.004.786.980.305,34
	A. Belanja Operasi	1.078.461.082.271,42	1.020.905.854.005,00	1.006.035.149.534,80	1.010.233.316.883,90	1.011.268.198.828,90	1.022.285.267.928,11
	B. Belanja Modal	724.900.679.689,30	757.425.039.795,00	746.743.057.017,80	748.424.990.795,90	749.938.659.625,49	757.929.511.664,82
	C. Belanja Tak Terduga	138.137.554.734,12	62.097.486.210,00	56.921.986.210,00	58.446.606.260,00	56.971.346.948,00	58.996.208.866,00
	D. Belanja Transfer	144.375.926,00	1.100.000.000,00	1.105.390.000,00	1.110.806.411,00	1.116.249.362,41	1.121.718.984,29
3	Pembiayaan	215.278.471.922,00	200.283.328.000,00	201.264.716.307,00	202.250.913.417,00	203.241.942.893,00	204.237.828.413,00
	A. Penerimaan Pembiayaan	1.078.461.082.271,42	1.020.905.854.005,00	1.006.035.149.534,80	1.010.233.316.883,90	1.011.268.198.828,90	1.022.285.267.928,11
	B. Pengeluaran Pembiayaan	(18.383.313.516,87)	(38.223.337.501,00)	(17.886.673.540,56)	(16.579.081.894,74)	(12.067.949.996,48)	(17.498.287.622,77)
	PEMBIAYAAN NETTO	11.397.678.869,04	-	-	-	-	-

Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2026 hingga 2030 menunjukkan arah fiskal yang hati-hati namun stabil. Pada baseline tahun 2024, pendapatan dan belanja daerah tercatat sebesar Rp1,06 triliun. Dalam lima tahun ke depan, pendapatan daerah diperkirakan mengalami sedikit penurunan dan kemudian bergerak stabil, dengan kisaran antara Rp982,68 miliar pada 2026 hingga Rp1,004 triliun pada 2030. Struktur pendapatan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang mencapai lebih dari 95 persen dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa



ketergantungan terhadap sumber eksternal masih tinggi dan menjadi tantangan tersendiri dalam konteks kemandirian fiskal daerah.



Meski kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil secara nominal, trennya terus meningkat dari Rp43,1 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp46,65 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sumber penerimaan lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Peningkatan PAD menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat kapasitas fiskal, khususnya dalam konteks pembiayaan pembangunan strategis tanpa ketergantungan penuh pada pusat. Namun, laju peningkatan ini perlu dipercepat dengan strategi optimalisasi BUMD, penguatan basis pajak, serta reformasi pengelolaan aset dan layanan publik berbayar.

Dari sisi belanja, pemerintah daerah merancang struktur pengeluaran yang relatif proporsional dan sesuai dengan rencana pendapatan. Belanja operasi merupakan komponen terbesar, yang secara konsisten berada di atas Rp1 triliun, menunjukkan beban tetap pemerintah dalam mendanai kebutuhan rutin, belanja pegawai, dan pelayanan dasar. Belanja modal juga mendapatkan perhatian besar, dengan alokasi tahunan di atas Rp740 miliar, mencerminkan komitmen untuk terus membangun dan memperbaiki infrastruktur strategis daerah. Selain itu, belanja tak terduga dan transfer tetap disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak serta memperkuat hubungan fiskal antarwilayah dan antarlevel pemerintahan, seperti dana desa atau bantuan keuangan lainnya.

Dalam aspek pembiayaan, struktur pembiayaan daerah menunjukkan penggunaan yang sehat dan terencana. Penerimaan pembiayaan tetap dipertahankan stabil untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja, sementara pengeluaran pembiayaan dirancang menurun dari Rp38,2 miliar pada tahun 2026 menjadi hanya sekitar Rp17,5 miliar pada tahun 2030. Kebijakan ini mencerminkan efisiensi fiskal serta penurunan beban pembiayaan dalam jangka menengah. Secara keseluruhan, proyeksi keuangan Kabupaten Seluma 2026–2030 mencerminkan perencanaan yang



realistis, dengan prinsip kehati-hatian fiskal, penguatan kapasitas lokal, dan keberlanjutan pembangunan daerah sebagai fondasi utama. Keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan harus terus dijaga agar pelayanan publik tetap optimal tanpa mengabaikan agenda transformasi struktural daerah.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Gambaran kondisi Kabupaten Seluma yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya masalah pembangunan daerah yang masih perlu diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang adaptif dan solutif untuk menghadapi berbagai kondisi masyarakat yang belum ideal. Analisis isu strategis menawarkan solusi dengan menghasilkan rumusan isu yang adaptif dan solutif dalam mengatasi permasalahan daerah. Isu strategis juga merupakan tantangan atau peluang yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Perumusan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Seluma juga dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat nasional dan provinsi. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi di level nasional dan Provinsi Bengkulu juga perlu diperhatikan untuk memastikan kesinambungan terhadap isu-isu dan masalah yang harus diselesaikan bersama.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahap penting karena berdampak langsung pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan ditetapkan pada tahap berikutnya. Selain berdasarkan dokumen perencanaan dan literatur yang relevan, perumusan ini juga sangat memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah di Kabupaten Seluma melalui diskusi langsung. Diskusi ini bertujuan untuk menambah referensi terkait permasalahan yang ada serta mengkonfirmasi kepada pemangku kepentingan atau pelaksana urusan terkait apakah permasalahan tersebut masih terjadi dan bagaimana potensinya di masa depan.

Perumusan permasalahan Kabupaten Seluma dimulai dari indikator pembangunan yang ada pada beberapa dokumen perencanaan maupun



dokumen pendukungnya dari level nasional, seperti metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pedoman lingkungan hidup strategis, standar pelayanan minimal (SPM), hingga dokumen dan hasil kajian level kota yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari beberapa pemilihan indikator tersebut, akhirnya diperoleh indikator yang dapat dijadikan rekomendasi untuk dokumen jangka menengah Kabupaten Seluma. Dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Seluma, beberapa dokumen pembangunan yang telah disusun oleh perangkat daerah menjadi referensi sebagai bahan masukan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan.



Gambar II-22. Penetapan Isu-isu Strategis Kabupaten Seluma 2025-2029

2.6.1. Permasalahan Kabupaten Seluma

Permasalahan pembangunan daerah mencerminkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta kesenjangan antara target masa depan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berdasarkan definisi tersebut, permasalahan pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian pembangunan saat ini yang



belum mencapai target dan dinilai masih kurang, tetapi juga dari kondisi yang sudah baik namun masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di masa depan.



Gambar II-23. Permasalahan Kabupaten Seluma

Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, diperlukan perumusan analisis permasalahan pembangunan daerah yang tepat. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah di setiap bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah, diketahui lima permasalahan utama di Kabupaten Seluma sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Belum optimalnya pembangunan ekonomi & pemerataan wilayah
3. Masih tingginya permasalahan sosial, lemahnya pelestarian budaya, dan belum meratanya kesejahteraan masyarakat
4. Terjadinya tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan hidup
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan



Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Seluma diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Seluma berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah strategis secara efektif dan efisien dalam jangka waktu 2025 hingga 2029. Secara garis besar, pembahasan dokumen ini terdiri dari beberapa bagian yaitu gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa poin yang menjadi masalah pokok di Kabupaten Seluma. Masalah pokok tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun beberapa isu strategis di Kabupaten Seluma mengingat secara konseptual isu strategis juga dapat berupa potensi masalah.

Tabel II-62 Rumusan Permasalahan Kabupaten Seluma

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Item Permasalahan	Analisa (Tren dan Perbandingan Data)
1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah masih di bawah target wajib belajar 12 tahun.	- Rata-rata lama sekolah Kabupaten Seluma 8,64 tahun (2023), meningkat dari 8,31 tahun (2020) tetapi masih di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu 9,12 tahun. - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK 61,2% (2023), lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bengkulu Utara 68,5%.
			Partisipasi sekolah SMA/SMK masih rendah	
			Kurangnya sarana dan prasarana sekolah, termasuk laboratorium dan perpustakaan	
		Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka stunting masih tinggi meskipun tren mengalami penurunan	- Prevalensi stunting 21,4% (2023), turun dari 24,7% (2021) tetapi masih lebih tinggi dari target nasional 14% pada 2024. - Rasio dokter per
			Fasilitas kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil.	
			Rasio dokter per penduduk masih	



No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Item Permasalahan	Analisa (Tren dan Perbandingan Data)
			rendah	1.000 penduduk 0,27 di Seluma, lebih rendah dibandingkan Bengkulu Tengah 0,35.
		Penguatan Kesetaraan Gender	Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih rendah.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan 42,1% (2023), lebih rendah dibandingkan Bengkulu Utara 45,6% dan rata-rata nasional 53,4%
		Pemuda dan Olahraga	Fasilitas olahraga belum merata	
2.	Pembangunan ekonomi dan infrastruktur	Persentase Kemiskinan Masih Tinggi	Angka kemiskinan masih cukup tinggi	Angka kemiskinan 12,3% (2023), menurun dari 13,1% (2020), tetapi masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu 11,2%
		Penguatan Ketahanan Pangan	Produktivitas pangan utama menurun	Produksi padi 45.600 ton (2023), turun dari 48.200 ton (2020)
		Ketergantungan sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan) masih tinggi	Kerentanan terhadap fluktuasi harga dan kondisi pasar (regional/internasional)	Sektor primer mendominasi sebesar 47,39% (2023) terhadap PDRB.
		Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Pertanian	Industri pengolahan hasil pertanian masih terbatas	Sebagian besar hasil pertanian dijual dalam bentuk mentah, tanpa nilai tambah melalui hilirisasi.
		Penguatan UMKM, IKM, Koperasi dan BUMDes	Keterbatasan akses permodalan dan rendahnya adopsi teknologi oleh UMKM	Dari 42.126 rumah tangga pertanian, 31.965 (76%) tidak memiliki akses terhadap kredit usaha rakyat
		Perbaikan Infrastruktur Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan	Kondisi infrastruktur jalan masih belum baik	38% jalan kabupaten dalam kondisi rusak.
		Fasilitas Pariwisata	Sarana dan prasarana wisata belum optimal.	Jumlah kunjungan wisatawan 15.000 orang (2023), lebih rendah dibandingkan Kabupaten Mukomuko 20.000



No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Item Permasalahan	Analisa (Tren dan Perbandingan Data)
				orang.
		Penataan Ruang Terencana	Tata ruang belum sesuai dengan kebutuhan perkembangan wilayah	Kebijakan pengembangan tata ruang berbasis zonasi ekonomi perlu dikembangkan
		Konektivitas dan integrasi infrastruktur	Minimnya konektivitas dan integrasi infrastruktur untuk mendukung rantai pasok industri dan perdagangan	Kondisi jalan yang belum optimal, keterbatasan pusat distribusi barang, serta rendahnya adopsi teknologi dalam sistem logistik menyebabkan biaya distribusi yang lebih tinggi dan menghambat daya saing daerah
3.	Tata Kelola Pemerintahan	Efisiensi Anggaran Pemerintah	Ketergantungan terhadap dana perimbangan (transfer daerah) cukup tinggi	PAD berkontribusi hanya 5,27% dari realisasi anggaran pendapatan daerah (2023).
		Supremasi Hukum	Tingkat kriminalitas masih tinggi	Jumlah kasus kriminalitas 145 kasus (2023), meningkat dari 130 kasus (2020).
		Peningkatan dan Kompetensi ASN	Kompetensi ASN belum merata di semua sektor pelayanan publik	Sertifikasi kompetensi ASN perlu di tingkatkan
4.	Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Keamanan dan Ketentraman	Kasus konflik dan ketertiban umum masih terjadi	Angka konflik mengalami peningkatan dari 20 kasus (2020) menjadi 33 kasus (2023)
		Penguatan Akhlak dan Budaya	Pelestarian budaya lokal perlu di optimalkan	Peningkatan anggaran pengembangan budaya perlu di optimalkan
5.	Lingkungan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman	Pencemaran dan kerusakan lingkungan terus meningkat	Rasio tutupan lahan hijau mengalami penurunan 32% (2023), turun dari 36% (2020) akibat alih fungsi lahan
		Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir	Kapasitas pengelolaan sampah masih rendah	Mayoritas sampah dibuang dalam lubang atau dibakar



A. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Permasalahan utama yang berkaitan dengan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Seluma mencakup aspek pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta pengembangan pemuda dan olahraga. Setiap permasalahan dirinci dalam bentuk isu spesifik beserta item permasalahan yang lebih terfokus, disertai dengan analisis berdasarkan tren dan perbandingan data antarwaktu maupun antarwilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi eksisting serta menunjukkan celah yang masih perlu diintervensi secara strategis guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Seluma. Berikut ini tabel analisa permasalahan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Seluma:

Tabel II-63 Analisa Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Manusia di Kabupaten Seluma

Permasalahan Utama	Permasalahan	Item Permasalahan	Analisa (Tren dan Perbandingan Data)
Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah masih di bawah target wajib belajar 12 tahun.	- Rata-rata lama sekolah Kabupaten Seluma 8,64 tahun (2023), meningkat dari 8,31 tahun (2020) tetapi masih di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu 9,12 tahun. - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK 61,2% (2023), lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bengkulu Utara 68,5%.
		Partisipasi sekolah SMA/SMK masih rendah	
		Kurangnya sarana dan prasarana sekolah, termasuk laboratorium dan perpustakaan	
	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka stunting masih tinggi meskipun tren mengalami penurunan	- Prevalensi stunting 21,4% (2023), turun dari 24,7% (2021) tetapi masih lebih tinggi dari target nasional 14% pada 2024. - Rasio dokter per 1.000 penduduk 0,27 di Seluma, lebih rendah dibandingkan Bengkulu Tengah 0,35.
		Fasilitas kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil.	
		Rasio dokter per penduduk masih rendah	
	Penguatan Kesetaraan Gender	Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih rendah.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan 42,1% (2023), lebih rendah dibandingkan Bengkulu



Permasalahan Utama	Permasalahan	Item Permasalahan	Analisa (Tren dan Perbandingan Data)
			Utara 45,6% dan rata-rata nasional 53,4%
	Pemuda dan Olahraga	Fasilitas olahraga belum merata	

Permasalahan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Seluma merupakan tantangan mendasar yang berdampak luas terhadap kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam sektor pendidikan, meskipun terjadi tren peningkatan dalam rata-rata lama sekolah, kemajuannya masih lambat dan belum mampu menjangkau target wajib belajar yang ditetapkan secara nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, capaian Kabupaten Seluma masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi pelajar pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA atau SMK. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak. Ketimpangan ini menjadi penghambat utama dalam peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi generasi muda di daerah.

Pada aspek kesehatan masyarakat, situasinya juga masih memprihatinkan. Meskipun prevalensi stunting mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angkanya masih menunjukkan bahwa permasalahan gizi kronis pada anak belum sepenuhnya teratasi. Stunting tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang fisik, tetapi juga menurunkan kapasitas kognitif anak-anak, yang berimplikasi jangka panjang terhadap kualitas SDM. Kondisi ini diperburuk oleh masih rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter, serta belum meratanya distribusi fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perdesaan. Kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai ini



menciptakan ketimpangan kesejahteraan dan memperbesar risiko ketahanan sosial masyarakat yang lemah.

Dalam hal kesetaraan gender, partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga masih jauh dari harapan. Perempuan belum memiliki akses dan peluang yang setara dalam berkontribusi terhadap sektor ekonomi, jika dibandingkan dengan laki-laki maupun dengan perempuan di wilayah kabupaten lain yang lebih maju. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja dapat disebabkan oleh hambatan sosial dan budaya, kurangnya dukungan infrastruktur penunjang, serta terbatasnya program pemberdayaan ekonomi perempuan. Sementara itu, pada sektor kepemudaan dan olahraga, ketersediaan fasilitas yang belum merata menjadi penghalang dalam pengembangan potensi dan kreativitas generasi muda. Banyak pemuda yang tidak memiliki ruang dan sarana untuk menyalurkan minat serta bakatnya, sehingga potensi sumber daya ini belum tergali secara maksimal.

Kondisi-kondisi tersebut jika dibiarkan akan berdampak sistemik terhadap masa depan pembangunan Kabupaten Seluma. Rendahnya capaian pendidikan dan minimnya kualitas kesehatan akan menghasilkan angkatan kerja yang kurang kompeten dan tidak sehat, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ekonomi daerah. Ketimpangan gender akan menghambat upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, lemahnya dukungan terhadap pemuda dapat memperbesar risiko pengangguran, keterpinggiran sosial, dan meningkatnya masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang bersifat holistik dan berkelanjutan, dengan pendekatan lintas sektor yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Investasi di bidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pemuda bukan hanya kebutuhan, tetapi juga merupakan strategi utama untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi dinamika global dan regional ke depan.



B. Belum optimalnya pembangunan ekonomi & pemerataan wilayah

Tabel II-64 Analisa Permasalahan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Kabupaten Seluma

Permasalahan Utama	Permasalahan	Item Permasalahan	Analisa (Tren dan Perbandingan Data)
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur	Persentase Kemiskinan Masih Tinggi	Angka kemiskinan masih cukup tinggi	Angka kemiskinan 12,3% (2023), menurun dari 13,1% (2020), tetapi masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu 11,2%
	Penguatan Ketahanan Pangan	Produktivitas pangan utama menurun	Produksi padi 45.600 ton (2023), turun dari 48.200 ton (2020)
	Ketergantungan sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan) masih tinggi	Kerentanan terhadap fluktuasi harga dan kondisi pasar (regional/internasional)	Sektor primer mendominasi sebesar 47,39% (2023) terhadap PDRB.
	Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Pertanian	Industri pengolahan hasil pertanian masih terbatas	Sebagian besar hasil pertanian dijual dalam bentuk mentah, tanpa nilai tambah melalui hilirisasi.
	Penguatan UMKM, IKM, Koperasi dan BUMDes	Keterbatasan akses permodalan dan rendahnya adopsi teknologi oleh UMKM	Dari 42.126 rumah tangga pertanian, 31.965 (76%) tidak memiliki akses terhadap kredit usaha rakyat
	Perbaikan Infrastruktur Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan	Kondisi infrastruktur jalan masih belum baik	38% jalan kabupaten dalam kondisi rusak.
	Fasilitas Pariwisata	Sarana dan prasarana wisata belum optimal.	Jumlah kunjungan wisatawan 15.000 orang (2023), lebih rendah dibandingkan Kabupaten Mukomuko 20.000 orang.
	Penataan Ruang Terencana	Tata ruang belum sesuai dengan kebutuhan perkembangan wilayah	Kebijakan pengembangan tata ruang berbasis zonasi ekonomi perlu dikembangkan
	Konektivitas dan integrasi infrastruktur	Minimnya konektivitas dan integrasi infrastruktur untuk mendukung rantai pasok industri dan perdagangan	Kondisi jalan yang belum optimal, keterbatasan pusat distribusi barang, serta rendahnya adopsi teknologi dalam sistem logistik menyebabkan biaya distribusi yang lebih tinggi dan menghambat daya saing daerah



Pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Kabupaten Seluma masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Gambaran utama permasalahan terletak pada rendahnya efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan secara signifikan, ketergantungan yang tinggi pada sektor primer, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi.

Salah satu permasalahan mendasar adalah masih tingginya angka kemiskinan meskipun terjadi tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup inklusif untuk menjangkau kelompok rentan dan belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Kondisi ini diperparah oleh menurunnya produktivitas pangan utama, yang menunjukkan lemahnya ketahanan pangan lokal, serta masih terbatasnya hilirisasi hasil pertanian yang menyebabkan rendahnya nilai tambah komoditas lokal.

Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan kondisi pasar regional maupun internasional. Ketergantungan ini juga berdampak pada lambatnya diversifikasi ekonomi dan terbatasnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Pelaku usaha lokal seperti UMKM, IKM, koperasi, dan BUMDes menghadapi hambatan serius dalam mengakses permodalan serta rendahnya kemampuan dalam mengadopsi teknologi. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan kapasitas usaha dalam mengembangkan skala produksi dan memperluas pasar.

Di sisi lain, kondisi infrastruktur yang belum memadai juga menjadi penghambat utama dalam mendorong efisiensi ekonomi dan mobilitas masyarakat. Banyak ruas jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak, terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan. Demikian pula fasilitas



pendukung sektor pariwisata belum optimal, sehingga potensi daerah dalam menarik wisatawan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Permasalahan lainnya menyangkut penataan ruang yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika perkembangan wilayah dan kebutuhan ekonomi. Ketidaksiesuaian tata ruang dengan zonasi kegiatan ekonomi menyebabkan pembangunan cenderung tidak terarah dan menimbulkan ketimpangan wilayah. Di samping itu, konektivitas dan integrasi infrastruktur logistik dan perdagangan juga masih lemah, ditandai dengan minimnya pusat distribusi dan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam sistem logistik, yang berdampak pada tingginya biaya distribusi dan rendahnya daya saing daerah.

Melalui identifikasi permasalahan ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi antara pengembangan ekonomi lokal, perbaikan infrastruktur, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Seluma.

C. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Tabel II-65 Analisa Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Seluma

Permasalahan Utama	Permasalahan	Item Permasalahan	Analisa (Tren dan Perbandingan Data)
Tata Kelola Pemerintahan	Efisiensi Anggaran Pemerintah	Ketergantungan terhadap dana perimbangan (transfer daerah) cukup tinggi	PAD berkontribusi hanya 5,27% dari realisasi anggaran pendapatan daerah (2023).
	Supremasi Hukum	Tingkat kriminalitas masih tinggi	Jumlah kasus kriminalitas 145 kasus (2023), meningkat dari 130 kasus (2020).
	Peningkatan dan Kompetensi ASN	Kompetensi ASN belum merata di semua sektor pelayanan publik	Sertifikasi kompetensi ASN perlu di tingkatkan

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Seluma masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Permasalahan



utama terletak pada efisiensi anggaran, penegakan supremasi hukum, serta kualitas dan pemerataan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Dalam hal efisiensi anggaran, struktur pendapatan daerah masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal, sehingga ruang fiskal untuk mendanai program pembangunan secara mandiri sangat terbatas. Ketergantungan ini juga berisiko terhadap keberlanjutan program pembangunan apabila terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional.

Dari aspek supremasi hukum, tingkat kriminalitas yang masih tinggi menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya terjaga. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan kapasitas penegakan hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan tertib. Stabilitas hukum yang baik merupakan prasyarat penting bagi iklim investasi dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kualitas sumber daya manusia aparatur masih menjadi tantangan tersendiri. Kompetensi ASN belum merata di seluruh sektor pelayanan publik, terutama dalam menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan yang responsif. Ketersediaan pelatihan teknis maupun sertifikasi kompetensi yang terbatas menghambat peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Seluma menuntut upaya perbaikan yang sistematis, mulai dari penguatan kemandirian fiskal, penegakan hukum yang lebih efektif, hingga peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN guna mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



D. Masih tingginya permasalahan sosial, lemahnya pelestarian budaya, dan belum meratanya kesejahteraan masyarakat

Tabel II-66 Analisa Permasalahan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Seluma

Permasalahan Utama	Permasalahan	Item Permasalahan	Analisa (Tren dan Perbandingan Data)
Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Keamanan dan Ketentraman	Kasus konflik dan ketertiban umum masih terjadi	Angka konflik mengalami peningkatan dari 20 kasus (2020) menjadi 33 kasus (2023)
	Penguatan Akhlak dan Budaya	Pelestarian budaya lokal perlu di optimalkan	Peningkatan anggaran pengembangan budaya perlu di optimalkan

Permasalahan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seluma menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian serius, khususnya terkait dengan aspek keamanan, ketertiban umum, serta pelestarian budaya lokal. Dari sisi keamanan dan ketentraman, masih seringnya terjadi kasus konflik dan gangguan ketertiban mencerminkan belum optimalnya sistem deteksi dini dan penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran lembaga sosial dan aparatur keamanan dalam membangun harmoni sosial dan menjaga stabilitas lingkungan. Ketidakstabilan sosial semacam ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta menghambat jalannya pembangunan.

Dalam aspek penguatan akhlak dan budaya, pelestarian nilai-nilai budaya lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Dukungan terhadap kegiatan budaya, baik dari sisi anggaran maupun program, masih belum memadai untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya yang menjadi identitas daerah. Minimnya perhatian terhadap sektor ini berpotensi menyebabkan tergerusnya nilai-nilai lokal yang seharusnya menjadi landasan pembangunan karakter masyarakat.

Tantangan dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seluma menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif antara penguatan ketahanan sosial, pelestarian budaya, dan pemberdayaan



komunitas lokal guna menciptakan masyarakat yang aman, tertib, serta berkarakter kuat dan berdaya saing.

E. Terjadinya tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan hidup

Gambar II-24. Analisis terhadap Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Permasalahan Utama	Permasalahan	Item Permasalahan	Analisa (Tren dan Perbandingan Data)
Lingkungan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman	Pencemaran dan kerusakan lingkungan terus meningkat	Rasio tutupan lahan hijau mengalami penurunan 32% (2023), turun dari 36% (2020) akibat alih fungsi lahan
	Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir	Kapasitas pengelolaan sampah masih rendah	Mayoritas sampah dibuang dalam lubang atau dibakar

Kabupaten Seluma menghadapi tantangan yang cukup serius dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Permasalahan utama terletak pada penurunan kualitas lingkungan dan belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman, terutama dalam hal pencemaran, kerusakan lingkungan, serta pengelolaan sampah. Salah satu isu yang mencuat adalah peningkatan laju alih fungsi lahan yang menyebabkan menurunnya tutupan lahan hijau. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem, menurunkan daya dukung lingkungan, dan meningkatkan potensi bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Pola pemanfaatan ruang yang tidak terkendali menunjukkan perlunya kebijakan pengendalian dan perlindungan lingkungan yang lebih tegas dan konsisten.

Selain itu, pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) dan sistem pengelolaan sampah secara umum masih belum memadai. Sebagian besar masyarakat masih menerapkan metode pembuangan sampah yang tidak ramah lingkungan, seperti membakar atau membuangnya secara terbuka. Rendahnya kapasitas layanan persampahan, baik dari sisi infrastruktur maupun manajemen, turut memperburuk kualitas lingkungan permukiman.



Permasalahan lingkungan di Kabupaten Seluma menuntut penanganan yang lebih terintegrasi, mulai dari pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan kualitas tata kelola lingkungan, hingga penguatan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.7. Isu Strategis

2.7.1. Isu Strategis Global

Isu strategis global merupakan tantangan atau permasalahan berskala internasional yang berdampak luas dan lintas batas negara, mencakup berbagai aspek seperti lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, kesehatan, dan keamanan. Isu-isu ini muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi, kemajuan teknologi, dan ketimpangan pembangunan antarnegara, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan kerja sama dan komitmen kolektif dari seluruh dunia. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi di tingkat nasional dan daerah, termasuk dalam aspek ketahanan pangan, bencana alam, inflasi, kemiskinan, dan stabilitas sosial. Pemerintah daerah perlu memahami dan merespons isu strategis global dalam setiap perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, agar kebijakan yang diambil mampu adaptif terhadap dinamika global dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Merujuk dari world bank report, UNICEF Global Report, UN Desa, CDC's Global, Global Climate Report dan European Central Bank terdapat 8 (delapan) isu Global sebagai berikut ini:

A. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi Global

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi global merupakan salah satu isu paling mendasar yang terus membayangi tatanan dunia modern. Di tengah kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi global yang pesat, distribusi



kekayaan dan akses terhadap sumber daya masih jauh dari merata. Data dari World Inequality Database tahun 2024 menunjukkan bahwa 10% individu terkaya menguasai lebih dari 50% pendapatan nasional di banyak negara besar seperti India, Rusia, dan Amerika Serikat. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, sekitar 3,4 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan pendapatan kurang dari \$6,85 per hari, angka yang mencerminkan kondisi kerentanan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada ketidakstabilan sosial dan meningkatnya polarisasi, tetapi juga menjadi hambatan utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, pendidikan yang merata, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pekerjaan yang layak.

Ketidaksetaraan yang semakin melebar juga menimbulkan risiko jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi global, karena melemahkan daya beli masyarakat luas dan mempersempit basis konsumsi domestik di banyak negara. Selain itu, ketimpangan dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan, memperkuat populisme, dan menciptakan ketegangan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, isu ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan di tingkat global maupun nasional untuk merumuskan strategi redistribusi ekonomi yang adil, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling rentan.

B. Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0

Transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah secara fundamental cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengelola sumber daya. Perkembangan pesat teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), komputasi awan, big data, dan otomatisasi cerdas menjadi pendorong utama dalam peningkatan



produktivitas dan efisiensi lintas sektor mulai dari manufaktur, pertanian, hingga layanan publik. Diperkirakan pasar global Industri 4.0 akan mencapai nilai sebesar 279,75 miliar dolar AS pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,3%. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital telah menjadi kekuatan disruptif yang tak terelakkan dalam lanskap pembangunan global, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inovatif dan terintegrasi.

Namun, di balik potensi besar tersebut, transformasi digital juga membawa tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kesenjangan digital, yakni disparitas akses terhadap teknologi antara negara maju dan berkembang, atau bahkan antara kawasan urban dan rural di dalam satu negara. Ketimpangan ini berisiko memperlebar jurang ketidaksetaraan, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi berbasis digital. Selain itu, meningkatnya pemanfaatan data dan teknologi canggih juga menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang komprehensif, baik terkait perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI, maupun keamanan siber. Penguatan kapasitas digital dan penyusunan kebijakan yang adaptif menjadi kunci agar transformasi ini dapat berlangsung secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

C. Krisis Pangan dan Energi

Krisis pangan dan energi telah menjadi isu strategis yang mengancam ketahanan global, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok. Laporan Global Report on Food Crises 2024 mencatat bahwa sekitar 282 juta orang di 59 negara mengalami kelaparan akut, yang sebagian besar disebabkan oleh konflik bersenjata, tekanan ekonomi, dan kejadian iklim ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Lonjakan harga pangan global turut memperparah kerentanan kelompok miskin dan rentan, serta menghambat pencapaian tujuan pengentasan kelaparan dan malnutrisi di berbagai wilayah. Ketidakseimbangan antara



produksi dan distribusi pangan juga menunjukkan lemahnya sistem pertanian dan logistik global dalam menghadapi guncangan berskala besar.

Krisis energi global semakin memperkuat tekanan terhadap perekonomian dunia. Ketidakstabilan pasokan energi akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga minyak dan gas, serta keterbatasan akses terhadap energi bersih menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesenjangan energi antarnegara. Harga energi yang tinggi tidak hanya membebani rumah tangga, tetapi juga menurunkan daya saing industri, khususnya di negara-negara berkembang. Situasi ini menunjukkan urgensi transisi menuju energi terbarukan yang lebih stabil, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong investasi dalam ketahanan energi nasional dan sistem pangan yang adaptif terhadap krisis global.

D. Migrasi, Urbanisasi dan Perkotaan Global

Migrasi internasional dan urbanisasi menjadi fenomena global yang terus meningkat seiring dengan perubahan demografi, ketimpangan pembangunan, serta tekanan sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2024, jumlah migran internasional tercatat mencapai 304 juta orang, naik signifikan dari 275 juta pada tahun 2020. Migrasi terjadi karena berbagai faktor seperti konflik, perubahan iklim, kemiskinan, serta harapan terhadap kehidupan yang lebih baik di negara atau kota tujuan. Mobilitas manusia dalam skala besar ini tidak hanya berdampak pada negara tujuan, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks bagi negara asal maupun transit.

Urbanisasi yang berlangsung dengan sangat cepat telah menciptakan tekanan besar terhadap kota-kota global, terutama di negara berkembang. Pertumbuhan populasi perkotaan yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai menyebabkan munculnya berbagai permasalahan seperti kemacetan, kekurangan perumahan layak, sanitasi buruk, dan akses terbatas terhadap layanan pendidikan serta kesehatan. Selain itu, urbanisasi juga memperbesar risiko



ketimpangan sosial dan segregasi wilayah di dalam kota itu sendiri, yang dapat memicu konflik sosial dan marginalisasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan kebijakan migrasi yang inklusif agar proses urbanisasi dan perpindahan penduduk dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

E. Penurunan Kepercayaan Terhadap Institusi Pemerintahan

Penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan menjadi fenomena global yang kian mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hasil survei Pew Research Center pada Mei 2024 menunjukkan bahwa hanya 22% warga Amerika Serikat yang percaya bahwa pemerintah mereka akan melakukan hal yang benar. Kondisi serupa juga terlihat di negara-negara OECD, di mana 44% responden menyatakan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah nasional. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidaktransparanan, korupsi, ketidakefisienan layanan publik, serta kegagalan pemerintah dalam merespons krisis seperti pandemi dan perubahan iklim. Ketika kepercayaan publik menurun, legitimasi pemerintah pun turut tergerus, memicu apatisme politik, penurunan partisipasi warga negara, hingga meningkatnya populisme dan disinformasi.

Dampak dari fenomena global ini juga berpotensi dirasakan di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketika masyarakat mulai meragukan integritas dan kapabilitas pemerintah daerah, akan muncul hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan, resistensi terhadap kebijakan publik, dan menurunnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal. Kurangnya kepercayaan dapat memperlambat reformasi birokrasi dan melemahkan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini perlu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif. Penguatan komunikasi publik, pemanfaatan teknologi digital seperti Command Center, serta pemberdayaan



masyarakat dalam pengawasan kebijakan menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan daerah yang inklusif dan akuntabel.

F. Ancaman Pandemi dan Kesehatan Global

Ancaman pandemi dan gangguan kesehatan global masih menjadi perhatian utama dunia, bahkan setelah berakhirnya fase krisis dari pandemi COVID-19. Tahun 2024 mencatat setidaknya 17 wabah penyakit menular yang tergolong berbahaya, termasuk kemunculan virus Marburg dan varian baru flu burung (H5Nx), yang menunjukkan bahwa potensi penyebaran penyakit lintas negara tetap tinggi. Selain itu, kasus demam berdarah dilaporkan mencapai lebih dari 12 juta di berbagai wilayah tropis, menjadikannya angka tertinggi sepanjang sejarah. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya sistem ketahanan kesehatan global, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya respons cepat, koordinasi lintas negara, serta investasi berkelanjutan dalam sistem pengawasan dan deteksi dini.

Di tengah mobilitas manusia yang semakin tinggi, urbanisasi yang padat, dan perubahan iklim yang memperluas habitat vektor penyakit, sistem kesehatan masyarakat harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap ancaman baru maupun yang terus berkembang. Pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menghantam stabilitas ekonomi, pendidikan, dan struktur sosial. Oleh karena itu, pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif, termasuk di tingkat lokal seperti Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi sangat penting. Upaya ini meliputi penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga medis, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelacakan dan pengawasan penyakit, serta edukasi masyarakat secara masif agar siap menghadapi risiko kesehatan global di masa depan.

G. Geopolitik dan Fragmentasi Global

Geopolitik dan fragmentasi global menjadi salah satu isu strategis yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan antarnegara,



terutama antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional yang ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, sanksi ekonomi, serta pembentukan blok-blok aliansi baru yang saling bersaing. Situasi ini memicu ketidakstabilan global dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem perdagangan internasional, aliran modal, serta rantai pasok global. Data terbaru menunjukkan bahwa fragmentasi geopolitik telah menyebabkan penurunan aliran investasi langsung asing (FDI) global sekitar 3% atau setara dengan €30 miliar pada tahun 2024. Hal ini menjadi indikator bahwa kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dunia turut tergerus akibat eskalasi ketegangan politik antarnegara.

Dampak dari fragmentasi geopolitik ini tidak hanya dirasakan di tingkat global, tetapi juga menular ke tingkat nasional dan daerah. Ketidakpastian dalam perdagangan dan investasi internasional dapat memengaruhi stabilitas harga komoditas, kelangkaan barang impor penting, serta menurunkan daya saing ekspor daerah. Bagi daerah seperti Kabupaten Bengkulu Tengah, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investasi, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui penguatan sektor ekonomi lokal, diversifikasi sumber pertumbuhan, serta membangun iklim investasi yang kondusif agar tetap resilien terhadap dampak dinamika geopolitik global.

H. Perubahan Iklim dan Krisis Ekologis

Perubahan iklim dan krisis ekologis merupakan tantangan terbesar umat manusia di abad ke-21 yang dampaknya semakin nyata dan luas. Tahun 2024 mencatat rekor suhu rata-rata global tertinggi dalam sejarah, dengan 14,5% permukaan bumi mengalami suhu ekstrem pada bulan Juni. Kenaikan suhu ini mendorong peningkatan intensitas dan frekuensi bencana alam seperti gelombang panas, banjir bandang, kekeringan ekstrem, dan



badai tropis. Selain itu, kebakaran hutan besar-besaran, terutama di wilayah tropis seperti Amazon, Afrika Tengah, dan Asia Tenggara, telah menyebabkan kehilangan hutan seluas 6,7 juta hektar angka tertinggi dalam dua dekade terakhir. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memperburuk krisis keanekaragaman hayati, meningkatkan emisi karbon, serta mengganggu siklus air dan pertanian global.

Di tengah tekanan tersebut, krisis ekologis juga memperbesar risiko terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi, terutama bagi negara berkembang dan daerah yang bergantung pada sumber daya alam. Kabupaten Bengkulu Tengah, misalnya, yang memiliki wilayah pesisir, pertanian, dan hutan, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti abrasi pantai, gagal panen, dan berkurangnya debit air bersih. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh kebijakan sektoral, termasuk melalui konservasi lingkungan, penggunaan energi terbarukan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta edukasi masyarakat terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

2.7.2. Isu Strategis Nasional

Pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 menjadi tahap awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai agenda pembangunan jangka menengah tahap pertama, periode ini menitikberatkan pada transformasi fundamental di berbagai sektor guna memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Fokus utama pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola pemerintahan, supremasi hukum dan stabilitas nasional, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Strategi pembangunan ini dirancang untuk



memastikan peningkatan kualitas SDM, percepatan industrialisasi berbasis nilai tambah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dan penguatan daya saing ekonomi digital serta energi hijau.

Dalam konteks pembangunan kewilayahan, RPJMN 2025-2029 memberikan arah yang lebih terintegrasi bagi setiap pulau dan kawasan strategis, termasuk Sumatera. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Sumatera memiliki peran krusial dalam mendukung target pembangunan nasional, terutama melalui penguatan mata rantai bioindustri dan industri maritim yang berdaya saing serta berkelanjutan. Kontribusi wilayah ini terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022 mencapai 22,0% dan diproyeksikan meningkat menjadi 22,3% pada 2029. Potensi geografis Sumatera sebagai jalur perdagangan maritim global menjadikannya strategis untuk pengembangan industri berbasis sumber daya alam, pertanian-agroindustri, pariwisata berkelanjutan, serta percepatan transisi energi terbarukan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti ketimpangan akses infrastruktur, degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi, serta belum optimalnya hilirisasi sektor unggulan yang perlu diatasi melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah.

Dengan mengacu pada kerangka pembangunan nasional yang telah ditetapkan, penelaahan RPJMN 2025-2029 menjadi langkah penting dalam memahami bagaimana kebijakan jangka menengah ini akan diimplementasikan di daerah. Kajian terhadap isu strategis yang dihadapi serta arah kebijakan pembangunan wilayah Sumatera menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa program pembangunan yang dirancang selaras dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Agenda pembangunan nasional jangka menengah 2025-2029 berfokus pada percepatan transformasi di berbagai sektor guna mewujudkan



pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dalam menghadapi tantangan struktural, pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, optimalisasi tata kelola pemerintahan, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Selain itu, penguatan supremasi hukum, stabilitas nasional, dan kepemimpinan global menjadi elemen kunci dalam memastikan kesinambungan pembangunan yang efektif.

Strategi pembangunan dalam lima tahun ke depan juga menitikberatkan pada hilirisasi industri, transisi energi, percepatan digitalisasi, serta pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, termasuk ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil guna memastikan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

A. Isu Transformasi Sosial

Fokus agenda pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2025-2029 adalah Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Tujuan utama dari transformasi ini adalah melahirkan individu yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya di masing-masing bidang pembangunan, yang memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk memastikan layanan dasar dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat.

Sektor kesehatan, tantangan utama mencakup rendahnya cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta gizi masyarakat, mulai dari ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif, hingga lansia. Pengendalian penyakit dan



ketahanan sistem kesehatan juga belum optimal, dengan tingginya angka penyakit menular, peningkatan penyakit tidak menular, serta ancaman penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Selain itu, disparitas dalam sistem kesehatan di berbagai wilayah menyebabkan ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Di sektor pendidikan, tantangan yang dihadapi meliputi ketimpangan akses dan partisipasi pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial-ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan akibat keterbatasan sarana-prasarana, serta belum meratanya distribusi guru berkualitas. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi juga masih rendah dalam kompetisi global.

Perlindungan sosial berfokus pada percepatan pengurangan kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, terutama bagi kelompok rentan. Namun, tantangan seperti ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial, dampak bencana alam dan perubahan iklim, serta keterbatasan layanan bagi penyandang disabilitas dan lansia masih menjadi kendala. Selain itu, akses terhadap hunian layak dan terjangkau masih terbatas, serta penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat. Program perlindungan sosial yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi pekerja informal dan jaminan hari tua, juga menjadi isu yang perlu diselesaikan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-67. Isu Strategis Transformasi Sosial Nasional

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Kesehatan untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi (189/100.000)
		Stunting masih tinggi (21,6%)
		Prevalensi obesitas terus meningkat (21,8%)
		Persentase aktivitas fisik cukup pada penduduk usia ≥ 10 tahun masih rendah (66,5%)
		Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia (385 per 100.000 penduduk)
		Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)



		43,78% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
		20,36% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
		78,35% rumah sakit terakreditasi paripurna
		63,54% FKTP terakreditasi paripurna
2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Akses pendidikan belum merata (APK PAUD rendah; tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA sederajat 76,79%)
		Kualitas pendidikan masih rendah (skor PISA: membaca 359; matematika 366; sains 383)
		Kualitas fasilitas, dan distribusi guru terbatas (<50% memiliki sertifikat pendidik dan hanya 870 ribu guru)
		Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah (55,43% berpendidikan SMP ke bawah)
		.Rendahnya kualitas lulusan, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah (40,9% yang bekerja di bidang keahlian non tinggi)
		Daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional masih rendah (peringkat 75 dari 132 negara dalam GII pada tahun 2022)
3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Akurasi program bantuan sosial masih rendah
		Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
		Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
		Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
		Program Jaminan Sosial belum optimal dan inklusif

B. Isu Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah menghadapi tantangan besar dalam upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mencapai pertumbuhan berbasis produktivitas. Salah satu kendala utama adalah stagnasi industrialisasi yang belum menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan perannya dalam perekonomian cenderung menurun. Sektor industri pengolahan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi penawaran seperti inefisiensi faktor produksi, rendahnya kompleksitas dan nilai tambah produk, serta keterbatasan dalam adopsi teknologi dan penelitian pengembangan. Di sisi permintaan, permintaan produk industri domestik masih terbatas, sementara



daya saing industri nasional di pasar global masih lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi industri belum berjalan optimal, sehingga diperlukan strategi yang lebih agresif dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor industri.

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam peningkatan produktivitas ekonomi, namun tantangan besar masih dihadapi akibat rendahnya kualitas tenaga kerja. Sebagian besar angkatan kerja Indonesia berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah, yang menyebabkan keterbatasan peningkatan produktivitas. Sektor pertanian juga mengalami tantangan serupa dengan rendahnya adopsi teknologi, lambatnya regenerasi petani, serta degradasi kualitas lahan yang menghambat peningkatan nilai tambah. Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum berkembang secara optimal akibat terbatasnya infrastruktur, kualitas SDM, serta sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih terarah dalam penguatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan sektor-sektor produktif agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

UMKM dan koperasi, sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, masih menghadapi kendala besar dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing. Permasalahan utama meliputi keterbatasan akses permodalan dan rendahnya adopsi teknologi yang membuat UMKM sulit untuk naik kelas. BUMN yang diharapkan dapat menjadi agen pembangunan juga belum sepenuhnya inklusif dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Selain itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian nasional masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pasar yang belum optimal, regulasi yang belum kuat, serta rendahnya pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara UMKM,



BUMN, dan sektor keuangan syariah untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Upaya pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan besar dalam transisi energi dan digitalisasi. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sementara pemanfaatan energi terbarukan belum maksimal akibat keterbatasan infrastruktur dan pendanaan. Pendekatan ekonomi hijau dan biru juga belum berkembang secara optimal karena masih membutuhkan biaya dan teknologi yang tinggi. Selain itu, percepatan digitalisasi menghadapi tantangan geografis dan karakteristik daerah yang berbeda, yang menyebabkan ketimpangan akses dan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu dioptimalkan. Sementara itu, rendahnya akses terhadap hunian layak dan belum optimalnya layanan perkotaan menyebabkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tidak terarah, sehingga menimbulkan permasalahan permukiman kumuh dan urban sprawl. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang lebih komprehensif dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan memastikan pembangunan yang lebih merata antara perkotaan dan perdesaan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-68. Isu Strategis Transformasi Ekonomi Nasional

No	Kategori	Permasalahan
1.	Industri	Deindustrialisasi akibat penurunan rasio PDB industri pengolahan
		Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam industri
		Kompleksitas dan daya saing produk industri masih rendah
		Adopsi teknologi lama masih dominan
		Mismatch produk dengan permintaan global
		Rendahnya kemampuan inovasi dalam industri
		Tuntutan energi hijau semakin besar dalam industri
2.	Ekonomi Biru	Upaya konservasi kawasan perairan dan pesisir yang belum maksimal
		Rendahnya diversifikasi usaha ekonomi biru
		Kurangnya kebijakan tata kelola pada sektor ekonomi biru
3.	Ekonomi Kreatif	Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
		Indeks kekayaan intelektual Indonesia masih di bawah rata-rata
		Kurangnya akses dalam komersialisasi kekayaan intelektual
		Kurangnya kemitraan dalam ekosistem ekonomi kreatif
		Daya saing SDM ekonomi kreatif yang masih rendah
4.	Produktivitas Tenaga Kerja	Besarnya angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah
		Ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan industri



No	Kategori	Permasalahan
		Belum terbangunnya sistem informasi pasar tenaga kerja yang kredibel
		Stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
5.	Pertanian	Rendahnya nilai tambah produk pertanian
		Rendahnya produktivitas pertanian
		Rendahnya adopsi teknologi pertanian
		Aging farmer
		Degradasi kualitas lahan
6.	UMKM dan Koperasi	Rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian
		Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam UMKM
		Belum optimalnya akses UMKM terhadap pendanaan
		Rendahnya wirausaha yang berorientasi tumbuh
7.	Perkotaan dan Perdesaan	Belum optimalnya kontribusi perkotaan terhadap ekonomi nasional
		Pola pembangunan perkotaan yang tidak merata
		Kurangnya layanan perkotaan yang memadai
		Masalah sosial-ekonomi di perkotaan
		Degradasi lingkungan perkotaan dan risiko bencana
		Tata kelola wilayah yang belum terpadu
		Ketimpangan kesejahteraan antara perkotaan dan perdesaan
		Perubahan struktur ekonomi akibat pembangunan urbanisasi
8.	Pekerjaan Hijau	Minimnya pemahaman dunia industri terhadap pekerjaan hijau
		Belum terintegrasinya strategi SDM dalam pekerjaan hijau
		Belum memadainya pengembangan keahlian SDM untuk pekerjaan hijau
		Terbatasnya akses pendanaan dalam mendukung pekerjaan hijau
		Lemahnya peran dunia usaha dan akademisi dalam pekerjaan hijau
9.	Pengelolaan Hutan Lestari	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional masih rendah
		Rendahnya produktivitas sektor hasil hutan kayu
		Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi sektor kehutanan
		Kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan
		Rendahnya dukungan regulasi dalam pengelolaan hutan
		Tingginya tingkat deforestasi
		Belum optimalnya kerja sama multistakeholder dalam pengelolaan hutan
10.	Percepatan Transisi Energi	Ketergantungan terhadap energi fosil yang terus meningkat
		Emisi GRK sektor energi cukup tinggi
		Potensi energi terbarukan masih belum dimanfaatkan optimal
		Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan belum memadai
		Kurangnya dukungan regulasi dalam transisi energi
		Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil masih tinggi
		Ketergantungan pada impor energi meningkat
		Belum optimalnya rantai nilai dalam transisi energi
11.	Digital	Kurangnya pondasi dalam percepatan digitalisasi nasional
		Belum meratanya akses infrastruktur digital
		Kurangnya adopsi teknologi digital dalam industri dan layanan publik
		Kurangnya investasi dalam SDM digital
		Belum optimalnya sistem keamanan siber
12.	Badan Usaha Milik Negara	Rendahnya daya saing BUMN dalam sektor ekonomi
		Kurangnya kontribusi BUMN dalam ekonomi nasional
		Kurangnya efisiensi pengelolaan BUMN dalam pembangunan nasional
13.	Pariwisata	Destinasi wisata menghadapi masalah keberlanjutan budaya



No	Kategori	Permasalahan
.		Aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata masih belum optimal
		Kurangnya kualitas layanan wisata
		Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan akibat minimnya pilihan wisata
		Kurangnya keterampilan SDM pariwisata
14	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Keterbatasan integrasi ekonomi domestik dan global
		Ketimpangan sektor perdagangan antarwilayah
		Kurangnya partisipasi dalam perdagangan global
		Kurangnya akses keuangan untuk mendukung ekspor
		Regulasi yang menghambat ekspor dan investasi
		Ketimpangan sektor perdagangan dalam negeri akibat regulasi yang belum efisien

C. Isu Transformasi Tata Kelola

Tata kelola menjadi aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan dan telah diakui secara luas sebagai faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Dalam RPJMN 2025-2029, tata kelola mencakup aspek politik, administrasi, dan hukum, yang tidak hanya berfokus pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, tetapi juga pada bagaimana proses pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespons perubahan global yang signifikan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, transformasi ini juga bertujuan untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi tata kelola, baik dalam aspek birokrasi, politik, maupun hukum. Reformasi birokrasi yang berjalan saat ini masih berorientasi pada prosedur dan administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu mencegah praktik korupsi. Hal ini tercermin dari tren penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam dua tahun terakhir. Selain itu, regulasi yang tumpang tindih, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta pembagian kewenangan yang belum optimal, semakin memperburuk inefisiensi birokrasi.



Intervensi politik dalam birokrasi menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan. Dinamika politik yang berkembang turut mempengaruhi efektivitas transformasi tata kelola, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Jika tidak segera diatasi, berbagai persoalan ini akan terus menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-69. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

No.	Kategori	Permasalahan
1	Integritas Partai Politik	Integritas partai politik belum terwujud karena standar etika belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal.
2	Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan	Lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektor-sektor rawan korupsi serta rendahnya budaya antikorupsi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.
3	Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik.
4	Sistem Penggajian Tunggal	Disparitas kesejahteraan ASN pusat dan daerah, remunerasi ASN belum memenuhi prinsip kompetitif, manfaat pensiun ASN masih rendah, dan adanya dual sistem penggajian ASN.
5	Manajemen Talenta	Penerapan sistem merit belum optimal, belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D, dan 34% ASN berusia 50 tahun ke atas (aging).
6	Kualitas Regulasi	Kondisi hiper regulasi, kewenangan pengelolaan regulasi tersebar di beberapa Kementerian, SDM di bidang regulasi belum memadai, serta partisipasi dalam pembentukan regulasi belum optimal.
7	Integrasi Proses Bisnis	Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi, tidak efektif, serta tumpang tindih program yang memboroskan anggaran.

D. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pemerintahan yang efektif dan responsif, kebijakan yang diterapkan harus selaras dengan dinamika lingkungan strategis. Dalam aspek hukum, penegakan dan kelembagaan hukum masih belum terintegrasi dengan baik, efisiensi belum optimal, serta



prinsip HAM belum sepenuhnya menjadi dasar dalam praktiknya. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh minimnya literasi hukum dan kurangnya pemberdayaan, sementara akses terhadap keadilan masih terbatas.

Bidang pertahanan dan keamanan, kemajuan teknologi, termasuk teknologi informasi, menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Sementara dalam konteks demokrasi, masih terdapat kendala dalam menjamin kebebasan dan kesetaraan sipil. Penyebaran informasi dan komunikasi publik yang belum merata serta kurangnya internalisasi nilai Pancasila dan konstitusionalisme menjadi hambatan. Demokrasi masih bersifat prosedural akibat maraknya politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya peran lembaga perwakilan.

Ranah politik luar negeri, dinamika geopolitik dan geoekonomi semakin memperbesar ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri. Berbagai faktor, seperti konflik intra dan antarnegara, disrupsi rantai pasok global, serta tren pemisahan ekonomi global (global economic decoupling) menjadi tantangan utama. Selain itu, penyelesaian batas wilayah negara yang belum tuntas serta kurang idealnya postur diplomasi Indonesia turut menghambat efektivitas kebijakan luar negeri.

Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam lima tahun ke depan, baik dari faktor eksternal maupun domestik. Perlambatan ekonomi mitra dagang utama, tekanan inflasi global, kebijakan suku bunga yang tinggi, perubahan iklim, serta percepatan digitalisasi menjadi tantangan utama dari sisi eksternal. Sementara itu, di tingkat domestik, penerimaan perpajakan yang masih rendah, kualitas belanja negara yang belum optimal, serta imbal hasil obligasi yang relatif tinggi dibandingkan negara lain menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Di sektor keuangan, masih terdapat keterbatasan dalam pendalaman pasar, intermediasi keuangan yang belum optimal, peran sektor keuangan non-bank yang masih terbatas,



serta ketimpangan inklusi dan literasi keuangan. Selain itu, pengembangan keuangan syariah masih belum maksimal, dan perlindungan terhadap konsumen serta investor masih lemah, sehingga berpotensi menghambat penyediaan likuiditas yang cukup bagi pembiayaan pembangunan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-70. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

No.	Kategori	Permasalahan
1	Stabilitas Makro	Risiko climate action; deglobalisasi; krisis lapangan pekerjaan; krisis utang; konfrontasi geoekonomi; asset bubble burst; inflasi tinggi; tingkat suku bunga tinggi; masih geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlemahan ekonomi global; transisi demografi; potensi pandemi ke depan; rendahnya penerimaan perpajakan; terbatasnya belanja negara; serta imbal hasil obligasi yang tinggi.
2	Demokrasi	Demokrasi masih prosedural dengan ciri: kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; politik electoral masih memiliki permasalahan seperti politik uang dan polarisasi isu SARA; serta fungsi-fungsi asasi demokrasi belum terlaksana optimal.
3	Politik Luar Negeri	Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri; konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global; tren global economic decoupling; belum selesainya perundingan batas wilayah; serta postur dan sinergi diplomasi Indonesia yang belum ideal.
4	Hukum	Praktik penegakan hukum yang belum terpadu; efisiensi rendah; HAM belum menjadi dasar utama; rendahnya budaya hukum masyarakat akibat minimnya literasi dan pemberdayaan; keterbatasan akses terhadap keadilan; serta kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.
5	Keamanan	Ancaman insurgensi; konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah; kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perbatasan; serta perlindungan IIVN dari serangan siber.
6	Pertahanan	Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang semakin kompleks; perang berbasis Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, dan High Yield Explosive (CBRNE); serta meningkatnya respons negara-negara dalam memperkuat industri pertahanan.

E. Isu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pembangunan harus didasarkan pada keseimbangan antara nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan. Agama dan kebudayaan berperan sebagai landasan spiritual, etika, serta moral dalam memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Dalam konteks ini, sumber daya



manusia menjadi penggerak utama transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai wadah pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai positif. Selain itu, kebijakan pemerintah harus memastikan inklusivitas dan kesetaraan gender, khususnya dalam memberikan akses pembangunan dan layanan dasar bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Seiring dengan bertambahnya populasi, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan telah berdampak pada berkurangnya fungsi ekosistem hutan. Sementara itu, petani dan nelayan sebagai produsen pangan mengalami stagnasi kesejahteraan. Permasalahan pengelolaan sampah juga semakin mendesak, dengan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) yang diperkirakan akan mencapai batas maksimal pada tahun 2028.

Dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK), Indonesia berfokus pada lima sektor utama, yaitu energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, serta pengelolaan limbah. Ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam aspek ketersediaan, akses, dan harga. Transisi ke energi baru terbarukan (EBT) diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, meskipun masih terdapat hambatan terkait pendanaan, regulasi, inovasi, dan kelembagaan. Dampak perubahan iklim berisiko meningkatkan kerugian ekonomi, memperburuk kerentanan masyarakat, serta meningkatkan frekuensi bencana lingkungan, terutama dalam sektor air, pertanian, laut dan pesisir, serta kesehatan. Ancaman kelangkaan air juga semakin nyata akibat rendahnya efisiensi pengelolaan dan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan. Selain itu, akses yang buruk terhadap air minum dan sanitasi dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, termasuk meningkatkan risiko penyakit menular dan gangguan pertumbuhan anak. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:



Tabel II-71. Isu Ketahanan Sosial dan Politik

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Isu Agama	Nilai agama belum optimal dalam pembangunan, wawasan dan identitas nasional belum maju, serta rendahnya literasi keagamaan.
2.	Isu Budaya	Karakter dan jati diri bangsa menghadapi tantangan negatif budaya global, nilai Pancasila belum terinternalisasi, serta rendahnya peran budaya dalam pembangunan.
3.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Belum optimalnya peran keluarga, rendahnya pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan, serta masih adanya ketimpangan gender.
4.	Pangan	Belum idealnya kualitas pangan, rendahnya kapasitas produksi pangan, serta tata kelola sistem pangan yang masih lemah.
5.	Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	Kualitas air, udara, dan lahan semakin menurun, meningkatnya pembuangan limbah ilegal, serta ancaman kepunahan spesies tumbuhan dan hewan.
6.	Energi	Akses energi yang belum merata, pemanfaatan energi baru-terbarukan masih rendah, serta tata kelola energi yang belum efektif.
7.	Bencana dan Perubahan Iklim	Frekuensi bencana meningkat drastis, jutaan keluarga tinggal di daerah rawan bencana, serta dampak perubahan iklim yang makin luas.

2.7.2.1. Isu Strategis dan Arah Pembangunan Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatra memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi ekonomi yang besar didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan maritim global, serta sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, industri bio-based, dan pariwisata. Namun, dalam upaya mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Sumatra masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi.

Salah satu isu utama adalah belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi, yang menghambat peningkatan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi, karena mayoritas tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah dengan akses terbatas terhadap pelatihan vokasi berkualitas. Kondisi ini semakin diperparah



dengan degradasi lingkungan akibat ekspansi perkebunan dan aktivitas pertambangan yang tidak terkendali, yang berkontribusi terhadap hilangnya biodiversitas dan perubahan fungsi ekosistem.

Infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan konektivitas antarwilayah masih belum merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan akses terhadap layanan dasar ini berdampak pada kesenjangan pembangunan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu. Di sisi lain, Sumatra juga menghadapi risiko tinggi terhadap bencana alam seperti tsunami, banjir rob, dan abrasi di wilayah pesisir barat, yang semakin diperburuk oleh dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi wilayah ini sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang ada. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis wilayah Sumatera dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-72. Isu Strategis Wilayah Sumatera

No.	Isu Strategis	Uraian
1.	Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain.	Kurangnya pengembangan industri hilir menyebabkan rendahnya nilai tambah komoditas.
2.	Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.	Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas.
3.	Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.	Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya biodiversitas.
4.	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T.	Keterbatasan tenaga medis dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
5.	Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah.	Konektivitas antar daerah masih terbatas akibat kurangnya infrastruktur transportasi dan digital.
6.	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatra.	Wilayah pesisir rentan terhadap ancaman tsunami, banjir rob, dan abrasi akibat perubahan iklim.

Arah pembangunan wilayah Sumatra dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat posisinya sebagai mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan



kontribusi ekonomi sebesar 22,0% terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022 dan proyeksi peningkatan menjadi 22,3% pada tahun 2029, Sumatra memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Letak geografis Sumatra yang strategis sebagai jalur perdagangan maritim global memberikan keunggulan dalam pengembangan sektor kemaritiman, termasuk industri perikanan, pelabuhan, dan logistik berbasis laut yang semakin kompetitif di pasar internasional.

Selain sektor kemaritiman, penguatan bioindustri menjadi fokus utama dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Sumatra, seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan hasil perkebunan lainnya. Hilirisasi industri pertanian dan agroindustri didorong untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Pengembangan pariwisata yang berbasis ekowisata dan budaya juga menjadi prioritas dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat identitas Sumatra sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan.

Percepatan urbanisasi yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan perkotaan yang inklusif dan berdaya saing. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penerapan konsep ekonomi hijau dan energi baru terbarukan (EBT) menjadi strategi utama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi Sumatra tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan sinergi kebijakan dan investasi yang tepat, Sumatra diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mendukung visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi berbasis bioindustri dan maritim yang berdaya saing di tingkat global.

Tabel II-73. Arahan Pembangunan Wilayah Sumatera (Provinsi Bengkulu)

No.	Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi



No.	Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
1	Sosial	Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan di kawasan perkotaan Bengkulu, Manna, Mukomuko, dan Pulau Enggano
2	Ekonomi	Pengembangan agroindustri & bioindustri sirkular hilirisasi sumber daya hayati dan industri kimia dasar hilirisasi batubara pada koridor industri Bengkulu-Kepahiang Pengembangan industrialisasi perikanan, terutama di kawasan perkotaan Bengkulu Pengembangan pariwisata bahari, melalui peningkatan 6A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, amenitas, ancillary, dan available package), terutama di Pulau Enggano Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkualitas, dan berkelanjutan, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai local advantage, terutama di Kota Bengkulu dan sekitarnya, serta ekowisata unggulan pada TN Bukit Barisan Selatan Peningkatan produktivitas kopi, hortikultura, dan peternakan secara berkelanjutan di Bengkulu, terutama di Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong Peningkatan produktivitas sawit dan karet rakyat secara berkelanjutan di Bengkulu, terutama di Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Pembangunan pembangkit listrik EBT berbasis tenaga air, terutama pada PLTA Kepahiang, serta pembangkit listrik EBT berbasis panas bumi, terutama pada PLTP Hululais Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra ruas Bengkulu-Curup-Lubuklinggau Optimalisasi dan peningkatan layanan & prasarana kepelabuhanan, termasuk peningkatan frekuensi layanan angkutan kargo bersubsidi pada Pelabuhan Pulau Baai dan Pelabuhan Malakoni (Pulau Enggano) Peningkatan layanan penyebaran menuju Pulau Enggano dari Kota Bengkulu Optimalisasi dan peningkatan layanan & prasarana Bandara Mukomuko (Kab. Mukomuko) dan Bandara Enggano (Kab. Bengkulu Utara), serta pengembangan bandara di kawasan perkotaan Manna Pemenuhan infrastruktur perkotaan, perumahan kota, penumbuhan layanan dasar perkotaan dan amenitas perkotaan, serta kemudahan multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan, terutama pada kawasan perkotaan di Manna
3	Tata Kelola	Harmonisasi dan kolaborasi keuangan antara Pusat dan Daerah guna mempercepat pembangunan pada daerah afirmatif/tumbuh, terutama di Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Bengkulu Selatan, dan Pulau Enggano (Kab. Bengkulu Utara)
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penguatan Lanal Bengkulu dalam rangka pengamanan dan penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Samudra Hindia
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Peningkatan literasi sejarah kebangsaan melalui pengembangan dan pemanfaatan situs cagar budaya Rumah Kelahiran Bung Karno, Benteng Marlborough, dan Benteng York Peningkatan pengelolaan statistik perkotaan, termasuk melalui penuntasan sampah anorganik dan organik dengan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tepat guna dan ramah lingkungan Pemenuhan air bersih, sanitasi, serta air minum untuk masyarakat di Bengkulu, terutama di Kab. Lebong dan Kab. Rejang Lebong Peningkatan ketahanan ketahanan air dan ekosistem DAS, termasuk



No.	Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
		upaya peningkatan produktivitas padi dan pertanian lahan basah di Bengkulu, terutama di Kab. Seluma, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur
		Pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumatera 275 kV di wilayah Bengkulu
		Pengelolaan bencana air dan udara, termasuk upaya konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengelolaan air baku, air OP, BM, dan PSDA yang andal, terutama pada WS Bengkulu-Alas-Alo dan WS Sebelat-Ketahun-Lais
		Pengembangan air minum yang menyentuh masyarakat di Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Mukomuko serta air minum perpipaan kawasan perkotaan
		Pengelolaan bencana multibahaya, termasuk banjir, longsor, abrasi, dan kebakaran hutan & lahan di Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Selatan serta kawasan perkotaan Bengkulu

2.7.3. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Dalam upaya memperkuat keterpaduan antara kebijakan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Provinsi Bengkulu, sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan prioritas daerah, termasuk Kabupaten Seluma. Pemahaman yang utuh terhadap isu-isu strategis tingkat provinsi menjadi kunci dalam merancang perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, kontekstual, dan berdampak nyata. Keterkaitan yang kuat antara isu provinsi dan kebutuhan lokal, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya sinkron dengan agenda provinsi, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan mengoptimalkan potensi wilayah secara berkelanjutan. Adapun terdapat 6 (enam) isu strategis Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* dalam tata kelola pemerintahan.
2. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.
3. Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah



4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi kebencanaan.
6. Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas

Tabel II-74 Permasalahan dan Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Permasalahan	Isu Strategis
Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip <i>good and clean governance</i> dalam tata kelola pemerintahan
Ketahanan Pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah
Ekonomi Rakyat Dan Daya Saing Daerah	Belum berkembangnya hilirisasi komoditas unggulan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
Akses Infrastruktur Dasar Dan Strategis	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas serta konektivitas wilayah.
Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi kebencanaan
Sumber Daya Manusia Yang Inklusif	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas

Provinsi Bengkulu saat ini dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari masih adanya praktik birokrasi yang belum efisien, rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pada sektor ketahanan pangan, Provinsi Bengkulu juga menghadapi tantangan serius. Ketergantungan pada pasokan luar daerah, belum kuatnya sistem produksi lokal, serta lemahnya infrastruktur pendukung menjadikan



ketahanan pangan masih rentan terhadap gejolak harga dan krisis distribusi. Hal ini diperparah dengan kurang optimalnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, seperti kopi, karet, sawit, dan perikanan. Potensi besar sektor-sektor ini belum mampu dimaksimalkan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat industri lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Sebagian wilayah di Bengkulu masih mengalami keterbatasan akses jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Ketimpangan infrastruktur ini berdampak pada rendahnya konektivitas antarwilayah dan lambatnya pertumbuhan kawasan potensial. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, serta lemahnya sistem mitigasi kebencanaan, membuat wilayah ini rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Ketimpangan juga terjadi dalam aspek sosial, khususnya pada akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ketidakmerataan ini tidak hanya memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah, tetapi juga menghambat terwujudnya pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis di atas, pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan arah kebijakan provinsi. Pendekatan ini akan memastikan sinergi yang kuat antar level pemerintahan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.7.4. Isu Strategis Kabupaten Seluma

Perumusan isu strategis yang tepat dan berdampak membutuhkan keterpaduan antara potensi serta permasalahan yang dihadapi Kabupaten Seluma dengan dinamika isu lingkungan hidup yang berkembang, baik di



tingkat KLHS, global, nasional, maupun provinsi Bengkulu. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berperan sebagai acuan dalam mengidentifikasi isu-isu lingkungan, sekaligus menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan dinamika isu global, nasional, dan provinsi, pembangunan daerah diarahkan agar tidak hanya responsif terhadap tantangan eksternal, tetapi juga tetap berpijak pada potensi dan kekuatan lokal. Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara potensi daerah, permasalahan utama, serta isu-isu lingkungan hidup dinamis (KLHS, global, nasional, dan provinsi) dengan isu strategis yang dirumuskan untuk Kabupaten Seluma.

Tabel II-75 Isu Strategis Daerah

Permasalahan	Isu Klhs	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Seluma
		Global	Nasional	Provinsi Bengkulu	
Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Involuntary Migration; Dampak Buruk Teknologi Berbasis AI	Transformasi Sosial	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta terbatasnya peran dan pengembangan pemuda menghambat peningkatan daya saing sumber daya manusia
Belum optimalnya pembangunan ekonomi & pemerataan wilayah		Krisis Sumber Daya Alam	Transformasi Ekonomi	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah; Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.	Rendahnya produktivitas ekonomi, ketimpangan wilayah, serta terbatasnya infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya
Masih tingginya permasalahan sosial, lemahnya pelestarian budaya, dan belum meratanya kesejahteraan masyarakat		Polarisasi Sosial; <i>Involuntary Migration</i>	Transformasi Sosial	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	Belum meratanya kesejahteraan dan rendahnya pelestarian nilai budaya lokal
Terjadinya tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan hidup		Cuaca Ekstrem; Perubahan Kritis Terhadap Ekosistem; Biodiversity dan Gangguan Ekosistem; Krisis	Perubahan Iklim dan Krisis Ekologis	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi kebencanaan	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang



Permasalahan	Isu KIhs	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Seluma
		Global	Nasional	Provinsi Bengkulu	
		Sumber Daya Alam;			
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan		Misinformasi dan Disinformasi	Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good and clean governance dalam tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya efektivitas dan akuntabilitas birokrasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif



BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

A. Visi dan Misi

Visi merupakan pernyataan umum tentang kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga mencerminkan arah pembangunan atau gambaran masa depan daerah yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan (kejelasan arah), yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang, kondisi daerah, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang muncul, maka visi Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

*“TERWUJUDNYA KABUPATEN SELUMA ELOK, MAJU, ADIL,
SEJAHTERA, BERKELANJUTAN DAN BERIMAN”*

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut:

Elok: Mencerminkan Kabupaten Seluma yang tertata dengan baik, memiliki lingkungan yang asri, infrastruktur yang mendukung kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Aspek ini menekankan pada pembangunan yang memperhatikan keindahan, kebersihan, serta keberlanjutan lingkungan.

Maju: Menggambarkan kemajuan daerah dalam berbagai sektor, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kabupaten Seluma diharapkan memiliki



pertumbuhan ekonomi yang kuat, daya saing tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi tantangan global.

Adil: Menekankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi dalam pembangunan.

Sejahtera: Menggambarkan kondisi masyarakat yang hidup dengan pendapatan yang layak, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta meningkatnya kualitas hidup. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui penguatan ekonomi berbasis pertanian, industri, dan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Berkelanjutan: Mengacu pada pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kabupaten Seluma diharapkan dapat berkembang dengan tetap menjaga sumber daya alam dan ekosistemnya untuk generasi mendatang.

Beriman : Mencerminkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai agama dan moral, di mana masyarakat hidup dalam harmoni dengan menjunjung tinggi etika, budaya, dan spiritualitas. Aspek ini juga menekankan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan serta kehidupan sosial yang rukun dan berbudaya.

Dengan demikian, visi Terwujudnya Kabupaten Seluma Emas Berlian (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman) mencerminkan komitmen daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertata dan nyaman,



pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara ekonomi dan sosial, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Selain itu, nilai-nilai moral dan spiritual tetap menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sehingga Kabupaten Seluma dapat berkembang menjadi daerah yang harmonis, produktif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

Misi disusun untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi merupakan penjabaran dari visi yang ingin dicapai serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapainya. Selain itu, misi memberikan arah yang jelas sekaligus menjadi batasan dalam proses pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi yang telah dirumuskan, pembangunan daerah akan ditempuh melalui lima misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter.

Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kabupaten Seluma yang elegan, lestari, berkelanjutan, oase, dan berkarakter merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Terwujudnya Kabupaten Seluma EMAS BERLIAN (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman). Kabupaten Seluma memiliki potensi besar dalam membangun masyarakat yang berdaya saing, berkarakter kuat, serta memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan. Keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang khas menjadi aset utama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkualitas. Oleh karena itu, pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, termasuk kawasan pesisir, hutan, dan sumber daya air, harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh



generasi saat ini dan mendatang. Upaya ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seluma juga perlu dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Penguatan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif, harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi. Selain itu, membangun karakter masyarakat yang religius, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan merupakan bagian penting dalam memperkuat identitas daerah. Dengan demikian, Kabupaten Seluma dapat menjadi wilayah yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga memiliki tatanan sosial yang harmonis dan berdaya saing. Keberlanjutan pembangunan ini akan memastikan bahwa Kabupaten Seluma menjadi daerah yang elegan dalam perencanaan, lestari dalam pemanfaatan sumber daya, serta berkarakter kuat dalam membangun masa depan yang lebih baik.

2. Misi Kedua: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan serta pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Misi kedua menekankan pada pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan dengan memperkuat kemandirian desa, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pelayanan publik yang responsif dan inovatif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga daya saing daerah dapat terus meningkat. Melalui strategi ini, Kabupaten Seluma diharapkan mampu menciptakan



lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, efisiensi birokrasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dengan memastikan bahwa setiap masyarakat Kabupaten Seluma mendapatkan akses yang setara dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi sumber daya lokal secara berkelanjutan. Di bidang pendidikan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas menjadi fokus utama untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sementara itu, sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, serta berbasis pencegahan. Misi ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta penguatan kesetaraan gender guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram, dan bahagia.

Misi ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada kesehatan, ekonomi, dan harmoni sosial. Kesehatan masyarakat ditingkatkan melalui akses layanan kesehatan yang berkualitas dan program pencegahan penyakit. Kemajuan ekonomi didorong dengan menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM, serta meningkatkan daya saing sektor ekonomi lokal. Selain itu, keharmonisan sosial menjadi prioritas dengan membangun lingkungan yang kondusif, meningkatkan keamanan, serta memperkuat nilai-nilai budaya dan gotong royong. Dengan pendekatan yang holistik ini, masyarakat Kabupaten



Seluma diharapkan dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan bahagia dalam lingkungan yang aman dan harmonis.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Seluma dengan Misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029

Misi RPJPD 2025-2045	Misi RPJMD 2025-2029	Misi Provinsi Bengkulu 2025-2029	Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden
Mewujudkan lingkungan masyarakat yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, ketahanan bencana, kualitas keluarga, kebudayaan, dan masyarakat yang inklusif	Misi 1. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter.	Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah	Asta Cita 8: Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang berkualitas dengan memperhatikan penerapan teknologi dan pelayanan publik	Misi 2. Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).	Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
Mewujudkan pembangunan merata, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan perencanaan yang berkualitas			Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Mewujudkan pembangunan ekonomi yang produktif, merata, dan berkelanjutan	Misi 3. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan,	Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan,	Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam



Misi RPJPD 2025-2045	Misi RPJMD 2025-2029	Misi Provinsi Bengkulu 2025-2029	Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden
dengan pemanfaatan sumber daya alam	dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan, dan berkeadilan.	kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan"	untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Mewujudkan stabilitas ekonomi dengan memperhatikan ekonomi makro, inovasi, dan daya saing daerah			Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui transformasi sosial	Misi 4. Mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram, dan bahagia.	Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Penyusunan misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029 disusun secara harmonis dengan arah kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2045, serta diselaraskan dengan misi pembangunan Provinsi Bengkulu dan prioritas nasional yang termuat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.



Keselarasan ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah secara vertikal dan mendorong keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Misi pertama RPJMD yang berfokus pada mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Seluma yang elegan, lestari, berkelanjutan, oase, dan berkarakter selaras dengan misi RPJPD yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelestarian lingkungan, penguatan nilai budaya, dan pembangunan sosial yang inklusif. Misi ini juga sejalan dengan misi Provinsi Bengkulu yang mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah sebagai fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks nasional, misi ini mendukung Asta Cita 8 yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, budaya, serta penguatan toleransi untuk membangun masyarakat adil dan makmur.

Misi kedua RPJMD mengenai pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan yang transformatif, serta pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, mendukung misi RPJPD yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang adaptif, berkualitas, dan berbasis teknologi. Sinergi ini juga tercermin dalam misi Provinsi Bengkulu yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan inovatif melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pada level nasional, misi ini selaras dengan Asta Cita 7 yang mendorong reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan yang responsif serta bebas korupsi.

Misi ketiga RPJMD yang mencakup pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara partisipatif dan berkeadilan juga menjadi bagian penting dari misi RPJPD dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan pembangunan wilayah yang berkeadilan. Keselarasan ini dikuatkan oleh misi Provinsi Bengkulu yang menargetkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan demokratis.



Secara nasional, misi ini mendukung Asta Cita 4 yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta layanan dasar yang inklusif.

Misi keempat RPJMD yang bertujuan menciptakan masyarakat dan keluarga yang sehat, harmonis, tentram, dan bahagia, berkontribusi langsung terhadap misi RPJPD yang mendorong transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang unggul. Misi ini juga konsisten dengan misi Provinsi Bengkulu yang fokus pada kesejahteraan sosial dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Dalam Asta Cita, misi ini kembali terhubung dengan Asta Cita 4, yang menekankan pada peningkatan kualitas kesehatan, penguatan institusi keluarga, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Misi-misi dalam RPJMD Kabupaten Seluma telah disusun secara terintegrasi dan selaras, memastikan bahwa arah pembangunan lima tahunan tetap berada dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang daerah, mendukung prioritas provinsi, dan berkontribusi langsung terhadap capaian nasional dalam kerangka pembangunan Indonesia Emas 2045.

B. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan arah strategis yang akan menjadi dasar dalam menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Tujuan merujuk pada hasil yang ingin dicapai dalam rentang waktu satu hingga lima tahun, yang ditetapkan dengan mengacu pada visi, misi, serta hasil analisis isu-isu strategis. Dengan mempertimbangkan visi, misi, dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025 – 2029, dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

Misi 1: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter.



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan budaya yang memiliki nilai-nilai agama melalui seni dan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya	Indeks Warisan Budaya
Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Indeks Ketahanan Daerah
Meningkatkan Nilai tambah Pariwisata	Meningkatkan Nilai tambah Pariwisata	Meningkatkan Nilai tambah Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman

Misi pertama Kabupaten Seluma bertujuan untuk mewujudkan iklim kehidupan masyarakat yang elegan, lestari, berkelanjutan, oase, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang berfokus pada pembentukan masyarakat yang berkarakter melalui penerapan nilai-nilai agama dan budaya, serta peningkatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, indikator utama yang digunakan adalah indeks pembangunan kebudayaan, yang mencerminkan sejauh mana nilai budaya dan agama diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Sasaran utama dari upaya ini adalah meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya daerah, yang diukur melalui indeks warisan budaya sebagai parameter keberhasilan dalam menjaga identitas budaya lokal.

Misi ini juga menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Indikator utama dalam hal ini adalah indeks risiko bencana, yang menjadi ukuran dalam menilai kerentanan daerah terhadap berbagai ancaman lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana, yang diukur melalui indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks ketahanan daerah. Dengan demikian, Kabupaten Seluma berupaya



membangun masyarakat yang tidak hanya berbudaya dan berkarakter, tetapi juga tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan sosial.

Misi 2: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan serta pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis	Indeks Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kapasitas infrastruktur untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi	Indeks Infrastruktur
Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya desa mandiri	Persentase desa mandiri
Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Nilai SAKIP
			Opini BPK
			Indeks Inovasi Daerah
			Nilai SPBE

Misi kedua Kabupaten Seluma menitikberatkan pada pembangunan daerah yang berkelanjutan, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pelayanan publik yang transformatif. Selain itu, misi ini juga berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi aspek utama dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan strategis, meningkatkan konektivitas, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator utama yang digunakan dalam mencapai tujuan ini adalah indeks infrastruktur daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pengembangan fasilitas publik dan konektivitas antarwilayah. Sasaran yang



ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas infrastruktur untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi, yang diukur melalui indeks infrastruktur dan rasio jalan dalam kondisi baik.

Kemandirian desa menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini adalah indeks desa membangun, yang mencerminkan perkembangan desa dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sasaran dari upaya ini adalah meningkatnya jumlah desa mandiri, yang diukur melalui persentase desa yang telah mencapai kategori mandiri.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian integral dari misi ini. Indikator yang digunakan adalah indeks reformasi birokrasi, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan daerah. Sasaran yang ingin dicapai meliputi meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah, yang diukur melalui beberapa indikator seperti nilai SAKIP, opini BPK, indeks inovasi daerah, serta nilai SPBE. Dengan strategi ini, Kabupaten Seluma berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berbasis teknologi.

Misi 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan
			PDRB Sektor Utama
			Indeks Akses Keuangan Daerah
		Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi Daerah (PMA) Nilai Investasi Daerah (PMDN)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah
		Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Angka Harapan Hidup
		Meningkatnya Pemberdayaan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
perempuan		Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Misi ketiga Kabupaten Seluma berfokus pada peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tujuan utama dari misi ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan publik. Dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kabupaten Seluma berupaya menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, indikator utama yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran meningkatnya perekonomian daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui laju pertumbuhan, PDRB sektor utama, serta indeks daya saing daerah yang mencerminkan kapasitas ekonomi lokal dalam menghadapi persaingan di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, peningkatan nilai investasi juga menjadi prioritas, yang diukur melalui nilai investasi daerah, baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Pada aspek pembangunan sumber daya manusia, pencapaian diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM), yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Seluma. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, yang diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah. Sementara itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, yang menunjukkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan yang inklusif. Indikator



pencapaiannya diukur melalui indeks pemberdayaan gender (IPG) dan indeks pembangunan gender (IDG), yang mencerminkan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi, sosial, serta pengambilan keputusan di tingkat daerah. Dengan berbagai langkah strategis ini, Kabupaten Seluma berupaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan kesejahteraan yang merata serta peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan perempuan.

Misi 4: Mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram, dan bahagia

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan dan Gizi masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Persentase Kecamatan dengan Status IKS Sehat
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Sosial Ekonomi Masyarakat	Indeks Kedalaman Kemiskinan
			Indeks Keparahan Kemiskinan
		Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka

Misi keempat Kabupaten Seluma bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat, berjaya dalam ekonomi, serta hidup harmonis, tenteram, dan bahagia. Misi ini menekankan pentingnya pembangunan kesejahteraan sosial yang mencakup peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan dan keamanan daerah. Dengan memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat sistem keamanan dan kesadaran hukum, Kabupaten Seluma berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya.

Dalam aspek kesehatan, peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat menjadi salah satu prioritas utama. Indikator utama yang



digunakan adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas layanan kesehatan, yang diukur melalui persentase kecamatan dengan status IKS sehat serta Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Dengan layanan kesehatan yang lebih baik dan akses yang lebih luas, diharapkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Seluma dapat meningkat secara signifikan.

Upaya pengentasan kemiskinan menjadi bagian krusial dalam misi ini, dengan indikator utama berupa angka kemiskinan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Selain itu, pengurangan angka pengangguran juga menjadi fokus utama, yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, Kabupaten Seluma berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel III-2. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Mewujudkan budaya yang memiliki nilai-nilai agama melalui seni dan budaya	Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dengan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan
		Sasaran: Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya	Indeks Warisan Budaya
		Tujuan: Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
		Sasaran: Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah
		Meningkatkan Nilai tambah Pariwisata	Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makanan dan minuman
		Meningkatnya Pertumbuhan sektor pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman
2.	Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan	Tujuan: Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis	Indeks Infrastruktur Daerah
		Sasaran: Meningkatnya kapasitas	Indeks Infrastruktur



NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA
	berkelanjutan serta pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)	infrastruktur untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi	
		Tujuan: Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun
		Sasaran: Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri
		Tujuan: Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik	Nilai SAKIP
		Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Opini BPK
			Indeks Inovasi Daerah
			Nilai SPBE
3.	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan, dan berkeadilan	Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
		Sasaran: Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan
			PDRB Sektor Utama
			Indeks Akses Keuangan Daerah
		Sasaran: Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi Daerah (PMA)
			Nilai Investasi Daerah (PMD)
		Tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan perempuan	Indek Modal Manusia (IMM)
	Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	
		Sasaran: Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Angka Harapan Hidup
		Persentase puskesmas terakreditasi	
		Persentase puskesmas terakreditasi	
		Sasaran: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
		Indeks Perlindungan anak	
4.	Mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram, dan bahagia	Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Indeks Keluarga Sehat
		Sasaran: Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Kecamatan dengan status IKS Sehat
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
		Tujuan: Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan
		Sasaran: Menjamin Perlindungan Sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan
			Indeks Keparahan Kemiskinan
		Sasaran: Mengurangi Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka



Pembangunan Kabupaten Seluma dalam RPJMD dirancang berdasarkan empat misi utama yang menjadi landasan arah kebijakan daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan, keempat misi tersebut diterjemahkan ke dalam 9 (sembilan) tujuan pembangunan yang mencakup berbagai sektor strategis, seperti sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Setiap tujuan memiliki sasaran yang lebih spesifik agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara terukur dan tepat sasaran, dengan jumlah sasaran yang ditetapkan sebanyak tiga belas sasaran pembangunan.

Untuk memastikan bahwa setiap sasaran dapat dicapai dengan baik, terdapat 13 (tiga belas) indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan tujuan pembangunan. Indikator tersebut mencakup aspek kebudayaan, infrastruktur, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat 24 (dua puluh empat) indikator yang dirancang untuk mengukur capaian sasaran pembangunan, seperti indeks warisan budaya, indeks ketahanan daerah, rasio jalan baik, persentase desa mandiri, serta berbagai indikator yang terkait dengan investasi, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan gender.

Strategi pembangunan Kabupaten Seluma dalam RPJMD menekankan pada keberlanjutan serta efektivitas implementasi kebijakan, dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan ini, pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih sistematis, terarah, dan berdampak luas bagi masyarakat, sehingga mampu menciptakan kemajuan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Seluma.



Tabel III-3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
VISI: Terwujudnya Kabupaten Seluma Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman									
MISI 1: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter	Mewujudkan budaya yang memiliki nilai-nilai agama melalui seni dan budaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	62,04	62,63	63,22	63,81	64,4	64,99
		Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya	Indeks Warisan Budaya (Angka)	54,00	54,59	55,18	55,77	56,36	56,95
	Mengurangi Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	165.01	164.21	163.41	162.61	161.81	161.01
		Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0.61	0.62	0.62	0.63	0.64	0.65
	Meningkatkan Nilai tambah Pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0.0186	0.0196	0.0206	0.0216	0.0226	0.0236
		Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0.19	0.32	0.41	0.50	0.59	0.68
MISI 2: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif.	Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan Kawasan-kawasan potensial dan strategis		Indeks Infrastruktur (Angka)	46.89	47.68	48.46	49.25	50.03	50.81
		Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (Angka)	46.89	47.68	48.46	49.25	50.03	50.81



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
maju dan berkelanjutan serta pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)		Untuk Menunjang Pemenuhan Pelayanan Dasar dan pengembangan ekonomi							
	Meningkatkan Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun (IDM) (I)	0.6842	0.6887	0.6931	0.6976	0.7022	0.7072
		Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju (%)	27.47	28.57	29.67	30.77	31.87	32.97
	Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	65.66	66.09	66.52	66.95	67.39	67.83
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Angka)	62.92	63.55	64.19	65.47	67.44	70.07
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
			Indeks Evaluasi SPBE (Indeks)	2.28	2.3	2.35	2.4	2.45	2.5
MISI 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender,			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	52.05	52.47	52.89	53.31	53.74	54.17
			Indeks Penerapan Sistem Merit (Angka)	0.55	0.56	0.60	0.61	0.63	0.66
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan perempuan		Indeks Modal Manusia (Indeks)	0.1-0.53	0.53-0.53	0.53-0.54	0.54-0.55	0.55-0.56	0.56-0.58
		Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8.19	8.23	8.28	8.33	8.38	8.42



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
berkelanjutan, dan berkeadilan		Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	68.58	68.80	69.03	69.25	69.48	69.71
		Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	60.55	62.06	63.61	65.20	66.83	68.50
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.28	4.50	4.72	4.95	5.17	5.39
			Rasio Gini (Indeks)	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Utama di Kabupaten Seluma	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Utama (%)	5.14	5.69	6.23	6.78	7.32	7.87
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	3.45	3.48	3.51	3.55	3.58	3.60
		Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi Daerah (PMA) (Juta Rupiah)	7500	8000	9000	10000	10500	11000
			Nilai Investasi Daerah (PMDN) (Juta Rupiah)	250000	275000	300000	325000	350000	375000
MISI 4: Mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat, berdaya ekonomi, harmonis, tentram, dan bahagia	Mengentaskan Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan ((%))	17.00	16.77	16.54	16.31	16.08	15.85
		Menjamin Perlindungan Sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)	2.42	2.41	2.40	2.39	2.38	2.36
			Indeks Keparahan Kemiskina (Indeks)	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43
		Mengurangi Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.36	2.34	2.30	2.28	2.26	2.24
	Meningkatkan derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat		Indeks Keluarga Sehat (Angka)	0.201	0.215	0.229	0.243	0.257	0.271
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Persentase kecamatan dengan status IKS sehat (%)	30	50	70	80	85	95
			Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga) (Indeks)	65.55:66	66.01:68	68.01:70	70.01:80	80.01:82	82.01:83



3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

A. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;

Strategi pembangunan Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang efektif, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan keamanan daerah dengan pendekatan inovatif berbasis teknologi serta optimalisasi potensi lokal. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 4 (empat) strategi utama yaitu:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan rata-rata lama sekolah, penguatan tenaga pendidik, serta digitalisasi sistem pendidikan. Di sektor kesehatan, peningkatan layanan kesehatan berbasis digital, cakupan BPJS bagi masyarakat miskin, serta program pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas. Kesetaraan gender dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan politik juga didorong untuk meningkatkan peran perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan.

2. Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Kabupaten Seluma memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta pengembangan pariwisata, UMKM dan industri kreatif. Oleh karena itu, strategi ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor unggulan, penguatan ekosistem UMKM dan koperasi, serta peningkatan daya saing investasi daerah. Pemerintah juga mendorong



penyederhanaan regulasi, penguatan akses pasar, serta pembangunan infrastruktur ekonomi seperti kawasan industri dan pusat logistik. Di sektor ketahanan pangan, dilakukan diversifikasi pangan lokal dan penguatan sistem distribusi logistik untuk mendukung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan.

3. Penguatan Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pembangunan wilayah yang lebih merata. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik, serta akses air bersih menjadi prioritas utama guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Digitalisasi layanan pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, penguatan tata kelola desa juga menjadi bagian dari strategi ini untuk meningkatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

4. Peningkatan Ketahanan Sosial, Lingkungan, dan Keamanan Daerah

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, harmonis, dan tangguh terhadap berbagai risiko sosial dan bencana. Dalam aspek lingkungan, penguatan regulasi pengelolaan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, serta pengembangan sistem pemantauan kualitas lingkungan berbasis digital menjadi prioritas utama. Di sisi ketahanan sosial, program pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan peran budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat akan terus dikembangkan. Untuk aspek keamanan daerah, pemerintah daerah akan meningkatkan mitigasi bencana, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan bencana dan penegakan hukum.

Untuk mencapai strategi pembangunan yang telah dirumuskan, diperlukan perencanaan partisipatif guna menjaring aspirasi masyarakat



Kabupaten Seluma dalam perencanaan tahunan maupun jangka menengah lima tahunan. Perencanaan partisipatif menjadi pendekatan utama dalam proses perencanaan pembangunan. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan bersama. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dilakukan pendampingan bagi komunitas atau kelompok warga sebagai upaya meningkatkan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Model ini telah diterapkan dalam perencanaan pembangunan sebelumnya dan bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang ada di tingkat komunitas dapat diidentifikasi secara lebih spesifik dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Pendampingan ini melibatkan kader-kader masyarakat yang memahami kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing, sehingga mampu memberikan solusi berbasis kebutuhan lokal.

Ke depan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, diharapkan seluruh desa dan komunitas di Kabupaten Seluma dapat difasilitasi dengan kader pendamping yang terlatih. Dengan adanya mekanisme ini, aspirasi masyarakat dapat lebih terakomodasi, mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa program pembangunan berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Rincian strategi dari setiap misi RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2029 akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel perencanaan pembangunan daerah.

Tabel III-4. Tujuan, Sasaran dan Strategi Setiap Misi

Tujuan	Sasaran	Strategi
VISI: Terwujudnya Kabupaten Seluma Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan Dan Beriman		
Misi 1: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter.		
Mewujudkan budaya yang memiliki nilai-nilai agama melalui seni dan budaya	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya	Revitalisasi dan konservasi cagar budaya
		Penguatan pendidikan budaya di sekolah
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya



Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Penguatan regulasi pengelolaan lingkungan
		Peningkatan rehabilitasi dan penghijauan lahan kritis
		Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana
Meningkatkan Nilai tambah Pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Potensi Lokal
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata
		Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk Wisata Unggulan
		Mendorong Investasi dan Kemitraan dalam Sektor Pariwisata
Misi 2: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan serta pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)		
Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kawasan potensial dan strategis	Meningkatnya kapasitas infrastruktur untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi	Pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis
		Peningkatan infrastruktur dasar di kawasan pertumbuhan ekonomi
		Penguatan kemitraan dengan sektor swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur
Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya desa mandiri	Penguatan kapasitas pemerintahan desa
		Peningkatan akses permodalan dan pelatihan bagi UMKM desa
		Pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal
Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Digitalisasi layanan pemerintahan (SPBE)
Misi 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan dan berkeadilan		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan perempuan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan,	Peningkatan akses pendidikan berkualitas
	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik
	Meningkatnya standar hidup layak	Digitalisasi sistem pendidikan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Utama	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan
		Penguatan Hilirisasi Produk Sektor Utama
		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal
		Pengembangan Ekonomi Digital untuk Sektor Unggulan
	Meningkatnya nilai investasi	Penguatan kapasitas SDM birokrasi
		Pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah
		Peningkatan akses pasar bagi UMKM dan koperasi
		Peningkatan infrastruktur ekonomi dan kawasan industri
		Penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha
Peningkatan promosi investasi		



Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pembangunan infrastruktur pendukung investasi
Misi 4: Mewujudkan masyarakat dan keluarga sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram dan bahagia		
Mengentaskan kemiskinan	Menjamin Perlindungan Sosial	Peningkatan Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial
		Perluasan Jangkauan Program Perlindungan Sosial
		Pengembangan Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas
	Mengurangi Pengangguran Terbuka	Peningkatan Akses dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
		Mendorong Transformasi Tenaga Kerja Informal ke Formal
Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan cakupan layanan kesehatan berbasis digital
		Penguatan promotif dan preventif kesehatan
		Peningkatan cakupan BPJS bagi keluarga miskin
		Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak
		Peningkatan edukasi kesehatan preventif
		Peningkatan akses sanitasi dan air bersih
		Program pencegahan stunting berbasis komunitas

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sd Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih fokus dan efektif dalam mencapai tujuan serta sasaran pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan arah kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan memiliki keterpaduan serta dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan dinamika pembangunan dan isu-isu strategis daerah.

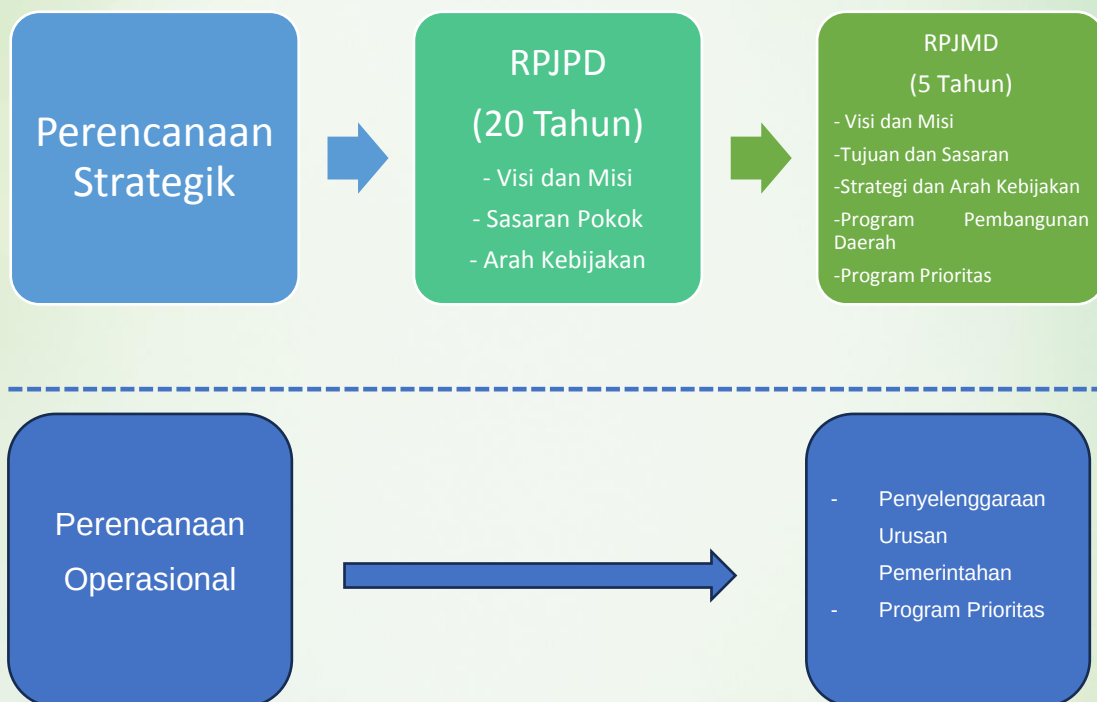
Arah kebijakan merupakan kerangka kerja yang sistematis dalam menyelesaikan tantangan pembangunan serta mengantisipasi isu-isu strategis yang dihadapi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi wujud konkret dari strategi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara konseptual, perencanaan pembangunan daerah terdiri dari dua aspek utama:



1. Perencanaan strategik, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang berfokus pada pencapaian kinerja layanan di setiap sektor pemerintahan.

Perencanaan ini bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang dapat dilaksanakan dengan jelas dan terukur. Segala upaya yang diarahkan langsung untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD dikategorikan sebagai bagian dari perencanaan strategik. Keberhasilan perencanaan strategik sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan perencanaan operasional, sebagaimana diilustrasikan dalam bagan yang menjelaskan keterkaitan keduanya.



Gambar III-1. Bagan Perencanaan Strategik dan Perencanaan Operasional

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam merumuskan fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD, diperlukan pertimbangan terhadap berbagai faktor, termasuk pencapaian indikator sasaran dalam setiap misi. Hal ini menjadi dasar penting dalam menetapkan langkah-langkah strategis guna memastikan target indikator sasaran dapat dicapai secara efektif. Dengan pendekatan ini, tahapan pembangunan dan ukuran pencapaian target di setiap tahunnya akan semakin jelas dan terarah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menetapkan fokus atau tema pembangunan untuk lima tahun ke depan, yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III-5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Seluma

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
Memperkuat fondasi transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik.	Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan investasi, serta pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan	Penguatan ketahanan sosial dan ekologi melalui pelestarian nilai-nilai lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Akselerasi pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pelayanan dasar, meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal	Perwujudan pembangunan menuju Kabupaten Seluma Emas Berlian (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan Dan Beriman

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus tahunan pembangunan di Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

Tabel III-6. Fokus Pembangunan Daerah Per Periode Tahun 2025-2029

FOKUS PEMBANGUNAN				
TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)



FOKUS PEMBANGUNAN				
TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
1. Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Kebudayaan
2. Kualitas Lingkungan Hidup	2. Kualitas Lingkungan Hidup	2. Kualitas Lingkungan Hidup	2. Kualitas Lingkungan Hidup	2. Kualitas Lingkungan Hidup
3. Kapasitas infrastruktur	3. Kapasitas infrastruktur	3. Kapasitas infrastruktur	3. Kapasitas infrastruktur	3. Kapasitas infrastruktur
4. Desa Mandiri	4. Desa Mandiri	4. Desa Mandiri	4. Desa Mandiri	4. Desa Mandiri
5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
6. Perekonomian Daerah	6. Perekonomian Daerah	6. Perekonomian Daerah	6. Perekonomian Daerah	6. Perekonomian Daerah
7. Nilai Investasi	7. Nilai Investasi	7. Nilai Investasi	7. Nilai Investasi	7. Nilai Investasi
8. Kualitas Pendidikan	8. Kualitas Pendidikan	8. Kualitas Pendidikan	8. Kualitas Pendidikan	8. Kualitas Pendidikan
9. Akses Kesehatan	9. Akses Kesehatan	9. Akses Kesehatan	9. Akses Kesehatan	9. Akses Kesehatan
10. Standar Hidup Layak	10. Standar Hidup Layak	10. Standar Hidup Layak	10. Standar Hidup Layak	10. Standar Hidup Layak
11. Kesenjangan Gender	11. Kesenjangan Gender	11. Kesenjangan Gender	11. Kesenjangan Gender	11. Kesenjangan Gender
12. Kesehatan Keluarga	12. Kesehatan Keluarga	12. Kesehatan Keluarga	12. Kesehatan Keluarga	12. Kesehatan Keluarga
13. Ketahanan Pangan	13. Ketahanan Pangan	13. Ketahanan Pangan	13. Ketahanan Pangan	13. Ketahanan Pangan
14. Kemiskinan	14. Kemiskinan	14. Kemiskinan	14. Kemiskinan	14. Kemiskinan
15. Bencana Alam	15. Bencana Alam	15. Bencana Alam	15. Bencana Alam	15. Bencana Alam
16. Ketertiban Sosial	16. Ketertiban Sosial	16. Ketertiban Sosial	16. Ketertiban Sosial	16. Ketertiban Sosial

Berdasarkan fokus pembangunan tahunan tersebut, maka tema pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Seluma selama kurun waktu 5 tahun (periode RPJMD) adalah sebagai berikut:

Tabel III-7. Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029

NO.	TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
1	2026	Sebagai tahun fondasi dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing sumber daya manusia.
2	2027	Memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan dan kemandirian desa dengan pembangunan ekonomi berbasis lokal dan merata.



NO.	TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
3	2028	Peningkatan pemerataan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
4	2029	Akselerasi pembangunan melalui ketahanan pangan, teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5	2030	Evaluasi, Konsolidasi, dan Penguatan Keberlanjutan Pembangunan menuju Kabupaten Seluma Emas Berlian (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan Dan Beriman

Tema pembangunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 disusun secara bertahap dengan fokus yang berbeda setiap tahunnya untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Pada tahun 2026, sebagai tahun fondasi, fokus utama pembangunan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan daya saing sumber daya manusia. Upaya ini mencakup reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan kebijakan yang mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan akan menjadi prioritas untuk membentuk sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pada tahun 2027, pembangunan difokuskan pada memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan dan penguatan kemandirian desa dengan pembangunan ekonomi berbasis lokal. Pemerintah daerah akan mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, dan UMKM sebagai pilar ekonomi utama. Infrastruktur penunjang akan diperkuat untuk meningkatkan akses pasar dan memperluas peluang investasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Tahun 2028 diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Fokus pembangunan dalam periode ini adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses yang merata terhadap layanan dasar yang berkualitas. Peningkatan fasilitas pendidikan,



layanan kesehatan yang lebih baik, serta program perlindungan sosial akan diperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Seluma.

Pada tahun 2029, tema pembangunan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor pertanian dan perikanan akan dikembangkan lebih lanjut dengan penerapan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Selain itu, adopsi teknologi dalam berbagai sektor akan didorong untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada tahun terakhir RPJMD 2030, fokus utama adalah evaluasi, konsolidasi, dan penguatan keberlanjutan pembangunan. Tahun ini menjadi momentum untuk menilai capaian pembangunan dalam empat tahun sebelumnya, mengidentifikasi tantangan, serta memastikan keberlanjutan program-program strategis yang telah berjalan. Langkah konsolidasi akan dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan kebijakan yang telah terbukti efektif, serta merancang strategi pembangunan jangka panjang yang lebih komprehensif untuk Kabupaten Seluma. Dengan pendekatan ini, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel III-8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI: Terwujudnya Kabupaten Seluma Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan Dan Beriman			
Misi 1: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter.			Penguatan ketahanan sosial dan ekologi melalui pelestarian nilai-nilai lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
Mewujudkan budaya yang memiliki nilai-nilai agama melalui seni dan budaya	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya	Revitalisasi dan konservasi cagar budaya	
		Penguatan pendidikan budaya di sekolah	
Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya	
		Penguatan regulasi pengelolaan lingkungan	
		Peningkatan rehabilitasi	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan penghijauan lahan kritis	
		Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana	
Meningkatkan Nilai tambah Pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Potensi Lokal	
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata	
		Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk Wisata Unggulan	
		Mendorong Investasi dan Kemitraan dalam Sektor Pariwisata	
Misi 2: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan serta pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)			Akselerasi pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pelayanan dasar, meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal
Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kawasan potensial dan strategis	Meningkatnya kapasitas infrastruktur untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi	Pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis	
		Peningkatan infrastruktur dasar di kawasan pertumbuhan ekonomi	
		Penguatan kemitraan dengan sektor swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur	
Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya desa mandiri	Penguatan kapasitas pemerintahan desa	
		Peningkatan akses permodalan dan pelatihan bagi UMKM desa	
		Pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal	
Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Digitalisasi layanan pemerintahan (SPBE)	
Misi 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan dan berkeadilan			Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan investasi, serta pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas sumber	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.	Peningkatan akses pendidikan berkualitas	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan perempuan	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	
	Meningkatnya standar hidup layak	Digitalisasi sistem pendidikan	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Utama	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	
		Penguatan Hilirisasi Produk Sektor Utama	
		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal	
		Pengembangan Ekonomi Digital untuk Sektor Unggulan	
	Meningkatnya nilai investasi	Penguatan kapasitas SDM birokrasi	
		Pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah	
		Peningkatan akses pasar bagi UMKM dan koperasi	
		Peningkatan infrastruktur ekonomi dan kawasan industri	
		Penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha	
		Peningkatan promosi investasi	
		Pembangunan infrastruktur pendukung investasi	
Misi 4: Mewujudkan masyarakat dan keluarga sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram dan bahagia			Penguatan Ketahanan Sosial melalui Peningkatan Kesehatan, Kesejahteraan Ekonomi, dan Keamanan Masyarakat
Mengentaskan kemiskinan	Menjamin Perlindungan Sosial	Peningkatan Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial	
		Perluasan Jangkauan Program Perlindungan Sosial	
		Pengembangan Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas	
	Mengurangi Pengangguran Terbuka	Peningkatan Akses dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	
		Mendorong Transformasi Tenaga Kerja Informal ke Formal	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan cakupan layanan kesehatan berbasis digital	
		Penguatan promotif dan preventif kesehatan	
		Peningkatan cakupan BPJS bagi keluarga miskin	
		Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak	
		Peningkatan edukasi kesehatan preventif	
		Peningkatan akses sanitasi dan air bersih	
		Program pencegahan stunting berbasis komunitas	

C. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diimplementasikan melalui perencanaan operasional. Dalam penyusunan RPJMD saat ini, keselarasan antara visi, misi daerah, sasaran pokok, dan arah kebijakan dirinci lebih lanjut dalam visi dan misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan agenda strategis kepala daerah selama periode RPJMD yang menjadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan. Program ini secara langsung diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, program pembangunan daerah dijalankan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun periode 2025-2029 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur
3. Tata Kelola Pemerintahan
4. Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat



5. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan, serta pengolahan sampah yang ramah lingkungan

Program pembangunan daerah dirancang untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah sebagai solusi terhadap permasalahan yang muncul dari isu-isu strategis daerah. Program ini kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, jelas, dan dapat diukur. Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Adapun program prioritas kepala daerah Kabupaten Seluma diantaranya:

Tabel III-9. Keselarasan Program Prioritas Kepala Daerah dengan Prioritas Nasional

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Prioritas Nasional
1.	Penguatan akhlak dan budaya serta pengembangan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pariwisata yang elegan, lestari dan berkelanjutan	Melestarikan lingkungan, alam, budaya dan kearifan lokal	Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Prioritas Nasional 7: Memperkuat Moderasi Beragama dan Kebudayaan
		Menguatkan nilai-nilai religius, toleransi, dan kebhinekaan secara persuasif	
		Mengembangkan objek-objek wisata yang terintegrasi	
		Menyempurnakan pembangunan Taman Makam Pahlawan Seluma	
2.	Pengembangan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Irigasi, Pendidikan, Kesehatan, Digital) dalam pembangunan Kawasan-kawasan potensial dan strategis	Membangun dan meningkatkan kualitas aksesibilitas ke kawasan usaha ekonomi dan perdesaan	Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Prioritas Nasional 6: Membangun Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	
		Memberikan pelayanan internet gratis di setiap desa	
3.	Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan pegawai (ASN dan Tenaga Honorer)	Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Menerapkan profesionalitas dalam pengisian jabatan pemerintahan	
		Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai	
		Melaksanakan pelayanan publik antar jemput	
		Meningkatkan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan ambulans gratis	



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Prioritas Nasional
4.	Peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Mengembangkan usaha ekonomi kreatif dan produktif masyarakat	Prioritas Nasional 4: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
		Membangun akses layanan pendidikan dan kesehatan yang merata	
		Membangun Universitas di Kabupaten Seluma	
		Mengembangkan Tempat Pelelangan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara	
5.	Percepatan transformasi pembangunan ekonomi daerah, pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender dan berkeadilan	Membangun kluster-kluster wisata dan ekonomi daerah	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Prioritas Nasional 5: Memperkuat Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
		Membangun pasar tradisional modern yang didukung transportasi publik	
		Mengembangkan usaha ternak masyarakat desa secara kolaboratif	
		Memberikan bantuan ternak sapi kepada masyarakat kurang mampu	
6.	Pemenuhan pelayanan dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial) dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan desa tertinggal secara partisipatif dan berkeadilan	Membangun akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Prioritas Nasional 4: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Prioritas Nasional 5: Memperkuat Perlindungan Sosial
		Memberikan beasiswa bagi masyarakat tak mampu dan mahasiswa berprestasi	
		Memberikan makanan tambahan bergizi dan BPJS Kesehatan gratis	
		Menyediakan makan siang gratis bagi siswa SD, SMP, dan SMA	
		Pelayanan ambulans gratis di setiap kecamatan	
7.	Mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pedagang, dan tenaga kerja	Memberikan bantuan tambahan modal bagi UKM, UMKM, BUMDes, dan koperasi	Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi
		Memfasilitasi peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian dan perikanan	

Pemerintah Kabupaten Seluma menetapkan berbagai program prioritas untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Penguatan akhlak, budaya, dan lingkungan diwujudkan melalui pengembangan wisata berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya alam. Infrastruktur ditingkatkan dengan aksesibilitas ke kawasan ekonomi, digitalisasi pelayanan publik, serta



layanan kesehatan gratis. Pengembangan SDM difokuskan pada pendidikan berkualitas, beasiswa, dan peningkatan layanan kesehatan. Sektor ekonomi diperkuat dengan klaster wisata, pasar modern, dan usaha ternak berbasis masyarakat. Pemerintah juga berupaya menekan kemiskinan dan pengangguran melalui perlindungan sosial serta bantuan modal bagi UMKM, petani, dan nelayan.

Dokumen RPJMN 2025-2029 memuat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama dalam mencapai sasaran nasional, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Pada dokumen RPJMN 2025-2029 terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis, dimana pelaksanaannya dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran RPJMN Kabupaten Seluma dalam hal ini berkomitmen penuh untuk mendukung PSN dimana indikasi nya dijelaskan sebagai berikut:

1. Makan Bergizi Gratis: Program Makan Bergizi Gratis (Nasional)
2. Swasembada Pangan: Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat; Layanan irigasi pendukung lumbung pangan Nasional (Nasional)
3. Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital: Hilirisasi singkong dan ubi jalar; penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung singkong, pengembangan kawasan industri terpadu; pengembangan layanan digital pemerintah terpadu (Nasional)
4. Perumahan dan Permukiman: Pembangunan 3 Juta Rumah (Nasional)
5. Sekolah Rakyat
6. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih



3.3. Lokus Pembangunan RPJMD 2025-2029

3.3.1. Orientasi Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang

Subbab ini membahas orientasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Seluma dalam RPJMD Tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), guna memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan dan pengelolaan ruang secara berkelanjutan

Dalam kerangka pembangunan kewilayahan Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma memiliki peran strategis sebagai bagian dari Kawasan Swasembada Pangan. Kabupaten Seluma berada pada koridor penting Mukomuko–Bengkulu Utara–Seluma–Bengkulu Selatan yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Potensi lahan pertanian yang luas, didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal, menjadi kekuatan utama bagi pengembangan sektor pertanian yang berdaya saing.



Arah pembangunan di Kabupaten Seluma diarahkan untuk memperkuat peran sebagai lumbung pangan regional, melalui optimalisasi produksi pertanian, penguatan infrastruktur irigasi dan distribusi hasil panen, serta peningkatan kapasitas petani. Pembangunan kawasan ini juga diorientasikan



pada pemanfaatan ruang yang selaras dengan daya dukung lingkungan, agar pengelolaan sumber daya alam dapat berkelanjutan.

Dengan demikian, orientasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Seluma dalam RPJMD Tahun 2025–2029 perlu diarahkan secara konsisten untuk mendukung kebijakan kawasan swasembada pangan, serta menjawab tantangan ketahanan pangan melalui pendekatan spasial yang berbasis tata ruang.

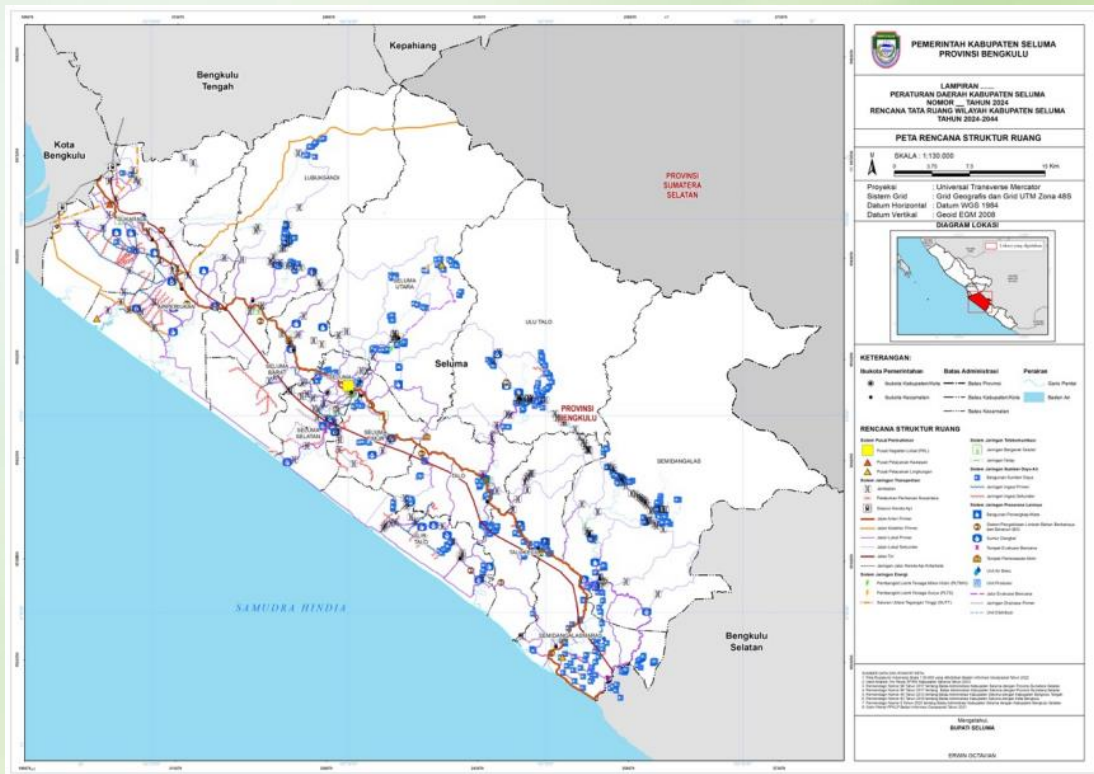
A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan dokumen RTRW kabupaten Seluma, rencana struktur ruang Kabupaten Seluma terdiri atas: (1). sistem perkotaan wilayah Kabupaten; dan (2). sistem jaringan prasarana Kabupaten yang meliputi:

- a. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi
- b. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan
- c. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi
- d. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, dan



- e. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana prasarana lainnya.



Gambar III-2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seluma

B. Rencana Sistem Pusat Permukiman

Dalam struktur ruang, direncanakan pusat-pusat permukiman yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Seluma yang memiliki nilai strategis. Sistem permukiman tersebut diwujudkan melalui penetapan:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang memiliki peran melayani kegiatan dalam skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang memiliki peran untuk melayani kegiatan skala Kecamatan
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang memiliki peran untuk melayani kegiatan skala antar desa



Tabel III-10 Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Seluma

No.	Sistem Pusat Permukiman	Rencana Sistem Pusat Permukiman	Konsep Pengembangan
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kota Tais Seluma Timur	Mewujudkan dan memantapkan dan peran dan fungsi Kota Tais dan seluma Timur sebagai PKL, dengan membangun fasilitas pendukung PKL yang memiliki skala pelayanan Kabupaten
2.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	PPK Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja PPK Masmambang Kecamatan Talo PPK Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan PPK Demayu Kecamatan Air Periukan PPK Pajar bulan Kecamatan Semidang Alas PPK Puguk Kecamatan Seluma Utara PPK Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi PPK Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat PPK Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras PPK Air Keruh Kecamatan Ulu Talo PPK Padang Cekur Kecamatan Ilir Talo PPK Sukamerindu Kecamatan Talo Kecil	Mendorong terwujudnya PKK dengan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendukung PPK terutama untuk PPK yang saat ini belum berkembang
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	PPL Sukasari Kecamatan Air Periukan PPL Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas PPL Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo PPL Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi PPL Lubuk Resan Kecamatan Seluma Utara	Mendorong terwujudnya PPL dengan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendukung PPL

Sumber: RTRW Kabupaten Seluma 2024-2044





Gambar III-3 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seluma

Sumber: RTRW Kabupaten Seluma 2024-2044

C. Rencana Sistem Jaringan Prasarana

1. Sistem Prasarana Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Seluma di fokuskan pada pengembangan jaringan jalan, pengembangan sistem terminal jaringan jalan Kereta Api dan transportasi laut (pengembangan pelabuhan).

a) Jaringan Jalan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, telah ditetapkan mengenai fungsi dan peranan jalan di wilayah perkotaan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan tingkatan fungsi jaringan jalan yang terdiri dari : Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal, baik bersifat pelayanan primer maupun sekunder. Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan system jaringan jalan dengan peranan pelayanan



distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat- pusat kegiatan, dengan perincian :

- a. Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- b. Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local.
- c. Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan local, atau pusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan.

Sistem Jaringan Jalan Sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai persil, dengan perincian:

- a. Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, dan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunderkedua.
- b. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunderketiga.
- c. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan



perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.

Sistem jaringan jalan yang direncanakan di Kabupaten Seluma adalah sistem primer yang menurut fungsinya seperti telah dijelaskan di atas, terdiri atas Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer. Jalan Arteri Primer (JAP) telah ditetapkan baik dalam RTRWN maupun RTRW Provinsi Bengkulu. Jalan Kolektor Primer (JKP) juga telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Bengkulu. Porsi terbesar penetapan system dan fungsi jaringan jalan dalam RTRW Kabupaten Seluma ini adalah pada Jalan Lokal Primer (JLP). Mengingat fungsi JLP yang akan mendukung struktur ruang wilayah, maka direncanakan ada 2 klasifikasi JLP, untuk ditetapkan JLP-1 dan JLP-2.

b) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Jalan di Kabupaten Seluma

Bupati Seluma melalui Keputusan Bupati Seluma Nomor 600 - 881 Tahun 2024 Tentang Penetapan Data Dasar Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu telah menetapkan Data Dasar Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

Tabel III-11. Data Dasar Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	Betungan - Tabalagan	Sukaraja	3
2	Tabalagan - Kuti Agung	Sukaraja	3,88
3	Air Petai - Betungan	Sukaraja	3,27
4	Babatan - Padang Kuas	Sukaraja	3,9
5	Padang Kuas - Kuti Agung	Sukaraja	8



NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
6	Padang Kuas - Air Kemuning	Sukaraja	5,49
7	Babatan - Padang Serai	Sukaraja	1,92
8	Babatan - Babatan (Pulau Sari)	Sukaraja	1,8
9	JL Nasional (Babatan) - Babatan (Bedeng Bata)	Sukaraja	0,51
10	Jenggalu - Padang Serai	Sukaraja	6,44
11	Jenggalu - Riak Siabun	Sukaraja	6,49
12	Tugu Bintang - Riak Siabun 1	Sukaraja	3,71
13	JL Nasional Cahaya Negeri - Sarimulyo	Sukaraja	3,28
14	BP 1 - Sumber Arum	Sukaraja	1,97
15	BP1 - BP1 Dusun 6	Sukaraja	0,74
16	BP1 - Sarimulyo	Sukaraja	0,75
17	JL Nasional (BP2) - Sarimulyo	Sukaraja	2,68
18	Sari Mulyo - Tawang Rejo	Sukaraja	5,96
19	Sidoluhur - Sidosari	Sukaraja	1
20	Cahaya Negeri - Kayu Arang	Sukaraja	3,98
21	JL Nasional (Simpang Niur) - Padang Pelawi	Sukaraja	2,55
22	JL Nasional (Kayu Arang) - Perempatan Desa Niur	Sukaraja	0,77
23	JL Nasional (Lubuk Sahung) - Padang Pelawi	Sukaraja	2,75
24	Padang Pelawi - Talang Sebaris	Sukaraja	7,85
25	JL Nasional (Lubuk Sahung) - Talang Benuang	Sukaraja	1,91
26	Perbatasan Lubuk Sahung - Sukaraja Perluasan	Sukaraja	1,93
27	JL Nasional (Sukaraja) - Lubuk Gilang	Sukaraja	3,11
28	JL Nasional (Sukamaju) - Dusun Serindingan	Air Periukan	0,72
29	Sukamaju - Perluasan	Air Periukan	0,87
30	Sukamaju - Talang Benuang	Air Periukan	1,26
31	Sukamaju - Lokasi Baru	Air Periukan	1,17
32	Lokasi Baru - Talang Benuang	Air Periukan	1,34
33	Lokasi Baru - Dermayu	Air Periukan	1
34	Dermayu - Umbulrejo	Air Periukan	2,66
35	JL Nasional (SMP N 06 Dermayu) - Simpang ke Umbulrejo	Air Periukan	2,14
36	JL Nasional (Sukamaju) - Sumberejo	Air Periukan	3,64
37	Sukasari - Dermayu (umbulrejo)	Air Periukan	2,38
38	JL. Propinsi (Kungkai Baru) - Tawang Rejo	Air Periukan	2,99



NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
39	JL. Propinsi (Lawang Agung) - Tawang Rejo	Air Periukan	5,76
40	JL. Propinsi (Keban Agung) - Simpangan ke Sumber Rejo	Air Periukan	4,3
41	JL. Nasional (Air Periukan) - Pertigaan Ke Talang Alai	Air Periukan	4,68
42	JL. Nasional (Air Periukan) - Pasar Rabu	Air Periukan	0,86
43	Lubuk Gilang - Padang Pelasan	Air Periukan	1,1
44	JL. Nasional (Padang Pelasan) - Talang Alai	Air Periukan	8
45	JL. Nasional (Gunung Agung) - Simpang Ke Talang Giring	Lubuk Sandi	4,35
46	Talang Alai - Talang Giring	Lubuk Sandi	7,62
47	Talang Alai - Napal Jungur	Lubuk Sandi	4,1
48	JL. Nasional (Rena Panjang) - Napal Jungur	Lubuk Sandi	6,68
49	Napal Jungur - Simpangan Jalan Batu Bara	Lubuk Sandi	2,32
50	Napal Jungur - Arang Sapat	Lubuk Sandi	4,1
51	Arang Sapat - Cawang	Lubuk Sandi	4,69
52	Cawang - Padang Capo Ilir	Lubuk Sandi	10,2
53	JL. Provinsi - Padang Capo Ilir	Lubuk Sandi	1,11
54	Padang Capo Ilir - Padang Capo Ulu	Lubuk Sandi	1,83
55	Tumbuan - Minggir Sari	Lubuk Sandi	4,35
56	Tumbuan (Jl. Pasar Baru)	Lubuk Sandi	0,53
57	Tumbuan (Jl. Pelak Gedung)	Lubuk Sandi	0,44
58	Tumbuan (Jl. Pendidikan)	Lubuk Sandi	0,32
59	Tumbuan - Talang Kebun	Lubuk Sandi	8,58
60	Napal Jungur - Talang Kebun Ujung	Lubuk Sandi	6,67
61	JL. Nasional (Lunjuk) - Minggir Sari	Seluma Barat	7,15
62	JL. Nasional (Sengkuang Jaya) - Tugu Perbatasan Talang Kebun	Seluma Barat	6,38
63	JL. Nasional (Lunjuk) - Pir 7 (Curup Tinggi)	Seluma Barat	7,17
64	Talang Tinggi - Talang Rami	Seluma Barat	6,7
65	JL. Nasional (Air Latak) - Perempatan Padang Rambun	Seluma Barat	3,96
66	Pertigaan Irigasi (Air Latak) - Purbosari	Seluma Barat	4,27
67	Pagar Agung - Talang Perapat	Seluma Barat	4,51
68	Pertigaan Talang Perapat - Purbosari	Seluma Barat	1,19
69	Napal - Simpang Kepada Rambun	Seluma Selatan	1,62
70	Mandi Angin - Sidomulyo (SD)	Seluma Selatan	0,65



NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
71	Simpang Padang Rambun - Padang Rambun (SD 57)	Seluma Selatan	1,85
72	Padang Rambun (SD 57) - Tanjung Seluai	Seluma Selatan	1,33
73	Tanjung Seluai - Pertigaan Talang Perapat	Seluma Selatan	3
74	Padang Rambun - Simpang Disnaker	Seluma Selatan	2,1
75	Padang Rambun - Tanjung Seluai	Seluma Selatan	1,99
76	Simpang Ke Padang Rambun - Sidomulyo (Liku 3)	Seluma Selatan	1,19
77	Tais - Pasar Seluma	Seluma Selatan	11,9
78	Simpang SLB - Rimbo Kedui	Seluma Selatan	2,12
79	Sengkuang - Tanjungan	Seluma Selatan	0,96
80	Tanjungan - Tangga Batu	Seluma Selatan	1,1
81	Tangga Batu - Rimbo Kedui Ujung	Seluma Selatan	2,25
82	Tangga Batu - Perkembangan	Seluma Selatan	5,1
83	Sukarami - Perkembangan	Seluma Selatan	1,71
84	Dusun Baru - Talang Rami	Seluma Selatan	4,2
85	Talang Saling - Rumah Dinas Bupati Ampar Gading	Seluma Selatan	2
86	Simpang BPBD - Rumah Dinas Wakil Bupati	Seluma Selatan	0,16
87	Rumah Dinas Bupati - Balai Adat Ampar Gading	Seluma Selatan	1,6
88	Simpang Enam - Simpang Kantor DKP	Seluma Selatan	3,1
89	Talang Saling - Pusat Pemerintahan	Seluma Selatan	1,47
90	Pematang Aur (Dinasker) - Mandi Angin	Seluma Selatan	1,34
91	Simpang Enam - Pematang Aur	Seluma Selatan	1,33
92	Simpang Enam - Talang Dantuk	Seluma Selatan	2,42
93	Simpang Enam - Lubuk Kebur	Seluma Selatan	2,89
94	JL. Nasional Lubuk Kebur - Fly Over Tais	Seluma Selatan	0,17
95	JL Pasar Tais	Seluma Selatan	0,61
96	JL Nasional (Tais) - Pasar Tais	Seluma Selatan	0,39
97	JL Kantor Lurah Pasar Tais	Seluma Selatan	0,52
98	JL. Alun-alun Tais - Kantor Camat Seluma	Seluma Selatan	0,22
99	JL. Sawo Besar 2	Seluma Selatan	0,2
100	JL. Sawo Besar 1	Seluma Selatan	0,25
101	JL Nasional (Kantor Camat Seluma) - Tanah Lupis	Seluma Selatan	0,51
102	JL Nasional (Lubuk Kebur) - Lubuk Lintang	Seluma Selatan	0,92



NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
103	JL Z. Abidin	Seluma Selatan	0,17
104	JL Macang Besar 1	Seluma Selatan	0,29
105	JL Macang Besar 2	Seluma Selatan	0,29
106	Rumah Dinas Kapolres - Simpang Pancoraden	Seluma Selatan	0,25
107	Simpang Tiga Pancoraden - Rumah Dinas Sekda	Seluma Selatan	1,56
108	Talang Saling - Mandi Angin	Seluma Selatan	2,76
109	Lubuk Lintang - Jalan Nasional (Lubuk Kebur)	Seluma Selatan	2,21
110	Talang Saling - Rumah Dinas (JL. Pancoraden)	Seluma Selatan	1
111	Simpangan Ke Bendungan - Bunga Mas	Seluma Selatan	0,9
112	Lubuk Kebur - Rumah Dinas	Seluma Selatan	1,15
113	Bunga Mas - Simpang Ke Balai Adat	Seluma Selatan	2,63
114	Bunga Mas - Pandan	Seluma Selatan	4,66
115	Bunga Mas Sembayat - Kota Agung	Seluma Timur	3,67
116	JL Nasional (Sembayat) - Kantor Camat Seluma Timur	Seluma Timur	0,32
117	Selebar - Simpang	Seluma Timur	8,13
118	JL Nasional (Selebar) - Jalan Dua Jalur	Seluma Timur	0,67
119	JL Nasional (Kota Agung) - Selebar	Seluma Timur	1,94
120	Perempatan Desa Simpang - Lapangan Tembak	Seluma Timur	6,73
121	Kunduran - Transbandep	Seluma Timur	2,5
122	Talang Sali - Transbandep	Seluma Timur	1,8
123	Talang Sali - Tenangan	Seluma Timur	4,2
124	Tenangan - Rawa Sari	Seluma Timur	3,64
125	Rawa Sari - Tanjungan	Seluma Timur	2,9
126	Talang Sali - Pagar	Seluma Timur	11,2
127	Pandan - Puguk	Seluma Utara	4,73
128	Tugu AMD - Selingsingan	Seluma Utara	2,57
129	Selingsingan - Puguk	Seluma Utara	2,49
130	Selingsingan - Simpang	Seluma Utara	3,24
131	Selingsingan - Mekar Jaya	Seluma Utara	15,8
132	Puguk - Lubuk Resam	Seluma Utara	13,8
133	JL Pariwisata Lubuk Resam	Seluma Utara	1,16
134	Lubuk Resam - Sinar Pagi	Seluma Utara	3,5
135	Lubuk Resam - Sekalak	Seluma Utara	10,6
136	Puguk - Bukit Penyambungan	Seluma Utara	5,48
137	Pertigaan Dusun Baru - Simpang Balai	Seluma Utara	4,94



NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
	Adat		
138	Talang Rami - Talang Beringin	Seluma Utara	4,82
139	Simpang Talang Beringin - Sekalak	Seluma Utara	7,49
140	Sekalak - Pertigaan Tugu Talang Kebun	Seluma Utara	10,4
141	Air Teras - Air Payangan	Talo	4,46
142	Air Teras - Batu Tugu	Talo	2,37
143	Air Payangan - Tanah Abang	Talo	3,81
144	Tebing Penago (Air Teras) - Talang Kabu	Talo	8,1
145	Jalan Nasional (Bunut Tinggi) - Lubuk Ngantungan	Talo	2,63
146	Masmambang - Air Petai	Talo	2,21
147	JL Nasional (SPBU Masmambang) - Simpang ke Air Petai	Talo	0,32
148	JL Kapten Kenadi	Talo	0,39
149	Masmambang - Lubuk Lagan	Talo	3,93
150	Talang Panjang - Talang Kabu	Talo	3,56
151	Talang Kabu - Paluah Terap	Talo	3,69
152	Paluah Terap - Tanah Abang	Talo	2,74
153	JL. Rawa Indah	Talo	1,37
154	Tanah Abang - Rawah Indah	Talo	6
155	Padang Cekur - Penago Satu	Talo	2,61
156	Talang Panjang - Dusun Baru	Talo	4,2
157	JL. Provinsi (Penago Baru) - Rawa Indah	Talo	1,1
158	Jalan Provinsi (Rawa Indah) - Penago Dua	Talo	5,89
159	Simpang Napal Melintang - Harapan Mulya (Trans)	Ulu Talo	3,24
160	Lubuk Ngantungan - Air Keruh	Ulu Talo	9,13
161	Air Keruh - Mekarjaya	Ulu Talo	6,79
162	Mekar Jaya - Pagar Banyu	Ulu Talo	9,44
163	Tanjung Agung - Pagar Banyu	Ulu Talo	2,58
164	Muara Simpung - Muara Nibung	Ulu Talo	2,32
165	Pagar Banyu - Simpang Batu Balai	Ulu Talo	9,18
166	Napalan - Sungai Petai	Talo Kecil	5,35
167	Napalan - Umbut (Tematang Panjang)	Talo Kecil	3
168	Sungai Petai - Batu Balai	Talo Kecil	7,82
169	Trans Batu Balai - Simpang Ke Batu Balai	Talo Kecil	1,95
170	Lubuk Lagan - Air Melancar	Talo Kecil	11,2
171	Suka Merindu - Talang Padang	Talo Kecil	1,45
172	Jalan Nasional (Taba) - Jalan Provinsi	Talo Kecil	5,96



NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
	(Pring Baru)		
173	Sukamerindu (Bitasan) - Air Melancar	Semidang Alas	6,96
174	Simpangan Air Melancar - Trans Batu Balai	Semidang Alas	3,68
175	Simpang Batu Balai - Gumung Megang	Semidang Alas	2,78
176	Jalan SMP N 1 - Pasar Pajar Bulan	Semidang Alas	0,83
177	Pinju Layang - Sendawar	Semidang Alas	1,91
178	JL SD 95 (Bandung Agung)	Semidang Alas	0,2
179	Pinju Layang - Nanjungan	Semidang Alas	2,82
180	JL. Propinsi (Pajar Bulan) - Talang Durian	Semidang Alas	3,62
181	Talang Durian - SP 2	Semidang Alas	7,91
182	Air Melancar - Cugung Langu	Semidang Alas	2,77
183	Cugung Langu - Gumung Megang	Semidang Alas	5
184	Talang Durian - Pondok Uden	Semidang Alas	7,46
185	Talang Durian - Cugung Langu	Semidang Alas	2
186	Talang Durian - Air Melancar	Semidang Alas	3,1
187	Muara Dua - Napalan	Semidang Alas	1,49
188	Kemang Manis - Gaja Mati 1	Semidang Alas	2,44
189	Muara Dua - Gumung Megang	Semidang Alas	9,22
190	Sp. 2 - Talang Kedurang	Semidang Alas	4,52
191	Nanti Agung - Suban	Semidang Alas	12,2
192	JL Provinsi (Desa Telatan) - Datarman	Semidang Alas	0,63
193	JL. Propinsi (Tebat Gumung) - Suban	Semidang Alas	9,82
194	Tebat Gumung - Datarman	Semidang Alas	1,3
195	Karang Anyar - Jin Nasional	Semidang Alas	1,45
196	Karang Anyar - Masjid Al Hidayah	Semidang Alas	0,67
197	Kantor Camat - SMA 6	Semidang Alas	0,9
198	JL. Nasional (Kembang Mumpo) - SMA 6	Semidang Alas	0,3
199	Ujung Padang - Pematang Riding	Semidang Alas	1,32
200	Ujung Padang - Tematang Batu (TPI)	Semidang Alas	3,29
201	JL Kelurahan Kembang Mumpo	Semidang Alas Maras	0,6
202	Tedunan - Ujung Padang	Semidang Alas Maras	4,27
203	Tedunan - Pantai Maras	Semidang Alas Maras	1,3
204	Ketapang Baru - Talang Alai	Semidang Alas Maras	7,1
205	JL. Propinsi (Jambat Akar) - Padang Serunaian	Semidang Alas Maras	9,11



c) Pengembangan Terminal

Rencana pengembangan sistem terminal Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut

1. Pelayanan transportasi Kabupaten Seluma untuk 20 tahun yang akan datang lebih mengutamakan pelayanan dengan angkutan umum (massal) yang dikombinasikan dengan penggunaan angkutan pribadi, dan dilengkapi dengan system pedestrian sebagai kepanjangan dari pelayanan angkutan umum berjadwal dan memiliki rute tetap ke pusat-pusat bangkitan pergerakan seperti perumahan, pertokoan/perdagangan, perkantoran dan tempat wisata/rekreasi, sebagai bagian dari pergerakan non-motoris di Kabupaten Seluma. Untuk pengembangan angkutan penumpang umum ini akan dipersiapkan terminal yaitu terminal tipe B di Kabupaten Seluma.
2. Untuk angkutan barang akan disediakan terminal angkutan barang secara khusus untuk perpindahan angkutan barang regional ke lokal dan sebaliknya. Angkutan barang regional (antar kota/kabupaten/provinsi) menggunakan truk 2 as atau lebih dengan daya angkut antara 6 sampai 18 ton. Sedangkan untuk angkutan barang local (dalam kota) akan digunakan pick up/box (mobil hantaran) dan maksimal truk 1 as dengan daya angkut antara 750 Kg sampai maksimum 6 ton. Terminal angkutan barang ini direncanakan akan ditempatkan di Kecamatan Seluma Timur dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

d) Jaringan Jalan Rel Kereta Api

Dalam RTRW Provinsi Bengkulu dijelaskan bahwa jalan rel kereta api merupakan pengembangan baru yang menghubungkan wilayah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi



Sumatera Barat. Lintasan jalan rel kereta api yang dikembangkan adalah Lintasan Tebingtinggi – Bengkulu dengan alternatifnya lintasan Kota Padang–Bengkulu dan Lintasan Bengkulu-Padang. Salah satu alternatif jalur diatas adalah jalur Tebingtinggi – Bengkulu yang berpeluang melintasi wilayah Kabupaten Seluma, khususnya di Kecamatan Sukaraja. Trase atau alinemen yang pasti dari jalan rel kereta api masih memerlukan kajian teknis dan perencanaan oleh Pemerintah Pusat dan atau PT. KAI.

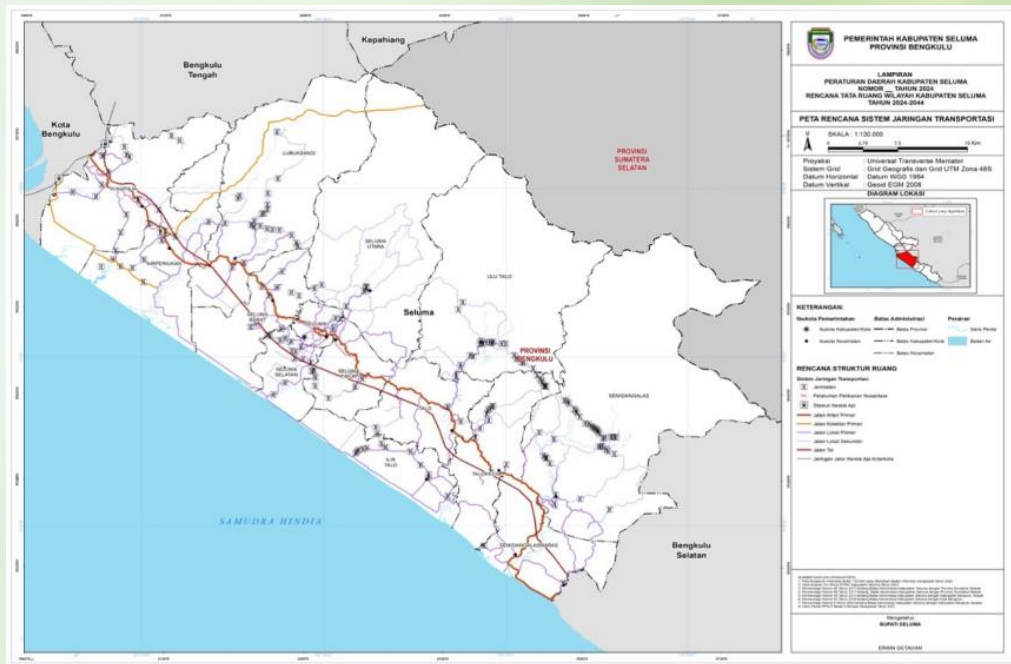
e) Jaringan Transportasi Laut

Dengan panjang garis pantai 70 Km serta konstelasi jaringan jalan dan sistem pusat pelayanan yang dikembangkan, maka ada prospek pengembangan pelabuhan di Kabupaten Seluma. Lokasi yang direkomendasikan untuk dikaji sebagai calon lokasi pelabuhan ini adalah di sekitar Pasar Seluma, dengan pertimbangan:

- Relatif jarak terdekat ke Tais sebagai pusat hirarki-1
- Dilalui oleh jaringan Jalan Kolektor Primer
- Relatif terletak di “tengah” pesisir pantai Kabupaten Seluma

Fungsi pelabuhan yang berpeluang dikembangkan tersebut dapat dimulai sebagai pelabuhan perikanan, dengan jangkauan pelayanan sampai ke penangkapan lini 3 (atau pada ZEE/Zona Ekonomi Eksklusif) ataupun sampai ke penangkapan di Samudera Indonesia. Selanjutnya sejalan dengan perkembangan angkutan barang kemudian dapat juga berfungsi sebagai pelabuhan umum, dengan hirarki sebagai pelabuhan “pengumpan” atau feeder di bawah Pelabuhan Utama Pulau Baai di Kota Bengkulu. Terdapat juga pengembangan Jetty di Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Seluma Barat, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Ilir Talo dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Lebih jelasnya mengenai rencana jaringan transportasi dapat di lihat pada Gambar di bawah ini.





Gambar III-4 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sumber: RTRW Kabupaten Seluma 2024-2044

2. Sistem Prasarana Energi dan Kelistrikan

Berdasarkan arahan RTR Pulau Sumatera, pengembangan system prasarana kelistrikan di Provinsi Bengkulu akan meliputi peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik: a. Peningkatan kapasitas atau pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tes dan Musi Ujan Mas di Provinsi Bengkulu b. Pengembangan potensi panas bumi di Tambang Sawah, Suban Gergok, Lebong Simpang di Provinsi Bengkulu. Sumber daya penyediaan energy listrik di Provinsi Bengkulu berasal dari 2 PLTA yaitu PLTA Danau Tes dan PLTA Musi. PLTA Danau Tes menghasilkan listrik dengan kapasitas 2 x 60 KW dan 4 x 4.410 KW (18.960 KW). Sedangkan PLTA Musi memiliki kapasitas yang mencapai 3 x 70.000 KW. PLTA Musi diresmikan pada tahun 2006. Berdasarkan data dari Dinas ESDM, Provinsi Bengkulu masih kekurangan pasokan listrik, sehingga masih banyak masyarakat di provinsi tersebut yang hingga kini belum menikmati layanan listrik. Di Provinsi Bengkulu saat ini masih terdapat 22 ribu kepala keluarga



(KK) yang berdomisili disekitar 300 desa yang belum mendapatkan pasokan aliran listrik.

Prinsip pengembangan sistem prasarana energi listrik di Kabupaten Seluma dalam jangka panjang adalah merupakan bagian atau terintegrasi dalam Sistem Jaringan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Menjelang sistem jaringan interkoneksi tersebut, maka untuk kebutuhan listrik sampai ke pedesaan dalam jangka pendek dan menengah dilakukan dengan pengembangan jaringan distribusi dan pembangkit listrik. Dalam pengembangan pembangkit tersebut dapat ditempuh dengan membangun PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) khususnya untuk lokasi yang potensial dengan sumber daya air di bagian hulu wilayah. Selain itu juga perlu untuk dikembangkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terutama pada desa-desa yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik.

Untuk rencana pengembangan sistem jaringan energi listrik antara lain pada desa-desa sebagai berikut:

1. Jaringan Transmisi Listrik
 - a. Desa Tanjung Agung dan Desa Padar Agung Kecamatan Seluma Barat
 - b. Desa Tenangan dan Desa rawasari di Kecamatan Seluma Timur
 - c. Desa Simpang di Kecamatan Seluma Utara
 - d. Desa Sungai Petai, Desa Lubuk Lagan dan Desa Napalan di Kecamatan Talo
 - e. Kecil
 - f. Desa Talang Durian-SP3-Kayu Elang-Gunung Megang Kecamatan Semidang
 - g. Alas
 - h. Desa Padang Kuas di Kecamatan Sukaraja



- i. Desa Air Payangan-Batu Tugu-Air Teras
 - j. Desa Maras Tengah-Padang Serunaian Kecamatan Semidang Alas Maras
 - k. Desa Sukaraja-Talang Alai- Dusun Tengah di Kecamatan Seluma
 - l. Kecamatan Ulu Talo
2. Pembangkit Tenaga Listrik
- a. PLTMH
 - Kecamatan Lubuk Sandi (Desa Cawang, Talang Giring, Padang Capo Ulu dan Padang Capo Ilir)
 - Kecamatan Seluma Utara (Desa Sekalak, Lubuk Resam, Talang Empat)
 - Kecamatan Ulu Talo (Desa Giri Nanto, Hargo Binangun, Mekar Jaya, Pagar Banyu, Simpu Rijang dan Muara Simpur)
 - Kecamatan Semidang Alas (Desa Kayu Elang, Rena Gajah Mati I dan Rena
 - Gajah Mati II, Desa Air Melancar, Desa Cugung Langgu dan Desa Mekar Sari Mukti)
 - Kecamatan Semidang Alas Maras (Desa Maras Tengah, Desa Genting Juara dan Pematang Riding)
 - b. Listrik Perdesaan
 - Kecamatan Seluma Barat (desa Tanjung Agung)
 - Kecamatan Seluma Timur (desa Tenangan dan Rawasari)
 - Kecamatan Seluma Utara (desa Simpang)
 - Kecamatan Talo Kecil (desa Sungai Petai dan Lubuk Lagan)
 - Kecamatan Semidang Alas (desa Talang Durian)
 - Kecamatan Sukaraja (desa Padang Kuas)
 - Kecamatan Ulu Talo
 - c. PLTS
 - Kecamatan Seluma Barat (desa Pagar Agung)



- Kecamatan Talo Kecil (desaNapalan)
- Kecamatan Ulu Talo (desa Giri Nanto, Muara Simpur)
- Kecamatan Semidang Alas Maras (desa Genting Juar)
- Kecamatan Semidang Alas (desa Air Melancar, Cugung Langgu dan Mekar Sari Mukti)

3. Sistem Prasarana Telekomunikasi

Telekomunikasi merupakan prasarana penting dalam mendukung kegiatan sosial- ekonomi masyarakat, kegiatan pemerintahan serta kegiatan lainnya. Penyediaan telepon sampai saat ini masih didominasi oleh PT. Telkom Tbk melalui penyediaan beberapa sentral telepon otomatis (STO) yang tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Seluma. Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan meliputi sistem kabel, sistem seluler dan sistem satelit. Prasarana telekomunikasi dikembangkan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, sehingga kebutuhan telekomunikasi dapat dipenuhi.

Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi di Kabupaten Seluma dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jaringan teristrial
 - a) Jaringan kabel telepon di wilayah perkotaan dan pedesaan
 - b) Jaringan nirkabel dengan pengembangan Base Transciver Station (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama berlokasi di: (1). Kecamatan Sukaraja; (2). Kecamatan Air Periukan; (3). Kecamatan Lubuk Sandi; (4). Kecamatan Seluma; (5). Kecamatan Seluma Barat; (6). Kecamatan Seluma Timur; (7). Kecamatan Seluma Selatan (8). Kecamatan Seluma Utara; (9). Kecamatan Talo; (10). Kecamatan Talo Kecil; (11). Kecamatan Ilir Talo; (12). Kecamatan Ulu Talo; (13). Kecamatan Semidang Alas; (14). Kecamatan Semidang Alas Maras



- c) Pengembangan dan peningkatan transmisi penyiaran televisi di seluruh kecamatan
 - d) Penyediaan akses internet untuk mendukung telemedicine yang di arahkan di setiap puskesmas
 - e) penyediaan akses internet go to school di arahkan di setiap sekolah
- 2) Jaringan satelit akan di kembangkan untuk wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Seluma



Gambar III-5 Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sumber: RTRW Kabupaten Seluma 2024-2044

4. Sistem Prasarana Sumber Daya Air

Rencana pengembangan sumberdaya air di kabupaten Seluma meliputi:

- 1) Rencana Jaringan sumber daya air lintas provinsi yang meliputi:
 - f) Pengembangan wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Bengkulu-Alas-Talo : (1). DAS Jenggalu; (2). DAS Nelas; (3). DAS Kungkai; (4). DAS Seluma; (5). DAS Penago; (6). DAS Talo; (7). DAS Alas; dan (8). DAS Maras

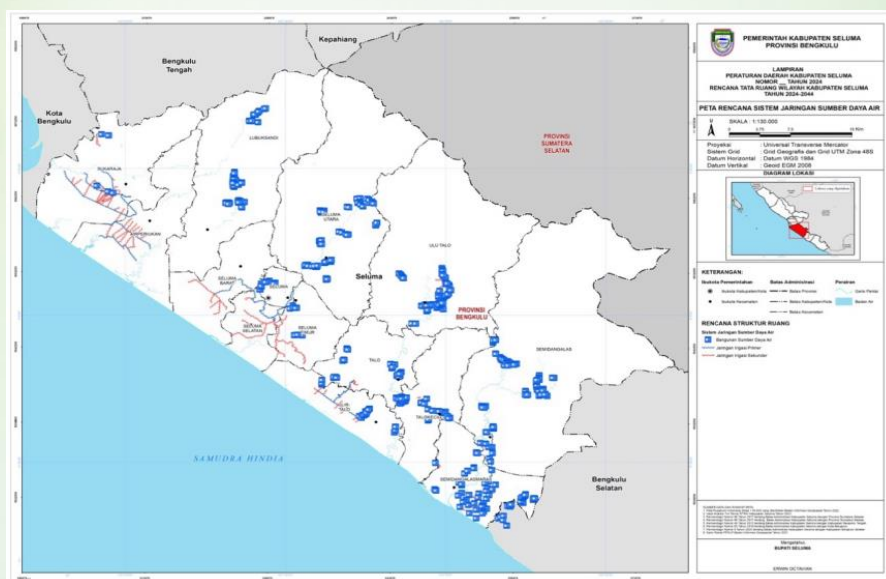


- g) Sistem Jaringan Irigasi yang meliputi: (1). daerah irigasi Air Riak Siabun (2). daerah irigasi Air Alas
- 2) Rencana Jaringan sumber daya air kabupaten yang meliputi:
 - a) Pengembangan Sumber Air meliputi: (1). Sungai Air Nelas Kecil, (2). Sungai air nelas Sungai air Keruh,(3). Sungai Air Ngalam, (4). Sungai Air Seluma, (5). Sungai Air Simpang, (6). Sungai Air Dingin, (7). Sungai Air Pilubang, (8). Sungai Air Pilubang Simpang Kanan dan Simpang Kiri, (9). Sungai Air Tanjung Aur, (10). Sungai Air Sindur, (11). Sungai Air Kungkai, (12). Sungai Air Penago, (13). Sungai Air Talo, (14). Sungai Air Alas, dan (15). Sungai Air Maras
 - b) Sistem Jaringan Irigasi meliputi: (1). Air Nelas/Jenggalu dan Air Sindur/Kungkai, melayani kawasan pertanian lahan basah yang terletak di Kecamatan Sukaraja dan AirPeriukan. (2). Air Seluma dan Air Ngalam, melayani kawasan pertanian lahan basah yang terletak di Kecamatan Seluma Selatan, Seluma Barat dan SelumaTimur. (3).Air Talo (termasuk Talo Kecil) dan Air Penago, melayani kawasan pertanian lahan basah yang terletak di Kecamatan Talo, Ilir Talo dan Talo Kecil. (4). Air Alas dan Air Maras, melayani kawasan pertanian lahan basah yang terletak di Kecamatan Semidang Alas dan Semidang AlasMaras.
- 3) Sistem Pengendali Banjir Sistem pengendali banjir di Kabupaten Seluma meliputi:
 - a) Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir diarahkan pada Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Talo, dan Kecamatan Semidang Alas Maras;
 - b) Pengembangan sistem pengamanan pantai di arahkan pada kecamatan Sukaraja Kecamatan Air Periukan, Kecamatan



Seluma Barat, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Talo Kecil dan Kecamatan Semidang Alas Maras

- c) Pengembangan sistem pengamanan sungai diarahkan pada kecamatan Sukaraja, Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Talo Kecil, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Lubuk Sandi, Kecamatan Seluma, Kecamatan Seluma Barat, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Seluma Timur dan Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Talo;
 - d) Pengembangan sistem pengendalian daya rusak di lengkapi sistem peringan dini di di seluruh Kabupaten Seluma.
- 4) Sistem Pengelolaan air baku meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah di seluruh wilayah Kabupaten Seluma



Gambar III-6 Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sumber: RTRW Kabupaten Seluma 2024-2044

- 5) Sistem pengamanan pantai meliputi pembangunan, rehabilitasi serta oprasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengaman pantai, seperti bangunan pemecah gelombang (breakwater)m sea wall, jetty di Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Air Periukan,



Kecamatan Seluma Barat, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Ilir Talo dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

5. Sistem Prasarana Lainnya

a) Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem penyediaan air minum (SPAM) diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 122 tahun 2015). Rencana pengembangan SPAM di Kabupaten Seluma terdiri dari sistem jaringan perpipaan dan rencana jaringan non perpipaan.

1) Rencana pengembangan sistem perpipaan

Wilayah pelayanan yang menurut pemanfaatan ruang dikategorikan sebagai perkotaan dan secara teknis hidrolis terjangkau oleh sistem perpipaan akan dilayani dengan jaringan perpipaan PDAM. Adapun kategori jaringan perpipaan PDAM yang akan dikembangkan berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan air adalah sebagai berikut: - Sistem Kota (Ibukota Kabupaten/skala kota kecil) - Sistem IKK (Ibukota Kecamatan). Rencana pengembangan jaringan perpipaan meliputi:

i. Pengembangan Unit Air baku:

- Air Nelas
- Air Sindur
- Air Suban
- Air Curug Mapah
- Air Pelompatan
- Air Melintang
- Air Sakalak
- Air Pilubang
- Air Simpang Kanan



- Air Dingin
- Air Talang Kudu
- Anak Sungai Ngalam
- Air Talo Ulu
- Air Talang Mekar
- Air Cugung
- Air Gaung
- Air Tunggang
- Air Talo Kecil
- Air Talo
- Air Bukit Tunjuk
- Air Alas
- Air Maras
- Air Gunung Mesir
- Air Maras
- Sungai Desa Pintu Layang
- Mata Air Buluh Mipis

ii. Pengembangan dan Pembangunan Unit Produksi:

Rencana Pengembangan Dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di rencanakan di Desa Puguk, Talang Kebun dan Tanjung Kuauw, Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Sungai Talo, Kecamatan Air Periukan desa Lubuk Juara (Sungai Air Sindur), Desa Rantau Panjang, Desa Kampai, Desa Suka Merindu dan Ds Girinanto;

Pengembangan Intake direncanakan pada desa Talang Beringin (Air Pilubang), Talang Kebun (air S. Suban), Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras, Sungai Talo, Kecamatan Air Periukan desa Lubuk Juara (Sungai Air Sindur), Desa Rantau Panjang (Anak Sungai



Maras), Desa Kampai (Sungai Bunut), Desa Suka Merindu (Sungai Talo Kecil) dan Ds Girinanto

Pembangunan Intake di rencanakan pada Air Keruh (SPAM IKK Sukaraja), Air Sindur (SPAM IKK Periukan), Air Pilubang (SPAM Kota), Air Sakakak (SPAM Kota), Air Melintang (SPAM Kota), Air Cabang Talo (SPAM IKK Ulu Talo), Air Talo Bunut (SPAM IKK Talo), Air Gunung Mesir (SAPAM IKK Semidang Alas) dan Air Maras (SPAM Pedesaan Kecamatan Semidang Alas Maras)

Pengembangan Unit Distribusi meliputi pengelolaan air minum Cabang Tais, Tanjung Kuauw Lubuk Sandi, Semidang Alas Maras, Ilir Talo, Sukaraja-Air Periukan, Semidang Alas, Talo, Talo Kecil, Ulu Talo

Pengembangan Unit Pelayanan yang meliputi:

SPAM Tais:

- Kecamatan Seluma Barat
- Kecamatan Seluma
- Kecamatan Seluma Selatan
- Kecamatan Seluma Timur
- Kecamatan Seluma Utara

SPAM IKK Tanjung Kuauw Lubuk Sandi:

- Kecamatan Seluma Barat
- Kecamatan Lubuk Sandi
- Desa Talang Kebun

SPAM IKK SAM (Kembang Mumpo) di Kecamatan Semidang Alas Maras SPAM IKK Ilir Talo di Kecamatan Ilir Talo

SPAM IKK Sukaraja-Air Periukan;

- Kecamatan Air Periukan
- Kecamatan Sukaraja

SPAM IKK Semidang Alas



- Kecamatan Semidang Alas
- Kecamatan Semidang Alas Maras

SPAM IKK Talo di Kecamatan Talo

SPAM IKK Talo Kecil di Kecamatan Talo Kecil

SPAM IKK Ulu Talo di Kecamatan Ulu Talo

iii. Jaringan Perpipaan Non PDAM (SPAM Perdesaan) Wilayah pelayanan yang secara letak geografis, dan teknis hidrolis kurang efisien dan ekonomis bisa dilayani oleh jaringan perpipaan PDAM, akan dilayani oleh sistem jaringan perpipaan non PDAM, misalnya melalui SPAM Perdesaan baik melalui dana APBN/ADD/APBD atau program Pamsimas.

iv. Bukan Jaringan Perpipaan

Wilayah pelayanan yang tidak terlayani oleh sistem jaringan perpipaan baik perpipaan PDAM maupun non PDAM akan dilayani dengan sistem Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi.

b) Sistem Pengelolaan Limbah

Sistem pengolahan air limbah di Kabupaten Seluma meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestic skala lingkungan dengan membangun septiktank individual dan septiktan komunal;
- b. pembangunan septictan komunal diarahkan Kecamatan Sukaraja (Kelurahan Babatan), Kecamatan Seluma Utara (Kelurahan Puguk), Kecamatan Seluma Timur (Kelurahan Bunga Mas)
- c. sistem pengelolaan limbah skala kawasan dengan Pengembangan dan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) diarahkan ;
 - Kecamatan Sukaraja (Desa Padang Pelawi, Kelurahan Sukaraja, Desa Bukit Peninjauan 1, Desa Sidosan)
 - Kecamatan Air Periukan (Desa Kungkai Baru)
 - Kecamatan Lubuk Sandi (Desa Dusun Tengah)



- Kecamatan Talo Kecil (Desa Talang Benuang, Desa Sukamerindu)
 - Kecamatan Seluma Utara (Kelurahan Puguk, Desa Talang Beringin)
 - Kecamatan Ilir Talo (Desa Tanah Abang)
 - Kecamatan Semidang Alas (Desa Bandung Agung, Desa Petai Kayu)
 - Kecamatan Semidang Alas Maras (Desa Gunung Kembang)
 - Kecamatan Seluma Selatan (Desa Tanjungan)
 - Kecamatan Seluma Barat (Desa Lubuk Lagan)
- d. Pengembangan IPAL B3
- e. Penyediaan sarana Penyediaan kendaraan pengangkut tinja
- f. Penyuluhan dan monitoring pengelolaan limbah kepada masyarakat

c) Sistem Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah sebagian besar direncanakan merupakan kawasan permukiman mengacu pada Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman (SNI 19- 3242-1994), Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan (SNI 19-2454-2002) terutama mengenai persyaratan hukum dan persyaratan teknis operasionalnya. rencana sistem pengelolaan sampah di kabupaten Seluma meliputi:

- a. mengoptimalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Seluma sebagai tempat proses pengelolaan dan pembuangan akhir sampah terletak di Kecamatan Seluma Timur Desa Talangsali dan menggunakan sistem open dumping;
- b. meningkatkan pelayanan sistem pengangkutan sampah;
- c. penambahan sarana dan prasarana pengangkut sampah
- d. pengelolaan sampah melalui model sanitary landfill dan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle)
- e. pembangunan TPS tersebar di seluruh Kabupaten Seluma.



d) Rencana Ruang dan Jalur Evakuasi

i. Jalur Evakuasi bencana

- Kecamatan Sukaraja
- Kecamatan Air Periukan
- Kecamatan Lubuk Sandi
- Kecamatan Seluma
- Kecamatan Seluma Barat
- Kecamatan Seluma Timur
- Kecamatan Seluma Selatan
- Kecamatan Seluma Utara
- Kecamatan Talo
- Kecamatan Talo Kecil
- Kecamatan Ilir Talo
- Kecamatan Ulu Talo
- Kecamatan Semidang Alas
- Kecamatan Semidang Alas Maras
- pemanfaatan jaringan jalan dan sungai sebagai jalur evakuasi

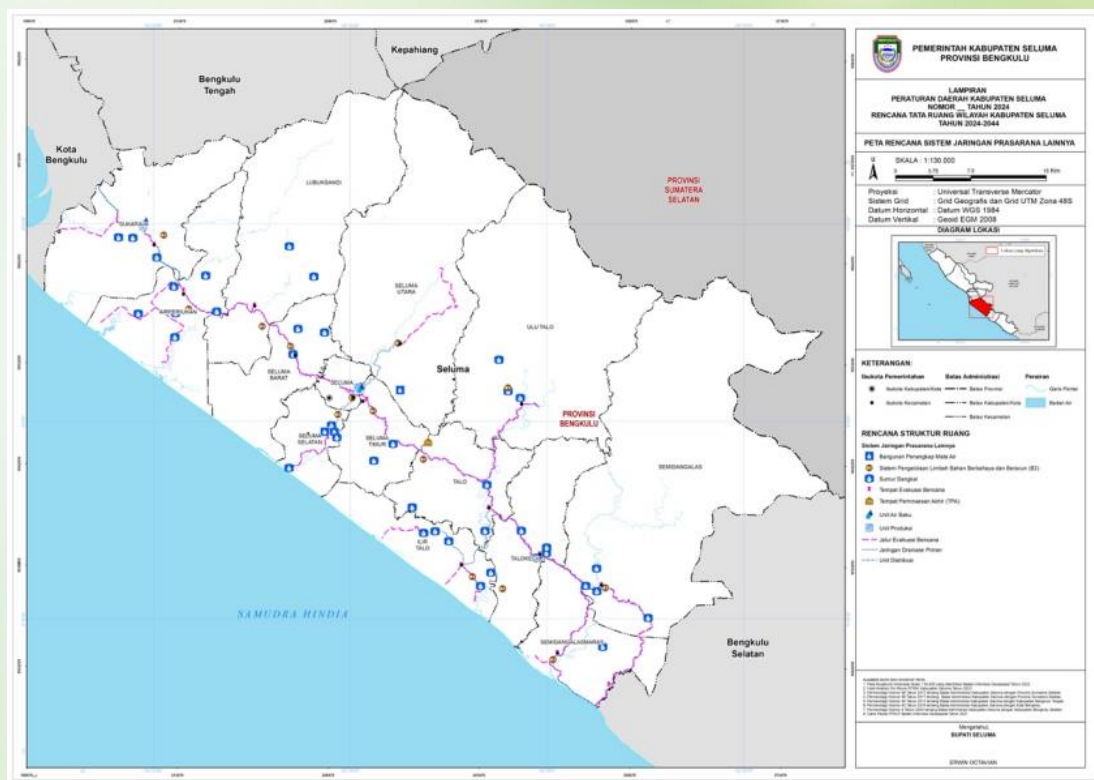
ii. Ruang Evakuasi bencana

- Pusat Evakuasi
 - Kecamatan Sukaraja
 - Kecamatan Air Periukan
 - Kecamatan Seluma
 - Kecamatan Talo
 - Kecamatan Semidang Alas
- Pusat Kumpul Sementara
 - Kecamatan Sukaraja
 - Kecamatan Air Periukan
 - Kecamatan Lubuk Sandi
 - Kecamatan Seluma



- Kecamatan Seluma Barat
 - Kecamatan Seluma Timur
 - Kecamatan Seluma Selatan
 - Kecamatan Seluma Utara
 - Kecamatan Talo
 - Kecamatan Talo Kecil
 - Kecamatan Ilir Talo
 - Kecamatan Ulu Talo
 - Kecamatan Semidang Alas
 - Kecamatan Semidang Alas Maras
- Penyediaan ruang evakuasi bencana dilaksanakan di kantor pemerintahan, sekolah, ruang terbuka hijau, dan fasilitas sosial dan umum; dan
 - kawasan ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evaluasi dan petunjuk arah serta sarana dan prasarana dasar.





Gambar II-59. Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sumber: RTRW Kabupaten Seluma 2024-2044

Tabel III-12 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Terwujudnya Kabupaten Seluma Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman						
MISI 1: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter	Mewujudkan budaya yang memiliki nilai-nilai agama melalui seni dan budaya			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
		Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya		Indeks Warisan Budaya (Angka)		
			Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	Mengurangi Risiko Bencana			Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
		Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengakuan tradisional dan MHA yang terkait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			B3)		B3)	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatkan Nilai tambah Pariwisata			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
		Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
MISI 2: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan serta	Meningkatkan Kemandirian Desa			Indeks Desa Membangun (IDM) ()		
		Meningkatnya Desa Maju		Persentase Desa Maju (%)		
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)				Persentase PKK aktif (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase BUM Desa Maju (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah Desa Mandiri (Desa)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah desa tertinggal (Desa)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
				Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Persentase Desa yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dikembangkan ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis mayarakat		2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
	Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan Kawasan-kawasan potensial dan strategis			Indeks Infrastruktur (Angka)		
		Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Untuk Menunjang Pemenuhan Pelayanan Dasar dan pengembangan ekonomi		Indeks Infrastruktur (Angka)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B (Unit)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah Garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Tata		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Angka)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Kelola Pemerintahan Daerah				
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
				Indeks Evaluasi SPBE (Indeks)		
				Indeks Penerapan Sistem Merit (Angka)		
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
		Meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
		Meningkatkan Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya evaluasi SAKIP PD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya informasi administrasi kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Angka)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Angka)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Persentase Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase data ASN yang sesuai standar (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pelayanan catatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya Kualitas Pengukuran Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang fisprya yang tercapai (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang ekososbud yang tercapai (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perkonomian dan SDA	persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang ekososbud yang tercapai (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan ()	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajemen dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat struktural dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan pengembangan	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			kompetensi teknis	Kompetensi Teknis (Persentase)	MANUSIA	
			meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya peranan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya tata kella akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstifikasi dan identifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakan lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Nilai Akip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
MISI 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan, dan berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				Rasio Gini (Indeks)		
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Utama di Kabupaten Seluma		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Utama (%)		
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Dokumen)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SOM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			meningkatkan pemanfaatan industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		Meningkatnya nilai investasi		Nilai Investasi Daerah (PMA) (Juta Rupiah)		
				Nilai Investasi Daerah (PMDN) (Juta Rupiah)		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan			Indeks Modal Manusia (Indeks)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Pemberdayaan perempuan					
		Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya kualitas partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terselenggaranya bahasa dan sastra	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekstrakurikuler kesenian (%)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
			meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminannya pemenuhan hak semua anak secara	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			komperhensif			
MISI 4: Mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram, dan bahagia	Mengentaskan Kemiskinan			Tingkat Kemiskinan ((%))		
		Menjamin Perlindungan Sosial		Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)		
				Indeks Keparahan Kemiskina (Indeks)		
			Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kawasan perrnukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Miskin (%)		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) anak terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya tata kelola pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Mengurangi Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	Meningkatkan derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat			Indeks Keluarga Sehat (Angka)		
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)		
				Persentase kecamatan dengan status IKS sehat (%)		
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					HUKUM ADAT	
				Persentase PKK aktif (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan HAK, serta perlindungan anak dan perempuan	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sehat	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya penggunaan data gender dan anak		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PENDUDUK	



BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma dirancang sebagai instrumen utama untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah kepala daerah terpilih. Program ini menjadi arah operasional kebijakan pembangunan selama lima tahun dan menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana sektoral yang selaras dengan tujuan strategis. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab menjalankan program sesuai dengan tugas dan kewenangannya, baik untuk urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan, maupun urusan pilihan yang mendukung potensi unggulan daerah.

Pelaksanaan program mencakup berbagai bidang seperti penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan sosial dan budaya. Semua pelaksanaan program dijalankan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan dukungan pembiayaan dari APBD, dana transfer pusat dan provinsi, Dana Desa, serta sumber lainnya yang sah. Pengalokasian anggaran disusun secara proporsional berdasarkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, serta prinsip keadilan antarwilayah kecamatan dan desa.





Tabel IV-1 Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Seluma

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					232.021.393.070,00		232.340.223.184,72		232.660.627.945,35		232.982.577.874,50		233.306.117.794,83	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					167.905.279.320,00		167.909.940.477,72		167.914.636.849,35		167.919.331.422,50		167.924.061.441,83	
Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	68.44	68.40	69.00	167.905.279.320,00	69.00	167.909.940.477,72	70.00	167.914.636.849,35	70.00	167.919.331.422,50	70.00	167.924.061.441,83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
														yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					63.716.113.750,00		64.028.322.707,00		64.342.061.492,00		64.657.337.592,00		64.974.158.541,00	
Meningkatnya kualitas partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	67.5	67.5	68	63.716.113.750,00	68	64.028.322.707,00	68	64.342.061.492,00	68	64.657.337.592,00	68	64.974.158.541,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dgiam	95	95	95.5		95.6		95.6		95.6		95.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pendidikan dasar (%)													Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	76.5	76.5	77		77		77		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	38	40	40		40		41		41		42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100.000.000,00		100.490.000,00		100.982.401,00		101.477.215,00		101.974.453,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	80	80	85	100.000.000,00	85	100.490.000,00	90	100.982.401,00	90	101.477.215,00	90	101.974.453,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					100.000.000,00		100.490.000,00		100.982.401,00		101.477.215,00		101.974.453,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	76	76	77	100.000.000,00	78	100.490.000,00	79	100.982.401,00	79	101.477.215,00	79	101.974.453,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					200.000.000,00		200.980.000,00		201.964.802,00		202.954.430,00		203.948.906,00	Pendidikan
Terselenggaranya bahasa dan sastra	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.980.000,00	100	201.964.802,00	100	202.954.430,00	100	203.948.906,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					186.890.999.545,00		187.177.506.245,80		186.721.448.683,53		187.080.992.110,78		187.314.619.718,99	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					110.262.189.620,00		110.306.529.729,80		109.601.087.107,53		109.645.862.812,78		109.690.857.916,99	
Meningkatnya evaluasi SAKIP PD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	0	0	0	110.262.189.620,00	0	110.306.529.729,80	0	109.601.087.107,53	0	109.645.862.812,78	0	109.690.857.916,99	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	65	66	67		68		69		70		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					75.264.819.495,00		75.501.282.533,00		75.744.936.092,00		76.053.944.231,00		76.236.788.926,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	92	92	92	75.264.819.495,00	91	75.501.282.533,00	90	75.744.936.092,00	90	76.053.944.231,00	89	76.236.788.926,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	25,27	24,23	23,22		22,21		21,20		20,19		19,18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	98	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	96,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru	94,57	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	lahir (%)													
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelaya- nan kesehatan sesuai standar (%)	52.58	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	92.7	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	67.61	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	45.88	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	89.29	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	65.38	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	75.26	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	64.02	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	0.0004	0.0004	0.0004		0.0005		0.0005		0.0006		0.0007		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					520.999.430,00		522.572.327,00		524.152.932,00		525.741.280,00		527.337.414,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	5	10	25	520.999.430,00	25	522.572.327,00	25	524.152.932,00	25	525.741.280,00	25	527.337.414,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	75	80	83		85		87		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					391.263.000,00		393.180.189,00		395.106.772,00		397.042.794,00		398.988.305,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	0	0	100	391.263.000,00	100	393.180.189,00	100	395.106.772,00	100	397.042.794,00	100	398.988.305,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					451.728.000,00		453.941.467,00		456.165.780,00		458.400.993,00		460.647.157,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	0	40	451.728.000,00	50	453.941.467,00	60	456.165.780,00	70	458.400.993,00	80	460.647.157,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN					58.982.943.241,00		55.002.049.795,00		55.086.971.854,00		55.157.749.509,00		55.179.424.851,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK T DAERAH PENANGG NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENATAAN RUANG														
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.909.331.651,00		10.912.431.936,00		10.915.547.413,00		10.918.678.156,00		10.921.824.241,00	
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	72.41	72.45	72.65	10.909.331.651,00	73.00	10.912.431.936,00	73.25	10.915.547.413,00	73.50	10.918.678.156,00	73.75	10.921.824.241,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.010.000.000,00		1.010.000.000,00		1.010.000.000,00		1.010.000.000,00		1.010.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0	0	100	5.010.000.000,00	100	1.010.000.000,00	100	1.010.000.000,00	100	1.010.000.000,00	100	1.010.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	39.25	39.33	40.51		41.72		42.98		44.27		45.59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					446.000.000,00		446.000.000,00		446.000.000,00		446.000.000,00		446.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.5	2.84	7.68	446.000.000,00	9.73	446.000.000,00	10.98	446.000.000,00	11.91	446.000.000,00	12.00	446.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.5	2.84	7.68		9.73		10.98		11.91		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					-		-		-		50.000.000,00		50.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	0		-		-		-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					320.125.380,00		336.131.649,00		352.938.231,00		370.585.143,00		389.114.400,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	9.75	9.75	9.95	320.125.380,00	10.14	336.131.649,00	10.35	352.938.231,00	10.55	370.585.143,00	10.76	389.114.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	50	-	70	-	75	-	80	-	85	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	25	25	30	1.000.000.000,00	32	1.000.000.000,00	33	1.000.000.000,00	35	1.000.000.000,00	37	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN					40.887.486.210,00		40.887.486.210,00		40.887.486.210,00		40.887.486.210,00		40.887.486.210,00	
Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	35,29	35,29	36,25	40.887.486.210,00	37,25	40.887.486.210,00	38,25	40.887.486.210,00	39,25	40.887.486.210,00	40,25	40.887.486.210,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					260.000.000,00		260.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	5	5	5,5	260.000.000,00	5,75	260.000.000,00	6	325.000.000,00	6,25	325.000.000,00	6,5	325.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	65	67	69	150.000.000,00	71	150.000.000,00	72	150.000.000,00	73	150.000.000,00	74	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					8.098.026.861,00		6.920.782.500,00		6.933.875.659,00		6.946.627.904,00		6.958.961.132,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.316.834.331,00		6.139.437.127,00		6.152.376.694,00		6.164.974.593,00		6.177.152.720,00	
Nilai Akip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	69,86	70,3	70,74	7.316.834.331,00	71,18	6.139.437.127,00	71,62	6.152.376.694,00	72,62	6.164.974.593,00	72,5	6.177.152.720,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Pemukiman
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					25.160.030,00		25.283.314,00		25.407.202,00		25.531.698,00		25.656.803,00	
Terpenuhiya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	25.160.030,00	100	25.283.314,00	100	25.407.202,00	100	25.531.698,00	100	25.656.803,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					6.032.500,00		6.062.059,00		6.091.763,00		6.121.613,00		6.151.609,00	
Meningkatnya Kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	48.02	50.67	53.32	6.032.500,00	55.97	6.062.059,00	58.62	6.091.763,00	61.27	6.121.613,00	63.92	6.151.609,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	89.56	89.66	89.76	450.000.000,00	89.86	450.000.000,00	89.95	450.000.000,00	90.05	450.000.000,00	90.15	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	62.50	87.50	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					18.809.426.798,00		18.842.014.210,00		20.384.663.298,00		18.947.374.366,00		19.010.147.633,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.949.806.802,00		17.958.358.120,00		19.466.951.337,00		17.975.586.662,00		17.984.264.214,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD (BPBD)	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	70.81	70.83	70.86	4.655.438.910,00	70.89	4.658.030.625,00	70.92	4.660.635.037,00	70.95	4.663.252.213,00	70.98	4.665.882.214,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD (SATPOL PP, DAMKAR)	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	63.07	64.64	66.21	13.294.367.892,00	67.78	13.300.327.495,00	69.35	14.806.316.300,00	70.92	13.312.334.449,00	72.5	13.318.382.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					148.880.621,00		169.434.093,00		199.990.274,00		250.549.183,00		301.110.829,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	85	90	90,45	38.598.075,00	92,25	38.787.206,00	96	38.977.263,00	96,25	39.168.252,00	100	39.360.176,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	89.29	74.355.116,00	89.29	74.719.457,00	96.08	75.085.581,00	96.08	75.453.501,00	96.08	75.823.223,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masvarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	95	35.927.430,00	96.5	35.927.430,00	98	35.927.430,00	99	35.927.430,00	100	35.927.430,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	14.28	28.57	-	42.85	20.000.000,00	71,42	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA					620.468.945,00		623.509.242,00		626.564.439,00		629.634.603,00		632.719.813,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Penyelenggaraan Tranitbumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)	0	85	87	15.000.000,00	90	15.073.500,00	92	15.147.360,00	95	15.221.582,00	95	15.296.168,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	25	25	100		100		100		100		100		Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat					303.823.115,00		305.311.848,00		306.807.877,00		308.311.235,00		309.821.960,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	25	25	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana					301.645.830,00		303.123.894,00		304.609.202,00		306.101.786,00		307.601.685,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas/Badan yang menangani Bidang ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					90.270.430,00		90.712.755,00		91.157.248,00		91.603.918,00		92.052.777,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	90.270.430,00	100	90.712.755,00	100	91.157.248,00	100	91.603.918,00	100	92.052.777,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	11.94	15	15		15		15		15		15		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	21.42	21.42	35.71		50		64.28		78.67		92.85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.233.237.785,00		5.201.895.103,00		5.271.292.322,00		5.347.327.349,00		5.445.662.478,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.062.034.360,00		4.064.118.199,00		4.066.212.245,00		4.068.316.558,00		4.070.431.179,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	67.10	67.10	67.15	4.062.034.360,00	67.40	4.064.118.199,00	67.60	4.066.212.245,00	68.10	4.068.316.558,00	68.80	4.070.431.179,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					318.109.000,00		319.667.734,00		321.234.106,00		322.808.153,00		324.389.913,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	20	40	50	318.109.000,00	55	319.667.734,00	75	321.234.106,00	85	322.808.153,00	100	324.389.913,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	5	10	15		20		25		35		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					41.742.000,00		41.946.536,00		42.152.074,00		42.358.619,00		42.566.176,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlarang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	5.62	8.50	10.88	41.742.000,00	12.40	41.946.536,00	14.90	42.152.074,00	16.10	42.358.619,00	20,00	42.566.176,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) anak terlarang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	5.00	6.80	8.50		9,00		10,00		15,00		20,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlarang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.7	4.40	5.80		6.80		8.50		9,00		10.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	10	10	15		15		20		20		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					204.330.000,00		204.351.217,00		204.372.538,00		204.393.963,00		204.415.494,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100	100	204.330.000,00	100	204.351.217,00	100	204.372.538,00	100	204.393.963,00	100	204.415.494,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	11.46	15.55	17.77		19.25		20.88		22.10		25.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	5	10	12		15		20		25		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					552.022.425,00		516.811.417,00		582.321.359,00		654.450.056,00		733.859.716,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	552.022.425,00	100	516.811.417,00	100	582.321.359,00	100	654.450.056,00	100	733.859.716,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.159.449.543,00		4.162.310.511,00		4.215.195.700,00		4.268.105.430,00		4.321.040.036,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.792.399.043,00		3.795.260.011,00		3.798.145.200,00		3.801.054.930,00		3.803.989.536,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Nilai Akip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	62.74	62.74	63.99	3.792.399.043,00	65.27	3.795.260.011,00	66.58	3.798.145.200,00	69.27	3.801.054.930,00	70.00	3.803.989.536,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					2.000.000,00		2.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	65	65	65	2.000.000,00	70	2.000.000,00	75	52.000.000,00	80	52.000.000,00	80	52.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					22.024.000,00		22.024.000,00		22.024.000,00		22.024.000,00		22.024.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	65	65	65	22.024.000,00	70	22.024.000,00	75	22.024.000,00	80	22.024.000,00	80	22.024.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					23.026.500,00		23.026.500,00		23.026.500,00		73.026.500,00		123.026.500,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	55	55	55	23.026.500,00	55	23.026.500,00	55	23.026.500,00	55	73.026.500,00	55	123.026.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	100	100	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.593.459.998,00		5.596.141.859,50		5.598.836.864,00		5.601.545.071,00		5.604.266.551,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.266.940.798,00		5.268.022.715,00		5.269.109.935,00		5.270.202.480,00		5.271.300.382,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64.21	64.21	65.21	5.266.940.798,00	66.21	5.268.022.715,00	67.21	5.269.109.935,00	68.21	5.270.202.480,00	69.21	5.271.300.382,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64.21	64.21	65.21		66.21		67.21		68.21		69.21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
					5.579.400,00		5.606.739,00		5.634.212,00		5.661.820,00		5.689.563,00	
	meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	85.80	85.80	86.80	5.579.400,00	87.80	5.606.739,00	88.80	5.634.212,00	89.80	5.661.820,00	90.80	5.689.563,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55.15	55.15	56.85		58.55		60.25		61.95		63.65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					87.929.050,00		88.359.902,50		88.792.866,00		89.227.951,00		89.665.168,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	87.929.050,00	100	88.359.902,50	100	88.792.866,00	100	89.227.951,00	100	89.665.168,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					32.040.000,00		32.196.996,00		32.354.761,00		32.513.300,00		32.672.615,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan HAK, serta perlindungan anak dan perempuan	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2	2	3	32.040.000,00	4	32.196.996,00	5	32.354.761,00	6	32.513.300,00	7	32.672.615,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penggunaan data gender dan anak														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)					164.795.750,00		165.603.249,00		166.414.706,00		167.230.138,00		168.049.565,00	
Terjaminannya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	75	75	76	164.795.750,00	77	165.603.249,00	78	166.414.706,00	79	167.230.138,00	80	168.049.565,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					36.175.000,00		36.352.258,00		36.530.384,00		36.709.382,00		36.889.258,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelataran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	36.175.000,00	100	36.352.258,00	100	36.530.384,00	100	36.709.382,00	100	36.889.258,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.447.439.522,00		3.599.207.589,00		3.600.984.334,00		3.602.769.753,00		3.604.563.938,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.282.096.447,00		3.283.054.332,00		3.284.016.926,00		3.284.984.206,00		3.285.956.242,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64.16	64.66	66.16	3.282.096.447,00	66.66	3.283.054.332,00	67.16	3.284.016.926,00	67.66	3.284.984.206,00	68.16	3.285.956.242,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					118.375.070,00		268.955.109,00		269.537.989,00		270.123.724,00		270.712.330,00	
Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	71.03	72.01	73.5	118.375.070,00	75	268.955.109,00	80	269.537.989,00	90	270.123.724,00	98	270.712.330,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					4.930.705,00		4.954.865,00		4.979.144,00		5.003.542,00		5.028.059,00	
Meningkatnya penanganan kerwanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	5.4	5.2	5	4.930.705,00	4.8	4.954.865,00	4.6	4.979.144,00	4.4	5.003.542,00	4.2	5.028.059,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					42.037.300,00		42.243.283,00		42.450.275,00		42.658.281,00		42.867.307,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	25	30	35	42.037.300,00	45	42.243.283,00	50	42.450.275,00	60	42.658.281,00	70	42.867.307,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					560.040.120,00		560.040.120,00		660.040.120,00		660.040.120,00		660.040.120,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00	
Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah Garapan	Persentase Terseselekannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	15	13	13	505.040.120,00	13	505.040.120,00	13	505.040.120,00	17	505.040.120,00	17	505.040.120,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan					-		-		-		-		-	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tersedianya tanah lokasi pembangunan aset pemda	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Sertunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Persentase Desa yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dikembangkan ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat														
Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	2	3	25.000.000,00	4	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	10	15	17	20.000.000,00	17	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	12	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					-		-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya terbit pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	0	0		0		0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					8.480.030.543,00		8.684.766.005,00		8.489.731.919,00		8.594.750.282,00		8.778.870.713,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.304.804.103,00		7.309.342.013,00		7.313.902.157,00		7.318.484.644,00		7.323.089.592,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64.45	65.79	67.13	7.304.804.103,00	68.48	7.309.342.013,00	69.82	7.313.902.157,00	71.16	7.318.484.644,00	72.5	7.323.089.592,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64.45	65.79	67.13		68.48		69.82		71.16		72.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64.45	65.79	67.13		68.48		69.82		71.16		72.5		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk mengitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0	0			0		0		0		100	179.046.540,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	75.04	75.04	75.24	100.000.000,00	75.44	100.000.000,00	75.64	100.000.000,00	75.84	100.000.000,00	75.90	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	73.10	73.10	73.40		73.70		74.00		74.30		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)					22.357.640,00		22.467.192,00		22.577.282,00		22.687.910,00		22.799.081,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Persentase RTH	Persentase RTH (Persentase)	78	86	90	22.357.640,00	92	22.467.192,00	94	22.577.282,00	96	22.687.910,00	98	22.799.081,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					52.868.800,00		52.956.800,00		53.252.480,00		53.577.728,00		53.935.500,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	52.868.800,00	100	52.956.800,00	100	53.252.480,00	100	53.577.728,00	100	53.935.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	0	0	55	50.000.000,00	60	50.000.000,00	63	50.000.000,00	65	50.000.000,00	70	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH											100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengakuan tradisional dan MHA yang terkait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	0		0		0		80	100.000.000,00	90	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					950.000.000,00		1.150.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (point)	0	0	50,25	950.000.000,00	60	1.150.000.000,00	65,05	950.000.000,00	70,5	950.000.000,00	80	950.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (point)	0	0	50,25		60		65,05		70,5		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL					5.819.901.406,00		5.203.669.998,00		5.207.457.053,00		5.211.262.666,00		5.215.086.928,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.374.601.406,00		4.576.262.998,00		4.577.932.729,00		4.579.610.643,00		4.581.296.780,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	69	70.19	70.20	5.374.601.406,00	70.22	4.576.262.998,00	70.24	4.577.932.729,00	70.26	4.579.610.643,00	70.30	4.581.296.780,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					410.000.000,00		412.009.000,00		414.027.844,00		416.056.581,00		418.095.258,00	
Meningkatnya kualitas pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	100	100	100	410.000.000,00	100	412.009.000,00	100	414.027.844,00	100	416.056.581,00	100	418.095.258,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	85	90	95		95		97		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIIL					10.000.000,00		100.049.000,00		100.098.240,00		100.147.721,00		100.197.445,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan catatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	97	97.5	98.3	10.000.000,00	98.5	100.049.000,00	98.9	100.098.240,00	99	100.147.721,00	100	100.197.445,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	98	98.3	98.5		98.9		99		99.5		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	97	97.5	98		98.5		98.9		99.5		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	97	97.5	98		98.5		98.9		99.3		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					10.000.000,00		100.049.000,00		100.098.240,00		100.147.721,00		100.197.445,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya informasi administrasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	90	92	94	10.000.000,00	95	100.049.000,00	96	100.098.240,00	98	100.147.721,00	100	100.197.445,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	2	2	2		3		4		5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	90	92	93	15.300.000,00	94	15.300.000,00	95	15.300.000,00	97	15.300.000,00	100	15.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.185.378.386,00		6.249.425.179,00		6.314.446.242,00		6.429.741.133,00		6.545.010.477,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.407.897.712,00		3.408.334.853,00		3.409.779.575,00		3.411.231.109,00		3.412.689.755,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	74.86	75.63	76.71	3.407.897.712,00	78.89	3.408.334.853,00	79.20	3.409.779.575,00	80.50	3.411.231.109,00	81.00	3.412.689.755,00	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					-		50.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	0	1	2	-	3	50.000.000,00	4	100.000.000,00	5	200.000.000,00	6	300.000.000,00	
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	0	0	0		1		2		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.008.046.455,00		2.017.885.881,00		2.027.673.521,00		2.037.709.611,00		2.047.694.387,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase BUM Desa Maju (Persentase)	15	16	17	2.008.046.455,00	18	2.017.885.881,00	19	2.027.673.521,00	20	2.037.709.611,00	21	2.047.694.387,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
	Jumlah Desa Mandiri (Desa)	1	1	2		2		2		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
	Jumlah desa tertinggal (Desa)	11	10	9		8		7		6		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					769.434.219,00		773.204.445,00		776.993.146,00		780.800.413,00		784.626.335,00	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	90	90	90	769.434.219,00	95	773.204.445,00	100	776.993.146,00	100	780.800.413,00	100	784.626.335,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase PKK aktif (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					8.034.669.600,00		8.023.794.481,00		8.063.111.074,00		8.102.620.318,00		8.142.323.158,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					59.797.200,00		9.845.206,00		9.893.448,00		9.941.926,00		9.990.641,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.41	2.41	2.31	59.797.200,00	2.21	9.845.206,00	2.11	9.893.448,00	2.01	9.941.926,00	1.91	9.990.641,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.97	2.97-2.78	2.77-2.58		2.57-2.38		2.37-2.18		2.17-1.98		1.97-1.97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.716.400.000,00		4.739.510.360,00		4.762.733.961,00		4.786.071.357,00		4.809.523.107,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	65.9	66	66	4.716.400.000,00	66	4.739.510.360,00	66.1	4.762.733.961,00	66.1	4.786.071.357,00	66.1	4.809.523.107,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	14.8	14.5	14.2		13.9		13.6		13.3		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					3.258.472.400,00		3.274.438.915,00		3.290.483.665,00		3.306.607.035,00		3.322.809.410,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sehat	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	75.60	75.60	75.80	3.258.472.400,00	75.90	3.274.438.915,00	76.10	3.290.483.665,00	76.20	3.306.607.035,00	76.22	3.322.809.410,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
JALAN (LLAJ)														
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B (Unit)	0	0	0	245.000.000,00	1	245.000.000,00	1	245.000.000,00	1	245.000.000,00	1	245.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.369.479.357,00		8.372.553.029,00		8.375.641.765,00		8.378.745.632,00		8.381.864.710,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.369.479.357,00		5.372.553.029,00		5.375.641.765,00		5.378.745.632,00		5.381.864.710,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	60,91	62,74	64,62	5.369.479.357,00	66,56	5.372.553.029,00	68,55	5.375.641.765,00	70,61	5.378.745.632,00	72,73	5.381.864.710,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	55	57	60	1.000.000.000,00	61	1.000.000.000,00	61.5	1.000.000.000,00	62	1.000.000.000,00	62.5	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	50	51.50	53.05	2.000.000.000,00	54.64	2.000.000.000,00	56.28	2.000.000.000,00	57.96	2.000.000.000,00	59.70	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	44.44	46.30	48.15		50.00		51.85		53.70		55.56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.001.227.456,00		5.002.391.794,00		5.003.561.837,00		5.004.737.615,00		5.005.919.154,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.734.597.456,00		4.735.435.307,00		4.736.277.263,00		4.737.123.347,00		4.737.973.575,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64	66.07	66.8	4.734.597.456,00	66.9	4.735.435.307,00	67	4.736.277.263,00	67.5	4.737.123.347,00	67.7	4.737.973.575,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	25	60	70	200.000.000,00	90	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					7.290.000,00		7.325.721,00		7.361.617,00		7.397.689,00		7.433.938,00	
Meningkatnya kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	4	5	5	7.290.000,00	5	7.325.721,00	5	7.361.617,00	5	7.397.689,00	5	7.433.938,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA					9.750.000,00		9.797.775,00		9.845.784,00		9.894.028,00		9.942.509,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	5	5	5	9.750.000,00	5	9.797.775,00	5	9.845.784,00	5	9.894.028,00	5	9.942.509,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					49.590.000,00		49.832.991,00		50.077.173,00		50.322.551,00		50.569.132,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	5	5	5	49.590.000,00	5	49.832.991,00	5	50.077.173,00	5	50.322.551,00	5	50.569.132,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.267.595.744,00		5.270.067.007,00		5.272.500.138,00		5.274.945.184,00		5.277.402.217,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.686.495.744,00		4.688.064.897,00		4.689.641.740,00		4.691.226.308,00		4.692.818.642,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	65	67	67	4.686.495.744,00	68	4.688.064.897,00	68,5	4.689.641.740,00	69	4.691.226.308,00	70	4.692.818.642,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					104.800.000,00		105.313.520,00		105.829.557,00		106.348.121,00		106.869.227,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	2.35	2.35	3.5	104.800.000,00	4.05	105.313.520,00	4.5	105.829.557,00	5	106.348.121,00	10	106.869.227,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	50	55	60		62.5		66.2		69.9		73.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					2.400.000,00		2.450.000,00		2.450.000,00		2.450.000,00		2.450.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang	100	100	100	2.400.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Berinvestasi (Persentase)													Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					407.200.000,00		407.211.760,00		407.223.578,00		407.235.453,00		407.247.387,00	
Meningkatnya perzinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	407.200.000,00	100	407.211.760,00	100	407.223.578,00	100	407.235.453,00	100	407.247.387,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					7.200.000,00		7.235.280,00		7.270.734,00		7.306.359,00		7.342.161,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	90	100	100	7.200.000,00	100	7.235.280,00	100	7.270.734,00	100	7.306.359,00	100	7.342.161,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					59.500.000,00		59.791.550,00		60.084.529,00		60.378.943,00		60.674.800,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	70	80	90	59.500.000,00	100	59.791.550,00	100	60.084.529,00	100	60.378.943,00	100	60.674.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Persentase)													Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.595.501.515,00		5.298.295.885,00		5.651.103.947,00		5.303.925.768,00		5.706.761.418,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.595.501.515,00		4.598.295.885,00		4.601.103.947,00		4.603.925.768,00		4.606.761.418,00	
Nilai Akip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	68.11	68.86	69.62	4.595.501.515,00	70.38	4.598.295.885,00	71.16	4.601.103.947,00	71.94	4.603.925.768,00	72.73	4.606.761.418,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	3	3	3	225.000.000,00	3	225.000.000,00	3	225.000.000,00	3	225.000.000,00	3	225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					775.000.000,00		475.000.000,00		825.000.000,00		475.000.000,00		875.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	0	0	775.000.000,00	0	475.000.000,00	0	825.000.000,00	0	475.000.000,00	0	875.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.72	2.8	2.9	20.000.000,00	3.01	20.000.000,00	3.2	20.000.000,00	3.3	20.000.000,00	3.4	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					28.868.320,00		28.868.320,00		28.868.320,00		28.868.320,00		28.868.320,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARA					28.868.320,00		28.868.320,00		28.868.320,00		28.868.320,00		28.868.320,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	273	279.83	286.82	28.868.320,00	293.99	28.868.320,00	301.34	28.868.320,00	308.87	28.868.320,00	316.60	28.868.320,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.950.000.000,00		1.959.555.000,00		1.969.156.818,00		1.978.805.689,00		1.988.501.835,00	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.110.000.000,00		1.115.439.000,00		1.120.904.650,00		1.126.397.084,00		1.131.916.429,00	
Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	25	40	50	1.110.000.000,00	50	1.115.439.000,00	50	1.120.904.650,00	55	1.126.397.084,00	60	1.131.916.429,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					280.000.000,00		281.372.000,00		282.750.722,00		284.136.202,00		285.528.468,00	
Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	53.41	53.41	60	280.000.000,00	64	281.372.000,00	65	282.750.722,00	65	284.136.202,00	65	285.528.468,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN					560.000.000,00		562.744.000,00		565.501.446,00		568.272.403,00		571.056.938,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	40	45	60.00	560.000.000,00	64	562.744.000,00	65	565.501.446,00	65	568.272.403,00	65	571.056.938,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.966.311.802,00		5.979.527.352,00		5.953.155.359,00		5.967.038.511,00		6.021.216.102,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.895.686.732,00		4.903.656.220,00		4.872.012.457,00		4.880.598.010,00		4.929.452.043,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	67.3	68	68.1	4.895.686.732,00	69.1	4.903.656.220,00	70	4.872.012.457,00	71	4.880.598.010,00	72	4.929.452.043,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.070.625.070,00		1.075.871.132,00		1.081.142.902,00		1.086.440.501,00		1.091.764.059,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	56.38	60	60.01	1.070.625.070,00	65	1.075.871.132,00	70	1.081.142.902,00	75	1.086.440.501,00	80.01	1.091.764.059,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					51.253.350,00		51.504.492,00		51.756.865,00		52.010.471,00		52.265.324,00	
2.24.02 - PROGRAM					17.695.065,00		17.781.771,00		17.868.902,00		17.956.459,00		18.044.446,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGLOLAAN ARSIP														
meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	0	80	17.695.065,00	81	17.781.771,00	85	17.868.902,00	87	17.956.459,00	90	18.044.446,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					27.423.870,00		27.558.247,00		27.693.283,00		27.828.979,00		27.965.342,00	
meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	0	80	27.423.870,00	81	27.558.247,00	85	27.693.283,00	87	27.828.979,00	90	27.965.342,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					6.134.415,00		6.164.474,00		6.194.680,00		6.225.033,00		6.255.536,00	
meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	0	0	6.134.415,00	0	6.164.474,00	5	6.194.680,00	5	6.225.033,00	5	6.255.536,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.996.917.078,00		7.006.863.081,00		7.016.857.816,00		7.026.901.528,00		7.036.994.455,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					5.155.967.933,00		5.156.893.285,00		5.157.823.169,00		5.158.757.611,00		5.159.696.633,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	66.82	68.24	68.50	5.155.967.933,00	68.70	5.156.893.285,00	69	5.157.823.169,00	69.20	5.158.757.611,00	69.55	5.159.696.633,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.542.419.355,00		1.549.977.209,00		1.557.572.098,00		1.565.204.201,00		1.572.873.703,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2568	2697	2861	1.542.419.355,00	2958	1.549.977.209,00	3079	1.557.572.098,00	3186	1.565.204.201,00	3297	1.572.873.703,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					194.812.185,00		195.766.765,00		196.726.021,00		197.689.979,00		198.658.659,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4257	4342	4912	194.812.185,00	4965	195.766.765,00	5032	196.726.021,00	5108	197.689.979,00	5180	198.658.659,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					103.717.605,00		104.225.822,00		104.736.528,00		105.249.737,00		105.765.460,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42.80	47.08	219	103.717.605,00	228	104.225.822,00	239	104.736.528,00	247	105.249.737,00	252	105.765.460,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi parwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	7	7	7	800.000.000,00	7	800.000.000,00	7	800.000.000,00	7	800.000.000,00	7	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Parwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran parwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Parwisata (Persentase)	7	7	7	1.100.000.000,00	7	1.100.000.000,00	7	1.100.000.000,00	7	1.100.000.000,00	7	1.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Parwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan intelektual (Persentase)	1	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SOM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	2	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					21.486.013.669,00		21.518.319.181,00		21.550.782.989,00		21.583.405.870,00		21.616.188.600,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.185.852.187,00		15.187.286.908,00		15.188.728.657,00		15.190.177.472,00		15.191.633.382,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64.21	65.5	69.02	15.185.852.187,00	70	15.187.286.908,00	70.5	15.188.728.657,00	75.0	15.190.177.472,00	80.4	15.191.633.382,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Pertanian
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.372.107.558,00		2.383.730.885,00		2.395.411.166,00		2.407.148.681,00		2.418.943.710,00	
meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	1	1	1	2.372.107.558,00	1	2.383.730.885,00	1	2.395.411.166,00	1	2.407.148.681,00	1	2.418.943.710,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	4	5	5.5		6.5		7		7.5		8.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3	3.5	4		4		4.5		4.5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.350.000.000,00		1.356.615.000,00		1.363.262.414,00		1.369.942.399,00		1.376.655.117,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	6546,75	6546,75	6546,75	1.350.000.000,00	6546,75	1.356.615.000,00	6546,75	1.363.262.414,00	6723,25	1.369.942.399,00	6723,25	1.376.655.117,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					700.000.000,00		703.430.000,00		706.876.807,00		710.340.503,00		713.821.172,00	Pertanian
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1	700.000.000,00	1	703.430.000,00	1	706.876.807,00	1	710.340.503,00	1	713.821.172,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	0	5		10		15		20		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN					1.000.000.000,00		1.004.900.000,00		1.009.824.010,00		1.014.772.148,00		1.019.744.531,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	10	10	15	1.000.000.000,00	20	1.004.900.000,00	25	1.009.824.010,00	30	1.014.772.148,00	35	1.019.744.531,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	10	10	15		20		25		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					50.000.000,00		50.245.000,00		50.491.201,00		50.738.607,00		50.987.227,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	100	100	50.000.000,00	100	50.245.000,00	100	50.491.201,00	100	50.738.607,00	100	50.987.227,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					828.053.924,00		832.111.388,00		836.188.734,00		840.286.060,00		844.403.461,00	
meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	5	5	15	828.053.924,00	20	832.111.388,00	25	836.188.734,00	30	840.286.060,00	35	844.403.461,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	0	5		10		15		20		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					-		-		-		-		-	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU					-		-		-		-		-	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TERBARUKAN														
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan					-		-		-		-		-	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					425.276.000,00		327.359.852,00		329.453.916,00		331.558.239,00		333.672.876,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					13.086.000,00		13.150.121,00		13.214.557,00		13.279.308,00		13.344.377,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	5	5	5	13.086.000,00	5	13.150.121,00	5	13.214.557,00	5	13.279.308,00	5	13.344.377,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4.800.000,00		4.823.520,00		4.847.155,00		4.870.906,00		4.894.774,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	5	5	5	4.800.000,00	5	4.823.520,00	10	4.847.155,00	10	4.870.906,00	10	4.894.774,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					244.450.000,00		245.647.805,00		246.851.479,00		248.061.051,00		249.276.551,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	5	5	5	244.450.000,00	10	245.647.805,00	10	246.851.479,00	10	248.061.051,00	10	249.276.551,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.840.000,00		51.089.116,00		51.339.453,00		51.591.016,00		51.843.812,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	6.39	6.39	7.2	50.840.000,00	7.5	51.089.116,00	8.01	51.339.453,00	8.2	51.591.016,00	8.5	51.843.812,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					112.100.000,00		12.649.290,00		13.201.272,00		13.755.958,00		14.313.362,00	
Meningkatnya terbitnya produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	70	70	100	112.100.000,00	100	12.649.290,00	100	13.201.272,00	100	13.755.958,00	100	14.313.362,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					15.100.000,00		15.173.990,00		15.248.343,00		15.323.059,00		15.398.142,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						-	-				-	-		
meningkatkan realisasi pembangunan industri						-	-				-	-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						-	-				-	-		
meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						-	-				-	-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					15.100.000,00		15.173.990,00		15.248.343,00		15.323.059,00		15.398.142,00	
meningkatkan pemanfaatan industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	5	5	5	15.100.000,00	5	15.173.990,00	5	15.248.343,00	10	15.323.059,00	10	15.398.142,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN					18.295.150,00		18.295.150,00		18.295.150,00		18.295.150,00		18.295.150,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG TRANSMIGRASI														
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					18.295.150,00		18.295.150,00		18.295.150,00		18.295.150,00		18.295.150,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	18.295.150,00	100	18.295.150,00	100	18.295.150,00	100	18.295.150,00	100	18.295.150,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					39.278.252.721,27		34.345.511.834,03		34.413.100.518,47		34.481.020.381,27		40.636.567.648,22	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.036.090.805,27		32.092.363.325,03		32.148.911.580,47		32.205.736.919,27		38.350.135.295,22	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	60,06	67,50	70,01	32.036.090.805,27	72,5	32.092.363.325,03	75,0	32.148.911.580,47	80,5	32.205.736.919,27	82,5	38.350.135.295,22	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					6.882.544.600,00		1.891.769.068,00		1.901.038.738,00		1.910.353.827,00		1.919.714.561,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	0	0	0	6.882.544.600,00	0	1.891.769.068,00	0	1.901.038.738,00	0	1.910.353.827,00	0	1.919.714.561,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					359.617.316,00		361.379.441,00		363.150.200,00		364.929.635,00		366.717.792,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	0	0	0	359.617.316,00	0	361.379.441,00	0	363.150.200,00	0	364.929.635,00	0	366.717.792,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	80	85	90		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	0	25	25		25		25		30		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	15.5	16	16.5		17		17.5		18		18.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	27.77	29.27	30.77		32.27		33.77		35.27		36.77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah (%)	17.62	18.67	19.72		20.77		21.82		22.87		23.92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					46.102.903.156,00		46.204.309.539,86		46.306.212.813,46		46.408.615.416,68		48.958.906.667,42	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.517.599.054,00		35.603.602.056,86		35.690.026.475,46		35.776.874.373,68		38.311.534.701,42	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	0	68.45	69.01	35.517.599.054,00	69.5	35.603.602.056,86	70	35.690.026.475,46	70.5	35.776.874.373,68	80	38.311.534.701,42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					10.585.304.102,00		10.600.707.483,00		10.616.186.338,00		10.631.741.043,00		10.647.371.966,00	
Meningkatkan penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	70	100	100	10.186.871.002,00	100	10.200.322.060,00	100	10.213.839.027,00	100	10.227.422.231,00	100	10.241.071.991,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatkan Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	70	100	100	398.433.100,00	100	400.385.423,00	100	402.347.311,00	100	404.318.812,00	100	406.299.975,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK T DAERAH PENANGG NG JAWA
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
undangan														DPRD
5.01 - PERENCANAAN					7.297.949.732,00		7.046.323.308,00		7.316.623.356,00		7.091.481.224,00		7.412.737.160,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.231.770.916,00		5.981.770.916,00		6.207.370.916,00		5.983.920.916,00		6.258.670.916,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	61.71	7257	64.80	6.231.770.916,00	68.04	5.981.770.916,00	69.40	6.207.370.916,00	72.17	5.983.920.916,00	73.62	6.258.670.916,00	Dinas/Bada yang menangani Bidang Perencana
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					560.126.698,00		548.379.231,00		582.755.817,00		570.533.752,00		606.299.153,00	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	80	100	100	501.281.363,00	100	488.356.990,00	100	521.533.131,00	100	508.086.612,00	100	542.603.070,00	Dinas/Bada yang menangani Bidang Perencana
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	80	85	100	58.845.335,00	100	60.022.241,00	100	61.222.686,00	100	62.447.140,00	100	63.696.083,00	Dinas/Bada yang menangani Bidang Perencana
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN					506.052.118,00		516.173.161,00		526.496.623,00		537.026.556,00		547.767.091,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang ekososbud yang tercapai (%)	80	100	100	157.224.553,00	100	160.369.044,00	100	163.576.424,00	100	166.847.954,00	100	170.184.914,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang fisipra yang tercapai (%)	78	100	100	248.270.399,00	100	253.235.808,00	100	258.300.524,00	100	263.466.534,00	100	268.735.867,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perkonomian dan SDA	persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang ekososbud yang tercapai (%)	80	100	100	100.557.166,00	100	102.568.309,00	100	104.619.675,00	100	106.712.068,00	100	108.846.310,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					222.359.161.646,00		223.382.066.020,00		224.829.982.931,00		225.542.096.558,00		226.700.927.612,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.764.289.221,00		15.778.002.531,00		16.211.783.036,00		15.905.516.325,00		16.039.522.096,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	66.94	67.5	70.01	15.764.289.221,00	72.5	15.778.002.531,00	75	16.211.783.036,00	80	15.905.516.325,00	85.5	16.039.522.096,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	75.85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					204.342.476.814,0 0		205.343.754.953,0 0		206.349.939.351,0 0		207.360.328.475,0 0		208.377.123.214,0 0	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	33,08	45,58	56,06	202.822.878.445,0 0	54,06	203.816.710.549,0 0	52,06	204.815.412.432,0 0	48,06	205.819.007.952,0 0	43,06	206.827.521.090,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	14,45	3,84	6,50		7		7,5		10		12,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	1,06	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	90	95	95	710.306.894,00	95	713.787.400,00	95	717.284.957,00	95	720.799.652,00	95	724.331.569,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	809.291.475,00	100	813.257.004,00	100	817.241.962,00	100	820.520.871,00	100	825.270.555,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					784.698.611,00		788.543.634,00		792.407.498,00		796.290.295,00		800.192.118,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	94,97	95,60	96,22	784.698.611,00	96,84	788.543.634,00	97,46	792.407.498,00	98,08	796.290.295,00	98,70	800.192.118,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.467.697.000,00		1.471.764.902,00		1.475.853.046,00		1.479.961.463,00		1.484.090.184,00	
Meningkatnya upaya ekstifikasi dan identifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	2,76	3,0	4,39	500.000.000,00	4,45	500.000.000,00	4,51	500.000.000,00	4,58	500.000.000,00	4,64	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	0	0	259.980.000,00	0	261.253.902,00	0	262.534.046,00	0	263.820.463,00	0	265.113.184,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya peranan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	0	0	707.717.000,00	0	710.511.000,00	0	713.319.000,00	0	716.141.000,00	0	718.977.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.547.320.608,00		5.547.835.108,00		5.548.352.128,00		5.548.871.680,00		5.549.393.777,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.238.222.248,00		5.238.736.748,00		5.239.253.768,00		5.239.773.320,00		5.240.295.417,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64.4	68.00	70	5.238.222.248,00	71	5.238.736.748,00	75	5.239.253.768,00	80	5.239.773.320,00	82	5.240.295.417,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					309.098.360,00		309.098.360,00		309.098.360,00		309.098.360,00		309.098.360,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase data ASN yang sesuai standar (%)	0	0	0	309.098.360,00	0	309.098.360,00	0	309.098.360,00	0	309.098.360,00	0	309.098.360,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					5.550.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					5.550.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat struktural dan fungsional (%)	100	0	0	750.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	0	0	0	4.800.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.506.253.468,00		2.512.127.060,00		2.618.004.934,00		3.428.887.106,00		2.575.162.271,00	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.326.253.468,00		2.332.029.060,00		2.437.808.454,00		3.248.591.664,00		2.394.767.381,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	65.22	67.45	70.50	2.326.253.468,00	75.50	2.332.029.060,00	79	2.437.808.454,00	80	3.248.591.664,00	80.3	2.394.767.381,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					30.000.000,00		30.098.000,00		30.196.480,00		30.295.442,00		30.394.890,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil keltibangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	0	60	60.5	30.000.000,00	70	30.098.000,00	70.5	30.196.480,00	70.6	30.295.442,00	70.8	30.394.890,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	60	60.5	150.000.000,00	70	150.000.000,00	70.5	150.000.000,00	70.6	150.000.000,00	70.8	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					13.772.209.340,00		13.756.734.407,00		13.769.663.706,00		13.834.225.304,00		13.807.183.379,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.822.308.226,00		12.804.040.778,00		12.814.163.878,00		12.875.905.526,00		12.846.029.836,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	68.05	68.45	69.45	12.822.308.226,00	69.90	12.804.040.778,00	70	12.814.163.878,00	70.45	12.875.905.526,00	80	12.846.029.836,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N- 1 (Persentase)	80	100	100	454.519.720,00	100	455.178.866,00	100	455.841.243,00	100	456.506.866,00	100	457.175.748,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan														
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
					495.381.394,00		497.514.763,00		499.658.585,00		501.812.912,00		503.977.795,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Infrastruktur (Infrastruktur e)	Infrastruktur (Infrastruktur e)	Terintegrasi (Integrat ed)	495.381.394,00	Terintegrasi (Integrat ed)	497.514.763,00	Terintegrasi (Integrat ed)	499.658.585,00	Dikelola (Manage d)	501.812.912,00	Dikelola (Manage d)	503.977.795,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	2	2	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					48.874.714.221,62		48.391.310.172,09		48.442.321.792,06		48.483.116.220,64		48.515.002.843,77	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.804.483.059,62		41.287.356.961,09		41.304.602.271,06		41.312.033.535,64		41.309.660.193,77	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	66.49	68.69	70.89	41.804.483.059,62	72.09	41.287.356.961,09	74.39	41.304.602.271,06	76.59	41.312.033.535,64	78.79	41.309.660.193,77	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	61.49	64.69	66.89		69.09		71.29		73.59		75.89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	70	70	70		70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	67.42	69.72	72.92		74.22		77.32		78.92		79.82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	57.32	59.62	63.82		66.42		69.12		72.42		75.82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	72.15	73.25	74.35		75.45		76.55		77.65		79.85		Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	65.13	67.03	69.23		71.13		73.43		75.13		77.53		Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	64.07	66.67	68.77		70.87		72.97		74.17		76.37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	65.13	67.03	69.23		71.13		73.43		75.13		77.53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	62.86	64.69	66.89		68.56		70.09		72.42		74.86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	59.98	62.72	64.82		66.42		69.12		72.42		74.86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	65.12	67.03	69.23		71.13		73.43		75.13		77.53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	57.84	59.62	63.82		66.42		69.12		71.29		74.86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	61.49	64.69	66.89		68.56		70.09		73.59		75.89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	59.26	62.72	64.82		66.42		69.12		71.29		73.26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					560.000.000,00		562.744.000,00		565.488.000,00		567.812.000,00		570.976.000,00	
Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	0	0	560.000.000,00	0	562.744.000,00	0	565.488.000,00	0	567.812.000,00	0	570.976.000,00	Dinas/Badan yang menangani bidang kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani bidang kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani bidang kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	80	83		85		87		89		92		Dinas/Badan yang menangani bidang kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	80	83		85		87		89		92		Dinas/Badan yang menangani bidang kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	80	83		85		87		89		92		Dinas/Badan yang menangani bidang kecamatan Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	0	0		0		0		0		0		Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	80	83		85		87		89		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	80	83		85		87		89		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	80	83		85		87		89		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	80	83		85		87		89		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	80	83		85		87		89		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.412.231.162,00		6.442.831.911,00		6.473.469.221,00		6.504.123.385,00		6.534.834.350,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	6.412.231.162,00	100	6.442.831.911,00	100	6.473.469.221,00	100	6.504.123.385,00	100	6.534.834.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	80	83		85		87		89		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	desa/kelurahan yang aktif (%)													bidang kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang aktif (%)													Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					98.000.000,00		98.377.300,00		98.762.300,00		99.147.300,00		99.532.300,00	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100	98.000.000,00	100	98.377.300,00	100	98.762.300,00	100	99.147.300,00	100	99.532.300,00	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemerintahan desa														bidang kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Cakupan Desa yang Tertib Administrasi (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					13.813.853.251,00		13.821.331.165,00		13.828.988.370,00		13.836.840.012,00		13.844.902.730,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3.875.002.011,00		3.876.414.834,00		3.877.834.579,00		3.879.261.283,00		3.880.694.974,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH TUGAS FUNGSI PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	65	66	67	3.875.002.011,00	68	3.876.414.834,00	69	3.877.834.579,00	70	3.879.261.283,00	71	3.880.694.974,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					828.216.200,00		832.274.459,00		836.352.604,00		840.450.731,00		844.568.940,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	15	16	17	828.216.200,00	18	832.274.459,00	19	836.352.604,00	20	840.450.731,00	21	844.568.940,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					992.200.000,00		992.200.000,00		992.200.000,00		992.200.000,00		992.200.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	60	61	62	992.200.000,00	63	992.200.000,00	64	992.200.000,00	65	992.200.000,00	66	992.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00	
Meningkatnya ketertarikan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	40	42	45	15.000.000,00	46	16.500.000,00	50	18.150.000,00	51	19.965.000,00	52	21.961.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					43.863.040,00		44.077.969,00		44.293.951,00		44.510.992,00		44.729.095,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	20	20	21	43.863.040,00	22	44.077.969,00	23	44.293.951,00	24	44.510.992,00	25	44.729.095,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					8.059.572.000,00		8.059.863.903,00		8.060.157.236,00		8.060.452.006,00		8.060.748.221,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	8.059.572.000,00	100	8.059.863.903,00	100	8.060.157.236,00	100	8.060.452.006,00	100	8.060.748.221,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.020.855.854.002,89		1.006.185.149.528,00		1.010.283.316.879,87		1.011.318.198.824,87		1.022.335.267.920,23	



B. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja mencerminkan kondisi yang perlu dipahami dan dikonfirmasi untuk menilai sejauh mana suatu instansi mencapai tujuannya. Kinerja juga digunakan untuk mengevaluasi dampak positif maupun negatif dari kebijakan operasional yang diterapkan, serta menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, mencakup unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan pencapaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah selama masa jabatannya. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui pencapaian indikator hasil dari program pembangunan daerah yang diakumulasi setiap tahun atau melalui indikator capaian mandiri setiap tahun. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dapat dicapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

Indikator kinerja daerah dirancang dengan merujuk pada indikator outcome dari program prioritas yang telah ditetapkan atau melalui pendekatan komposit (impact). Perumusan indikator ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh satu atau lebih indikator capaian program (outcome) terhadap pencapaian indikator kinerja daerah. Setelah program dan kegiatan prioritas ditentukan, indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai ukuran pencapaian pembangunan.

Sebagai panduan pencapaian target pembangunan, dilakukan pemetaan indikator tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD sesuai dengan perencanaan strategis daerah. Berikut ini Tabel penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seluma:



Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seluma Tahun 2026-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.53-0.53	0.53-0.54	0.54-0.55	0.55-0.56	0.56-0.58
2.	Tingkat Kemiskinan	(%)	16,77	16,54	16,31	16,08	15,85
3.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,215	0,229	0,243	0,257	0,271
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5	4,72	4,95	5,17	5,39
5.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	62,63	63,22	63,81	64,4	64,99
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,09	66,52	66,95	67,39	67,83
7.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	164,21	163,41	162,61	161,81	161,01
8.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6887	0,6931	0,6976	0,7022	0,7072
9.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Utama	%	5,69	6,23	6,78	7,32	7,87
10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	62,06	63,61	65,2	66,83	68,5
11.	Persentase Desa Maju	%	28,57	29,67	30,77	31,87	32,97
12.	Nilai Investasi Daerah (PMA)	Juta Rupiah	8.000	9.000	10.000	10.500	11.000
13.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,41	2,40	2,39	2,38	2,36
14.	Indeks Warisan Budaya	Angka	54,59	55,18	55,77	56,36	56,95
15.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Angka	63,55	64,19	65,47	67,44	70,07
16.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	68,8	69,03	69,25	69,48	69,71
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,34	2,3	2,28	2,26	2,24
18.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,23	8,28	8,33	8,38	8,42
19.	Indeks Infrastruktur	Angka	47,68	48,46	49,25	50,03	50,81
20.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65
21.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,48	3,51	3,55	3,58	3,6
22.	Nilai Investasi Daerah (PMDN)	Juta Rupiah	275.000	300.000	325.000	350.000	375.000
23.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
24.	Indeks Keparahan Kemiskina	Indeks	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43
25.	Nilai Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
26.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	52,47	52,89	53,31	53,74	54,17

C. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur utama dalam menilai pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kebijakan serta program pembangunan. Indikator Kinerja Daerah digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan strategis, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong daya saing daerah. Indikator kinerja yang terukur dapat memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel IV-3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Seluma

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65.24	65.66	66.09	66.52	66.95	67.39	67.83	
2	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.38	3.45	3.48	3.51	3.55	3.58	3.60	
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	102	104	105	106	107	108	110	
4	Indeks Profesionalitas ASN		68.3	70	75	75	78	80	85	
5	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	80	100	100	100	100	100	100	
6	Nilai komponen evaluasi kinerja pada SAKIP daerah	Nilai	13,41	13.70	14.01	14.45	15.20	15.45	17.00	
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase	0	60	60.5	70	70.5	70.6	70.8	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Modal Manusia	Indeks	0-0	0.1-0.53	0.53-0.53	0.53-0.54	0.54-0.55	0.55-0.56	0.56-0.58	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.06	4.28	4.50	4.72	4.95	5.17	5.39	
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	17.23	17.00	16.77	16.54	16.31	16.08	15.85	
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	68.35	68.58	68.80	69.03	69.25	69.48	69.71	
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2.43	2.42	2.41	2.40	2.39	2.38	2.36	
6	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Utama	%	4.66	5.14	5.69	6.23	6.78	7.32	7.87	
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.14	8.19	8.23	8.28	8.33	8.38	8.42	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.38	2.36	2.34	2.30	2.28	2.26	2.24	
9	Indeks Keparahan Kemiskina	Indeks	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	
10	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
11	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	2.76	3.0	4.39	4.45	4.51	4.58	4.64	
12	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	71.03	72.01	73.5	75	80	90	98	
III ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	59.07	60.55	62.06	63.61	65.20	66.83	68.50	
2	Nilai Investasi Daerah (PMA)	Juta Rupiah	7049.5	7500	8000	9000	10000	10500	11000	
3	Nilai Investasi Daerah (PMDN)	Juta Rupiah	242515.9	250000	275000	300000	325000	350000	375000	
4	Indeks Penerapan Sistem Merit	Angka	0.5	0.55	0.56	0.60	0.61	0.63	0.66	
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.35	13.38	13.38	13.38	13.40	13.40	13.40	
6	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	80	80	80	80	80	80	85	
7	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	65	65	65	70	75	80	80	
8	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	70	100	100	100	100	100	100	
9	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	56.38	60	60.01	65	70	75	80.01	
10	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	35.29	35.29	36.25	37.25	38.25	39.25	40.25	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
11	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	75.60	75.60	75.80	75.90	76.10	76.20	76.22	
12	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Infrastruktur (Infrastruktur)	Infrastruktur (Infrastruktur)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)	
13	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	80	100	100	100	100	100	100	
14	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	5	5	5	5	5	10	10	
15	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Persentase	5	5	5	5	5	5	5	
16	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Persentase	65	67	69	71	72	73	74	
17	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	0	0	0	0	0	2	2	
18	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.72	2.8	2.9	3.01	3.2	3.3	3.4	
19	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	40	45	60.00	64	65	65	65	
20	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	20	40	50	55	75	85	100	
21	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	80	85	100	100	100	100	100	
23	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
24	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
26	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	25	60	70	90	100	100	100	
27	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
28	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	80	80	85	85	90	90	90	
29	Persentase BUM Desa Maju	Persentase	15	16	17	18	19	20	21	
30	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	92	92	92	91	90	90	89	
31	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan	Persentase	9.75	9.75	9.95	10.14	10.35	10.55	10.76	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Aman)									
32	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	75	80	83	85	87	88	90	
33	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
34	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	25	25	30	32	33	35	37	
35	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	5	5	5	5	5	5	5	
36	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
37	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	75	75	76	77	78	79	80	
38	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	94,97	95,60	96,22	96,84	97,46	98,08	98,70	
39	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	5.4	5.2	5	4.8	4.6	4.4	4.2	
40	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	25	30	35	45	50	60	70	
41	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	55	57	60	61	61.5	62	62.5	
42	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	97	97.5	98.3	98.5	98.9	99	100	
43	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	90	92	94	95	96	98	100	
44	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persentase	0	0	0	1	2	3	3	
45	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	0	1	2	3	4	5	6	
46	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	4	5	5	5	5	5	5	
47	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	50	55	60	62.5	66.2	69.9	73.6	
48	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
49	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
50	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	0	0	80	81	85	87	90	
51	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	0	0	80	81	85	87	90	
52	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam	Persentase	90	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Membuka Usaha									
53	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	42.80	47.08	219	228	239	247	252	
54	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	6546,75	6546,75	6546,75	6546,75	6546,75	6723.25	6723.25	
55	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	10	10	15	20	25	30	35	
56	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	5	5	15	20	25	30	35	
57	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	5	5	5	5	10	10	10	
58	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	5	5	5	10	10	10	10	
59	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
60	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	90	95	95	95	95	95	95	
61	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	14.45	3,84	6.50	7	7.5	10	12.5	
62	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55.15	55.15	56.85	58.55	60.25	61.95	63.65	
63	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	90	90	90	95	100	100	100	
64	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14.8	14.5	14.2	13.9	13.6	13.3	13	
65	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	3	3.5	4	4	4.5	4.5	5	
66	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	0	0	5	10	15	20	25	
67	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	0	0	5	10	15	20	25	
68	Persentase PKK aktif	%	80	100	100	100	100	100	100	
69	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	1	2	2	2	3	3	
70	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	10	10	15	20	25	30	35	
71	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	5.00	6.80	8.50	9.00	10.00	15.00	20.00	
72	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	5	10	15	20	25	35	50	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
73	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	98	98.3	98.5	98.9	99	99.5	100	
74	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
75	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	97	97.5	98	98.5	98.9	99.5	100	
76	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	1.7	4.40	5.80	6.80	8.50	9.00	10.50	
77	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	44.44	46.30	48.15	50.00	51.85	53.70	55.56	
78	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	1.06	0	0	0	0	0	0	
79	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	39.25	39.33	40.51	41.72	42.98	44.27	45.59	
80	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	97	97.5	98	98.5	98.9	99.3	100	
81	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase	10	10	15	15	20	20	25	
82	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	5	10	12	15	20	25	30	
83	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	92.7	100	100	100	100	100	100	
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	67.5	67.5	68	68	68	68	68	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95	95	95.5	95.6	95.6	95.6	96.8	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	76.5	76.5	77	77	77	77	77	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam	%	38	40	40	40	41	41	42	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	pendidikan kesetaraan									
AB 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.0006	0.0007	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	25:27	24:23	23:22	22:21	21:20	20:19	19:18	
3	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	96.18	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	94.57	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	52.58	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	67.61	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	45.88	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	89.29	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	65.38	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	75.26	100	100	100	100	100	100	
13	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	64.02	100	100	100	100	100	100	
AC 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
AD 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	89.56	89.66	89.76	89.86	89.95	90.05	90.15	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	62.5	87.5	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	48.02	50.67	53.32	55.97	58.62	61.27	62.5	
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	89.56	89.66	89.76	89.86	89.95	90.05	90.15	
6	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase	48.02	50.67	53.32	55.97	58.62	61.27	63.92	
7	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	62.50	87.50	100	100	100	100	100	
AE 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	85	90	90,45	92,25	96	96.25	100	
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	11.94	15	15	15	15	15	15	
AF 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	5.62	8.50	10.88	12.40	14.90	16.10	20.00	
AG 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	55	55	55	55	55	55	55	
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	65	65	65	70	75	80	80	
AH 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	85.80	85.80	86.80	87.80	88.80	89.80	90.80	
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AI 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	25.93	25.93	25.93	25.93	25.93	25.93	25.93	
AJ 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
1	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase	0	10	18	18	18	18	18	
2	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Persentase	0	10	18	18	18	18	18	
3	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	0	10	18	18	18	18	18	
4	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	0	10	18	18	18	18	18	
5	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase	0	2	3	4	5	5	5	
6	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persentase	10	15	17	17	15	15	12	
7	Persentase Terselenggarakannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	15	13	13	13	13	17	17	
AK 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	73.65	73.65	73.86	74.07	74.29	74.50	74.71	
AL 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	2	2	2	3	4	5	6	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	85	90	95	95	97	98	100	
AM 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Persentase Desa Mandiri	%	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	6.04	4.40	3.30	2.20	1.10	0	0	
3	Jumlah desa tertinggal	Desa	11	10	9	8	7	6	5	
AN 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	65.9	66	66	66	66.1	66.1	66.1	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2.41	2.41	2.31	2.21	2.11	2.01	1.91	
AO 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
1	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	424	450	550	650	750	850	900	
2	Persentase Perlangkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	26.59	39.31	52.04	64.74	77.48	90.20	94.32	
3	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	88.85	92.11	88.17	85.54	82.91	80.28	79.03	
4	Jumlah pelabuhan penyeberangan	unit	1	1	1	1	1	1	1	
5	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	(%)	11.15	7.89	11.83	14.46	17.09	19.72	21.42	
6	V/C ratio di jalan Provinsi	Nilai	18:100	18:100	18:100	18:100	18:100	18:100	18:100	
7	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B	Unit	0	0	0	1	1	1	1	
AP 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	5	5	5	5	5	5	5	
AQ 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	2.35	2.35	3.5	4.05	4.5	5	10	
AR 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AS 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	273	279.83	286.82	293.99	301.34	308.87	316.60	
AT 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	78	79	80	81	83	84	85	
AU 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	78	79	80	81	85	87	90	
AV 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4257	4342	4912	4965	5032	5108	5180	
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2568	2697	2861	2958	3079	3186	3297	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AW 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	4	5	5.5	6.5	7	7.5	8.5	
AX 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	15.50	15.7	17.2	19.5	21.6	23.8	25.4	
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	25	25	25	25	30	50	
4	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	
5	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	27.77	29.27	30.77	32.27	33.77	35.27	36.77	
6	Persentase Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	17.62	18.67	19.72	20.77	21.82	22.87	23.92	
AY 5.02 - KEUANGAN										
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	33,08	45,58	56,06	54,06	52,06	48,06	43,06	
AZ 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2	2	3	3	3	3	3	



BAB V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Dokumen ini menjadi perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Seluma selama periode tersebut. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah, masyarakat, dan sektor usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program-program yang telah dirumuskan dalam RPJMD dengan optimal.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah periode 2025-2029 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra). Dokumen ini mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan di setiap Perangkat Daerah. Selain itu, konsistensi antara RPJMD dan Renstra harus dijaga melalui mekanisme pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia, kemajuan infrastruktur dan ekonomi, profesionalisme birokrasi, keberlanjutan lingkungan, serta berkembangnya daerah secara keseluruhan. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, Kabupaten Seluma diharapkan semakin mendekati target jangka panjangnya, yaitu menjadi daerah yang maju, sejahtera, berkelanjutan, serta memiliki daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional.



